

BERITA DAERAH KOTA DEPOK



NOMOR 5 TAHUN 2016

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 01 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN 2006-2025**



**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2006-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perencanaan Pembangunan jangka panjang sebagai landasan, arah dan prioritas Pembangunan secara menyeluruh, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk mewujudkan masyarakat Kota Depok yang maju dan sejahtera, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;

b. bahwa perlu diadakan penambahan dan penyesuaian pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok dalam analisisisustategis, sasaran pokok, indicator kinerja sasaran, target kinerja sasaran, penetapan tahapan, arah dan prioritas pembangunan, serta penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
DAN
WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006-2025.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01), diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 serta mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dan dasar hukum penyusunan Perubahan RPJPD. Selain itu juga dijelaskan hubungan antara Perubahan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan dan maksud serta tujuan penyusunan Perubahan RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi Daerah yang meliputi aspek Geografi dan Demografi, serta indicator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi aspek : kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang dihadapi dalam Pembangunan Daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu strategis meliputi permasalahan Pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menyampaikan Visi dan Misi Kota Depok 2006-2025 yang disepakati antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Depok, disusun berdasar analisis isu-isu strategis.

**BAB V SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH**

Bab ini menjelaskan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang yang menghubungkan antara sasaran dengan sasaran pokok tiap tahapan Pembangunan lima tahunan.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

BAB VII PENUTUP

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.



Diundangkan di Depok pada tanggal 22 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

Ilui

HARRY PRIHANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(5/104/2016)



LEMBAR DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 5

TAHUN 2016

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2006-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perencanaan Pembangunan jangka panjang sebagai landasan, arah dan prioritas Pembangunan secara menyeluruh, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk mewujudkan masyarakat Kota Depok yang maju dan sejahtera, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;

b. bahwa perlu diadakan penambahan dan penyesuaian pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok dalam analisisisustategis, sasaran pokok, indicator kinerja sasaran, target kinerja sasaran, penetapan tahapan, arah dan prioritas pembangunan, serta penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
DAN
WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006-2025.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01), diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 serta mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dan dasar hukum penyusunan Perubahan RPJPD. Selain itu juga dijelaskan hubungan antara Perubahan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan dan maksud serta tujuan penyusunan Perubahan RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi Daerah yang meliputi aspek Geografi dan Demografi, serta indicator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi aspek : kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang dihadapi dalam Pembangunan Daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu strategis meliputi permasalahan Pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menyampaikan Visi dan Misi Kota Depok 2006-2025 yang disepakati antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Depok, disusun berdasar analisis isu-isu strategis.

BAB V SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bab ini menjelaskan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang yang menghubungkan antara sasaran dengan sasaran pokok tiap tahapan Pembangunan lima tahunan.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

BAB VII PENUTUP

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok 22 Juni 2016
pada tanggal 22 Juni 2016



KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 22 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

HARRY PRIHANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR ⁵
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(5/104/2016)

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	6
1.4. Maksud dan Tujuan.....	6
1.5. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	8
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	8
2.1.1. Batas Wilayah Administrasi Dan Kondisi Geografis	8
2.1.2. Geologi	9
2.1.3. Topografi	10
2.1.4. Hidrologi	12
2.1.5. Klimatologi.....	13
2.1.6. Wilayah Rawan Bencana	14
2.1.7. Buangan Gas Dan Limbah	15
2.1.7.1. Buangan Gas	15
2.1.7.2. Buangan Limbah	16
2.1.8. Penggunaan Lahan	17
2.1.9. Demografi.....	18
2.1.9.1. Struktur Dan Distribusi Penduduk	19
2.1.9.2. Umur Perkawinan Pertama.....	20
2.1.9.3 Komponen Demografi.	21
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	22
2.2.1. Pertumbuhan PDRB	22
2.2.1.1. Sektor Primer	24

2.2.1.2. Sektor Sekunder	27
2.2.1.3. Sektor Tersier	33
2.2.2. Sosial Budaya	40
2.2.3. Indeks Gini	40
2.2.4. Kemiskinan	41
2.3. Aspek Pelayanan Umum	41
2.3.1. Pendidikan	42
2.3.2. Kesehatan	43
2.3.3. Fasilitas Perumahan	44
2.3.4. Fasilitas Persampahan	46
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	47
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah	47
2.4.1.1. Pola Konsumsi	47
2.4.1.2. Penduduk Menurut Pengeluaran Perkapita Sebulan	48
2.4.2. Fasilitas Infrastruktur	49
2.4.2.1. Transportasi dan Komunikasi	49
2.4.2.2. Ruang Terbuka Hijau	51
2.4.3. Iklim Berinvestasi.....	52
2.4.3.1. Ketertiban Masyarakat	52
2.4.3.2. Ketenagakerjaan	53
2.4.3.3. Sumber Daya Manusia	54
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	56
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	56
3.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 Sampai Dengan Tahun 2014	57
3.1.2. Kekuatan, Tantangan Dan Peluang Pembangunan Kota Depok Tahun 2025	60
3.1.2.1. Aspek Demografi	60
3.1.2.1.1. Pertumbuhan Penduduk	60
3.1.2.1.2. Migrasi.....	63
3.1.2.1.3. Tingkat Kelahiran Dan Keluarga	

Berencana	64
3.1.2.1.4. Pendidikan Penduduk	65
3.1.2.1.5. Lapangan Usaha / Mata Pencaharian.....	65
3.1.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	66
3.1.2.2.1. Perekonomian Daerah	66
3.1.2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	69
3.1.2.2.1.2. Indeks Harga Implisit.....	90
3.1.2.2.1.3. PDRB Per Kapita Dan Indeks Gini	92
3.1.2.2.2. Pembangunan Manusia	94
3.1.2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia	94
3.1.2.2.2.2.Kemiskinan Dan Pengangguran	102
3.1.2.3. Aspek Pelayanan Umum	107
3.1.2.3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM).	107
3.1.2.3.2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	108
3.1.2.3.3. Sosial.....	110
3.1.2.3.4. Koperasi Dan UMKM	112
3.1.2.4. Aspek Daya Saing Daerah	114
3.1.2.4.1. PDRB Dan Pola Konsumsi Masyarakat	114
3.1.2.4.2. PDRB Kreatif	115
3.1.2.4.3. Infrastruktur	116
3.1.2.4.3.1. Perhubungan	117
3.1.2.4.3.2. Sumber Daya Air	119
3.1.2.4.3.3. Lingkungan Hidup	120
3.1.2.4.3.4. Permukiman	121
3.1.2.4.3.5. Penataan Ruang	125
3.1.2.4.3.6. Penanaman Modal	126
3.1.2.4.4. Angka Kriminalitas	127

3.1.2.4.5. Rasio Ketergantungan	129
3.1.3. Telaahan RPJP Nasional Dan RPJPD Provinsi Jawa Barat	130
3.1.4. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lainnya	132
3.2. Isu-Isu Strategis	134
BAB IV VISI DAN MISI	136
4.1. Visi	136
4.2. Misi	140
4.3. Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.	140
BAB V SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH.....	141
5.1. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Daerah	141
5.1.1. Sasaran Pokok Misi Pertama	141
5.1.2. Sasaran Pokok Misi Kedua	141
5.1.3. Sasaran Pokok Misi Ketiga	142
5.1.4. Sasaran Pokok Misi Keempat	142
5.1.5. Sasaran Pokok Misi Kelima	143
5.2. Arahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032	156
5.3. Tahapan Dan Prioritas Pembangunan Daerah Lima Tahunan	163
5.3.1. Kebijakan Umum Dan Prioritas Pembangunan Lima Tahun Pertama (2006 – 2011)	163
5.3.2. Kebijakan Umum Dan Prioritas Pembangunan Lima Tahun Kedua (2012 – 2016)	165
5.3.3. Kebijakan Umum Dan Prioritas Pembangunan Lima Tahun Ketiga (2016 – 2021)	169
5.3.4. Kebijakan Umum Dan Prioritas Pembangunan Lima Tahun Keempat (2021 – 2025)	174
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN	179
BAB VII PENUTUP	181

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Sebaran Luas Formasi Geologi Kota Depok	11
Tabel 2.2	Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2009	17
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2002-2006	20
Tabel 2.4.	Persentase Perempuan Berusia 10 Tahun Keatas Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Di Kota Depok Tahun 2001- 2006	21
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk yang Lahir, Datang, Mati dan Pergi di Kota Depok Tahun 2001-2004	21
Tabel 2.6.	Perkembangan Angka Kelahiran Total (TFR) Kota Depok, Tahun 2001-2006	22
Tabel 2.7.	PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam juta rupiah).....	26
Tabel 2.8.	Persentase PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam persen).....	26
Tabel 2.9.	PDRB Kota Depok (ADHK 2000) dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan (dalam juta rupiah).....	28
Tabel 2.10.	Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam persen)	29
Tabel 2.11.	PDRB Kota Depok (ADHK 2000) dari Lapangan Usaha Listrik, Gas Air Minum (dalam juta rupiah).....	30
Tabel 2.12.	Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Listrik, Gas & Air minum (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam persen)	30
Tabel 2.13.	PDRB (ADHK 2000) Kota Depok dari Lapangan Usaha Konstruksi (dalam juta rupiah)	32
Tabel 2.14.	Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Konstruksi (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam persen).....	32
Tabel 2.15.	PDRB dari Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel & Restoran (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam juta rupiah)	33
Tabel 2.16.	Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel & Restoran (ADHK 2000) di Kota Depok	34
Tabel 2.17.	PDRB dari Lapangan Usaha Angkutan & Komunikasi (ADHK 2000) di Kota Depok.....	35

Tabel	2.18.	Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Angkutan & Komunikasi (ADHK 2000) di Kota Depok.....	35
Tabel	2.19.	PDRB Lapangan Usaha Bank dan Lembaga Keuangan (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam juta rupiah).....	37
Tabel	2.20.	Persentase PDRB Lapangan Usaha Bank dan Lembaga Keuangan (ADHK 2000) di Kota Depok.....	37
Tabel	2.21.	PDRB Lapangan Usaha Jasa-jasa (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam juta rupiah).....	39
Tabel	2.22.	Persentase PDRB Lapangan Usaha Jasa-jasa (ADHK 2000) di Kota Depok	39
Tabel	2.23.	Gini Rasio dan Pendapatan yang Diterima Kelompok Masyarakat Bawah.....	41
Tabel	2.24.	Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2006	43
Tabel	2.25.	Sumber Daya Pendidikan Kota Depok Tahun 2008.....	42
Tabel	2.26.	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup di Kota Depok Tahun 2001-2006	44
Tabel	2.27.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai di Kota Depok Tahun 2002-2005.....	45
Tabel	2.28.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal di Kota Depok Tahun 2006.....	45
Tabel	2.29.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Bersih di Kota Depok Tahun 2002-2006.....	46
Tabel	2.30.	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Untuk Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kota Depok Tahun 2001-2006.....	47
Tabel	2.31.	Penduduk Menurut Pengeluaran Per kapita Sebulan di Kota Depok Tahun 2004 – 2006.....	48
Tabel	2.32.	Komposisi Lalu Lintas.....	49
Tabel	2.33.	Kondisi dan Panjang Jalan Menurut Kewenangan Tahun 2005 (meter)	50
Tabel	2.34.	Gangguan Ketertiban Masyarakat di Kota Depok Tahun 2001-2006..	53
Tabel	2.35.	Penduduk 10 Tahun keatas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2005.....	55
Tabel	2.36.	Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2005.....	55

Tabel	3.1.	Kota Dengan Penduduk Lebih Dari 100.000 Jiwa (Sensus Penduduk 2010)	61
Tabel	3.2.	Penduduk Kota Depok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2005-2025.....	61
Tabel	3.3.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Depok Tahun 2026.....	79
Tabel	3.4.	Estimasi Nilai Jasa Pemerintahan Umum di Kota Depok	88
Tabel	3.5.	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Kota Depok Tahun 2009-2013.....	91
Tabel	3.6.	Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2013	96
Tabel	3.7.	Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2013	106
Tabel	3.8.	PDRB Kreatif Kota Depok dan Laju Pertumbuhan ekonomi kreatif Tahun 2013.....	115
Tabel	3.9.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal 2006-2013.....	121
Tabel	3.10.	Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kota Depok Tahun 2011-2026	122
Tabel	3.11.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Depok Tahun 2006-2013	123
Tabel	3.12.	Rasio Ketergantungan dan Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2005-2025	129
Tabel	3.13.	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	130
Tabel	3.14.	Identifikasi Kebijakan RPJPD Daerah lain	133
Tabel	5.1.	Sasaran Pokok, Indikator Kinerja dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Depok Sampai Dengan Tahun 2025	144
Tabel	5.2.	Tahapan dan Arah kebijakan Pembangunan Kota Depok Sampai Dengan Tahun 2025	150
Tabel	5.3.	Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032.....	158
Tabel	5.4.	Rencana Pola Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032.....	161

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik	2.1 Tempat Penyaluran Buangan Akhir Tinja.....	16
Grafik	2.2 Komposisi Sampah TPA Cipayung	17
Grafik	2.3. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2006	19
Grafik	2.4. Laju PDRB Kota Depok Tahun 2000 – 2005.....	23
Grafik	2.5. Posisi Lapangan Usaha Pertanian Kota Depok dibanding rata-rata Jawa Barat.....	25
Grafik	2.6. Posisi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kota Depok.....	29
Grafik	2.7. Posisi Lapangan Usaha Listrik, Gas & Air Minum Kota Depok.....	30
Grafik	2.8. Posisi Lapangan Usaha Konstruksi Kota Depok dibanding Jawa Barat	31
Grafik	2.9. Posisi Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel & Restoran Kota Depok dibanding Jawa Barat	33
Grafik	2.10. Posisi Lapangan Usaha Angkutan & Komunikasi Kota Depok dibanding Jawa Barat	35
Grafik	2.11. Posisi Lapangan Usaha Bank & Lembaga Keuangan Kota Depok dibanding Jawa Barat	37
Grafik	2.12. Posisi Lapangan Usaha Jasa-jasa Kota Depok dibanding Jawa Barat	39
Grafik	2.13. Fluktuasi Lalu Lintas di Kota Depok	50
Grafik	2.14. Pengguna Narkoba di Kota Depok Tahun 2001-2006	53
Grafik	2.15. Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok..	54
Grafik	3.1. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Depok	62
Grafik	3.2. Proyeksi Jumlah Penduduk di Kota Depok	63
Grafik	3.3. Estimasi Perkembangan Peserta KB Aktif Sampai Dengan Tahun 2025	65
Grafik	3.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Sampai Dengan Tahun 2025	70
Grafik	3.5. Estimasi Perkembangan PDRB Sampai Dengan Tahun 2025	70
Grafik	3.6. Estimasi Perkembangan Distribusi Presentase Sektor Sampai Dengan Tahun 2025.....	71
Grafik	3.7. Estimasi Perkembangan Distribusi Presentase PDRB Sektor Primer Sampai Dengan Tahun 2025.....	72

Grafik	3.8.	Estimasi Perkembangan Produksi Belimbing Sampai Dengan Tahun 2025	73
Grafik	3.9.	Estimasi Perkembangan Produksi Ikan Hias dan Pemberian Sampai Dengan Tahun 2025	74
Grafik	3.10.	Estimasi Perkembangan Produksi Ikan Air Tenang Sampai Dengan Tahun 2025.....	74
Grafik	3.11.	Tren Perkembangan Kontribusi Sektor Sekunder Sampai Dengan Tahun 2025	76
Grafik	3.12.	Perkembangan PDRB Industri Pengolahan di Kota Depok	77
Grafik	3.13.	Perkembangan Kebutuhan Listrik di Kota Depok	78
Grafik	3.14.	Perkembangan Jumlah Pemakaian Air Bersih Perpipaan di Kota Depok	80
Grafik	3.15.	Tren Perkembangan Distribusi Sektor Tersier Sampai Dengan Tahun 2025	82
Grafik	3.16.	Perkembangan Persentase Tenaga Kerja Sektor Tersier di Kota Depok	83
Grafik	3.17.	Perkembangan Ekspor Kota Depok.....	84
Grafik	3.18.	Pertumbuhan Sektor Angkutan Kota Depok	86
Grafik	3.19.	Perkembangan Lapangan Usaha Bank & Lembaga Keuangan lainnya.....	88
Grafik	3.20.	Pertumbuhan Sektor Jasa Kota Depok	89
Grafik	3.21.	Perkembangan Lapangan Usaha Jasa-jasa di Kota Depok	90
Grafik	3.22.	Perkembangan Inflasi Kota Depok	92
Grafik	3.23.	Perkembangan PDRB per Kapita di Kota Depok	93
Grafik	3.24.	Proyeksi Indeks Gini Sampai Dengan Tahun 2025	93
Grafik	3.25.	Proyeksi Perkembangan IPM Kota Depok Samai Dengan Tahun 2025	95
Grafik	3.26.	Perkembangan Kunjungan Pasien RSUD Kota Depok	98
Grafik	3.27.	Estimasi Perkembangan AMH di Kota Depok	99
Grafik	3.28.	Kecenderungan Jumlah Orang Miskin Sampai Dengan Tahun 2025..	103
Grafik	3.29.	Proyeksi Angkatan Kerja Hingga Tahun 2025	106
Grafik	3.30.	Tren IKM Kota Depok Sampai Dengan Tahun 2025	108
Grafik	3.31.	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial di Kota Depok..	110

Grafik	3.32.	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial Anak-anak di Kota Depok	111
Grafik	3.33.	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial Yang Dihadapi Wanita di Kota Depok sampai tahun 2025.....	111
Grafik	3.34.	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial di Kota Depok sampai dengan tahun 2025	112
Grafik	3.35.	Perkembangan Pola Konsumsi Masyarakat Kota Depok	115
Grafik	3.36.	Perkembangan Sarana Jalan di Kota Depok	117
Grafik	3.37.	Perkembangan Kasus Kriminal di Kota Depok Tahun 2001 - 2013	128
Grafik	3.38.	Perkembangan Kasus Penggunaab Narkoba di Kota Depok Tahun 2001-2013	128
Grafik	3.39.	Rasio Ketergantungan di Kota Depok Tahun 2005-2025	130

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Depok	9
Gambar 2.2. Peta Geologi	10
Gambar 2.3. Peta Topografi	12
Gambar 2.4. Peta Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Dibawahnya.....	13
Gambar 2.5. Peta Kawasan Rawan Bencana.....	15
Gambar 2.6. Peta Kawasan Terbuka Hijau.....	52
Gambar 3.1. Pola Hubungan antara Permasalahan Kota Depok, Perumusan Visi Misi dan Perumusan Arah Kebijakan	56
Gambar 3.2. Sebaran Layanan Air Bersih Perpipaan di Kota Depok Tahun 2013 ..	81
Gambar 5.1. Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032.....	157
Gambar 5.2. Rencana Pola Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032.....	160

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 JUNI 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006-2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif (comparative advantages) wilayahnya. Keunggulan komparatif tersebut selanjutnya diarahkan dan dikembangkan secara terencana sehingga terwujud pengembangan daerah yang optimal, tercermin dari luasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kota Depok mempunyai keunggulan komparatif berupa letaknya yang sangat strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Saat ini Kota Depok telah tumbuh sebagai kota niaga dan jasa, namun core competence ini belum mampu dikelola secara optimal lantaran masih terbatasnya kemampuan daerah terutama dalam hal pembiayaan. Untuk memformulasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Penyusunan rencana pembangunan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana pembangunan tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis (Renstra-SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP), Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

RPJPD Kota Depok disusun dengan periodisasi waktu dimulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2025. Hal itu dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok yang telah ditetapkan terlebih dahulu yaitu pada tahun 2006. Secara makro substansi RPJPD Kota Depok telah diselaraskan dengan RPJP Nasional,namun substansi materi RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 belum mengacu pada Perda Prov. Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, dan belum berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032. Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa RPJPD kabupaten/kota disusun mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi, berpedoman pada RTRW kabupaten/kota dan memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya, begitu pula dengan sistematika yang terdapat pada RPJPD Kota Depok 2006-2025 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pasal 28 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

RPJPD Kota Depok 2006-2025 sampai saat ini telah dijabarkan ke dalam RPJMD Tahap I (2006-2011) dan RPJMD Tahap II (2011-2016). Melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, menghasilkan kemajuan di berbagai sektor kehidupan, antara lain ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertinggi di Jawa Barat. Sejak pembangunan mulai dipacu pada era otonomi daerah, Kota Depok kini tumbuh menjadi kota yang makin mengarah ke wujud kota metropolitan, yang dicirikan oleh jumlah penduduknya yang besar dan semakin berkembangnya ekonomi dan gaya hidup masyarakat. Kota Depok juga mengarah kepada makin menguatnya sektor tersier, utamanya perdagangan dan jasa, sehingga sesuai dengan Visi Kota yang telah ditetapkan, yaitu **“Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius dan Berwawasan Lingkungan”**. Namun, akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di satu sisi berdampak positif, di sisi lain berpotensi memberikan beban dan tantangan

tersendiri dalam pemberian pelayanan dan mensejahterakan masyarakat oleh Pemerintah Kota. Saat ini dampak tersebut telah mulai dirasakan dengan munculnya berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan, ketidaktertiban, banjir, kurang optimalnya penanganan sampah, berkurangnya ruang terbuka hijau, menurunnya rasio jumlah sekolah dan sarana kesehatan per satuan jumlah penduduk, meningkatnya pencemaran udara dan air, hingga masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan penyalahgunaan narkoba. Dinamika perkembangan Kota Depok yang pesat ini berdampak pada perencanaan jangka panjang. Data proyeksi yang tercantum dalam dokumen RPJPD 2006-2025 memerlukan evaluasi dan perbaikan karena tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini.

Menurut pasal 282 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa dalam hal RPJPD tidak disusun sesuai dengan tatacara penyusunan dan substansi yang dirumuskan dalam Permendagri tersebut, maka dapat dilakukan perubahan RPJPD.

Perubahan RPJPD tidak menyangkut Visi dan Misi RPJPD beserta penjabaran visi dan misi yang telah disepakati antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Depok. Perubahan dilakukan terhadap sistematika dan substansi yang berhubungan dengan perbaikan angka proyeksi perkembangan daerah sampai dengan tahun 2025, disertai dengan prediksi terhadap potensi permasalahan dan tantangan baru ke depan, arah kebijakan-kebijakan pembangunan dan kebijakan umum yang perlu disesuaikan dan dipedomani, sasaran pokok, tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan, serta target sasaran yang lebih terukur sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri No. 54 Tahun 2010. Selain visi dan misi, gambaran umum daerah juga tidak diubah karena mencerminkan kondisi pada saat itu (kondisi tahun 2006) tetapi dilengkapi data-data baru yang diperlukan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24),
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 9);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

RPJPD disusun dengan mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat, berpedoman pada RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032 serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota disekitarnya. Mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi. Mempedomani RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032 dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan arah dan kebijakan RTRW. Memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006 - 2025 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh komponen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan stakeholder lainnya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Sedangkan tujuan penyusunan RPJP Daerah Kota Depok adalah:

- a. Untuk menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang disepakati bersama berdasarkan musyawarah, sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.
- b. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kota dengan memperhatikan basis potensi yang dimiliki.

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika pembahasan laporan meliputi bahasan berikut ini :

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dan dasar hukum penyusunan Perubahan RPJPD. Selain itu juga dijelaskan hubungan antara Perubahan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan dan maksud serta tujuan penyusunan Perubahan RPJPD.

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi aspek : kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

BAB 3. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB 4. VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menyampaikan Visi dan Misi Kota Depok 2006-2025 yang disepakati antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Depok, yang disusun berdasar analisis isu-isu strategis.

BAB 5. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bab ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang menghubungkan antara sasaran dengan sasaran pokok tiap tahapan pembangunan lima tahunan.

BAB 6. KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

BAB 7. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

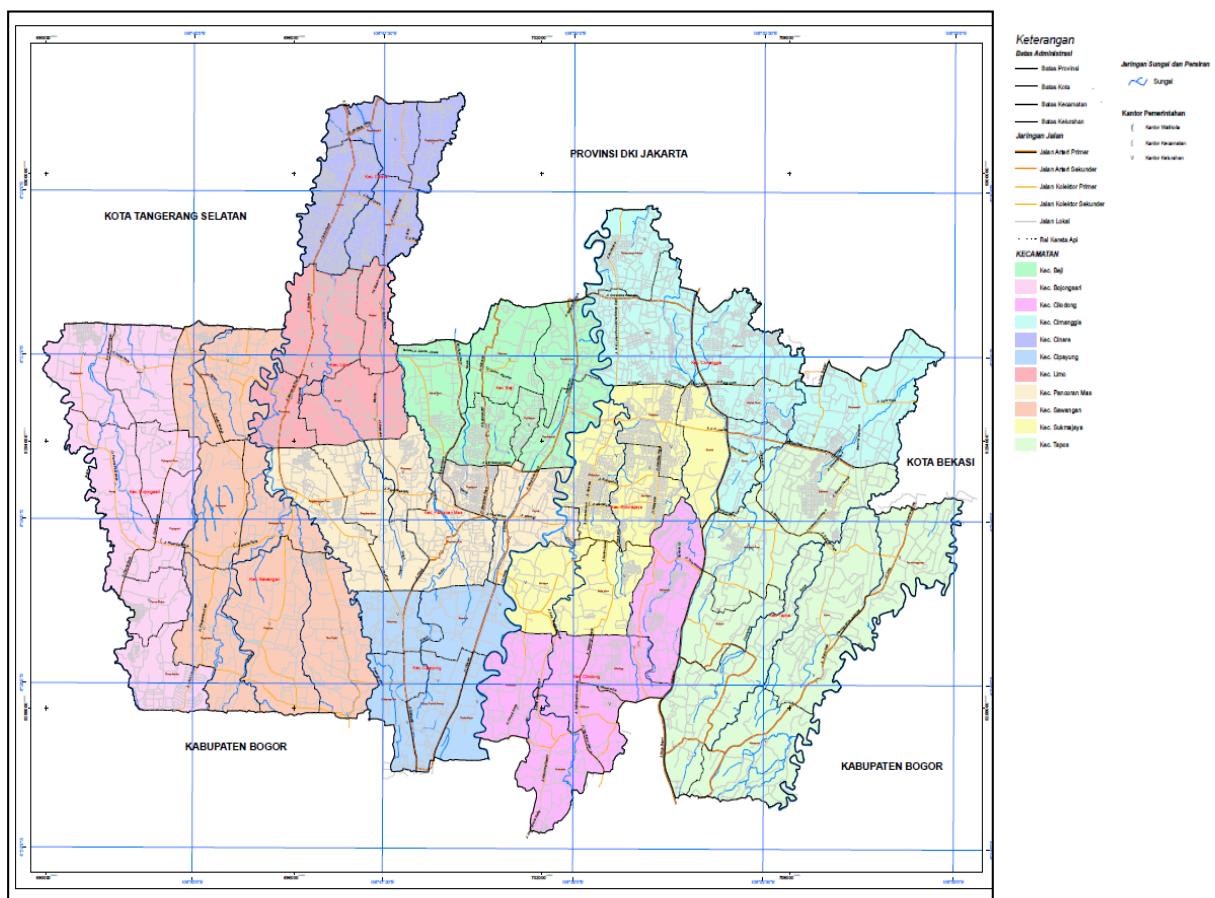
2.1.1 BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DAN KONDISI GEOGRAFIS

Kota Depok berada dalam posisi yang strategis karena terletak pada poros wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat $6^{\circ} 19' 00''$ – $6^{\circ} 28' 00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 43' 00''$ – $106^{\circ} 55' 30''$ Bujur Timur. Kota Depok memiliki luas wilayah $200,29 \text{ km}^2$ atau 0,58 % dari luas Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan tiga kabupaten/kota dan dua provinsi yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Secara administratif, berdasarkan Perda No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan di Kota Depok, Pemerintahan Kota Depok yang tadinya terdiri dari 6 Kecamatan dimekarkan menjadi 11 Kecamatan yakni Kec.Cimanggis dimekarkan menjadi Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Tapos, Kecamatan Sukmajaya dimekarkan menjadi Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cilodong, Kecamatan Sawangan dimekarkan menjadi Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Pancoran Mas dimekarkan menjadi Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung, Kecamatan Limo dimekarkan menjadi Kecamatan Limo dan Kecamatan Cinere serta Kecamatan Beji tidak dimekarkan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Depok



Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

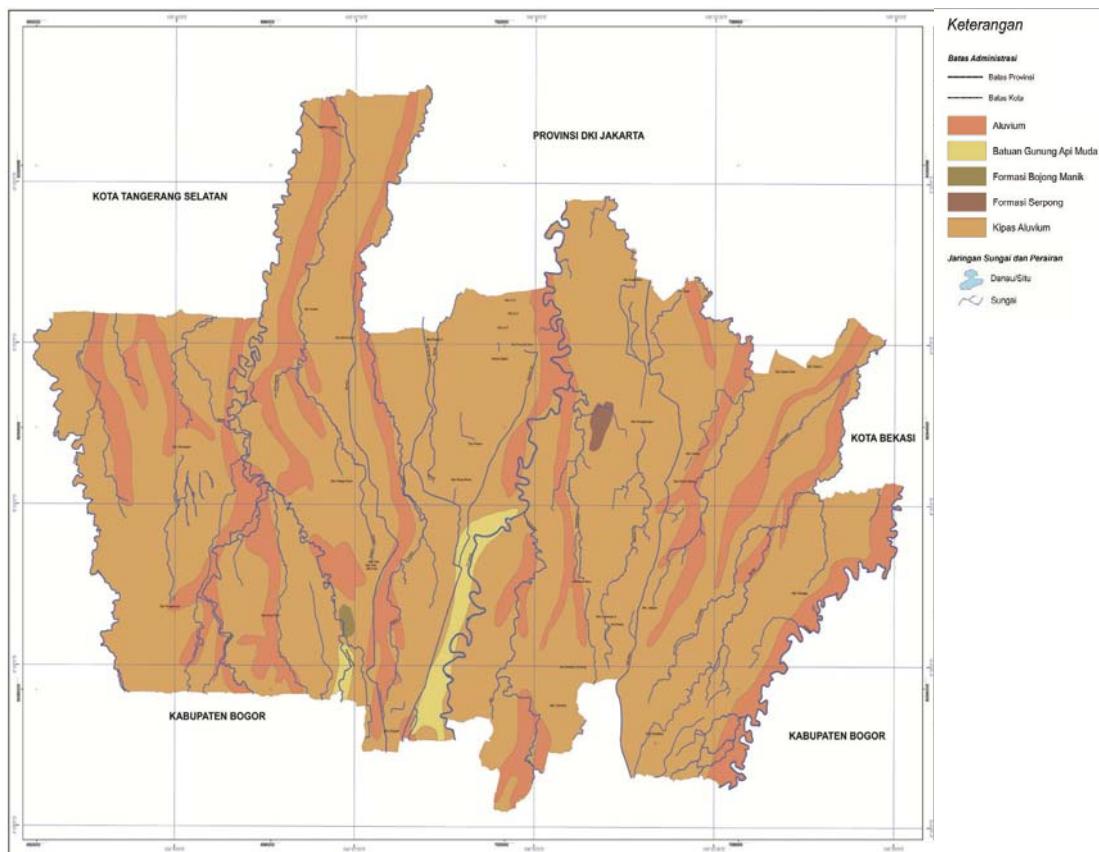
2.1.2 GEOLOGI

Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kota Depok terdiri dari:

- Alluvial coklat kekuningan, tanah endapan yang masih muda, terbentuk dari endapan lempung, debu dan pasir, umumnya tersingkap di jalur-jalur sungai, tingkat kesuburan sedang–tinggi.
- Alluvial kelabu, bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfat yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO₂ dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbentuk persegi sedang sifat kimiinya sama dengan bahan asalnya.
- Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan Laterit Air Tanah, tanah latosol yang perkembangannya dipengaruhi air tanah, tingkat kesuburan sedang, kandungan air tanah cukup banyak, sifat fisik tanah sedang – kurang baik.
- Komplek alluvial Coklat dan Alluvial Coklat Keabuan.

- e. Latosol Coklat Kemerahan, tanah yang belum begitu lanjut perkembangannya, terbentuk dari tufa vulkan andesitis – basaltis, tingkat kesuburnya rendah – cukup, mudah meresapkan air, tahan terhadap erosi, tekstur halus. Latosol Merah, berasal dari vulkan intermedier, tanah ini subur, dan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan

Gambar 2.2. Peta Geologi



Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

2.1.3 TOPOGRAFI

Kondisi topografi Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya 0%-25% (Sumber: Bakosurtanal). Kota Depok mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km², dengan kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar dan mata air yang timbul menjadi air permukaan berupa situ-situ. Luas situ dan danau pada tahun 2005 sebesar 0,84%, dengan kualitas air relatif baik dan sebagian kecil sudah tercemar.

Tabel 2.1. Sebaran Luas Formasi Geologi Kota Depok

Kode	Kelas Lereng	Luas	
		Ha	%
A	Datar (0% – 8%)	8.957	44,7
B	Landai (8% - 15%)	9.026	45,1
C	Agak Curam (15%-25%)	2.046	10,2
Jumlah		20.029	100

Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal

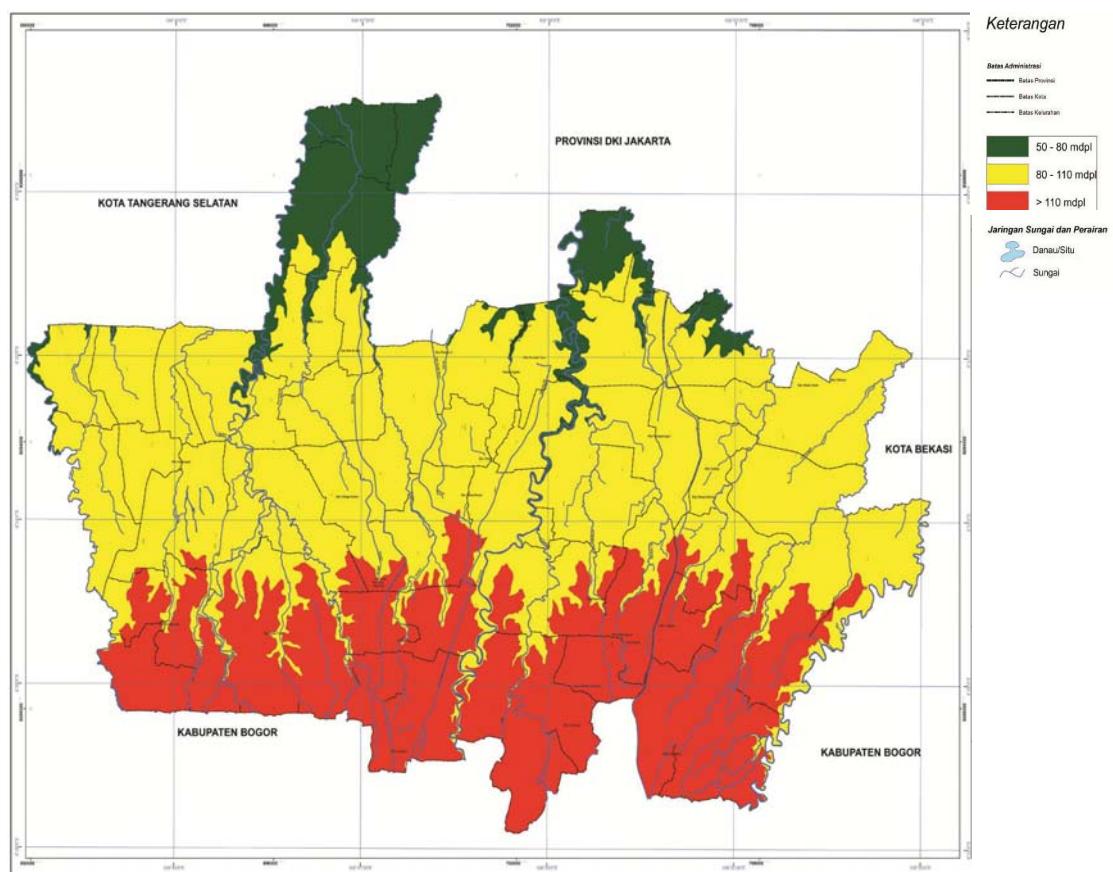
Bagian Utara umumnya berupa dataran rendah, sedangkan di wilayah bagian Selatan umumnya merupakan daerah bergelombang. Sebagian besar ketinggian Kota Depok berkisar antara 40-70 mdpl yang berada di bagian tengah Kota Depok dengan sebaran seluruhnya di Kecamatan Beji, sebagian kecil di bagian Selatan Kecamatan Cinere, hampir seluruhnya di Kecamatan Cimanggis, sebagian di Kecamatan Bojongsari bagian Utara, dan sebagian besar di Kecamatan Pancoran Mas.

Sedangkan bagian selatan Kota Depok memiliki ketinggian 100-140 mdpl, antara lain berada di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos. Secara umum kemiringan lereng di Kota Depok hampir rata dengan rata-rata kemiringan 0-8 %, adapun kemiringan 8-15 % hanya terdapat di wilayah sektor sempadan sungai. Adapun penyebaran wilayah berdasarkan kemiringan yaitu :

1. 0 – 8 % terletak di hampir seluruh Kota Depok
2. 8 – 15 % terletak di hampir seluruh Kota Depok,
3. 15 – 25 % terletak di Kelurahan Leuwinangung, Tapos, Cimpaeun, Sukmajaya, Jatimulya, Pasir Gunung Selatan, Tugu, Pondok Cina, Bakti Jaya, Tirta Jaya, Kalimulya, Rangkapan Jaya dan Cinangka (pada umumnya terletak di sekitar sungai)

Kemiringan lereng antara 0-8 % potensial untuk pengembangan perkotaan, sedangkan kemiringan lereng yang lebih besar dari 8-15 % potensial untuk dijadikan sebagai pertanian. Di samping itu, perbedaan kemiringan lereng juga bermanfaat untuk sistem drainase. Permasalahan yang muncul akibat topografi Kota Depok adalah karena adanya perbedaan kemiringan lereng yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari Selatan menuju Utara yaitu Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Kali Cikeas.

Gambar 2.3. Peta Topografi

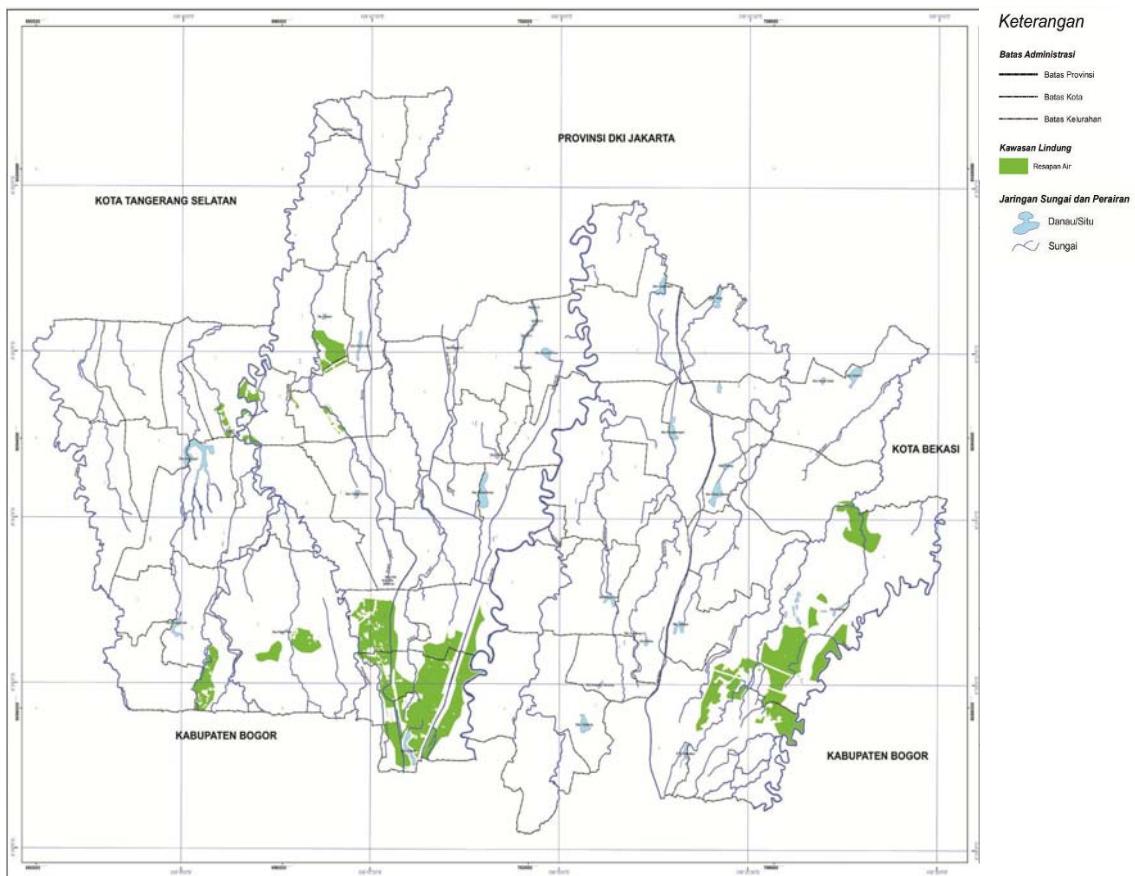


Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

2.1.4 HIDROLOGI

Sumber Daya Air terdiri dari dua sumber utama yaitu sungai dan situ. Secara makro sungai-sungai di Kota Depok termasuk kedalam dua satuan wilayah sungai besar, yaitu sungai Ciliwung dan Cisadane. Selanjutnya sungai-sungai tersebut dibagi menjadi 13 Satuan Wilayah Aliran Sungai, yaitu sungai Ciliwung, Kali Baru, Pesanggrahan, Angke, Sugutamu, Cipinang, Cijantung, Sunter, Krukut, Saluran Cabang Barat, Saluran Cabang Tengah dan sungai Caringin. Berkaitan dengan situ, saat ini Kota Depok memiliki 25 situ yang tersebar di wilayah Timur, Barat dan Tengah. Luas keseluruhan situ dan danau yang ada di Kota Depok berdasarkan data tahun 2005 adalah seluas 168,24 Ha, atau sekitar 0,84% luas Kota Depok. Kedalaman situ-situ yang ada Kota Depok bervariasi antara 1 sampai 4 meter. Dari pengukuran kualitas air pada situ-situ di Kota Depok, kualitas air yang paling buruk terdapat pada Situ Gadog dan Rawa Besar. Selain penurunan kualitas air, kawasan situ juga mengalami degradasi luasan.

Gambar 2.4. Peta Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Dibawahnya



Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

2.1.5 KLIMATOLOGI

Wilayah Depok termasuk dalam daerah beriklim tropis dengan perbedaan curah hujan yang cukup kecil dan dipengaruhi oleh iklim musim, secara umum musim kemarau antara bulan April-September dan musim hujan antara Oktober-Maret (sumber: Revisi RTRW Kota Depok 2005-2010). Adapun kondisi iklim di Kota Depok sebagai berikut:

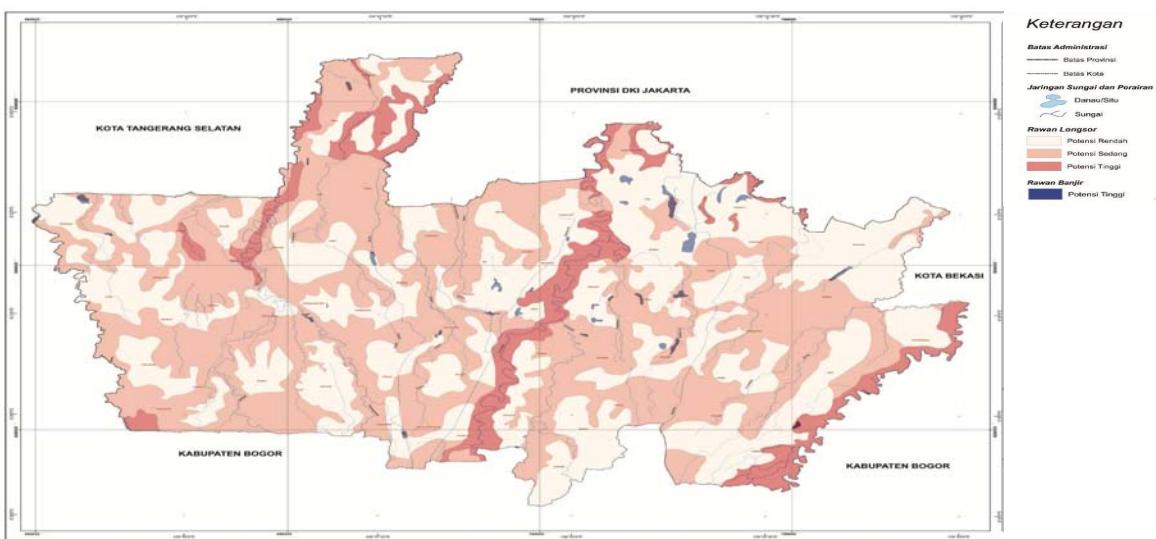
- Temperatur : 24,3-33 derajat Celsius
- Kelembaban rata-rata : 82 %
- Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th
- Kecepatan angin rata-rata : 3,3 knot
- Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 %
- Jumlah curah hujan : 2684 mm/tahun
- Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun

Kondisi curah hujan di seluruh wilayah di daerah Kota Depok relatif samadengan kadar curah hujan sepanjang tahun.. Kondisi curah hujan di Kota Depok mendukung kegiatan dibidang pertanian terutama pertanian lahan basah di areal irigasi teknis, sedangkan di daerah tinggi dan tidak ada saluran irigasi teknis akan lebih sesuai untuk tanaman palawija kombinasi dengan padi/lahan basah pada musim hujan sebagai pertanian tada hujan. Selain penting sebagai sumber irigasi, curah hujan juga penting untuk pemberian gambaran penentuan lahan, terutama lokasi, pola cocok tanam dan jenis tanaman yang sesuai.

2.1.6 WILAYAH RAWAN BENCANA

Potensi rawan bencana yang terdapat di Kota Depok adalah rawan bencana banjir, rawan bencana longsor dan rawan bencana kebakaran. Kawasan rawan bencana banjir berada di lokasi perumahan yang terletak di dataran rendah dan tersebar di beberapa kelurahan yaitu: Kelurahan Tugu, Sukatani, Mekarsari, Cisalak, Sukmajaya, Sukamaju, Abadijaya, Mekarjaya, Cilodong,, Depok, Depok Jaya, Pancoranmas, Cipayung Jaya, Cipayung, Rangkapan Jaya, Rangkapan Jaya Baru, Pondok Jaya, Mampang, Bojong Pondok Terong, Bojongsari, Sawangan Baru, Sawangan, Pengasinan, Bedahan, Duren Mekar, Kukusan, Pondok Cina, Beji, Krukut, Meruyung, Gandul dan Cinere (*sumber:Pra Design Mikro Drain Pengelolaan Situ Kota Depok, 2004*). Faktor penyebab terjadinya bencana ini adalah lama dan intensitas hujan tinggi, meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran kecil dan kapasitas aliran sungai tidak memadai, dan sistem drainase yang tidak memadai. Kawasan rawan longsor berada di sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Situ Pedongkelan. Sedangkan kawasan rawan bencana kebakaran terdapat di sekitar permukiman padat penduduk dan bangunan di Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Sukmajaya, dan Kelurahan Tugu.

Gambar 2.5. Peta Kawasan Rawan Bencana



Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

2.1.7 BUANGAN GAS DAN LIMBAH

2.1.7.1. BUANGAN GAS

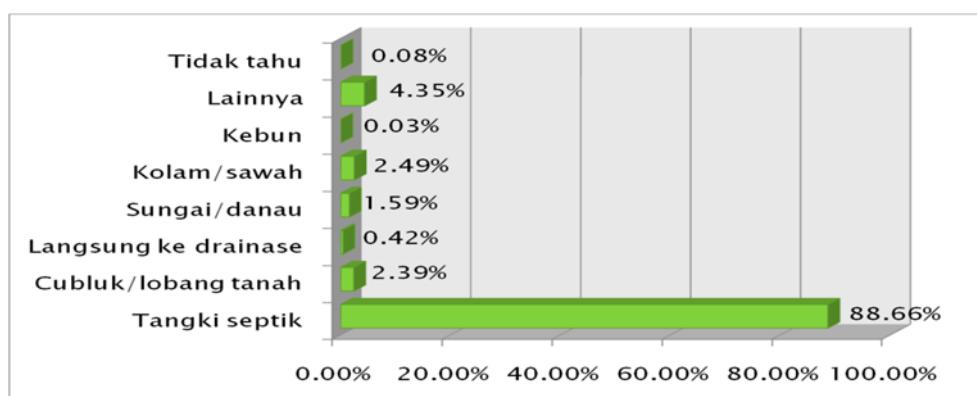
Kualitas udara di Kota Depok berdasarkan data tahun 2005, pada 4 (empat) titik pengamatan atas kadar SO_2 , NO_2 , CO , O_3 dan Pb masih memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Konsentrasi Sulfur Dioksida (SO_2) pada 4 (empat) titik pengamatan tersebut antara 0,1 – 16,14 mikro-gram/m³, di bawah ambang baku mutu 365 mikro-gram/m³. Konsentrasi Nitrogen Oksida (NO_2) pada 4 titik pemantauan tersebut antara 2,94 – 15,95 mikro-gram/m³, di bawah ambang baku mutu 150 mikro-gram/m³. Konsentrasi Karbon Monoksida (CO) pada 4 titik pemantauan tersebut antara 151,45 – 716,84 mikro-gram/m³, di bawah ambang baku mutu 10.000 mikro-gram/m³. Konsentrasi Oksidan (O_3) pada 4 titik pemantauan tersebut antara 12,94 – 40,38 mikro-gram/m³, di bawah ambang baku mutu 235 mikro-gram/m³. Konsentrasi Timbal (Pb) pada 4 titik pemantauan tersebut antara 0,16 – 1,56 mikro-gram/m³, di bawah ambang baku mutu 2 mikro-gram/m³. Sedangkan konsentrasi debu (partikulat) pada 4 (empat) titik pemantauan tersebut antara 0,078 – 0,364 mikro-gram/m³, dengan ambang baku 0,23 mikro-gram/m³. Kondisi tersebut akan dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang melalui Program Langit Biru. Sedangkan untuk konsentrasi debu akan terus dikurangi di bawah ambang mutu standar pada tahun-tahun berikutnya, memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Sedangkan berdasarkan data hasil uji Kualitas udara di Kota Depok tahun 2015, pada 12 (dua belas) titik pengamatan atas kadar SO_2 , NO_2 , CO , O_3 dan Pb masih memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Konsentrasi Sulfur Dioksida (SO_2) pada 12 (dua belas) titik pengamatan tersebut antara 21,8 – 80,00 mikro-gram/m³, di bawah ambang baku mutu 900 mikro-gram/m³. Konsentrasi Nitrogen Oksida (NO_2) pada 12 (dua belas) titik pantau tersebut antara 7,96 – 32,10 mikro-gram/m³, di bawah ambang baku mutu 400 mikro-gram/m³. Konsentrasi Karbon Monoksida (CO) pada 12 (dua belas) titik pantau tersebut rata-rata di kurang dari 1140 mikro-gram/m³, di bawah ambang baku mutu 30.000 mikro-gram/m³. Konsentrasi Timbal (Pb) pada 12 (dua belas) titik pantau tersebut di bawah 0.010 mikro-gram/m³, Sedangkan konsentrasi debu (partikulat) pada 12 (dua belas) titik pantau tersebut antara 54 - 224 mikro-gram/m³. Tingkat kebisingan pada 12 (dua belas) titik pantau adalah antara 55 – 73 dB (A) rata-rata di atas ambang baku mutu yaitu 55 dB (A).

2.1.7.2. BUANGAN LIMBAH

Limbah cair yang berasal dari limbah manusia diatasi melalui sistem *septic-tank*. Air limbah pemukiman manusia yang berupa air buangan kamar mandi, air bekas cuci, dan air bekas kegiatan perkotaan lainnya masih menggunakan sistem tercampur, yaitu air limbah dan air hujan dialirkan melalui satu saluran. Sedangkan untuk air limbah industri dan komersial belum ada sistem yang menanganinya secara khusus.

Grafik 2.1. Tempat Penyaluran Buangan Akhir Tinja

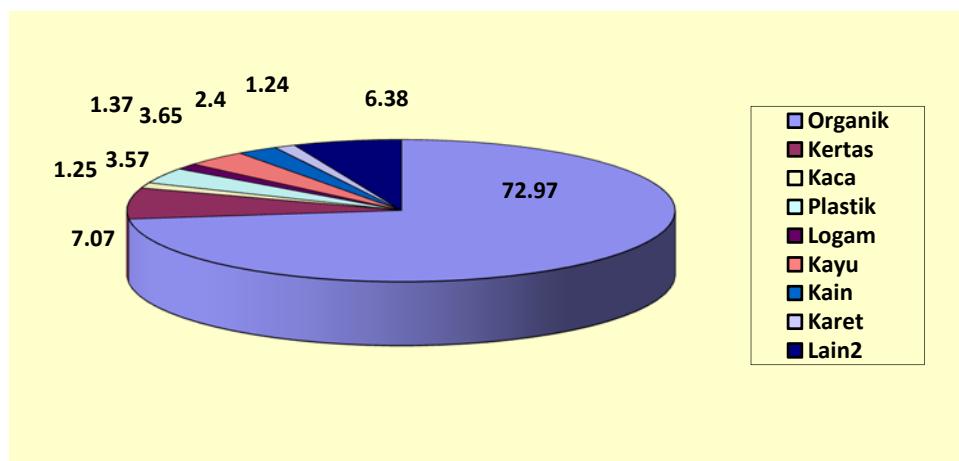


Sumber : Laporan EHRA Kota Depok 2011

Limbah padat Kota Depok diatasi dengan sistem *sanitary landfill* yang berlokasi di TPA Cipayung, berdekatan dengan sungai Pesanggrahan yang berfungsi sebagai tempat pembuangan air lindi *landfill*. Sistem penanganan limbah padat akan dikembangkan lebih lanjut berupa program daur ulang dan sistem komposting. Secara garis besar, volume sampah Kota Depok dapat dihitung melalui perkalian antara timbulan sampah per kapita dikalikan jumlah populasi penduduk Kota Depok. Pada tahun 2005 timbulan sampah yang

dihasilkan Kota Depok mencapai 766 meter kubik per hari dengan tingkat pertumbuhan sampah sebesar 4.4%. Dari total sampah yang dihasilkan, sekitar 488 meter kubik per hari yang terlayani, atau 63.71%. Sebagian besar sampah yang dihasilkan penduduk Kota Depok merupakan sampah organik yang mudah membusuk dan berasal dari produk domestik (63%), sedangkan sisanya berasal dari pasar (19%), komersial dan jalan (14%), industri dan rumah sakit (4%).

Grafik 2.2. Komposisi Sampah TPA Cipayung



Sumber : Studi ANDAL TPA Cipayung, 2002

2.1.8 PENGGUNAAN LAHAN

Berdasarkan hasil interpretasi foto udara tahun 2009, maka secara umum itensitas penggunaan lahan di Kota Depok terbagi atas 2 bagian, yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kawasan terbangun terdiri dari : perumahan, perdagangan dan jasa ini mempunyai luas 7.457,69 Ha, sedangkan kawasan tidak terbangun yang terdiri dari sawah, tegalan, kebun, Setu dan hutan kota memiliki luas 12.574,48 Ha. Dari hasil interpretasi foto udara terhadap kawasan terbangun dan tidak terbangun tersebut maka penggunaan lahan di wilayah Kota Depok dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2009

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Gedung	1,92	0,01
2	Hutan	37,02	0,18
3	Industri	316,87	1,58
4	Kawasan Campuran	10196,09	50,91
5	Kawasan Strategis	492,99	2,46
6	Kebun Campuran	38,58	0,19

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
7	Kolam Ikan	2,8	0,01
8	Lahan Irrigasi Setengah Teknis	409,94	2,05
9	Lahan Irrigasi Teknis	874,85	4,37
10	Lap. Golf	248,37	1,24
11	Perdagangan dan Jasa	240,65	1,20
12	Perguruan Tinggi	24,57	0,12
13	Perkantoran dan Jasa Pelayanan	65,52	0,33
14	Perumahan Formal	1291,84	6,45
15	Perumahan Swadaya	5508,77	27,50
16	RPH	7,55	0,04
17	Setu	122,47	0,61
18	Tegalan \ Ladang	145,02	0,72
19	Terminal	3,18	0,02
Total		200,29	100

*Sumber: Rencana Induk Perumahan dan Permukiman Tahun 2010
(Hasil Ground Check 2009)*

Sumber daya lahan Kota Depok mengalami tekanan, sejalan dengan perkembangan kota. Kebijakan pemerintah yang memposisikan Kota Depok sebagai daerah penyangga Ibukota Jakarta, telah menyebabkan tekanan dan persaingan yang ketat dalam pemanfaatan lahan untuk pemukiman. Dalam pemanfaatan ruang kota, pada tahun 2005 kawasan pemukiman mencapai 89,03% dari total pemanfaatan ruang Kota Depok, atau 44.31% dari luas kota.

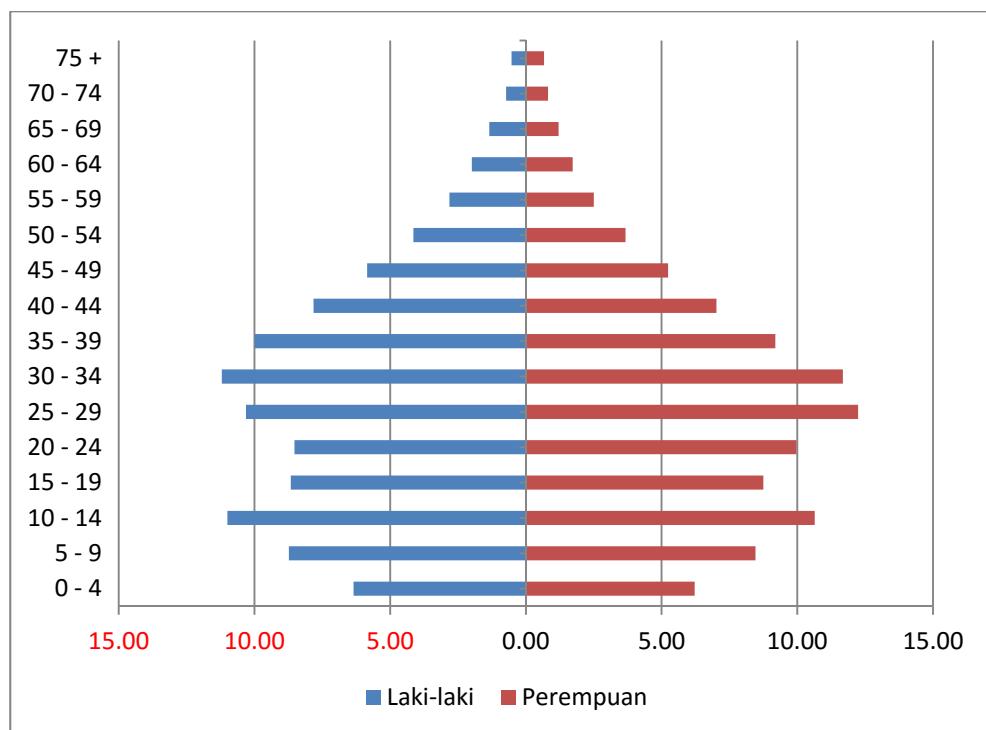
2.1.9 DEMOGRAFI

Kegiatan pulang-pergi (*commuter*) penduduk Kota Depok dari dan ke Jakarta untuk bekerja, menyebabkan meningkatnya kepadatan lalulintas yang berdampak pada timbulnya kemacetan kota. Tingginya jumlah kendaraan juga mengakibatkan peningkatan polusi udara. Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan dengan Ibukota Negara, Kota Depok menghadapi berbagai permasalahan perkotaan, termasuk masalah kependudukan. Dalam kaitan ini Kota Depok mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai dampak dari meningkatnya perkembangan kota dengan tumbuhnya berbagai kawasan pemukiman, pusat-pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.

2.1.9.1 Struktur dan Distribusi Penduduk

Jumlah penduduk Kota Depok, selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan cukup besar. Pada tahun 2002 jumlah penduduk Kota sebanyak 1.247.233 jiwa dan pada tahun 2006 mencapai 1.420.480 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,47%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Depok ini tergolong tinggi yang disebabkan adanya perbedaan penduduk yang lahir dan mati, serta penduduk yang datang dan pindah ke dan dari kota tersebut. Komposisi penduduk terdiri atas laki-laki 719.969 jiwa (50,68%) dan perempuan 700.511 jiwa (49,32%), sehingga rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah sebesar 102 sebagaimana tercantum pada **Grafik 2.3**.

Grafik 2.3 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2006



Sumber: BPS, 2006, diolah

Jumlah penduduk Kota Depok tersebar di enam kecamatan yaitu : di Kecamatan Cimanggis sebesar 392.512 jiwa yang merupakan kecamatan dengan populasi penduduk terbesar dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Beji yaitu sebesar 143.592 jiwa. Dengan luas wilayah 200,29 km², maka kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 7.092,12 jiwa/km², atau sekitar 71 jiwa per hektar.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2002-2006

Kecamatan/Tahun	2002	2003	2004	2005	2006
010 Sawangan	143,211	149,039	153,245	159,543	166,276
020 Pancoran Mas	226,405	235,790	240,904	247,622	254,797
030 Sukmajaya	285,928	296,636	301,809	307,753	314,147
040 Cimanggis	343,399	357,546	367,283	379,487	392,512
050 Beji	120,462	126,653	130,656	136,899	143,592
060 Limo	127,828	123,633	137,662	143,218	149,156
Kota Depok	1,247,233	1,289,297	1,331,559	1,374,522	1,420,480

Sumber: Depok Dalam Angka 2002-2006 (BPS)

2.1.9.2 Umur Perkawinan Pertama

Perkawinan usia muda berpengaruh cukup besar terhadap laju pertumbuhan penduduk bila dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kelahiran bayi. Dengan demikian berhasilnya penurunan laju pertumbuhan penduduk salah satu faktornya akan dipengaruhi oleh berhasilnya penundaan usia perkawinan. Selain itu resiko kematian sangat tinggi bagi perempuan yang melahirkan pada usia sangat muda.

Berdasarkan Tabelll.4 dibawah initerjadi pergeseran usia perkawinan ke umur lebih tua. Penurunan persentase perkawinan pertama terjadi pada umur < 17 tahun turun dari 16,26 persen menjadi 12,28 persen; umur 17-18 tahun turun dari 28,14 persen menjadi 16,19 persen. Sedangkan kenaikan persentase perkawinan pertama terjadi pada pada kelompok umur 19 - 24 tahun, dari 44,63 persen naik menjadi 50,91 persen; kelompok usia >25 dari 10,97 persen naik menjadi 20,62 persen.

Tabel 2.4. Persentase Perempuan Berusia 10 Tahun Keatas Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Di Kota Depok Tahun 2001 – 2006

Umur perkawinan Pertama (tahun)	Tahun					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
< 17	16,26	16,64	21,05	13,61	11,60	12,28
17 – 18	28,14	22,54	16,91	17,48	19,26	16,19
19 – 24	44,63	49,01	45,92	51,28	51,16	50,91
> 25	10,97	11,81	16,12	17,63	17,99	20,62
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Indikator Kesejahteraan Masyarakat 2001-2006

Angka-angka ini mengindikasikan bahwa sudah ada kesadaran dari penduduk Kota Depok untuk menunda perkawinan mereka pada umur yang cukup, yaitu pada kelompok 19 - 24 tahun. Sudah ada pemahaman dari para perempuan bahwa untuk membina keluarga tidak hanya diperlukan kesiapan fisik saja tetapi juga diperlukan kesiapan mental.

2.1.9.3 Komponen Demografi

Salah satu komponen demografi yang dapat mempengaruhi proses demografi dan mutu sumber daya manusia adalah kelahiran (fertilitas). Banyaknya kelahiran yang terjadi pada tahun tertentu berkaitan dengan faktor-faktor demografis seperti komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Banyaknya perkawinan yang terjadi, lamanya perkawinan dan banyaknya anak yang telah dilahirkan. Selain itu banyaknya kelahiran yang terjadi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi penduduk seperti pendidikan, pendapatan, agama dan tata nilai yang berlaku pada suatu komunitas.

Angka kelahiran penduduk dari tahun 2001 sampai 2004 mengalami fluktuasi (Tabel II.5), demikian juga angka kematian penduduk Kota Depok, berfluktuasi hampir mendekati pola angka kelahiran. Pada tahun 2004, jumlah penduduk yang lahir 7.318 jiwa dan mati 3.789 jiwa (selisih 3.529 jiwa). Angka kepergian penduduk Kota Depok juga berfluktuasi, yaitu jumlah penduduk yang datang 24.395 jiwa dan penduduk yang pergi 8.517 jiwa (selisih 15.878 jiwa). Berdasarkan data tersebut diatas, pertumbuhan penduduk di Kota Depok sebagian besar disebabkan oleh migrasi.

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk yang Lahir, Datang, Mati dan Pergi di Kota Depok Tahun 2001-2004

Komponen Demografi/Tahun	2001	2002	2003	2004
Lahir	3.684	3.286	7.704	7.318
Mati	1.519	1.550	3.784	3.789
Datang	7.066	9.418	19.950	24.395
Pergi	2.720	2.753	7.419	8.517

Sumber : Depok Dalam Angka Tahun 2001-2004,

Indikator yang biasa digunakan untuk memperoleh informasi tentang angka kelahiran dan perkembangan tingkat fertilitas adalah Angka Kelahiran Total adalah *Total Fertility Rate*

(TFR). Tabel II.6. memperlihatkan perkembangan angka kelahiran total (TFR) dalam kurun waktu 2001 – 2006 relatif stabil.

**Tabel 2.6. Perkembangan Angka Kelahiran Total (TFR)
Kota Depok, Tahun 2001-2006**

Tahun	Angka Kelahiran Total (TFR)
2001	2,04
2002	2,00
2003	1,85
2004	1,95
2005	1,88
2006	2,12

Sumber : Indikator Kesejahteraan Masyarakat 2001-2006

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 PERTUMBUHAN PDRB

Gambaran perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari aktifitas sektor-sektor ekonomi di daerah tersebut. Tolok ukur untuk menghitung aktifitas ekonomi tersebut dilakukan melalui perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan menggunakan tiga pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan produksi, adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah pada jangka waktu tertentu.
- 2) Pendekatan pendapatan, adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut didalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Pendekatan pengeluaran, adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto, perubahan stok, eksport netto disuatu wilayah.

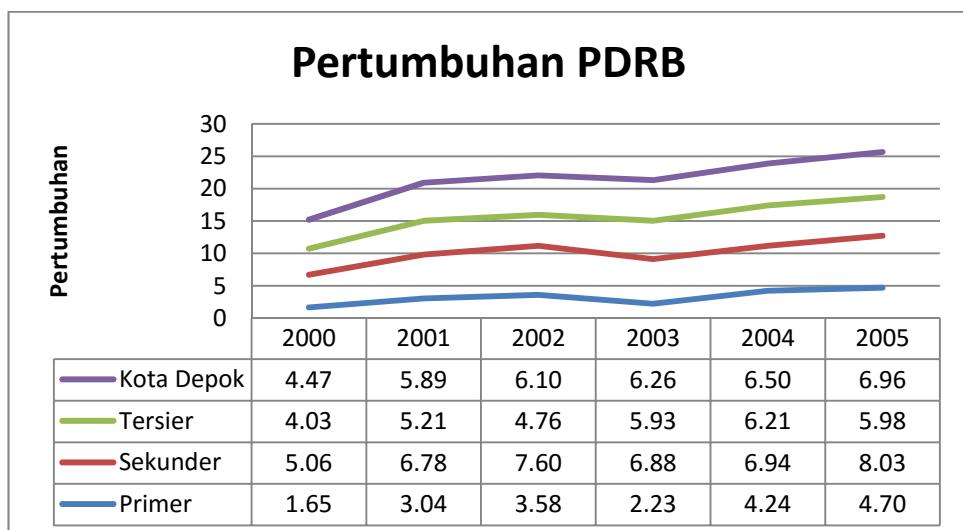
Sektor yang dihitung dalam PDRB dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

- 1) Sektor Primer, terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian
- 2) Sektor Sekunder, terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, serta sektor bangunan
- 3) Sektor Tersier, terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam PDRB selama tahun 2000-2005, terlihat bahwa perekonomian Kota Depok mengalami peningkatan, dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 6,0 per tahun. Laju perekonomian tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 6,96 sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 2.4.

Perkembangan ekonomi di Kota Depok tahun 2005 bertumpu pada sektor tersier yaitu pada lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran yang memiliki kontribusi sebesar 30,07 % dengan laju pertumbuhan 6,07. Sektor sekunder lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar adalah industri pengolahan sebesar 38,49% dengan laju pertumbuhan 9,0. Sedangkan kontribusi sektor primer secara keseluruhan hanya 2,99% dengan laju pertumbuhan 4,7. Sehingga dapat disimpulkan, perekonomian Kota Depok pada tahun 2005 masih didominasi peran sektor tersier dan sektor sekunder. Sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB adalah sektor Lembaga Keuangan.

Grafik 2.4 Laju PDRB Kota Depok Tahun 2000 – 2005



Sumber: PDRB Kota Depok Menurut Lapangan Usaha, BPS 2003-2007, diolah

2.2.1.1. SEKTOR PRIMER

A. PERTANIAN

Sektor pertanian dalam arti luas mencakup sub-sektor tanaman pangan, sub-sektor peternakan dan sub-sektor perikanan. Menurut data tahun 2005 sektor pertanian menyerap 1.44% tenaga kerja, serta memberikan kontribusi PDRB sebesar 3% terhadap nilai total PDRB Kota Depok, dengan laju pertumbuhan 4.70%. Angka-angka ini relatif kecil, karena sektor pertanian masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu ditangani, yaitu produktivitas, efisiensi usaha, konservasi lahan pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana, serta terbatasnya kredit dan infrastruktur pertanian.

Komoditas pertanian yang diusahakan di lahan sawah berupa tanaman padi, palawija (kedele dan kacang tanah), dan sayur-sayuran (pitsai/sawi, bawang merah dan tomat). Sedangkan komoditas pertanian tanaman pangan yang umumnya diusahakan di lahan kering adalah jagung, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

Luas lahan sawah menurut data BPS (2006) sekitar 972,10 Ha, sedangkan luas panen dan produksi dari berbagai jenis tanaman pangan adalah sebagai berikut : padi 901 ha dan 4.865,40 ton, ubi kayu 336 ha dan 26.181,12 ton, ubi jalar 274 ha dan 45,90 ton, jagung 441 ha dan 1.297,22 ton, kacang tanah 252 ha dan 304,46 ton. Adapun luas panen kacang panjang 365 ha, cabe 72 ha, terong 267 ha, mentimun 223 ha, kangkung 343 ha, dan bayam 303 ha.

Beberapa komoditas perkebunan di Kota Depok tidak diusahakan lagi karena adanya peralihan fungsi lahan seperti kelapa, kelapa hybrida, kopi dan melinjo, sementara beberapa komoditas lainnya masih dipertahankan meskipun mengalami penurunan produksi, yaitu jahe (luas 4,93 ha, produksi 5,979 ton), dan kencur (luas panen 7,625 ha, produksi 7,625 ton) (BPS, 2006).

Komoditas perkebunan rakyat yang paling berpotensi dan sangat berkembang di Kota Depok adalah belimbing. Selama tahun 2000 sampai 2004 produksi buah belimbing mengalami perkembangan yang sangat pesat, meningkat sebesar 236% lebih dan pada tahun 2006 dengan produksi mencapai 3.162 ton. Tingginya produksi ini disebabkan oleh populasi tanaman yang terus bertambah dan produktivitas yang meningkat akibat introduksi ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya. Minat berusaha tani belimbing mulai meningkat dipicu oleh daya serap pasar yang kuat, harga yang relatif stabil dan marjin laba yang cukup memadai. Kecocokan agroklimat dan tersedianya varietas unggul menjadikan

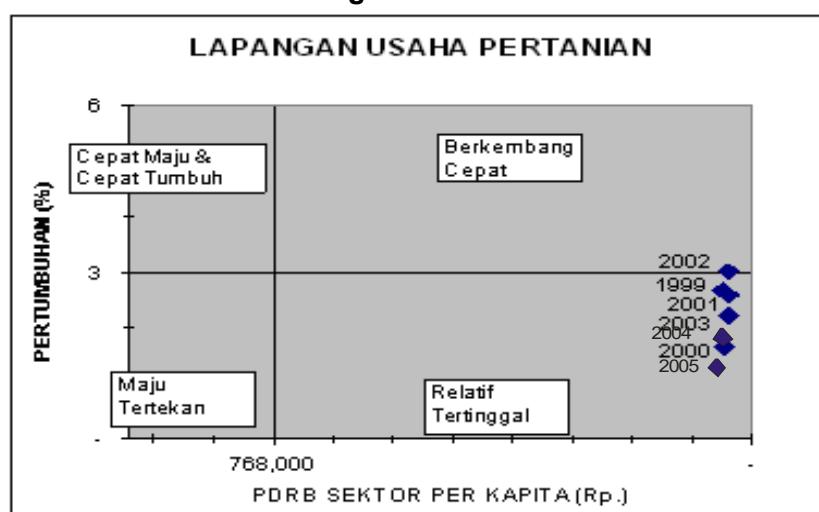
belimbing Depok memiliki keunggulan komparatif sekaligus kompetitif dibandingkan belimbing dari daerah lain.

Pada tahun 2006 pengusahaan ternak sebagian besar berupa usaha skala kecil. Populasi ternak besar (khususnya sapi) yang cukup tinggi di Kota Depok disebabkan adanya ternak yang masuk dari luar kota ke dalam lokasi transit di Kota Depok sebelum dikirim ke Rumah Potong Hewan (RPH). Jumlah populasi berbagai jenis ternak besar adalah: sapi perah 967 ekor, sapi potong 2.020 ekor, kerbau 428 ekor, dan kuda 197 ekor. Sedangkan populasi ternak kecil dan unggas adalah : kambing 8.638 ekor, domba 3.713 ekor, anjing 2.785 ekor, ayam 835.671 ekor, dan itik 27.980 ekor.

Potensi perikanan terbatas pada perikanan darat. Menurut data pada tahun 2006, luas areal tiap jenis kolam adalah sebagai berikut: kolam pemberian 15,91 ha, kolam air tenang 219,46 ha dan jaring apung (japung) sejumlah 828 buah. Produksi ikan pada tahun 2006 adalah: kolam pemberian 11.920 ekor senilai Rp. 1.782.614.000,-, kolam air tenang 1.327,59 ton senilai Rp. 13.778.470.000,- dan japung 30,48 ton senilai Rp. 237.830.000,-.

Selain ikan konsumsi, dikembangkan juga ikan hias. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan produksi ikan hias sebesar 133,8%. Peningkatan ini disebabkan oleh berkembangnya rumah tangga perikanan dan produktivitas yang semakin meningkat (138,5%). Pasar ekspor ikan hias yang terbuka menjadikan usaha tani ikan hias berkembang dan diminati masyarakat. Selain pasar ekspor, pasar lokal dan pasar regional juga sangat terbuka. Hingga tahun 2006, luas lahan produksi ikan hias mencapai 7,96 ha dengan produksi mencapai 58.719.390 ekor dengan nilai Rp. 34.064.072.000,-.

Grafik 2.5. Posisi Lapangan Usaha Pertanian Kota Depok dibanding rata-rata Jawa Barat



Sumber :Olah Data PDRB Kota Depok, 2006

Selama lima tahun terakhir, dibandingkan angka rata-rata Jawa Barat, baik pertumbuhan maupun rata-rata PDRB per kapitanya, lapangan usaha pertanian Kota Depok relatif tertinggal. Secara grafis, perbandingan lapangan usaha pertanian Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Grafik 2.5**.

Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok yang berasal dari Lapangan usaha pertanian adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.7**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha pertanian Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok dapat dilihat pada **Tabel 2.8**.

Tabel 2.7 PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Pertanian	144.562,46	149.731,67	153.071,51	159.556,91	167.053,64
Tanaman Bahan Makanan	24.716,83	27.069,24	27.824,47	28.037,29	28.598,04
Tanaman Perkebunan	191,00	199,00	211,00	218,00	220,18
Peternakan	103.493,07	105.379,97	107.687,79	113.682,37	120.087,59
Kehutanan	-	-	-	-	-
Perikanan	16.161,56	17.083,46	17.348,25	17.619,25	18.147,83

Sumber : PDRB Kota Depok, 2001-2005

Tabel 2.8. Persentase PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam persen)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Pertanian	3,91	3,82	3,67	3,60	3,52

Sumber : PDRB Kota Depok,, 2001-2005

B. PERTAMBANGAN/PENGGALIAN

Di wilayah Kota Depok, tidak ada potensi bahan tambang/galian, baik golongan A, B maupun C, serta Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok yang berasal dari lapangan usaha ini.

2.2.1.2. SEKTOR SEKUNDER

A. INDUSTRI PENGOLAHAN

Pada tahun 2005, industri pengolahan yang terdapat di Kota Depok berjumlah 105 unit usaha, terbanyak sub sektor industri kimia, barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet, plastik yaitu 31 unit usaha dan diikuti sub sektor industri tekstil, pakaian jadi dan kulit sebanyak 23 unit usaha.

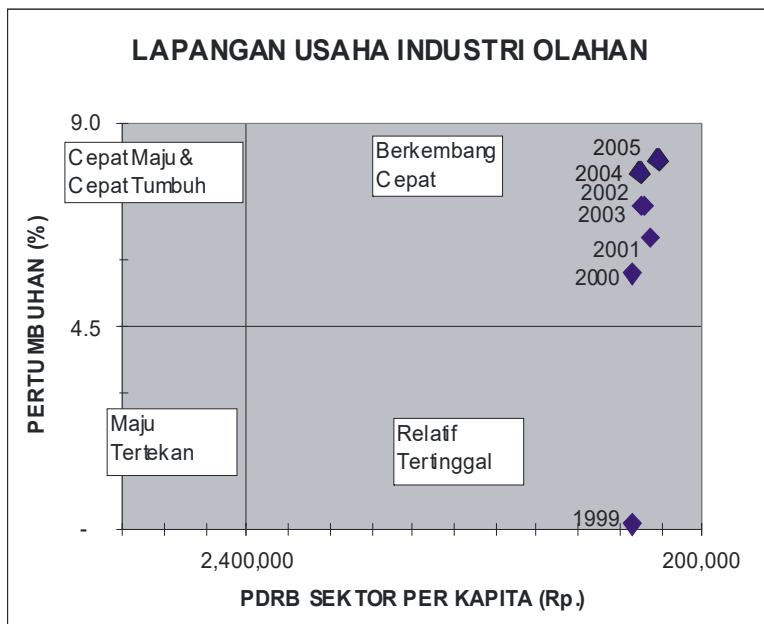
Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 35.057 jiwa yang didominasi oleh industri tekstil, pakaian jadi dan kulit sebanyak 12.751 orang; diikuti industri kimia, barang dari bahan kimia, karet dan plastik sebanyak dengan tenaga kerja 9.951 orang.

Hasil-hasil industri pengolahan di Kota Depok sebagian telah menjadi komoditas ekspor. Kota Depok diklasifikasikan sebagai kota yang tinggi ekspor industri manufakturnya diantara 182 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Ada 80 kabupaten/kota yang mendapat peringkat tinggi ekspor industri manufakturnya pada tahun 1990, empat diantaranya dari DKI Jakarta dan Jawa Barat, yaitu: Kabupaten Karawang, Kotamadya Jakarta Pusat, Kota Tangerang dan Kota Depok.

Pada tahun 1999, terdapat 76 kabupaten/kota yang tergolong tinggi ekspor industri manufakturnya, lima diantaranya dari DKI Jakarta dan Jawa Barat, yaitu: Kota Bogor, Kotamadya Jakarta Barat, Kotamadya Jakarta Pusat, Kota Bekasi dan Kota Depok. Pada tahun 2006, ekspor industri manufaktur Kota Tangerang menjadi sangattinggi, Kota Bogor dan Kota Bekasi menurun, sedangkan Kota Depok stabil.

Sejak tahun 2001 sampai dengan 2005, rata-rata pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan di Kota Depok berkembang cepat dibandingkan Jawa Barat yakni diatas 5% per tahun (ADHK 2000), sementara Jawa Barat hanya 4,5% per tahun. Meskipun lapangan usaha industri pengolahan di Kota Depok berkembang cepat, namun PDRB lapangan usaha ini masih dibawah PDRB Jawa Barat, yaitu Rp. 1.376.119,- per kapita (ADHK 2000) sedangkan rata-rata PDRB lapangan usaha industri pengolahan di Jawa Barat adalah Rp. 2.400.000,- per kapita. Secara grafis, perbandingan lapangan usaha industri pengolahan Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Grafik 2.6**.

Grafik 2.6. Posisi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kota Depok



Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok yang berasal dari lapangan usaha industri pengolahan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.9**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha industri pengolahan Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.9. PDRB Kota Depok (ADHK 2000) dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Industri Pengolahan	1.436.273,00	1.559.431,51	1.671.866,52	1.793.348,32	1.954.749,67
Industri Gas	-	-	-	-	-
3.1.1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
3.1.2 Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
Industri non Migas	1.436.273,00	1.559.431,51	1.671.866,52	1.793.348,32	1.954.749,67

Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

Tabel 2.10. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam persen)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Industri Pengolahan	38,87	39,78	40,13	40,45	41,23
Industri Gas	-	-	-	-	-
3.1.1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
3.1.2 Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
Industri non Migas	38,87	39,78	40,13	40,45	41,23

Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

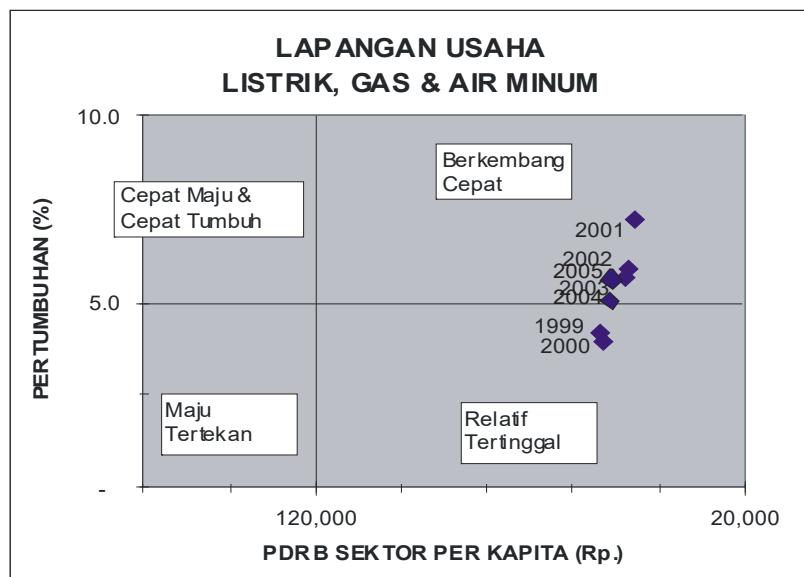
B. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM

Industri energi listrik di Kota Depok pada tahun 2006 memiliki jumlah pelanggan sebesar 282.959 pelanggan, energi yang terjual sebesar 755.699.105 Kwh dan daya tersambung 436.792.844 VA. Jumlah energi listrik terjual menurut kelompok pelanggan: rumah tangga 455.737.273 kwh, industri 134.246.20 kwh, kantor niaga (tarif usaha) 101.196.369 kwh, serta sosial dan pemerintahan 64.519.267 kwh.

Penyediaan air minum di Kota Depok sampai dengan tahun 2007 masih dikelola oleh PDAM Kabupaten Bogor dan KPS Air Bersih. Pada tahun 2006, jumlah pelanggan PDAM di Kota Depok 40.027 pelanggan (SL) dan besarnya pemakaian PDAM adalah 12.238.584 meter kubik.

Ditinjau dari rata-rata pertumbuhan lapangan usaha listrik, gas & air minum Kota Depok berkembang cepat dibandingkan Jawa Barat. Sejak tahun 2003 sampai dengan 2005 pertumbuhan lapangan usaha listrik, gas & air minum di Kota Depok selalu diatas 5% per tahun (ADHK 2000). PDRB lapangan usaha listrik, gas & air minum di Kota Depok pada tahun 2005 sebesar Rp. 157.837,97 juta (ADHK 2000). Secara grafis, perbandingan lapangan usaha listrik, gas & air minum Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Grafik 2.7.**

Grafik 2.7. Posisi Lapangan Usaha Listrik, Gas & Air Minum Kota Depok



Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok yang berasal dari lapangan usaha listrik, gas & air minum adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.11**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha listrik, gas & air minum Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 2.12**.

Tabel 2.11. PDRB Kota Depok (ADHK 2000) dari Lapangan Usaha Listrik, Gas & Air Minum (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Listrik, Gas dan Air Minum	126.236,53	131.126,70	138.496,57	146.341,60	157.837,97
Listrik	120.039,19	124.226,17	131.170,41	138.560,03	146.873,63
Gas					
Air Bersih	6.197,34	6.900,53	7.326,16	7.781,57	10.964,34

Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

Tabel 2.12. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Listrik, Gas & Air minum (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam persen)

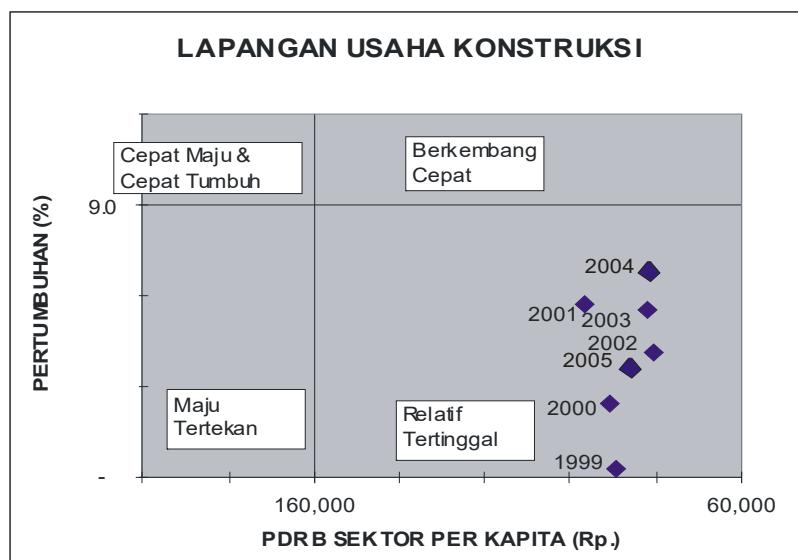
Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Listrik, Gas dan Air Minum	3,42	3,35	3,33	3,31	3,33
Listrik	3,25	3,17	3,15	3,13	3,10
Gas	-	-	-	-	-
Air Bersih	0,17	0,18	0,18	0,18	0,23

Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

C. BANGUNAN/KONSTRUKSI

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan pembangunan fisik (konstruksi), baik yang digunakan sebagai tempat tinggal (pemukiman) atau sarana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi maupun perorangan.

Grafik 2.8. Posisi Lapangan Usaha Konstruksi Kota Depok dibanding Jawa Barat



Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

Secara grafis, perbandingan lapangan usaha bangunan/konstruksi Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Grafik 2.8**. Lapangan usaha bangunan/konstruksi Kota Depok masih tertinggal dengan Jawa Barat, baik rata-rata pertumbuhannya maupun rata-rata PDRB. Sejak tahun 2002 sampai dengan 2005, pertumbuhan lapangan usaha bangunan/konstruksi di Kota Depok berada dibawah 6% per tahun (ADHK 2000), padahal rata-rata pertumbuhan lapangan usaha bangunan/konstruksi di Jawa Barat mencapai 9% per tahun. PDRB lapangan usaha bangunan/konstruksi di Kota Depok tahun 2005 sebesar Rp. 289.734,93 juta (ADHK 2000).

Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok yang berasal dari Lapangan usaha bangunan dan konstruksi adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.13**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha bangunan dan konstruksi Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 2.14**.

Tabel 2.13. PDRB (ADHK 2000) Kota Depok dari Lapangan Usaha Konstruksi (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Bangunan/Konstruksi	245.483,27	254.911,08	269.033,15	284.053,85	289.734,93

Sumber : Olah Data Kota Depok dalam Angka (BPS), 2006

Tabel 2.14. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Konstruksi (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam persen)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Bangunan/Konstruksi	6,64	6,50	6,46	6,41	6,11

Sumber : Olah Data Kota Depok dalam Angka (BPS), 2006

2.2.1.3. SEKTOR TERSIER

A. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

Sebagai kota yang tinggi ekspor industri manufakturingnya selama dasawarsa 1990–1999. Pada tahun 2003, nilai ekspor Kota Depok masih tercatat cukup tinggi. Beberapa komoditas di Kota Depok sampai bulan Juni 2006 tercatat nilai ekspornya sebesar USD 227,829,906. Jumlah perusahaan perdagangan yang mempunyai SIUP tahun 2006 sekitar 1.196 perusahaan.

Arus kunjungan migran sirkuler dan wisatawan ke Kota Depok cukup banyak seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi, terutama operasional perdagangan dan jasa di Kota Depok. Dalam rangka memenuhi permintaan sekaligus menjamin keamanan/kenyamanan pengunjung yang datang, maka pengusaha telah menyediakan hotel dan akomodasi lainnya di Kota Depok. Namun jumlah hotel dan akomodasi lainnya tidak berkembang secara pesat, mengingat Kota Depok sangat dekat dengan Ibukota Jakarta yang merupakan pusat niaga dan jasa terbesar di Indonesia dengan fasilitas dan akomodasi yang lebih baik dan lebih banyak. Pada tahun 2006 di Kota Depok tersedia 182 kamar hotel, terdiri dari 78 kamar hotel bintang 3; 54 kamar hotel bintang 2 dan 50 kamar hotel melati.

Ditinjau dari rata-rata pertumbuhan lapangan usaha perdagangannya, hotel & restoran Kota Depok berkembang cepat dibandingkan Jawa Barat. Sejak tahun 2001 sampai dengan 2005, hotel & restoran di Kota Depok berada di atas 5% per tahun (ADHK 2000), kecuali tahun 2002. Capaian ini berada diatas Jawa Barat yang hanya mencapai 4% per

tahun. Dalam segi PDRB per kapita, lapangan usaha perdagangan, hotel & restoran di Kota Depok rata-rata mencapai Rp. 970.488,- (ADHK 2000) selama lima tahun terakhir ini, sedangkan rata-rata di Jawa Barat sebesar Rp. 1.000.000,- per kapita. Secara grafis, perbandingan lapangan usaha perdagangan, hotel & restoran Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Grafik2.9**.

Grafik 2.9. Posisi Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel & Restoran Kota Depok dibanding Jawa Barat



Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok yang berasal dari lapangan usaha perdagangan, hotel & restoran adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.15**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha perdagangan, hotel & restoran Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 2.16**.

Tabel 2.15. PDRB dari Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel & Restoran (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Perdagangan, Hotel Restoran	1.123.483,29	1.153.513,37	1.221.192,62	1.293.418,42	1.371.884,46
Perdagangan besar dan eceran	915.386,46	937.596,39	992.914,58	1.051.953,48	1.125.590,22
Hotel	5.579,38	5.923,77	5.958,23	5.993,16	6.113,02
Restoran	202.517,45	209.993,21	222.319,81	235.471,78	240.181,22

Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

Tabel 2.16. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel & Restoran (ADHK 2000) di Kota Depok

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Perdagangan, Hotel Restoran	30,41	29,42	29,31	29,17	28,94

Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

B. ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

Salah satu potensi Kota Depok adalah di sektor perhubungan. Lokasi Kota Depok yang dekat dengan ibukota dan banyaknya penduduk yang bekerja di Ibukota Jakarta, menyebabkan meningkatnya kegiatan perjalanan *commuter* (pulang-pergi). Sub sektor angkutan yang tersedia di Kota Depok hanya angkutan darat, salah satunya adalah angkutan massal kereta api. Pada angkutan massal kereta api, jumlah penumpang kereta api yang menggunakan stasiun yang berada di Kota Depok sebesar 12.964.072 orang dan nilai karcis yang terjual sebesar Rp. 21.617.220.000,-.

Pada sub-sektor komunikasi yang mencakup kegiatan pos dan giro, telekomunikasi dan jasa penunjang telekomunikasi hingga tahun 2006 tercatat jumlah kantor pos pembantu di Kota Depok sebanyak 14 buah dengan pendapatan sebesar Rp. 5.169.037.227,-.

Lapangan usaha angkutan dan komunikasi Kota Depok relatif tertinggal dibandingkan Jawa Barat, baik rata-rata pertumbuhannya maupun rata-rata PDRB per kapitanya. Sejak tahun 2001 sampai dengan 2005 pertumbuhannya selalu dibawah 8% per tahun (ADHK 2000), kecuali tahun 2002 mencapai 15.38%, padahal rata-rata pertumbuhan di Jawa Barat mencapai 10% per tahun. Rata-rata PDRB per kapita lapangan usaha angkutan dan komunikasi di Kota Depok mencapai Rp. 176.101,- (ADHK 2000), sedangkan rata-rata PDRB lapangan usaha angkutan dan komunikasi di Jawa Barat mencapai Rp. 250.000,- per kapita. Secara grafis, perbandingan lapangan usaha angkutan dan komunikasi Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Grafik 2.10**.

Grafik 2.10. Posisi Lapangan Usaha Angkutan & Komunikasi Kota Depok dibanding Jawa Barat



Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok yang berasal dari lapangan usaha angkutan dan komunikasi adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.17**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha angkutan dan komunikasi Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 2.18**.

Tabel 2.17. PDRB dari Lapangan Usaha Angkutan & Komunikasi (ADHK 2000) di Kota Depok

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Angkutan dan Komunikasi	182.490,44	210.548,51	225.171,34	240.540,53	259.654,73

Sumber : Olah Data Kota Depok dalam Angka (BPS), 2006

Tabel 2.18. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Angkutan & Komunikasi (ADHK 2000) di Kota Depok

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Angkutan dan Komunikasi	4,94	5,37	5,40	5,43	5,48

Sumber : Olah Data Kota Depok dalam Angka (BPS), 2006

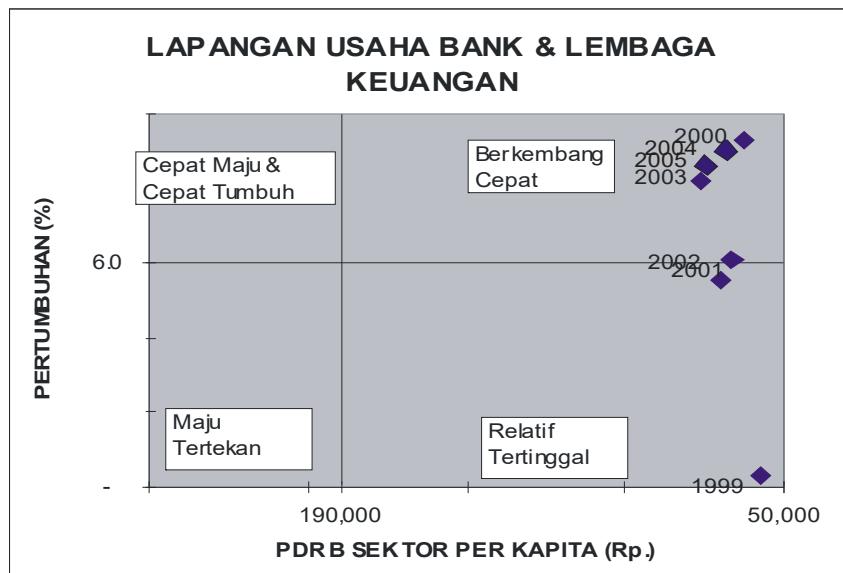
C. BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Sub-sektor bank mencakup kegiatan yang memberikan jasa keuangan pada pihak lain seperti menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman, baik jangka pendek, menengah maupun panjang, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga dan sebagainya. Untuk pelayanan jasa keuangan tahun 2006, di Kota Depok terdapat lembaga keuangan formal bank sebanyak 21 bank dengan rincian: bank pemerintah 4 buah, bank swasta nasional 15 buah, bank daerah 2 buah, dan besaran dana yang ada seluruhnya Rp. 14.468.763.000,-.

Termasuk dalam sub-sektor lembaga keuangan lainnya adalah lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan, dan jasa perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank meliputi kegiatan asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi, simpan pinjam, lebaga pembiayaan, pedagang valuta asing, pasar modal dan jasa penunjang seperti pialang, penjamin emisi, dan sebagainya. Sewa bangunan meliputi kegiatan usaha persewaan bangunan, dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan, serta usaha persewaan tanah persil. Jasa Perusahaan meliputi kegiatan memberikan jasa hukum (advokat dan notaris), jasa akutansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan peyajian data, jasa bangunan/arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran serta jasa persewaan mesin dan peralatan.

Dibandingkan lapangan usaha bank & lembaga keuangan rata-rata di Jawa Barat, dari segi rata-rata pertumbuhannya selama empat tahun terakhir ini, lapangan usaha bank & lembaga keuangan di Kota Depok berkembang cepat. Rata-rata pertumbuhan lapangan usaha bank & lembaga keuangan di Jawa Barat sebesar 6% per tahun, sedangkan di Kota Depok diatas 7% per tahun (ADHK 2000), namun pada tahun 2005 menurun menjadi 5.69%. Rata-rata PDRB lapangan usaha bank & lembaga keuangan di Jawa Barat adalah Rp. 190.000,- per kapita, sedangkan di Kota Depok pada periode yang sama hanya mencapai Rp. 131.595,- dan rata-rata selama lima tahun (2001-2005)hanya Rp. 126.918,- (ADHK 2000). Secara grafis, perbandingan lapangan usaha bank & lembaga keuangan Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Grafik2.11**.

**Grafik 2.11. Posisi Lapangan Usaha Bank & Lembaga Keuangan
Kota Depok dibanding Jawa Barat**



Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

Perkembangan PDRB (atas dasar harga konstan 1993) Kota Depok yang berasal dari Lapangan usaha bank dan lembaga keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.19**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha bank dan lembaga keuangan Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 2.20**.

Tabel 2.19. PDRB Lapangan Usaha Bank dan Lembaga Keuangan (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Bank & Lembaga Keuangan Lainnya	139.448,38	148.777,26	160.664,75	173.635,35	183.523,01
Bank	4.097,04	4.816,42	5.114,07	5.432,57	5.867,18
Lembaga Keuangan bukan Bank	567,66	594,81	631,75	671,29	704,85
Sewa Bangunan	116.341,09	124.006,79	134.720,98	146.451,66	155.238,76
Jasa Perusahaan	18.442,59	19.359,24	20.197,95	21.079,83	21.712,22

Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

Tabel 2.20. Persentase PDRB Lapangan Usaha Bank dan Lembaga Keuangan (ADHK 2000) di Kota Depok

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Bank & Lembaga Keuangan Lainnya	3,77	3,80	3,86	3,92	3,87

Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

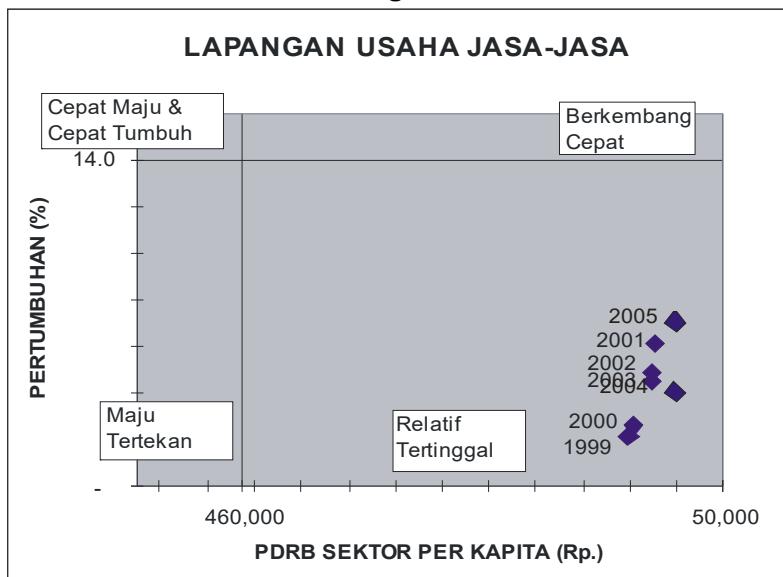
D. JASA-JASA

Lapangan usaha jasa-jasa dikelompokkan kedalam dua sub-sektor yaitu: sub-sektor jasa pemerintahan umum dan sub-sektor jasa swasta. Jasa pemerintahan umum Kota Depok meliputi kegiatan jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok untuk kepentingan rumah tangga dan masyarakat umum. Sebagai contoh jasa pemerintahan umum, pertahanan dan keamanan, pelayanan publik dan sebagainya. Nilai tambah jasa pemerintahan umum dihitung dengan pendekatan pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai.

Jasa swasta meliputi kegiatan jasa yang dilaksanakan pihak swasta, misalnya jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga. Jasa sosial kemasyarakatan mencakup kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, palang merah, panti asuhan, panti wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat, rumah ibadat dan sejenisnya yang dikelola oleh swasta. Jasa hiburan dan rekreasi mencakup kegiatan jasa bioskop, kebun binatang, taman hiburan, pub, bar, karaoke, diskotik, kolam renang dan kegiatan hiburan lainnya. Jasa perorangan dan rumah tangga mencakup kegiatan yang pada umumnya melayani perorangan dan rumah tangga seperti jasa revarasi, pembantu rumah tangga, tukang cukur, tukang jahit, semir sepatu, salon kecantikan dan sejenisnya.

Dibandingkan lapangan usaha jasa-jasa rata-rata Jawa Barat, baik dari segi rata-rata pertumbuhannya maupun PDRB per kapita, selama lima tahun terakhir (2001-2005), lapangan usaha jasa-jasa di Kota Depok relatif tertinggal. Rata-rata pertumbuhan lapangan usaha jasa-jasa di Jawa Barat adalah 14% per tahun, sedangkan pertumbuhan lapangan usaha jasa-jasa di Kota Depok hampir selalu dibawah 8% per tahun (ADHK 2000). Demikian juga rata-rata PDRB lapangan usaha jasa-jasa per kapita di Jawa Barat mencapai Rp. 460.000,- per kapita, sedangkan rata-rata PDRB lapangan usaha jasa-jasa per kapita di Kota Depok hanya Rp. 257.510,- (ADHK 2000). Secara grafis, perbandingan lapangan usaha jasa-jasa Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Grafik2.12**.

Grafik 2.12. Posisi Lapangan Usaha Jasa-jasa Kota Depok dibanding Jawa Barat



Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

Perkembangan PDRB (atas dasar harga konstan) Kota Depok yang berasal dari lapangan usaha jasa-jasa adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.21**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha jasa-jasa Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 2.22**.

Tabel 2.21. PDRB Lapangan Usaha Jasa-jasa (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Jasa-jasa	296.744,96	312.192,16	327.129,86	342.927,92	356.430,19
Pemerintahan Umum	142.386,67	153.475,27	160.657,91	168.235,35	176.647,12
Swasta	154.358,29	158.716,89	166.471,95	174.692,57	179.783,07
1. Sosial Kemasyarakatan	45.401,34	46.682,49	49.833,56	53.223,56	55.884,74
2. Hiburan & rekrasi	3.119,18	3.694,81	3.835,21	3.982,09	4.061,73
3. Perorangan & Rumah Tangga	105.837,77	108.339,59	112.803,18	117.486,92	119.836,60

Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

Tabel 2.22. Persentase PDRB Lapangan Usaha Jasa-jasa (ADHK 2000) di Kota Depok

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Jasa-jasa	8,03	7,96	7,85	7,73	7,52

Sumber : PDRB Kota Depok, 2006

2.2.2 SOSIAL BUDAYA

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, aspek sosial dan budaya di Kota Depok juga berkembang dengan pesat. Perkembangan sosial dan budaya di Kota Depok meliputi: kualitas kehidupan beragama, kesejahteraan sosial, pendidikan dan budaya.

Berdasarkan agama dan kepercayaan, penduduk Kota Depok pada tahun 2006 yang menganut agama Islam 91,94 %, selebihnya adalah Protestan 4,68%, Katolik 2,23%, Hindu 0,51%, Budha 0,63% dan Konghucu 0,01%. Jumlah tempat peribadatan di Kota Depok pada tahun 2006 yaitu 548 masjid, 1.139 mushola, 6 gereja Katolik, 121 gereja Protestan, dan 2 vihara.

Tingkatkesejahteraan sosial penduduk Depok dapat tercermin dari jumlah keluarga sejahtera yang ada di Kota Depok. Dari Total 26.823 keluarga yang ada di Kota Depok pada tahun 2006, sejumlah 7.684 keluarga diantaranya adalah keluarga pra-sejahtera dan 46.814 keluarga lainnya adalah keluarga sejahtera 1.

Aspek budayamerupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan kota. Seperti umumnya kota metropolitan, budaya masyarakat Depok relatif bersifat terbuka dan wilayahnya memiliki daya tarik ekonomis bagi para pendatang. Jika dilihat dari sisi etnis, masyarakat Kota Depok tampak cukup heterogen, dengan kategori penduduk asli dan pendatang. Pada saat ini kondisi sosial budaya masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial budaya metropolitan. Budaya masyarakat Depok cukup unik karena merupakan refleksi gabungan kultur desa dan kota. Kultur yang menjadi potensi lokal diantaranya dalam bentuk seni budaya Betawi yang merupakan aset Kota Depok yang perlu dipelihara.

Secara kelembagaan sosial budaya, tercermin dalam bentuk lembaga sosial kemasyarakatan, pada tahun 2006 di Kota Depok terdapat antara lain: 63 kelompok Karang Taruna, 351 Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan 87 organisasi sosial, serta banyak lagi organisasi sosial kemasyarakatan yang terus tumbuh seiring dengan semangat demokratisasi.

2.2.3 INDEKS GINI

Berdasarkan data indikator kesejahteraan masyarakat tahun 2006 (sumber: BPS, 2006), angka gini rasio di Kota Depok selama 2001-2005 rata-rata kurang dari 0,3. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapata perkapita cukup merata sebagaimana tercantum pada Tabel 2.23.

Tabel. 2.23. Gini Rasio dan Pendapatan yang Diterima Kelompok Masyarakat Bawah

	2001	2002	2003	2004	2005
Gini Rasio	0,152	0,121	0,2811	0,3141	0,199
% Pendapatan dari 40% kelompok bawah	13,73	11,03	13,65	20,10	7,06

2.2.4 KEMISKINAN

Kemiskinan Tidak hanya diartikan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut persoalan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Jumlah penduduk miskin di Kota Depok tahun 2006 berdasarkan 14 kriteria yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah 124.706 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sebesar 1.420.480, maka persentasi penduduk miskin Kota Depok sekitar 8,78 % atau persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 91,22%.

Tabel. 2.24. Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2006

NO.	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA (KK)	JIWA
1	Sawangan	5.173	21.235
2	Pancoranmas	6.496	28.232
3	Sukmajaya	5.148	23.642
4	Cimanggis	7.576	30.702
5	Beji	2.595	11.044
6	Limo	2.455	9.851
	KOTA DEPOK	29.443	124.706

Sumber: Survey Pemetaan Penduduk Miskin (Bappeda, 2006)

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pemerintahan adalah organisasi publik yang berfungsi mengelola pembangunan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai aspirasi dan kebutuhannya. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dibentuk susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Depok yang meliputi 23 Lembaga Pemerintah, terdiri atas: 1 Kepala Daerah, 1 Wakil Kepala Daerah, 1 organisasi Sekretariat Daerah, 1

organisasi Sekretariat DPRD, 13 organisasi Dinas, 2 organisasi Badan, 5 organisasi Kantor, dan 6 Kecamatan. Selain itu terdapat pula organisasi DPRD dan KPUD. Kondisi struktur organisasi pemerintah daerah ini bersifat fleksibel serta dapat menyesuaikan dengan regulasi dan standar yang dibuat oleh pemerintah pusat, serta menyesuaikan kebutuhan pemerintah kota, sehingga jumlah dan jenis organisasi perangkat daerah dapat diubah sesuai kondisi dan kebutuhan.

Pada tahun 2006 Kota Depok memiliki 6 kecamatan dengan 63 kelurahan yaitu: Kecamatan Sawangan 14 kelurahan, Pancoran Mas 11 kelurahan, Sukmajaya 11 kelurahan, Cimanggis 13 kelurahan, Beji 6 kelurahan dan Limo 8 kelurahan. Kedepan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat akan dikembangkan menjadi 11 (sebelas) kecamatan.

2.3.1. PENDIDIKAN

Pada tahun ajaran 2006/2007 di Kota Depok terdapat 362 buah SD, dengan jumlah murid 108.403 orang dan jumlah guru sekitar 4.657 orang dan SLTP berjumlah 137 sekolah dengan jumlah murid 57.839 orang, jumlah guru 3.117 orang. Di tingkat SLTA terdapat 105 sekolah dengan jumlah murid dan guru masing-masing 33.663 orang dan 2.546 orang. Secara umum kondisi sarana prasarana sekolah, terutama sekolah negeri masih jauh dari memadai (*sumber: BPS, 2006*).

Pada tahun 2005, penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun keatas memiliki ijazah tertinggi SLTA dan sederajat. 24,61%. Memiliki Ijazah tertinggi SLTA merupakan persentase terbesar dibanding jenjang pendidikan lainnya. Sedangkan menurut kemampuan berbahasa Indonesia, penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis huruf latin 79,95 %, huruf lainnya 0,17 %, bisa huruf latin dan huruf lainnya 18,58 % dan yang buta huruf 1,30 % (*sumber : BPS, 2006*).

Tabel. 2.25. Sumber Daya Pendidikan Kota Depok Tahun 2008

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH KELAS	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RATIO		
					KELAS/GURU	MURID/KELAS	MURID/GURU
1	Sekolah Dasar **)	3,150	5,954	145,919	0.53	46.32	24.51
	Kecamatan Limo	250	536	12,919	0.47	51.68	24.10
	Kecamatan Sawangan	352	675	15,438	0.52	43.86	22.87
	Kecamatan Cimanggis	714	1,460	36,701	0.49	51.40	25.14
	Kecamatan Sukmajaya	688	1,382	32,730	0.50	47.57	23.68
	Kecamatan Beji	513	585	12,546	0.88	24.46	21.45
	Kecamatan Pancoranmas	633	1,316	35,585	0.48	56.22	27.04

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH KELAS	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RATIO		
					KELAS/ GURU	MURID/ KELAS	MURID/ GURU
2	Sekolah Menengah Pertama **)	1,148	3,103	38,720	0.37	33.73	12.48
	Kecamatan Limo	70	144	2,403	0.49	34.33	16.69
	Kecamatan Sawangan	209	823	8,069	0.25	38.61	9.80
	Kecamatan Cimanggis	208	586	8,129	0.35	39.08	13.87
	Kecamatan Sukmajaya	240	636	8,210	0.38	34.21	12.91
	Kecamatan Beji	86	202	2,938	0.43	34.16	14.54
	Kecamatan Pancoranmas	335	712	8,971	0.47	26.78	12.60
3	Sekolah Menengah Atas *)	117	331	4,888	0.35	41.78	14.77

*) data sekolah negeri, **) data sekolah negeri dan swasta

Sumber: *Hasil Survey dan Analisi Kebutuhan Sumber Daya Pendidikan Kota Depok Tahun 2008 (Bappeda Kota Depok)*

Hasil Survey dan Analisi Kebutuhan Sumber Daya Pendidikan Kota Depok Tahun 2008 (Tabel II.25) menunjukkan bahwa ditemui adanya kesenjangan antara jumlah rombongan belajar dengan ketersediaan kelas. Akibatnya banyak terdapat sekolah yang menunjukkan rasio murid kelas yang melebihi ketentuan. Solusi yang sudah dilakukan oleh masing-masing sekolah yang mengalami kondisi tersebut adalah dengan menggunakan sistem shift, yaitu murid masuk pagi dan masuk siang. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua murid memperoleh pelayanan pembelajaran pada pagi hari. Dalam jangka panjang sistem shift ini dapat mengganggu kenyamanan belajar karena murid tidak seluruhnya dapat belajar pada pagi hari.

2.3.2. KESEHATAN

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Depok tersedia beberapa fasilitas kesehatan. Tahun 2006 di Kota Depok terdapat 12 rumah sakit, 27 Puskesmas, 10 Puskesmas Pembantu, dan 1064 dokter praktik dengan rincian: 420 dokter umum, 238 dokter gigi, 416 dokter spesialis. Dengan tidak adanya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok menyebabkan tidak adanya rumah sakit rujukan bagi Puskesmas untuk dapat dirawat dengan pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Saat ini pelayanan kesehatan diperoleh dari rumah sakit swasta melalui media kerjasama dengan pemerintah daerah, serta mengandalkan rujukan Rumah Sakit Umum di Kota Bogor dan Jakarta.

Derajat kesehatan di Kota Depok dapat diamati dari hasil perhitungan angka kematian bayi (AKB), angka harapan hidup (AHH) dan Angka Kesakitan (Morbiditas). Angka kematian bayi pada tahun 2003 mencapai 33,38 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2004 sebesar 29,28 per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2005 sebesar 28,07 per 1000 kelahiran

hidup. Terjadi penurunan AKB sebesar 5,31 persen dari tahun 2003 ke 2005, penurunan ini cukup berarti karena AKB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui derajat kesehatan ibu dan anak di Kota Depok. Namun masih cukup tinggi dan masih harus diturunkan lagi. Angka harapan hidup di Kota Depok cenderung naik setiap tahun sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Angka kesakitan memperlihatkan gangguan kesehatan penduduk. Gangguan kesehatan yang dialami penduduk Kota Depok tahun 2005(Inkesra, 2006) sebesar 17,06 persen oleh sakit pilek, 15,46 persen oleh sakit batuk, 12,70 persen oleh sakit panas, sakit lainnya 5,69 persen.

Tabel. 2.26. Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup di Kota Depok Tahun 2001-2006

Tahun	Angka Kematian Bayi	Angka Harapan Hidup
2001	44,67	69,73
2002	44,20	71,80
2003	33,38	71,96
2004	29,28	72,17
2005	28,07	72,97
2006	27,99	73,03

Sumber: BPS (Indikator Kesejahteraan Masyarakat 2001-2006)

2.3.3. FASILITAS PERUMAHAN

Tingkat kenyamanan rumah berkaitan dengan adanya fasilitas perumahan yang memadai. Salah satu fasilitas dasar perumahan adalah luas lantai yang memadai untuk kebutuhan pengaturan hidup sehari-hari. Luas lantai hunian sangat penting sebagai salah satu indikator kesejahteraan. Semakin sempit luas lantai rumah cenderung dianggap kurang sehat.

Luas lantai rumah di Kota Depok pada tahun 2005 sangat bervariasi. Luas lantai kurang dari 20 m² dihuni sekitar 1,9 % rumah tangga; sekitar 17,71 % rumah tangga menempati rumah dengan luas lantai 20 m² – 49 m². Rumah tangga yang menempati rumah dengan luas 50 m² – 99 m² sebanyak 46,43% dan sisanya sebanyak 33,96% menempati rumah dengan luas diatas 99 m². Secara umum sebagian besar rumah tangga di Kota Depok menempati rumah dengan ukuran antara 50 m²-99 m².

Tabel. 2.27. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai di Kota Depok Tahun 2002-2005

Luas Lantai	2002	2003	2004	2005
	%	%	%	%
<20	1,43	1,57	1,58	1,90
20-49	23,10	17,94	20,69	17,71
50-99	50,51	50,88	50,62	46,43
100-149	17,92	19,75	19,40	23,13
150+	7,04	9,86	7,71	10,83
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS 2006 (Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2006)

Fasilitas perumahan lainnya adalah jenis atap rumah, jenis lantai rumah, jenis dinding rumah, fasilitas jambanan fasilitas penerangan. Pada tahun 2006, 31,20 % rumah beratap seng/asbes, 65,95% beratap genteng, dan 2,57 % beratap beton. Jenis lantai rumah bukan tanah di Kota Depok sebesar 95,45% dan jenis dinding yang terluas adalah tembok sebesar 98,29%. Fasilitas jamban sebesar 89,67% adalah milik sendiri, 7,96% milik bersama, 0,85 % jamban umum dan 1,51 % lainnya. Fasilitas penerangan rumah sebesar 99,86 % rumah tangga menggunakan listrik PLN.

Kepemilikan rumah merupakan salah satu indikasi kemampuan ekonomi penduduk. Berdasarkan Tabel II.28 sebesar 67,69 % penduduk tinggal dirumah milik sendiri dan 20,37% masih mengontrak.

Tabel. 2.28. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal di Kota Depok Tahun 2006

Status Penguasaan	dalam (%)
Milik Sendiri	67,69
Kontrak	20,37
Sewa	1,72
Bebas Sewa	0,14
Dinas	2,28
Milik orang tua/sanak/saudara	7,67
lainnya	0,13
Jumlah	100,00

Sumber : BPS 2007 (Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok Tahun 2007)

Percentase rumah tangga menurut sumber air bersih di Kota Depok Tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel II.28. Rumah tangga yang menggunakan air kemasan menjadi 10,39 % pada tahun 2006. Rumah tangga yang menggunakan air ledeng turun menjadi 13,53% pada tahun 2006. Rumah tangga yang menggunakan pompa naik menjadi 56,55 % pada tahun 2006. Masih terdapat rumah tangga yang menggunakan sumur ta terlindungi sebesar 2,56, kondisi ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan perhatian yang serius untuk menyediakan fasilitas air bersih di Kota Depok.

Tabel. 2.29. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Bersih di Kota Depok Tahun 2002-2006

Sumber Air Bersih	2002	2003	2004	2006
	%	%	%	%
Air Kemasan	0,78	1,41	3,60	10,39
Leding	21,80	14,40	16,60	13,53
Pompa	45,46	60,22	52,30	56,55
Sumur Terlindungi	24,65	12,67	17,20	10,83
Sumur Tak Terlindungi	6,23	10,83	9,70	2,56
Mata Air Terlindungi	0,77	0,31	0,60	6,01
Mata Air Tak Terlindungi	0,22	0,00	0,00	0,13
Lainnya	0,00	0,16	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS 2007 (Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok Tahun 2007)

2.3.4. FASILITAS PERSAMPAHAN

Produksi sampah di Kota Depok sebesar 2,65 liter/perorang/hari, dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 sebesar 1.420.480 jiwa maka diperkirakan jumlah timbulan sampah perhari rata-rata adalah 3.764 m³/hari. Jumlah timbulan sampah yang sudah dikelola/diangkut adalah 1.281 m³/hari, hal ini berarti cakupan pelayanan sampah baru mencapai 34,03% atau baru melayani 483.396 jiwa (Kajian Pengelolaan Persampahan Kota Depok, 2007). Prasarana pengangkutan sampah di Kota Depok terdiri dari 38 unit TPS dan 1 TPA.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pola Konsumsi

Tolok ukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Tingkat pendapatan dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Pendapatan yang rendah menunjukkan rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga pemenuhan konsumsi yang bersifat primer (makanan) menjadi pilihan yang utama. Terbatasnya penghasilan berpengaruh pula terhadap rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Pengeluaran rumah tangga untuk pemenuhan konsumsi dibedakan menjadi dua yaitu: pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan (Non Makanan). Semakin besar pengeluaran untuk non makanan, berarti tingkat kesejahteraan semakin baik, artinya bahwa semakin tinggi pendapatan maka akan semakin kecil porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan. Tingkat kesejahteraan meningkat bila pengeluaran untuk non makanan sudah lebih dari 60 persen. Sehingga pola pengeluaran rumah tangga dapat mencerminkan besar dan kecilnya daya beli masyarakat.

Pola pengeluaran penduduk Kota Depok semakin membaik, sebagaimana tercantum pada Tabel II.30. selama kurun waktu 2001-2006 persentase pengeluaran untuk makanan cenderung turun dari 54,73 persen pada tahun 2001 menjadi 40,14 persen pada tahun 2006. Persentase untuk bukan makanan naik dari 45,27 persen pada tahun 2001 menjadi 59,86 persen pada tahun 2006. Rata-rata pengeluaran konsumsi total pada tahun 2006 sebesar Rp. 528.629,-.

Tabel 2.30. Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Untuk Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kota Depok Tahun 2001-2006

Tahun	Makanan (Rp.)	Makanan (%)	Bukan Makanan (Rp.)	Bukan Makanan (%)	Makanan+Bukan Makanan (Rp.)
2001	125.695	54,73	103.958	45,27	229.653
2002	181.259	54,87	149.073	45,13	330.332
2003	162.056	44,24	204.236	55,76	366.292
2004	190.211	42,27	259,809	57,73	450.020

Tahun	Makanan (Rp.)	Makanan (%)	Bukan Makanan (Rp.)	Bukan Makanan (%)	Makanan+Bukan Makanan (Rp.)
2005	197.905	38,30	318.850	61,70	516.755
2006	212.169	40,14	316.460	59,86	528.629

Sumber: *Indikator Kesejahteraan Masyarakat 2001-2006*

2.4.1.2. Penduduk Menurut Pengeluaran Perkapita Sebulan

Pada tahun 2006, kelompok pengeluaran 300.000 – 499.999 merupakan yang terbesar untuk pengeluaran perkapita penduduk yaitu sebesar 44,39 %. Terjadi peningkatan peningkatan pengeluaran rumah tangga di Kota Depok selama kurun waktu tahun 2004-2006, hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk di Kota Depok sudah berada pada tingkat kesejahteraan yang lebih merata. Hanya terdapat 1,56 % pada kelompok 150.000 – 199.999 dan 12,58 % pada kelompok 200.000 – 299.999 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31. Penduduk Menurut Pengeluaran Per kapita Sebulan di Kota Depok Tahun 2004 – 2006

Kelompok Pengeluaran	2004		2005		2006	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
Kurang dari 40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000 – 59.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.000 – 79.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.000 – 99.999	3.226	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000 – 149.999	52.333	3,95	14.756	1,08	4.688	0,33
150.000 – 199.999	106.100	8,01	77.588	5,65	22.159	1,56
200.000 – 299.999	344.823	26,04	277.256	20,21	178.696	12,58
300.000 – 499.999	453.432	34,24	527.464	38,44	630.550	44,39
500.000 dan lebih	364.538	27,52	475.076	34,62	584.385	41,14

Sumber: *Indikator Kesejahteraan Masyarakat 2001-2006*

2.4.2 Fasilitas Infrastruktur

2.4.2.1. Transportasi dan Komunikasi

Penduduk Kota Depok dalam menjalankan aktivitasnya menggunakan berbagai jenis moda transportasi. Moda transportasi yang paling banyak diminati adalah Kereta Api dikarenakan biayanya yang relatif murah dan terhindar dari kemacetan sehingga cepat sampai ditujuan. Jumlah penumpang kereta api diKota Depok sebesar 15.102.053 penumpang (Sumber: BPS, 2006).Moda transportasi selain kereta api yang banyak digunakan adalah sepeda motor, mobil pribadi, mobil penumpang umum (MPU) dan bis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.32.

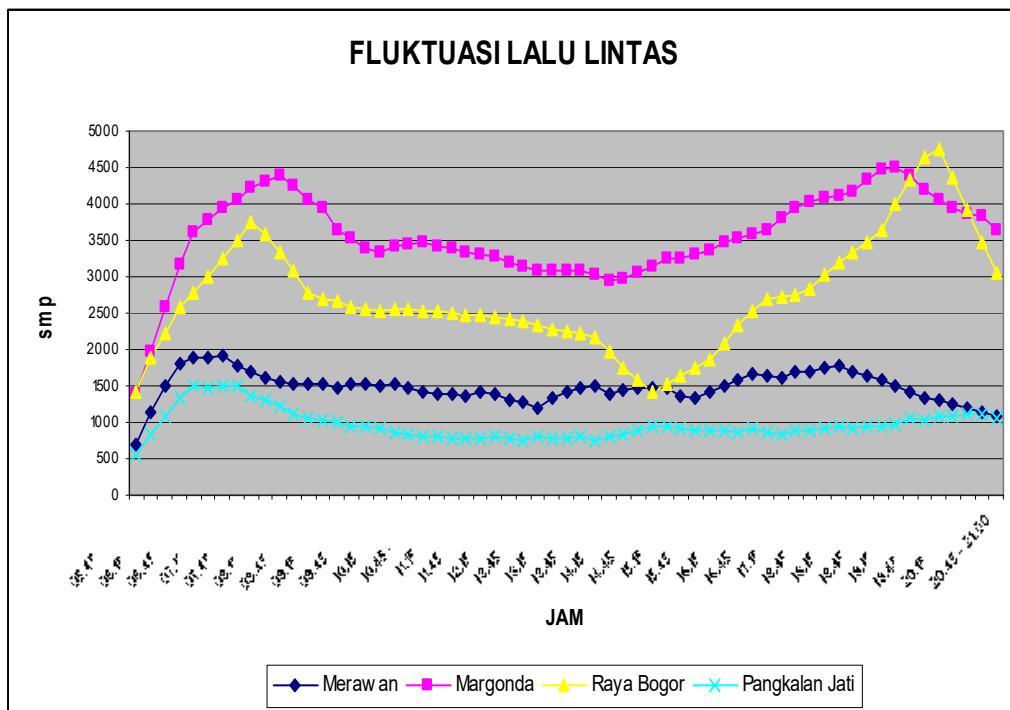
Tabel. 2.32. Komposisi Lalu Lintas

Ruas Jalan	Sepeda Motor (%)	Pribadi (%)	MPU (%)	Bus Sedang (%)	Bus Besar (%)	Truk Kecil (%)	Truk Sedang (%)	Truk Besar (%)	Kendaraan Tak Bermotor (%)
Jl. Merawan	56,33	33,54	5,98	0,12	0,01	1,75	1,26	0,05	0,96
Jl. Margonda	69,21	14,84	9,87	3,1	1,23	0,88	0,63	0,03	0,219
Jl. Raya Bogor	70,88	8,4	16,25	1,16	0,19	1,53	1,02	0,26	0,3
Jl. Pangkalan Jati	73,53	13,91	9,93	0,14	0,09	1,49	0,28	0,08	0,55
Jl. Juanda	68,22	22,68	3,13	0,2	0,14	3,31	1,49	0,06	0,77

Sumber : Tataran Transportasi Lokal Kota Depok (2006)

Penduduk Kota Depok sebagian besar beraktivitas di Jakarta, pagi hari berangkat ke Jakarta, malam harinya pulang ke Depok. Pola pergerakan penduduk ini menyebabkan fluktuasi volume lalu lintas pada lokasi-lokasi gerbang kota Depok, seperti jalan Merawan, jalan Pangkalan Jati, jalan Margonda dan jalan Raya Bogor cukup tinggi terutama pada pagi hari dan sore hari. Beberapa ruas jalan sudah mencapai rasio volume/kapasitas (V/C ratio) melebihi 0,8.Komposisi Lalu Lintas pada lokasi-lokasi gerbang kota Depok disajikan pada Grafik 2.13.

Grafik 2.13. Fluktuasi Lalu Lintas di Kota Depok



Sumber : Tataran Transportasi Lokal Kota Depok (2006)

Sementara itu kondisi jalan di Kota depok menurut data tahun 2005 adalah yang mantap sebesar 25 %, dan yang tidak mantap sebesar 75%. Jenis konstruksi yang digunakan adalah yang dibeton sepanjang 27.227 meter, yang di hotmix 245.577 meter, yang dipenetrasi 47.719 meter dan yang masih dalam tahap perkerasan 6200 meter (Sumber: BPS, 2006).

Tabel 2.33. Kondisi dan Panjang Jalan Menurut Kewenangan Tahun 2005 (meter)

Uraian	Negara	Propinsi	Kota	Jumlah
1. Jenis Konstruksi				
Perkerasan	-		6,200	6,200
Penetrasi	-		47,719	47,719
Hotmix	28,500	21,050	247,577	297,127
Beton	-	5,095	27,227	32,322
Jumlah	28,500	26,145	328,723	383,368
II. Kondisi Jalan				
Baik	28,500	26,145	19,550	74,195
Rusak Sedang	-	-	285,403	285,403
Rusak ringan	-	-	23,770	23,770
Rusak Berat		-	0	-
Jumlah	28,500	26,145	328,723	383,368

Uraian	Negara	Propinsi	Kota	Jumlah
III. Kelas Jalan				
Arteri	28,500	26,145	9,320	63,965
Kolektor	-	-	319,403	319,403
Jumlah	28,500	26,145	328,723	383,368

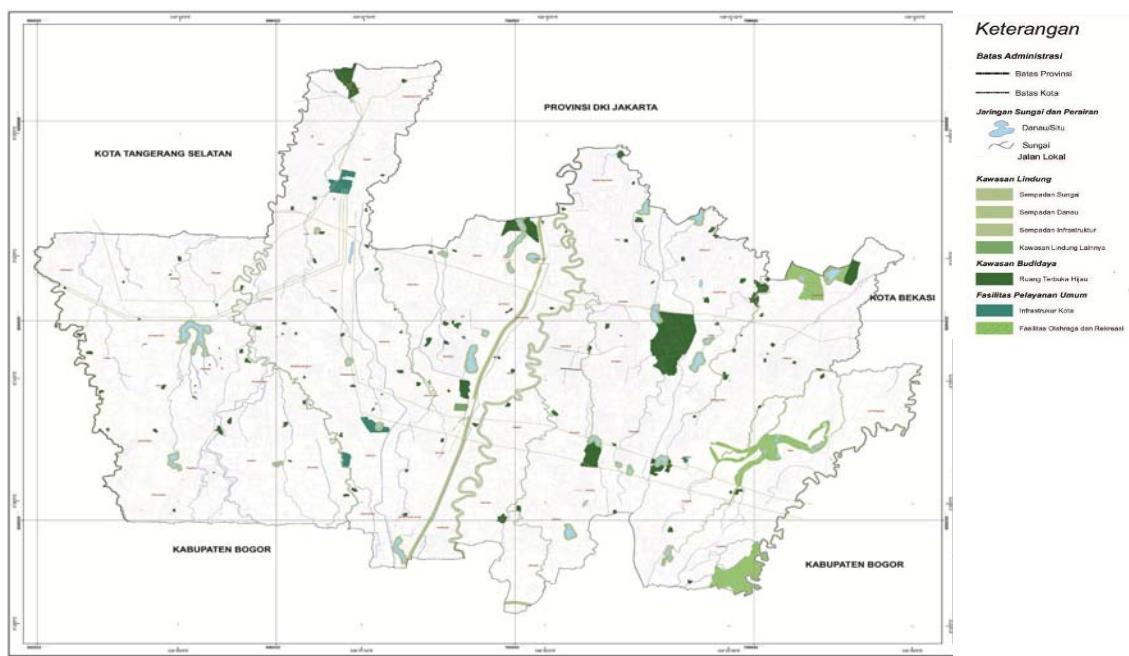
Sumber: BPS 2006 (*Depok Dalam Angka*)

Jumlah Kantor Pos Pembantu di Kota Depok sebanyak 18 buah dengan jumlah surat yang dikirm dari dalam atau luar sebanyak 2.799.347 sedangkan surat yang diterima dari dalam atau luar negeri sebanyak 2.582.540. Pada bulan September 2006 jumlah pelanggan Kancatel Depok sebesar 72771 dengan jumlah kapasitas sentral dan jumlah LIS (Line in service) 79.042 dan 75.064 (BPS, 2006).

2.4.2.2 Ruang Terbuka Hijau

Pada tahun 2000 kawasan terbuka (hijau) tercatat 53,83% dan kawasan terbangun 46,18% dari total wilayah Kota Depok. Pada tahun 2005, ruang terbuka (hijau) menyusut tinggal 50,54% dan kawasan terbangun meningkat lebih dari 3% menjadi 49,46%. Meningkatnya tutupan permukaan tanah terutama disebabkan oleh tekanan dari pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemukiman. Kebijakan pemerintah yang memposisikan Kota Depok sebagai wilayah pemukiman dan penyangga ibukota Jakarta menyebabkan kepadatan pemukiman yang berlebihan dibeberapa tempat di Kota Depok. Tekanan paling berat dialami oleh sumber daya air (sungai dan situ), yang menjadi tempat pembuangan limbah domestik berbentuk cair maupun padat. Alih fungsi lahan di sekitar situ menjadi pemukiman penduduk juga menambah tekanan berupa degradasi jumlah luasan situ-situ.

Gambar 2.6. Peta Kawasan Terbuka Hijau



Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

2.4.3. Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Ketertiban Masyarakat

Permasalahan sosial di Kota Depok semakin berkembang sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang menjadi daya tarik bagi masyarakat daerah untuk bermigrasi. Tingginya migrasi disatu sisi turut mendorong meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan disisi lain menciptakan lingkungan hidup perkotaan yang kurang kondusif dan meningkatkan kriminalitas.

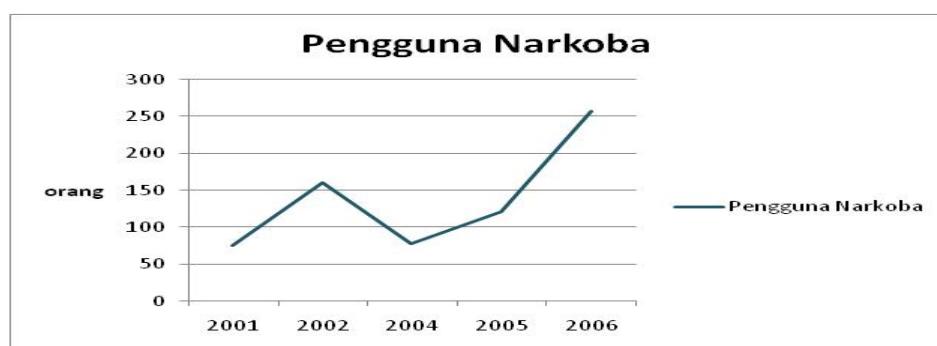
Kriminalitas dikelompokan kedalam empat katagori yaitu: 1) kejahatan konvensional (pencurian, perampukan, perkelahian), 2) kejahatan transnasional/lintas Negara, seperti narkoba, *illegal logging*, terorisme, dan lainnya, 3) kejahatan yang berkaitan dengan kerugian terhadap kekayaan negara (korupsi, *illegal mining*, *illegal fishing*), 4) kejahatan yang berimplikasi pada masalah-masalah rasial. Kriminalitas yang menonjol di Kota Depok dari tahun 2001-2006 (BPS) adalah kejahatan konvensional yaitu sebesar 11.800 kasus atau rata-rata sekitar 66,33%. Sedangkan penyalahgunaan narkoba sekitar 628 kasus atau rata-rata sekitar 3,53%. Tetapi dilihat dari kecendrungannya, pengguna narkoba mengalami peningkatan sekitar 200 % dari tahun 2001 (grafik 2.14), hal ini cukup memprihatinkan dan perlu dilakukan penanganan yang serius.

Tabel 2.34. Gangguan Ketertiban Masyarakat di Kota Depok Tahun 2001-2006

Jenis Gangguan	Jumlah kasus						Jumlah	%
	2001	2002	2003	2004	2005	2006		
Kriminalitas (Termasuk Narkoba)	1.529	2.458	2.753	2.151	2.209	2.014	13.114	95
Demo	23	26	78	78	65	123	5.362	-
Narkoba	75	160	-	77	121	257	690	5

Sumber : Depok Dalam Angka 2001-2006, diolah

Grafik 2.14. Pengguna Narkoba di Kota Depok Tahun 2001-2006

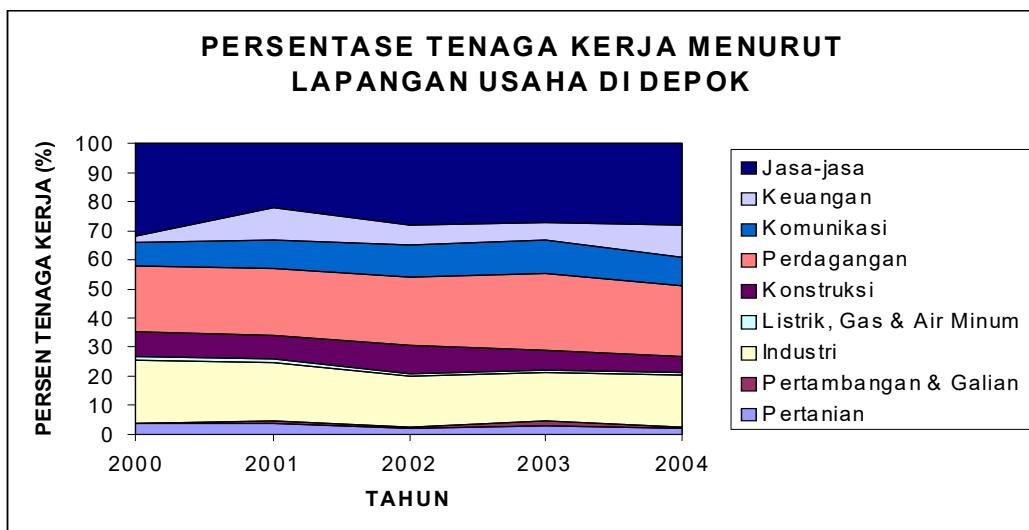


2.4.3.2 Ketenagakerjaan

Pertumbuhan upah dibandingkan dengan pertumbuhan nilai tambah per pekerja cenderung menurun selama lima tahun terakhir sehingga berdampak pada produktivitas kerja. Upah minimum pekerja disektor formal setiap tahun mengalami penyesuaian berupa kenaikan, namun nilai tambah produksi yang dihasilkan diperkirakan tidak sebanding dengan peningkatan upah pekerja. Penurunan produktivitas akan berdampak pada melemahnya daya saing yang sangat diperlukan dalam memperkuat *core competence* kota.

Menurut data ketenagakerjaan pada tahun 2005, penduduk Kota Depok yang bekerja adalah sebesar 46.02% dari total penduduk usia kerja (10 tahun ke atas), sedangkan yang belum mendapatkan kesempatan kerja (pengangguran) sebesar 8.48%. Angkatan kerja se Kota Depok adalah 617.288 jiwa atau sebesar 54.5% dari total penduduk usia kerja, dan sisanya sebesar 515.284 jiwa atau 45,5 % merupakan kelompok Bukan Angkatan Kerja.

Grafik 2.15. Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok



Sumber :Depok dalam Angka (BPS, 2005)

Grafik 2.15. diatas ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kota Depok sebagian besar bekerja di sektor tersier, yaitu sektor yang meliputi lapangan usaha perdagangan, angkutan, komunikasi, keuangan dan jasa-jasa. Pada tahun 2005, jumlah angkatan kerja yang terlibat disektor tersier ini mencapai 75.7% dari total angkatan kerja. Pada sektor sekunder, yaitu sektor yang meliputi lapangan usaha industri pengolahan, listrik, gas, air minum dan konstruksi, jumlah angkatan kerja yang terlibat sebanyak 22.31% dari total angkatan kerja. Sedangkan disektor primer, yaitu sektor yang meliputi lapangan usaha pertanian dan pertambangan, jumlah angkatan kerja yang terlibat hanya 1,44% dari total angkatan kerja.

2.4.3.3. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia di Kota Depok dilihat dari segi pendidikan relatif masih terbatas. Pada tahun 2005, jumlah penduduk berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 40% (432.076 jiwa), tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 24 % (262.859 jiwa), tamat SLTA 28 % (307.586 jiwa), sedangkan yang lulus perguruan tinggi atau diploma keatas sebesar 8 % (86.299 jiwa).

Tabel. 2.35. Penduduk 10 Tahun keatas Menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2005

Pendidikan Tertinggi	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sekolah Dasar (tamat /tidak tamat)	432.076	40
Tamat Sekolah Lanjutan Pertama	262.859	24
Tamat Sekolah Lanjutan Atas	307.586	28
Tamat Diploma keatas	86.299	8

Sumber: Depok Dalam Angka (BPS, 2005)

Komposisi angkatan kerja di Kota Depok sebagian besar diisi oleh lulusan Sekolah Lanjutan Atas sebesar 38 %, berpendidikan Sekolah Dasar sebesar 29 %, tamat Sekolah Lanjutan Pertama sebesar 21 %, dan tamat Diploma keatas sebesar 12 %. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut menyebabkan kurangnya daya serap pasar terhadap tenaga kerja yang ada. Akhirnya banyak angkatan kerja yang memilih pekerjaan sebagai operator atau pekerja kasar yaitu sekitar 34% atau 172.264 orang dibandingkan sebagai tenaga profesional/manager yaitu sekitar 13 % atau 68.482 orang (BPS, 2005).

Tabel. 2.36. Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2005

Pendidikan Tertinggi	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sekolah Dasar (tamat /tidak tamat)	166.371	29
Tamat Sekolah Lanjutan Pertama	123.659	21
Tamat Sekolah Lanjutan Atas	223.993	38
Tamat Diploma keatas	71.775	12

Sumber: Depok Dalam Angka (BPS, 2005)

BAB III

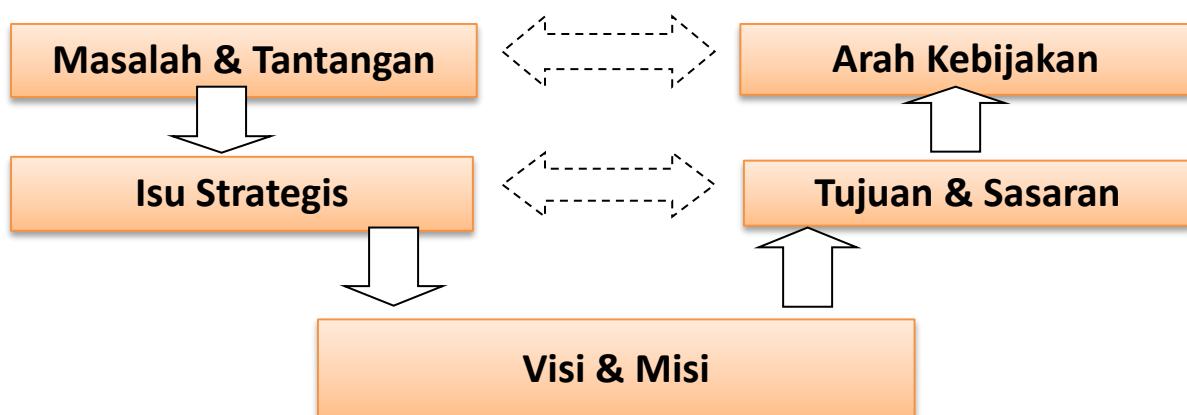
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan tantangan yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kota Depok diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal kota, regional maupun global dalam 7 (tujuh) tahun terakhir (2006-2014).

Perumusan permasalahan ini penting untuk menentukan sasaran pembangunan Kota Depok sampai dengan tahun 2025 untuk selanjutnya dijabarkan menjadi arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap III dan IV, sasaran pokok, indikator sasaran dan target kinerja sasaran sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara ilustratif, pola hubungan antara permasalahan wilayah, isu strategis, visi dan misi hingga arahan kebijakan dapat dilihat dalam Gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1 Pola Hubungan antara Permasalahan Kota Depok, Perumusan Visi Misi dan Perumusan Arah Kebijakan



3.1.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006-2025 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

Menurut Permendagri No. 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), Kota Depok yang merupakan kota otonom kawasan perkotaan besar, perlu menyediakan pelayanan minimal sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan, yaitu sebagai :

- 1) Tempat permukiman perkotaan. Pelayanan yang perlu disediakan adalah perumahan (rumah layak huni dan terjangkau, rumah susun), air minum (jaringan perpipaan air minum), drainase (jaringan system drainase), prasarana jalan lingkungan (jalan lingkungan, jalan setapak, penerangan jalan umum), persampahan (tempat pengolahan akhir, tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pembuangan sementara), air limbah (sistem pembuangan air limbah domestik secara terpusat, sistem pembuangan air limbah rumah tangga/setempat), energi (jaringan listrik dan gas), komunikasi dan informasi (jaringan telepon, telepon umum, stasiun relay, kantor pos, stasiun radio, website daerah), ruang terbuka hijau dengan luas minimal 30% luasan kawasan.
- 2) Pusat dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan. Pelayanan yang harus disediakan adalah perkantoran pemerintah, pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan, Balai Pelatihan Ketenagakerjaan, Pusat Informasi Ketenagakerjaan, Perizinan Ketenagakerjaan, Pelayanan perizinan, sarana monitoring polusi udara, laboratorium penelitian lingkungan, pos pemadam kebakaran, hidran umum, pusat evakuasi bencana, menjaga ketentraman dan ketertiban.
- 3) Pelayanan sosial. Pelayanan yang harus tersedia adalah Pendidikan (Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini, SD/MI/Paket A atau yang sederajat, SD berstandar internasional, SMP/MTs/Paket B atau yang sederajat, SMA/MA/Paket C atau yang sederajat, SMK atau yang sederajat, perpustakaan, museum dan pusat kebudayaan), kesehatan (posyandu, klinik bersalin, puskesmas pembantu, puskesmas/balai pengobatan, tempat praktek dokter, apotik/rumah obat, rumah sakit, rumah sakit bersalin), pelayanan sosial (panti asuhan, panti jompo, pusat rehabilitasi narkoba, pusat rehabilitasi masalah sosial, rumah singgah), rekreasi dan olahraga (balai pertemuan, gedung kesenian, tempat rekreasi, gelanggang olahraga, stadion), sarana peribadatan, taman pemakaman umum, dan taman makam pahlawan.

- 4) Pusat Kegiatan Ekonomi. Kota harus menyediakan pasar, pusat perdagangan, Rumah Potong Hewan dan Unggas, pergudangan, ruang untuk sektor informal dan UKM, jasa keuangan, pusat informasi daerah, penginapan, pelayanan transportasi meliputi jaringan jalan dan perambuan, terminal penumpang, terminal barang, fasilitas perlengkapan jalan (halte, trotoar), fasilitas pendukung keselamatan (pengujian, dll), jaringan pelayanan angkutan, pelayanan angkutan, dan manajemen rekayasa.

Berpedoman pada Standar Pelayanan Perkotaan tersebut, Kota Depok memiliki tugas menyediakan 4 fungsi pelayanan dasar perkotaan, fokus perhatian pembangunan daerah adalah pada infrastruktur dasar, ekonomi, sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kota Depok juga harus dibangun dengan azas berkelanjutan yaitu melalui keseimbangan dalam keterkaitan antara ekonomi, sosial dan lingkungan (ekologi) guna membangun masyarakat yang makmur dan berkualitas.

Capaian kinerja terhadap 4 fungsi pelayanan dasar tersebut sejak tahun 2006, yang merupakan tahun mulai berlakunya RPJPD Kota Depok 2006-2025, menghasilkan berbagai kemajuan baik dalam bidang prasarana dan sarana kota maupun dalam pencapaian Visi Kota sebagaimana ditunjukkan dalam perkembangan kesejahteraan masyarakat, yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, ekonomi dan indikator-indikator kesejahteraan lainnya. Namun di balik keberhasilan tersebut, seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangan wilayah perkotaan, terutama akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan komunikasi dan informatika yang pesat serta globalisasi, maka tantangan serta permasalahan yang dihadapi semakin kompleks dan tidak ringan. Pelayanan perkotaan di segala bidang berkejaran dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang kian meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga menuntut tatakelola kota yang makin adaptif, efisien dan efektif, termasuk dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah guna memenuhi kebutuhan anggaran yang makin besar.

Pengendalian dan evaluasi capaian kinerja RPJPD sampai dengan tahun 2014 menunjukkan bahwa Visi pembangunan jangka panjang Kota Depok yakni, “*Depok Kota Niaga Dan Jasa, Yang Religius Dan Berwawasan Lingkungan*”, masih cukup relevan. Namun demikian, pengendalian dan evaluasi kinerja makro Kota Depok yang dilakukan terhadap pelaksanaan RPJPD sampai dengan tahun 2014, menemukan berbagai perkembangan kota yang tidak sesuai lagi dengan prediksi pada RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025, antara lain sebagai berikut:

- a. Dari aspek Geomorphologi dan lingkungan hidup, tercatat bahwa tekanan terhadap Sumber daya lahan meningkat, Kualitas udara mulai menurun, RTH mulai menurun,

Pengolahan limbah industri 'belum' tersedia, Sampah meningkat dan yang tertangani belum optimal. Yang mendasar adalah bahwa RTH di tahun 2025 diproyeksikan akan lebih rendah dari 30%, sehingga perlu disiapkan langkah antisipasi dalam mengawal pertumbuhan pembangunan yang dilakukan.

- b. Dari aspek Demografi, Migrasi penduduk semakin tinggi dengan segala dampaknya, Laju penduduk masih tinggi, dan meningkat. LPP rata-rata dari tahun 2004 – 2013 sebesar 4.10%. Jumlah penduduk 2013 sebanyak 1.962.160 jiwa dengan seks ratio penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 101,89. Angkatan kerja meningkat, meski tidak sebanding dengan penyerapannya, angkatan kerja tahun 2013 sebanyak 123.118 (berpendidikan D3 ke atas 14,90%) Dengan prioritas di bidang pendidikan, diproyeksikan kualitas SDM Kota Depok akan semakin baik, SDM dengan pendidikan D3 ke atas diharapkan mencapai 75%.
- c. Dari aspek ekonomi dan sumber daya alam, tercatat bahwa PDRB Tahun 2013 mencapai Rp 23.26 Triliun, PAD tahun 2013 sdh mencapai Rp 581,107 Miliar, APBD Tahun 2013 sdh mencapai Rp Rp 2.4 Triliun, Kontribusi sektor primer paling kecil, tekanan pada sektor pertanian, kecuali beberapa komiditi (belimbing, Ikan hias). Kontribusi PDRB ADHK sektor primer tahun 2013 hanya 2,41% dari total PDRB, dan sepertinya akan semakin kecil dimasa mendatang. Kontribusi sektor sekunder, masih tinggi dan ada peningkatan (terutama industri pengolahan). Kontribusi PDRB sektor sekunder saat ini sekitar 49.76% dari total PDRB, dan kemungkinan meningkat terbuka. Kontribusi sektor tersier masih dominan, meskipun ada penurunan (angkutan dan komunikasi). Sektor tersier ini memberi kontribusi sekitar 47,48%. Dari tahun 2009-2013, perhotelan tidak mengalami perkembangan, digantikan oleh tumbuh kembangnya apartemen. Sektor Perbankan dan Jasa juga terjadi peningkatan. Di tahun 2025 sektor tersier masih akan menjadi sektor unggulan dengan kontribusi di atas 50%, khususnya sub sektor perdagangan dan pendidikan yang akan menjadi kompetensi inti Kota Depok.
- d. Dari aspek Sosial Budaya dan Politik, Tingkat kemiskinan Kota Depok di Tahun 2010 sebesar 2,75 % dan Tahun 2012 sebesar 2,46% dan pada Tahun 2013 sebesar 2,32% berada jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional (11,47 %) maupun Provinsi Jawa Barat (9,88 %). Artinya penduduk diatas garis kemiskinan pada Tahun 2013 sebesar 97,68%.
- e. Dari aspek pendidikan dan kesehatan, Jumlah SD di Kota Depok sebanyak 410 buah dan SMP/sederajat 177 buah. Dari jumlah sekolah tersebut, terdapat 279 SD Negeri

dan 19 SMP Negeri. Jika dihitung kapasitas daya tamping sekolah negeri di Kota Depok yaitu Kapasitas daya tamping SMPN baru mencapai 26,59% dari total siswa SMP di kota Depok, dan kapasitas daya tamping SMAN/SMKN baru mencapai 20,48% dari total siswa SMA di Kota Depok. Untuk Sarana Kesehatan di tahun 2013 terdapat 20 RS (1 RSUD Kelas B), 35 Puskesmas, 113 poliklinik, 4 Pustu. Dengan prioritas di bidang pendidikan, infratruktur ini diproyeksikan di tahun 2025 akan terus meningkat.

- f. Dari aspek pemerintahan, Pemekaran menjadi 11 Kecamatan dengan segala konsekuensinya

Dari data analisa pelaksanaan RPJPD tahap I dan Tahap II (sampai dengan tahun 2014), didapatkan prediksi serta estimasi yang disusun pada tahun 2006 untuk menggambarkan masa depan Kota Depok perlu dilakukan perbaikan karena tidak sesuai dengan perkembangannya secara faktual. Beberapa aspek dan parameter pembangunan juga perlu ditambahkan untuk lebih melengkapi data yang ada sehingga gambaran tentang kondisi Kota Depok ke depan diharapkan bisa lebih komprehensif.

3.1.2 KEKUATAN, TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN KOTA DEPOK TAHUN 2025

Berdasarkan gambaran kondisi wilayah dan perekonomian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, kondisi Kota Depok saat ini dan kedepan akan dibagi menurut kondisi geografis, demografis, sosial kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi.

3.1.2.1. ASPEK DEMOGRAFI

3.1.2.1.1. PERTUMBUHAN PENDUDUK

Pertumbuhan penduduk Kota Depok terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang makin besar. Proyeksi lama mengansumsikan pertumbuhan penduduk sebesar 3,5 %, namun secara faktual mencapai 4,27 % pada tahun 2010. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kota Depok menduduki ranking 8 dari kota-kota se Tanah Air (Tabel 3.1).

**Tabel 3.1 Kota Dengan Penduduk Lebih Dari 100.000 Jiwa
(Sensus Penduduk 2010)**

RANGKING	KOTA	PROVINSI	JUMLAH
1	Jakarta	Jakarta	9.607.787
2	Surabaya	Jawa Timur	2.765.487
3	Bandung	Jawa Barat	2.394.873
4	Bekasi	Jawa Barat	2.334.871
5	Medan	Sumatera Utara	2.097.610
6	Semarang	Jawa Tengah	1.890.984
7	Tangerang	Banten	1.798.601
8	Depok	Jawa Barat	1.738.570
9	Palembang	Sumatera Selatan	1.455.284
10	Makassar	Sumatera Selatan	1.338.663

Sumber : Sensus Penduduk, 2010

Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2013 mencapai 1.962.160 jiwa, terdiri atas laki-laki 990.286 jiwa (50,64%) dan perempuan 971.874 jiwa (49,36%). Dengan luas wilayah 200,29 km², maka kepadatan penduduk Kota Depok rata-rata 9.796 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk mencapai 3,35 %, termasuk sangat tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta yang hanya 1,42 % per tahun. Dengan laju pertumbuhan tersebut maka pada tahun 2025 penduduk Kota Depok diperkirakan mencapai 2.985.161 jiwa yang terdiri atas laki-laki 1.480.368 jiwa (49,59%) dan perempuan 1.504.793 jiwa (50,41%), sebagaimana tercantum pada table dibawah ini.

Tabel 3.2. Penduduk Kota Depok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2005-2025

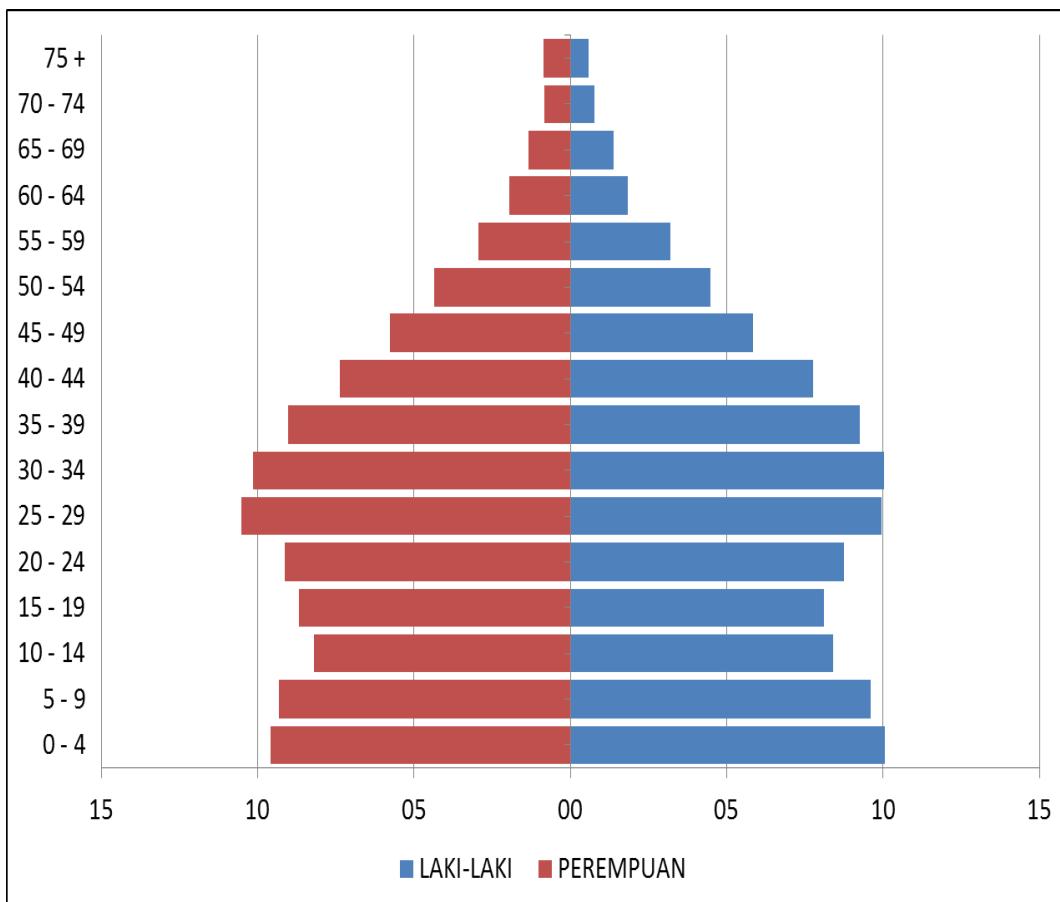
Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jiwa	%	Jiwa	%	
2005	696.329	50,66	678.193	49,34	1.374.522
2006	719.969	50,68	700.511	49,32	1.420.480
2007	761.382	51,79	708.620	48,21	1.470.002
2008	780.092	51,88	723.585	48,12	1.503.677
2009	798.802	51,97	738.178	48,03	1.536.980
2010	879.325	50,64	857.240	49,36	1.736.565
2011	918.836	50,66	894.777	49,34	1.813.613
2012	961.876	50,66	936.691	49,34	1.898.567
2013	990.286	50,47	971.874	49,53	1.962.160
2014	1.027.074	50,66	1.000.177	49,34	2.027.251
2015	1.070.744	50,46	1.051.120	49,54	2.121.864
2016	1.113.483	50,20	1.104.692	49,80	2.218.175

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jiwa	%	Jiwa	%	
2017	1.158.641	50,07	1.155.334	49,93	2.313.975
2018	1.200.244	50,00	1.200.050	50,00	2.400.294
2019	1.234.509	50,03	1.233.119	49,97	2.467.628
2020	1.275.154	49,93	1.278.777	50,07	2.553.930
2021	1.316.336	49,84	1.324.873	50,16	2.641.210
2022	1.359.280	49,76	1.372.264	50,24	2.731.545
2023	1.400.453	49,67	1.419.120	50,33	2.819.573
2024	1.440.415	49,63	1.462.082	50,37	2.902.498
2025	1.480.368	49,59	1.504.793	50,41	2.985.161

Sumber : Diolah dari Depok Dalam Angka (BPS) 2005-2013

Komposisi penduduk Kota Depok termasuk penduduk muda. Populasi penduduk didominasi usia antara 0-9 tahun dan usia antara 25-34 tahun. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana diperlihatkan pada grafik dibawah ini.

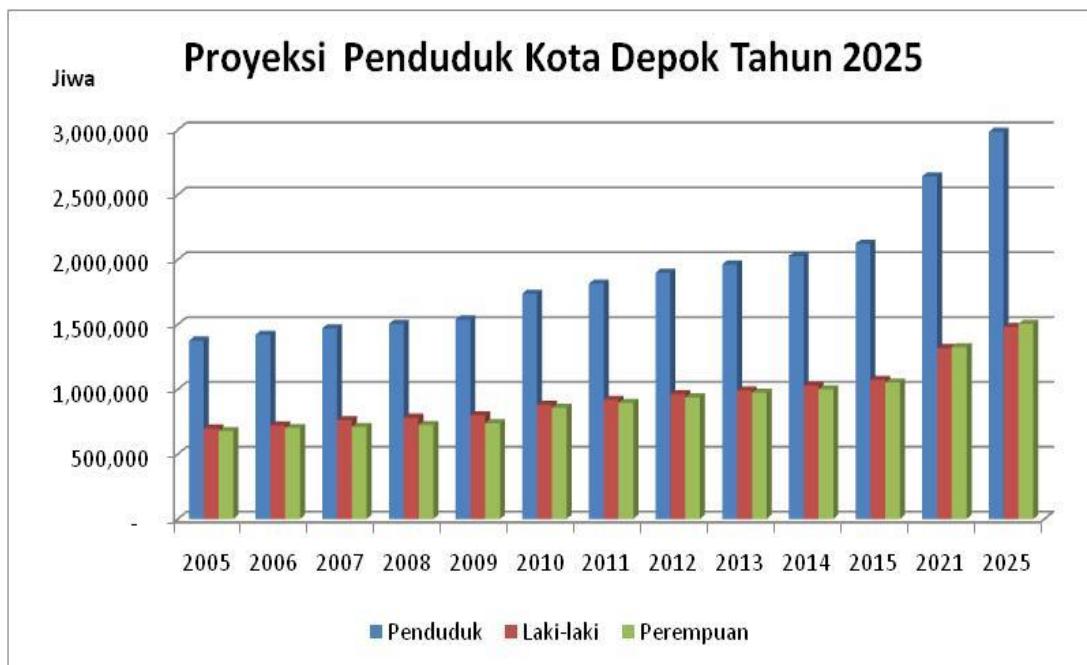
Grafik 3.1 Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Depok



Bertambahnya penduduk sebenarnya merupakan pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah bila kualitas sumber daya manusia itu memadai, dan sebaliknya bila sebagian besar merupakan warga kurang terampil memungkinkan potensi kota sebagai basis pertumbuhan ekonomi akan terganggu dan muncul persoalan-persoalan seperti kemiskinan kota, kesemrawutan mobilitas penduduk, rendahnya pelayanan kepada masyarakat, dan kerusakan lingkungan akibat tertekannya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kota akan menjadi kawasan obesitas dan invaliditas yang bisa menganggu pertumbuhan ekonomi kota itu sendiri.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Depok perlu diturunkan dalam kurun waktu ke depan sehingga kapasitas kota untuk pelayanan publik tidak mengalami penurunan. Proyeksi perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat pada **Grafik 3.2.**

Grafik 3.2. Proyeksi Jumlah Penduduk di Kota Depok



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2005-2013

3.1.2.1.2. MIGRASI

Penyebab utama pesatnya jumlah penduduk perkotaan adalah urbanisasi. Urbanisasi di Kota Depok dipicu antara lain oleh meluasnya wilayah metropolitan/megacity Jakarta yang berdampak pada pesatnya perkembangan dan meluasnya daerah pinggiran, sehingga tingkat pertumbuhan penduduk kota inti cenderung menurun, sementara di daerah satelit justru meningkat. Kondisi yang sama dialami oleh Kota Bekasi, Tangerang dan Tangerang Selatan.

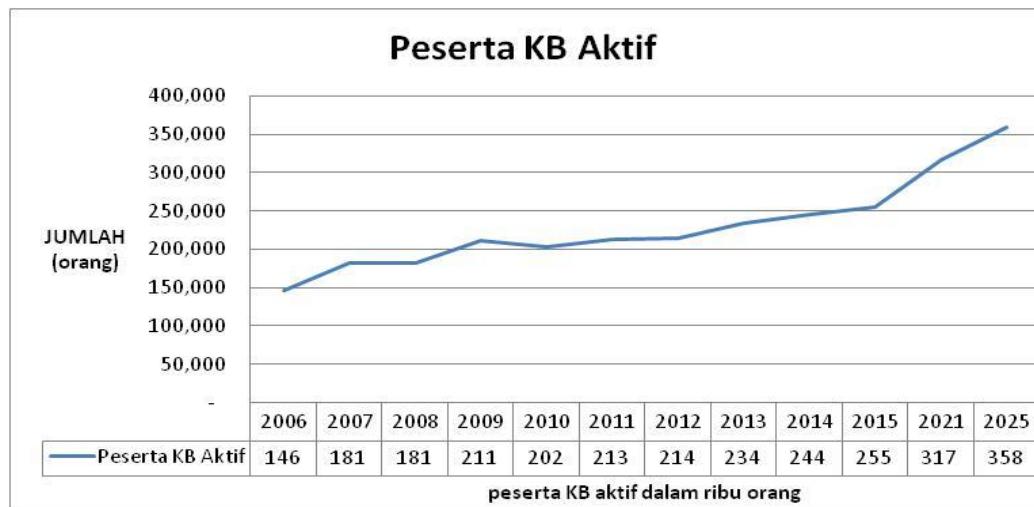
Migrasi penduduk ke Kota Depok paling banyak berasal dari Jakarta dalam rangka mencari tempat bermukim yang lebih nyaman, selain datang dari berbagai daerah dalam rangka mencari pekerjaan. Urbanisasi tidak mudah dikendalikan karena terkait dengan kompleksitas masalahnya, sehingga selain peran daerah, peran negara dan provinsi sangat diperlukan khususnya untuk lebih mengembangkan ekonomi pedesaan dan mengoptimalkan hubungan desa-kota yang sinergis dalam rangka mengurangi ketimpangan kota-desa. Kebijakan yang perlu diambil agar migrasi tidak memunculkan dampak negatif bagi Kota Depok adalah penyediaan lapangan pekerjaan, perumahan dan permukiman, sarana/prasarana maupun pelayanan dasar yang terjangkau, baik bagi pendatang baru maupun penduduk lama.

3.1.2.1.3. TINGKAT KELAHIRAN DAN KELUARGA BERENCANA

Faktor lain yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah tingkat kelahiran. Angka kelahiran terkait dengan aspek sosial ekonomi penduduk seperti pendidikan, pendapatan, agama dan nilai-nilai yang berlaku pada suatu komunitas. Selama 5 tahun terakhir, angka kelahiran total Kota Depok meskipun relatif stabil (fluktuasinya antara 2,04-2,26), terdapat kecenderungan untuk mengalami peningkatan sehingga berpotensi memperberat aspek demografi kota.

Tantangan lain untuk mengendalikan jumlah penduduk adalah umur perkawinan pertama. Berdasarkan data BPS, terdapat kecenderungan umur perkawinan pertama yang pada usia muda (rata-rata berumur 24,60 tahun) sehingga berpotensi memiliki lebih banyak anak karena semakin panjang masa reproduksinya. Adanya fakta ini menuntut kita untuk terus menggalakkan program Keluarga Berencana sehingga pertumbuhan penduduk Kota Depok dapat dikendalikan. Peserta KB aktif perlu didorong lebih tinggi sehingga tidak menambah jumlah penduduk lebih besar (**Grafik 3.3**).

Grafik 3.3 Estimasi Perkembangan Peserta KB Aktif Sampai Dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2006-2013

3.1.2.1.4. PENDIDIKAN PENDUDUK

Tantangan aspek demografi lainnya adalah tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2013, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas sebanyak 52,20%, disusul lulusan SMP dan SD (masing-masing 16,08% dan 10,93%), sarjana sebesar 11,50%, dan yang tidak berijazah sebanyak 8,99%. Tingginya angka tamatan SMP ke bawah (27,01%) perlu dikurangi melalui pendidikan informal dan nonformal. Dalam rangka menjawab tantangan perkembangan Kota Depok yang cenderung menuju kota metropolitan, perlu upaya mengubah komposisi tersebut menjadi makin tinggi warga yang terdidik sehingga dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang tersedia.

3.1.2.1.5. LAPANGAN USAHA / MATA PENCAHARIAN

Berdasarkan data BPS Tahun 2013, mayoritas warga Kota Depok bekerja di sektor jasa kemasasyarakat (24,28%), disusul sektor perdagangan, rumah makan dan hotel (33,97 %), sektor industri (13,44%), dan sisanya tersebar di sektor listrik, gas, air, bangunan, angkutan, komunikasi, keuangan, dan lain-lain sebesar 26,48. Mengingat masih adanya pengangguran di Kota Depok (sebesar 7,67 %), maka perlu digali potensi sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, antara lain sektor industri rumah tangga dan kecil yang berpeluang besar untuk menambah kesempatan berusaha. Sektor informal yang terorganisir juga merupakan penyerap tenaga kerja yang potensial.

3.1.2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

3.1.2.2.1. PEREKONOMIAN DAERAH

Kawasan Cepat Tumbuh

Kota Depok selain sebagai kota otonom, merupakan bagian dari kawasan cepat tumbuh (KCT) metropolitan/megacity Jakarta, dengan salah satu cirinya yaitu mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi bahkan di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional. Kalau pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sekitar 5-7% pertahun, maka KCT diperkirakan bisa tumbuh lebih dari 7% pertahun, bahkan bisa lebih.

Pada umumnya KCT mempunyai *Comparative Advantages* berupa keunggulan lokasi yang strategis dan *Competitive Advantages* atau keunggulan buatan yang diciptakan. Kota Depok sebaiknya tidak hanya memiliki keunggulan komparatif, tetapi juga keunggulan kompetitif sehingga dapat berkembang lebih pesat. Upaya yang perlu dilakukan adalah melalui :

- a. Peningkatan akses informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan;
- b. Pengembangan sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan;
- c. Optimalisasi dukungan kebijakan yang berpihak pada petani dan pelaku swasta;
- d. Peningkatan infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah;
- e. Penguatan koordinasi, sinergi dan kerja sama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan baik pemerintah, swasta, lembaga non-pemerintah dan masyarakat serta antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan;
- f. Peningkatan akses petani dan pelaku usaha kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi;
- g. Pengembangan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta
- h. Pemanfaatan kerangka kerja sama antar wilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

Ekonomi Kreatif

Potensi lain Kota Depok adalah ekonomi kreatif, seiring dengan trend masyarakat dunia yang sedang memasuki transformasi besar dalam ekonomi. Ekonomi kreatif tidak mengandalkan sumberdaya alam melainkan sumberdaya manusia, oleh karena itu, kota, kabupaten, atau provinsi perlu lebih menumbuhkan "iklim orang-orang" daripada iklim bisnis dalam menarik iklim investasi ekonomi kreatif. *Creative city* adalah sebuah tempat di mana orang merasakan, bahwa mereka bisa berpikir bertindak, berencana dengan imajinasi. Hal itu membutuhkan adanya budaya toleransi pada perbedaan, toleransi pada perubahan, dan pada banyak hal sehingga semua orang bisa berkembang dan mengembangkan diri. Untuk membentuk brand kota yang kreatif, bisa dimulai dengan cara mengidentifikasi dan mengenali ciri khas kota tersebut, tidak meniru dari kota lain, karena apa yang sukses di sebuah kota belum tentu cocok dan pas untuk diterapkan di kota lainnya.

Pengembangan ekonomi kreatif di Kota Depok dapat dilakukan melalui :

- a) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan kapabilitas, integritas, dan kreativitas yang tinggi sehingga memungkinkannya untuk memahami realitas pembangunan dan ikut memacu pertumbuhan ekonomi perkotaan.
- b) Pengembangan sikap kepemimpinan yang mampu mengakomodasi semua potensi dan permasalahan yang ada sebagai modal utama dalam pembangunan perkotaan, serta mampu menggerakan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat.
- c) Mengembangkan kebebasan berfikir, ekspresi kreativitas dan gagasan untuk meningkatkan peran SDM dalam pembangunan.
- d) Pengembangan budaya organisasi sehingga menghasilkan cara-cara berpikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi, dengan membawa suatu identitas sendiri.
- e) Penggalian dan penguatan identitas lokal (ciri khas) yang dapat dijadikan sebagai salah satu modal pembangunan.
- f) Penyediaan ruang perkotaan dan kelengkapan fasilitasnya yang dapat mendorong SDM untuk membangun perkotaan yang kreatif.

- g) Penciptaan dinamika jejaring, kerjasama dan kemitraan yang dapat menginspirasi ide kreatif bersama dalam pembangunan perkotaan.

Berdasarkan data BPS Kota Depok, PDRB ekonomi kreatif cukup besar yang berpotensi untuk lebih dikembangkan lagi. Pada 2013 mencapai 11,73 persen atau Rp. 2,7 triliun, khusus kuliner, PDRB-nya mencapai Rp. 228,43 miliar yang sekarang ini terpusat di kawasan Margonda. Potensi ekonomi kreatif lainnya adalah fashion, percetakan dan kerajinan.

Ekonomi Lokal

Tantangan lain Kota Depok adalah pengembangan ekonomi lokal, yaitu pembangunan yang memberi penekanan pada pengembangan sumberdaya lokal sesuai dengan potensi lokal. Pengembangan ekonomi lokal menghargai kemajemukan dan keanekaragaman potensi lokal, mengedepankan kemampuan tata kelola dan kearifan lokal sehingga menghasilkan produk yang berkelanjutan dan menjamin terjaganya inisiatif lokal. Perekonomian lokal dapat dibagi menjadi dua sektor perekonomian, yaitu sektor basis dan non basis. Kegiatan pada sektor basis merupakan kegiatan yang mengeksport barang-barang dan jasa-jasa ke luar batas wilayah perekonomian. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam wilayah yang bersangkutan. Makin banyak sektor basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan dari luar daerah ke dalam daerah yang bersangkutan, sehingga akan menambah permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh sektor non basis, demikian pula sebaliknya. Sektor basis mempunyai peranan sebagai penggerak utama (prime mover role) perekonomian wilayah melalui efek multiplier.

Proses berkembangnya perekonomian lokal meliputi empat tahap. Pertama, tumbuhnya kewiraswastaan (entrepreneurship) lokal. Kedua, lepas landasnya (take off) perusahaan-perusahaan lokal. Ketiga, berkembangnya perusahaan-perusahaan tersebut keluar lokalitas, dan keempat, terbentuknya suatu perekonomian wilayah yang mengakar pada kegiatan dan inisiatif lokal serta keunggulan-keunggulan komparatif aktifitas ekonomi lokal tersebut. Local economic development menekankan sebanyak mungkin menggunakan aspek lokalitas dalam pembangunan, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan kelembagaan. Indikator yang digunakan adalah besarnya kesempatan kerja di daerah tersebut sehingga pengembangan ekonomi lokal lebih dapat menjawab permasalahan pengangguran perkotaan. Sumberdaya manusia atau pelaku yang penting dilibatkan dalam pengembangan ekonomi lokal adalah usaha mikro, kecil dan

menengah. Dalam perkembangannya, keberadaan dan produktivitas UKM di Kota Depok makin meningkat meskipun relatif lambat.

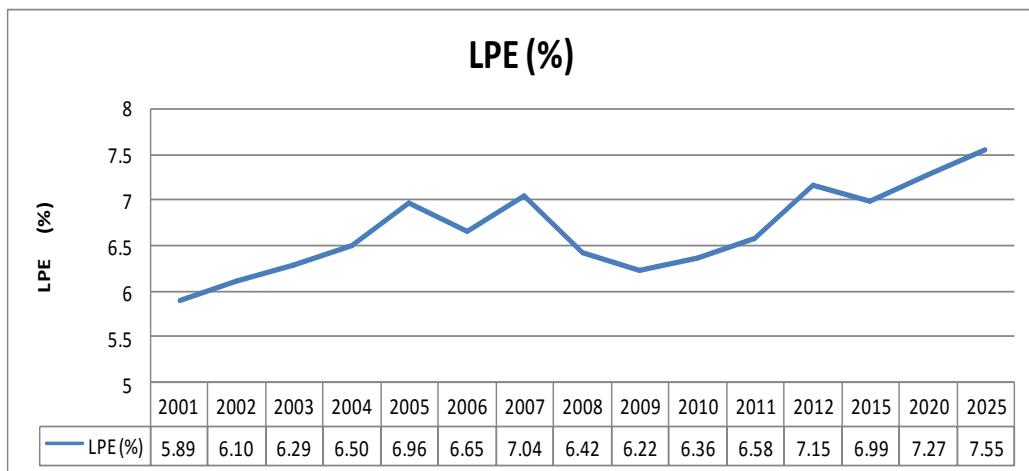
Sektor Informal

Sektor informal adalah unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi. Peran sektor informal kota sangat strategis sebagai katup pengaman pengangguran dengan populasi tenaga kerja mencapai 70%. Aktifitas sektor informal antara lain adalah pedagang kaki lima, pedagang asongan, penjual jasa semir sepatu, penyedia payung di waktu hujan, penjual air dorongan, pembantu parkir tak berseragam. Pemberdayaan sektor informal sulit dilakukan dengan memformalkan sektor tersebut karena pelaku sektor informal sebagian besar adalah orang-orang yang kurang tinggi pendidikannya dan jumlahnya sangat besar dan terus bertambah. Namun demikian, sektor informal perlu ditata karena sektor ini bisa sangat tidak efisien dan berpotensi menciptakan kekumuhan lingkungan kota. Salah satu yang dapat dilaksanakan adalah dengan mengorganisasikan sektor informal tanpa harus membuat langsung menjadi formal. Di beberapa kota, upaya mengorganisasikan sektor informal ini sudah banyak yang menunjukkan hasil positif. Selain itu salah satu kewajiban Kota adalah menyediakan ruang untuk sektor informal ini.

3.1.2.2.1.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB kota Depok (atas dasar harga berlaku) selama 6 (enam) tahun terakhir (2008-2013) mengalami peningkatan mencapai hampir 100 %, Sedangkan PDRB (atas dasar harga konstan) mengalami peningkatan sebesar 37%, atau tumbuh rata-rata 6,54 % tiap tahun. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan atau lebih dikenal dengan Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE) ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Barat. Fakta ini menunjukkan bahwa Kota Depok dengan keuntungan letak geografisnya, merupakan kawasan cepat tumbuh yang dicirikan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, oleh karenanya masih bisa dipacu lebih tinggi lagi. Secara empiris di berbagai kawasan cepat tumbuh menunjukkan bahwa kalau pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sekitar 5-7% pertahun, maka pada kawasan cepat tumbuh bisa tumbuh lebih dari 7% pertahun, atau bisa sekitar 9% pertahun bahkan 11%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok selama sepuluh tahun terakhir serta proyeksinya sampai tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

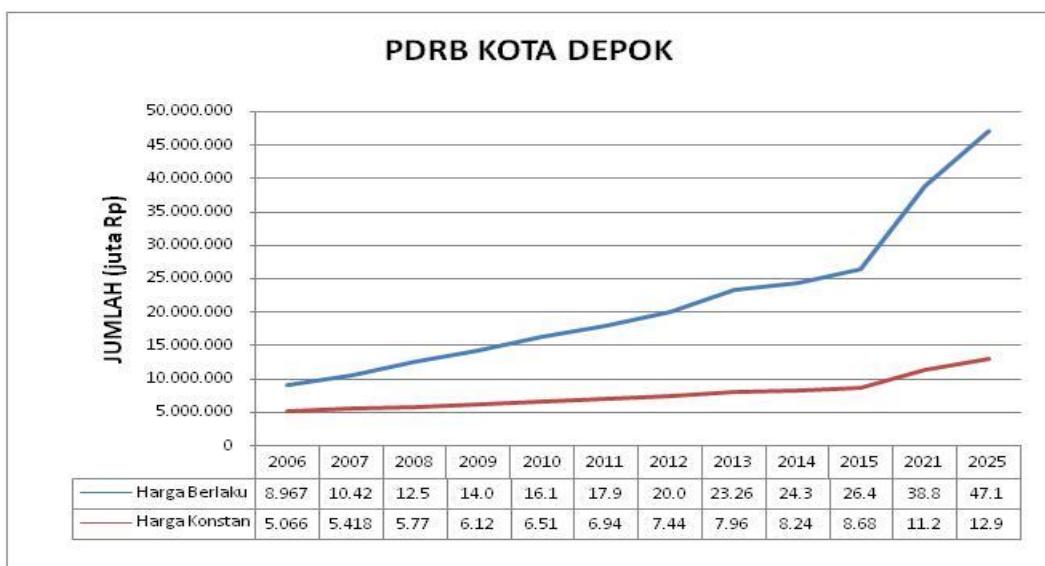
Grafik 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Sampai Dengan Tahun 2025



Sumber: diolah dari PDRB Kota Depok 2001-2012

Strategi percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai terobosan dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Daya saing ditentukan oleh kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, sumberdaya manusia, dan utamanya iklim berinvestasi. Iklim investasi terkait dengan kualitas pelayanan publik khususnya perizinan, regulasi yang mendukung usaha, stabilitas daerah serta tingkat kriminalitas. Hambatan investasi dan berusaha karena biaya ekonomi tinggi, banyaknya regulasi yang memberatkan, serta keamanan dan ketertiban daerah, perlu ditekan atau ditiadakan agar Kota Depok menjadi kota yang ramah untuk investasi. Indeks integritas pelayanan publik Kota Depok yang relatif rendah harus menjadi pemicu bagi perbaikan daya saing Kota Depok ke depan.

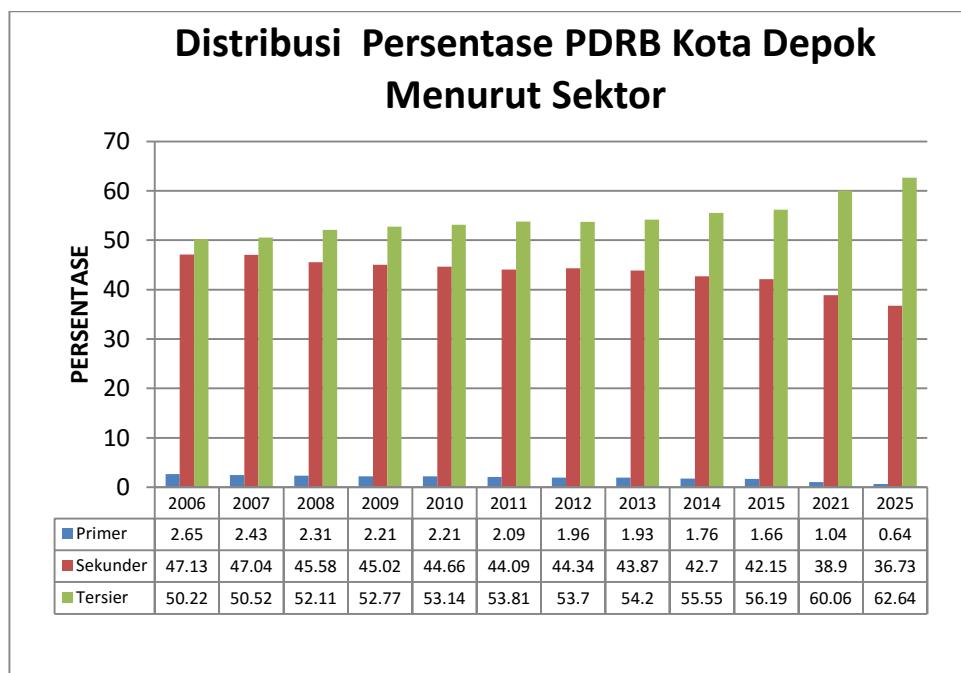
Grafik 3.5 Estimasi Perkembangan PDRB Sampai Dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari PDRB Kota Depok (BPS),2006-2013

PDRB Kota Depok disumbang terutama oleh sektor tersier (50-54 %) dan sekunder (44-47%), sedangkan sektor primer cenderung mengalami penurunan. Proyeksi PDRB Kota Depok sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.5**. Sedangkan pada **Grafik 3.6**, dapat dilihat tren perkembangan distribusi PDRB tiap-tiap sektor, tampak bahwa sektor tersier mengalami kecenderungan meningkat, dan sebaliknya sektor primer dan sekunder.

Grafik 3.6 Estimasi Perkembangan Distribusi Presentase Sektor sampai dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari PDRB Kota Depok (BPS), 2006-2013

1) SEKTOR PRIMER

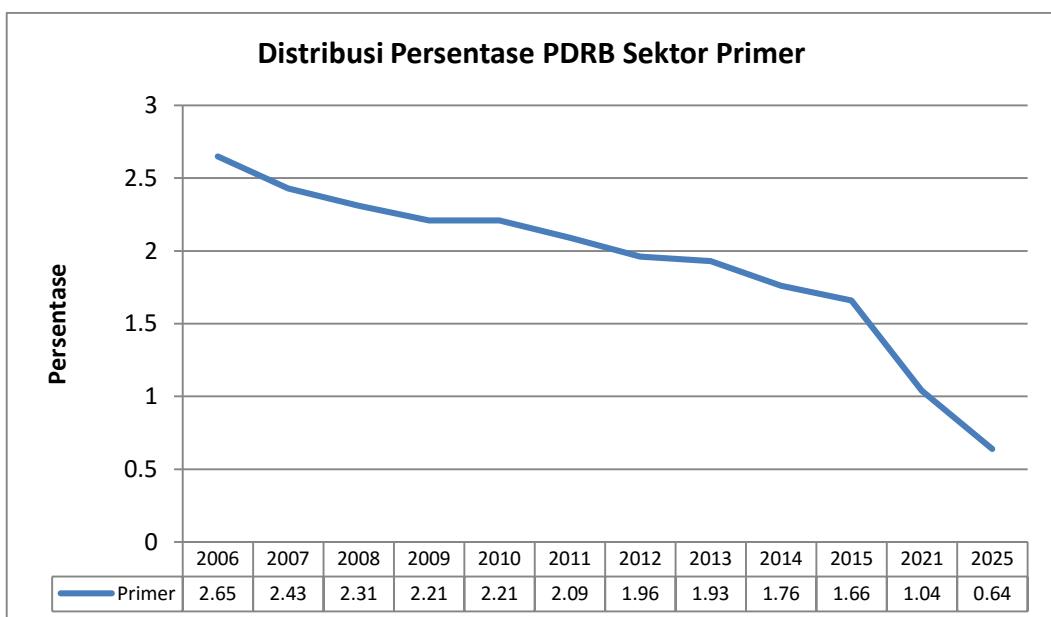
Sektor primer yang berkembang di Kota Depok hanya lapangan usaha pertanian, sedangkan pertambangan dan penggalian tidak ditemukan. Lapangan usaha pertanian terdiri dari tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, sedangkan kehutanan tidak ditemukan di Kota Depok. Subsektor peternakan merupakan lapangan usaha yang dominan (mencapai 66%). Dalam struktur ekonomi daerah, sektor primer sebagaimana lazimnya di kawasan perkotaan, hanya sedikit memberikan kontribusi terhadap PDRB, yaitu 2,1-2,64 % dalam 5 tahun terakhir ini. Meskipun PDRB lapangan usaha pertanian mengalami peningkatan tiap tahun (relatif kecil), kontribusinya terhadap perekonomian daerah ke depan cenderung semakin mengecil.

Peranan kelompok sektor primer dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2009-2013 menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurun dari 2,21% (2009) menjadi 1,93 % (2013).

Peranan kelompok sektor primer dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2009-2013 menurut PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurun dari 2,84% (2009) menjadi 2,41 % (2013), dengan perubahan sebesar 0,43 %

Perkembangan sektor primer semakin menurun karena proses pembangunan yang lebih pesat di luar sektor primer sehingga mengurangi lahan dan tanah yang dipergunakan untuk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. **Grafik 3.7.** menunjukkan proyeksi distribusi pertanian terhadap PDRB sampai dengan tahun 2025.

Grafik 3.7 Estimasi Perkembangan Distribusi Presentase PDRB Sektor Primer Sampai Dengan Tahun 2025

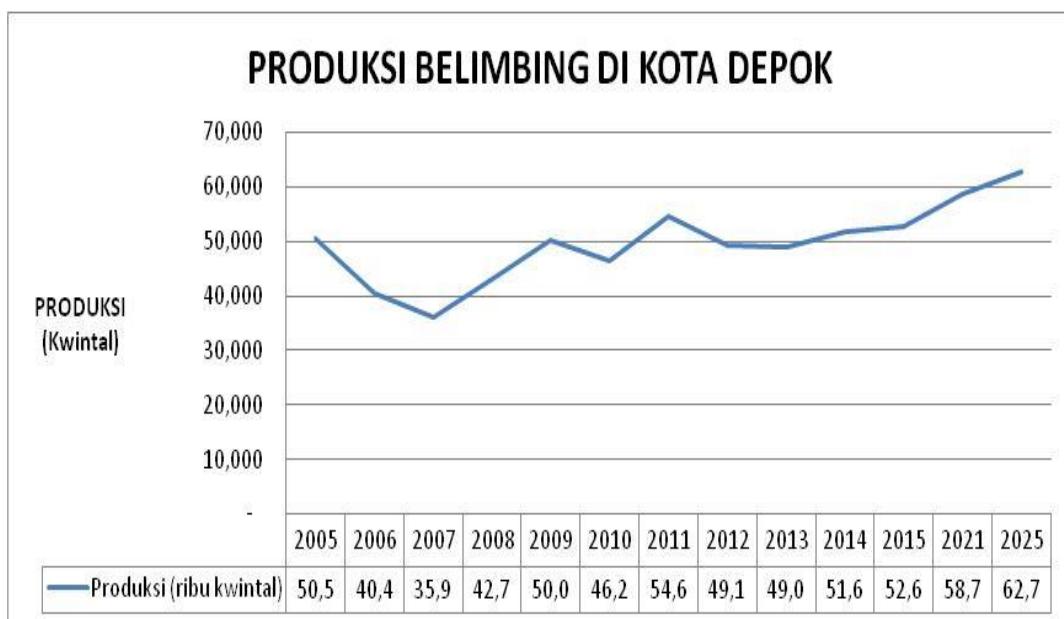


Sumber : Diolah dari PDRB Kota Depok (BPS), 2006-2013

Meskipun kontribusinya terhadap perekonomian daerah rendah, sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian karena terdapat komoditas unggulan daerah yang perlu dipertahankan dan dikembangkan, selain kontribusinya terhadap ruang terbuka hijau kota. Komoditas unggulan daerah adalah belimbing, tanaman hias, ikan hias dan usaha pemotongan hewan (RPH).

Komoditas lokal pertanian berpotensi untuk berkembang jika mendapat perhatian serius seperti terlihat proyeksinya pada **Grafik 3.8**.

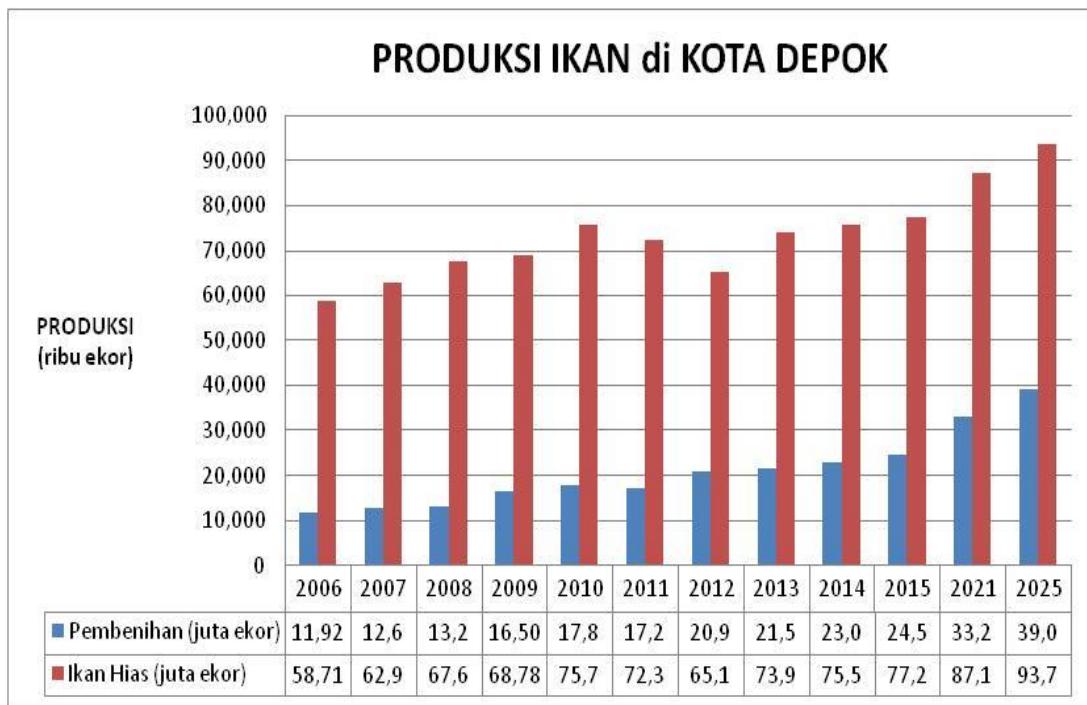
Grafik 3.8 Estimasi Perkembangan Produksi Belimbing sampai dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2005-2013

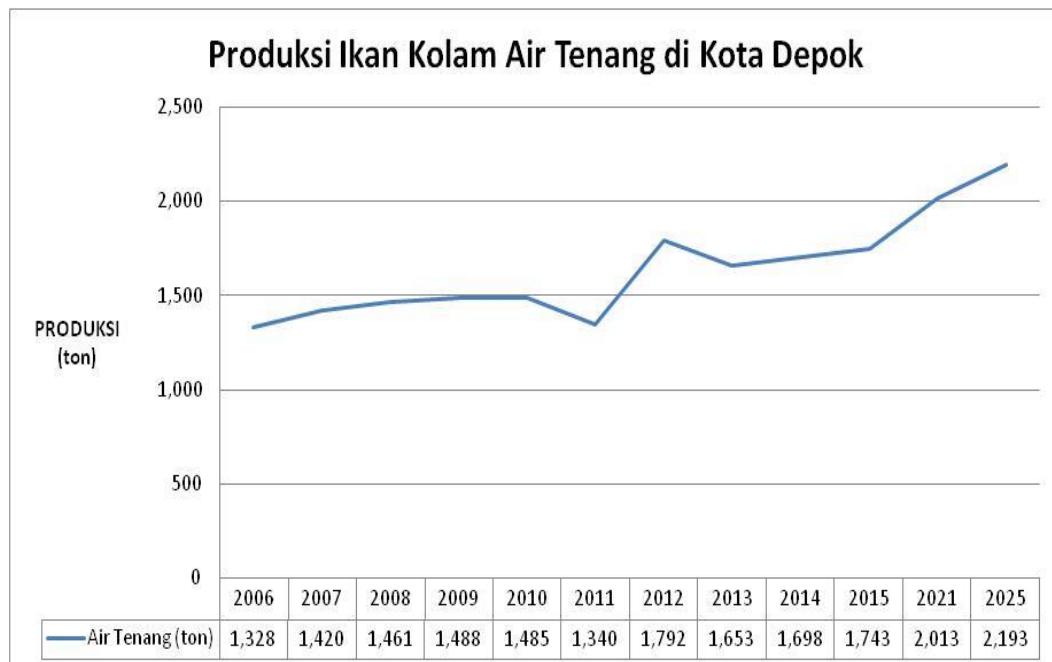
Produksi belimbing yang memiliki keunggulan mutu secara nasional, bisa semakin meningkat jika ada jaminan ketersediaan lahan budidaya, yang mulai berkurang oleh kepentingan sektor lain. Demikian halnya dengan ikan hias dan tanaman hias, yang masih bisa dibudidayakan di pekarangan (**Grafik 3.9** dan **3.10**). Pangsa pasar ketiga komoditas masih terbuka dan diharapkan dapat menjadi unggulan di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada juga berpotensi dikembangkan menjadi RPH regional untuk menangkap peluang kebijakan DKI Jakarta yang merencanakan penyediaan hewan potong di luar wilayahnya.

Grafik 3.9 Estimasi Perkembangan Produksi Ikan Hias dan Pemberian sampai dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2006-2012

Grafik 3.10 Estimasi Perkembangan Produksi Ikan Air Tenang sampai dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2006-2012

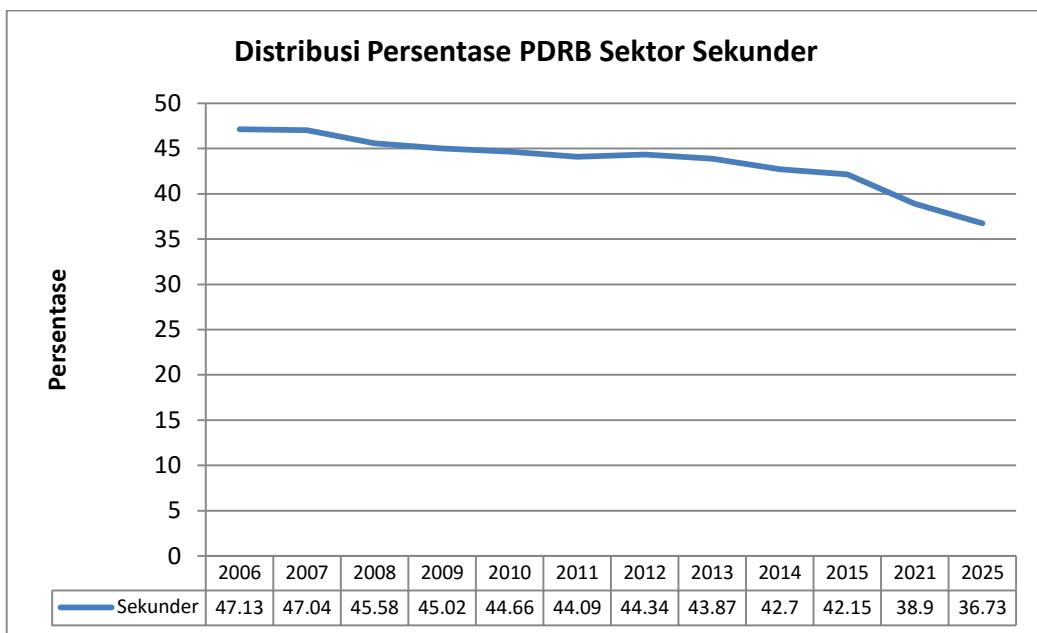
Selain ketersediaan lahan, permasalahan lain yang dihadapi sektor pertanian adalah masih lemahnya kelembagaan petani, produktivitas dan akses terhadap sumberdaya modal dan pasar. Perlu upaya perlindungan lahan usaha produktif serta fasilitasi dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akses kepada sumberdaya produktif sehingga masyarakat pertanian berminat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas serta mendiversifikasi usahanya, khususnya yang bernilai ekonomi dan bernilai tambah tinggi. Perbaikan sistem usahatani yang ada tidak saja memperbaiki bagian hulu tetapi juga pada bagian hilirnya sehingga meningkatkan jangkauan dan pangsa pasar produk pertanian unggulan Kota Depok, tidak saja di tingkat lokal dan regional, tetapi bisa menjadi komoditas ekspor karena secara kualitatif produk pertanian Depok memenuhi syarat.

Dengan iklim usaha pertanian yang menarik maka usahatani akan menjadi lebih kompetitif sehingga kecenderungan alih fungsi lahan dan usaha bisa dikurangi karena usahatani masih menarik minat masyarakat terutama kalangan muda. Sektor pertanian menurut data BPS tahun 2013, menyerap tenaga kerja paling kecil, yaitu kurang dari 1,83% dari total angkatan kerja yang ada. Sedangkan laju pertumbuhan sektor pertanian hanya 0,51%.

2) SEKTOR SEKUNDER

Sektor sekunder terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha listrik, gas dan air minum, serta lapangan usaha bangunan/konstruksi. Peranan kelompok sektor sekunder dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2009-2013 menurut PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurun dari 45,02 % (2009) menjadi 43,87 % (2013). Keadaan ini dipengaruhi oleh penurunan peran sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Peranan kelompok sektor sekunder dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2009-2013 menurut PDRB atas Dasar Harga Konstanrelatif stabil dari 49,97 % (2009) menjadi 49,76 % (2013). Meskipun tetap memberikan kontribusi signifikan, pada masa mendatang kontribusi sektor sekunder cenderung menurun terhadap total PDRB seperti diperlihatkan pada **Grafik 3.11**.

Grafik 3.11 Tren Perkembangan Kontribusi Sektor Sekunder sampai dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari PDRB Kota Depok (BPS), 2006-2013

Seiring dengan kontribusinya yang menurun, persentase angkatan kerja yang bergerak di sektor sekunder diperkirakan akan semakin kecil di masa mendatang. Subsektor yang paling besar menyerap tenaga kerja adalah industri olahan, sedangkan subsektor listrik, gas dan air minum serta bangunan/konstruksi semakin menurun serapannya.

a) Industri Pengolahan

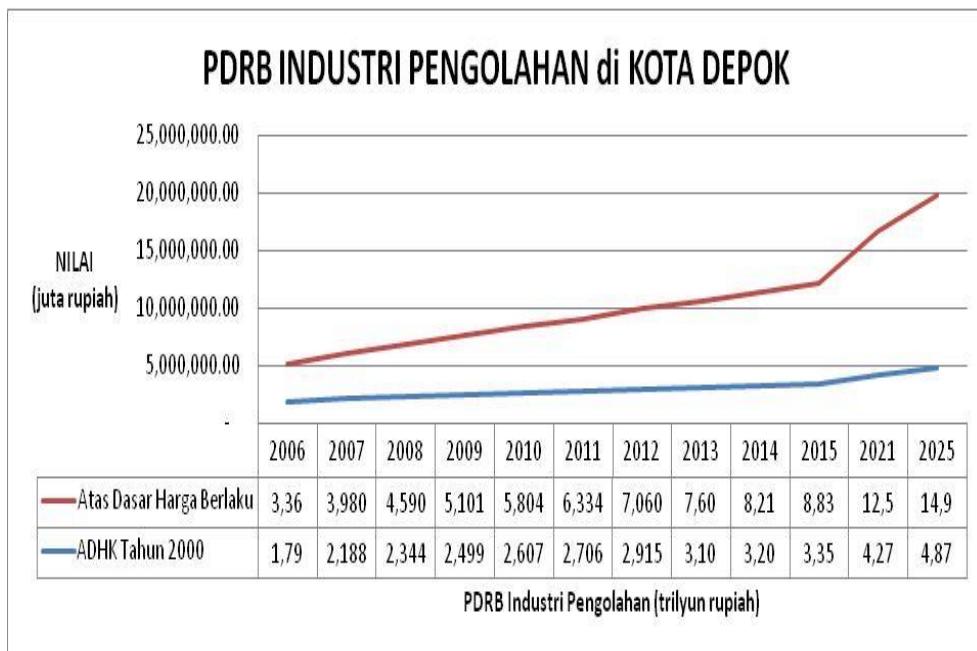
Subsektor ini mencakup industri besar dan sedang, industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga. Industri besar dan sedang mencakup perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 19 orang, sedangkan industri kecil 5 sampai 19 orang dan industri kerajinan rumah tangga dengan tenaga kerja 1 sampai 4 orang.

Industri pengolahan yang cukup prospektif untuk dikembangkan di Kota Depok adalah sub sektor tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, serta sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau. Kedua sub sektor ini sifatnya juga industri yang *labour intensive*, sehingga penyerapan tenaga kerjanya juga cukup besar. Gangguan negatif terhadap dua sub sektor ini dapat berdampak buruk terhadap perekonomian Kota Depok.

Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan sektor industri mencapai 38,99% (2013), diperkirakan akan mengalami penurunan pada masa mendatang, namun sebagai sektor basis, sektor industri pengolahan masih tetap signifikan mempengaruhi struktur PDRB Kota. Sedangkan laju pertumbuhan sektor industri dalam 5 tahun terakhir juga mengalami

fluktuasi, tumbuh sebesar 6,57% pada tahun 2009 lalu menurun di tahun 2011 menjadi 3,77% lalu tumbuh 7,73 pada 2012 dan melambat menjadi 6,47% di tahun 2013.

Grafik 3.12 Perkembangan PDRB Industri Pengolahan di Kota Depok



Sumber : Diolah dari PDRB Kota Depok (BPS), 2006-2013

Pertumbuhan industri kecil dan menengah menunjukkan kecenderungan meningkat, namun sektor ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain belum tertatanya struktur industri berbasis potensi lokal, kurangnya fasilitas usaha dan promosi produk, kurangnya koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah, dan besar serta sektor ekonomi lainnya, dan perlunya minimalisasi ekonomi biaya dari aspek institusi, infrastruktur, dan logistik. Tantangan lainnya adalah kurang berkembangnya diversifikasi unggulan daerah. Perlu upaya fasilitasi dan mediasi oleh dinas terkait sehingga industri sebagai salah satu sektor basis daerah dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga bernilai tambah tinggi dan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, serapan tenaga kerja oleh sektor industri dianggap belum optimal, mencapai 16,51% dari total angkatan kerja, cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Jenis industri yang labour intensive (menyerap tenaga kerja besar) di Kota Depok adalah industri makanan, minuman dan tembakau, selain subsektor tekstil, barang dan kulit serta alas kaki.

Salah satu potensi sektor industri adalah industri kreatif. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok menyebutkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri kreatif Depok pada

tahun 2013 mencapai 11,73 persen atau Rp2,7 triliun. Khusus kuliner, PDRB-nya mencapai Rp. 228,43 miliar yang sekarang ini terpusat di kawasan Margonda. Potensi ini perlu terus dikapitalisasi sehingga menjadi kekuatan ekonomi kota yang handal, apalagi peluangnya masih sangat terbuka karena mengandalkan pada inisiatif dan kreativitas masyarakat. Mewujudkan Depok sebagai kota kreatif akan mendukung sekali bagi tumbuhnya industri kreatif.

b) Listrik, Gas dan Air Minum

Industri energi listrik di Kota Depok akan menjadi semakin penting di masa mendatang. Perbaikan teknologi dan peningkatan efisiensi perangkat listrik rumah tangga dan perangkat listrik pada industri diperkirakan belum akan mengurangi kebutuhan energi listrik. Dengan semakin berkembangnya perumahan, perkantoran dan perdagangan di Kota Depok, maka kebutuhan akan energi listrik, gas dan air minum meningkat pula. Perkembangan daya tersambung dan jumlah pelanggan sangat tergantung pada kemampuan PLN dalam menyediakan energi yang dijual, karena kebutuhan diperkirakan lebih besar dari penyediaan yang ada maka akan menimbulkan distorsi antara kebutuhan dan ketersediaan energi. Perkembangan kebutuhan Listrik PLN dapat dilihat pada **Grafik 3.13.**

Grafik 3.13 Perkembangan Kebutuhan Listrik di Kota Depok



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032, Pada Tahun 2011 Kota Depok memerlukan daya sebesar 238.946.830VA yang terbagi kedalam kebutuhan rumah tangga sebesar 170.676.307 VA, penerangan jalan umum (PJU) sebesar 25.601.446 VA serta fasilitas sosial dan fasilitas umum sebesar 42.669.077 VA. untuk kebutuhan non rumah tangga (fasos fasum dan penerangan jalan), kebutuhan tertinggi adalah untuk Kecamatan Sukmajaya dengan total kebutuhan listrik sebesar 13.845.763 VA atau mencapai 5,79 % dari total kebutuhan listrik Kota Depok, dimana kebutuhan PJU sebesar 5.192.161 VA dan fasos fasum sebesar 8.653.602 VA. Sedangkan kebutuhan terkecil untuk Kecamatan Limo dengan kebutuhan listrik hanya mencapai 2.788.082 VA atau sebesar 1,17 % dari total kebutuhan listrik di Kota Depok pada tahun 2011. Pada Tahun 2021 kebutuhan listrik di Kota Depok meningkat menjadi 366.807.951 VA dengan total kebutuhan untuk rumah tangga sebesar 262.005.679 VA, penerangan jalan umu sebesar 39.300.852 VA dan fasos fasum sebesar 65.501.420 VA. Pada tahun 2021 kebutuhan listrik terbesar adalah untuk Kecamatan Sukmajaya sebesar 74.391.347 VA yang terbagi menjadi kebutuhan rumah tangga sebesar 53.136.676 VA, sarana penerangan jalan umum sebesar 7.970.501 VA dan fasos fasum sebesar 13.284.169 VA.

Pada Tahun 2026, Kota Depok memerlukan daya sebesar **1,817,889,434** VA, dengan rincian kebutuhan untuk rumah tangga sebesar **1,298,492,453** VA, sarana penerangan jalan umum sebesar **194,773,868** VA dan fasos fasum sebesar **324,623,113** VA. Untuk lebih jelas mengenai rencana kebutuhan energi listrik dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Depok Tahun 2026

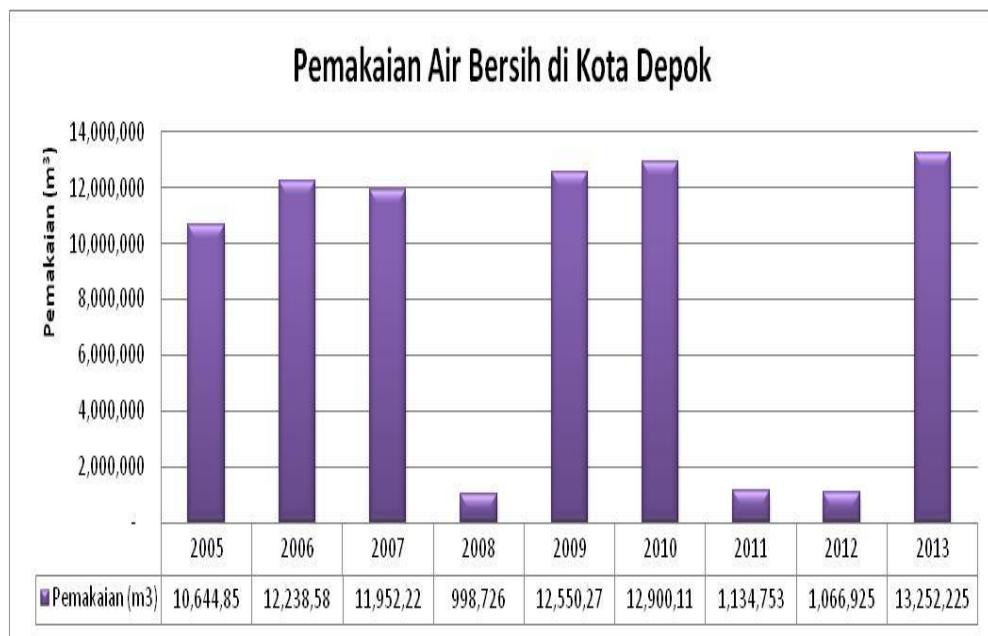
TAHUN	KEBUTUHAN LISTRIK (VA)			
	RUMAH TANGGA	SARANA PJU	FASOS FASUM	TOTAL
2011	170.676.307	25.601.446	42.669.077	238.946.830
2016	211.466.692	31.720.004	52.866.673	296.053.369
2021	262.005.679	39.300.853	65.501.420	366.807.951
2026	1,298,492,453	194,773,868	324,623,113	1,817,889,434

*Sumber : Naskah Akademis Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok
Tahun 2012-2032*

Penyediaan air bersih di Kota Depok polanya mirip dengan penyediaan listrik oleh PLN. Jumlah pelanggan dan pemakaian air bersih Kota Depok diperkirakan akan meningkat

terus, oleh karena itu manajemen pengelolaan air bersih perlu terus diperbaiki dan dikembangkan sesuai peningkatan kebutuhan pasar. Dengan telah berdirinya Badan Usaha Milik Daerah PDAM Kota Depok, maka peluang untuk meningkatkan kapasitas pelayanan diharapkan dapat diwujudkan. Kondisi eksisting perkembangan jumlah pemakaian air bersih di Kota Depok dapat dilihat pada **Grafik 3.14**.

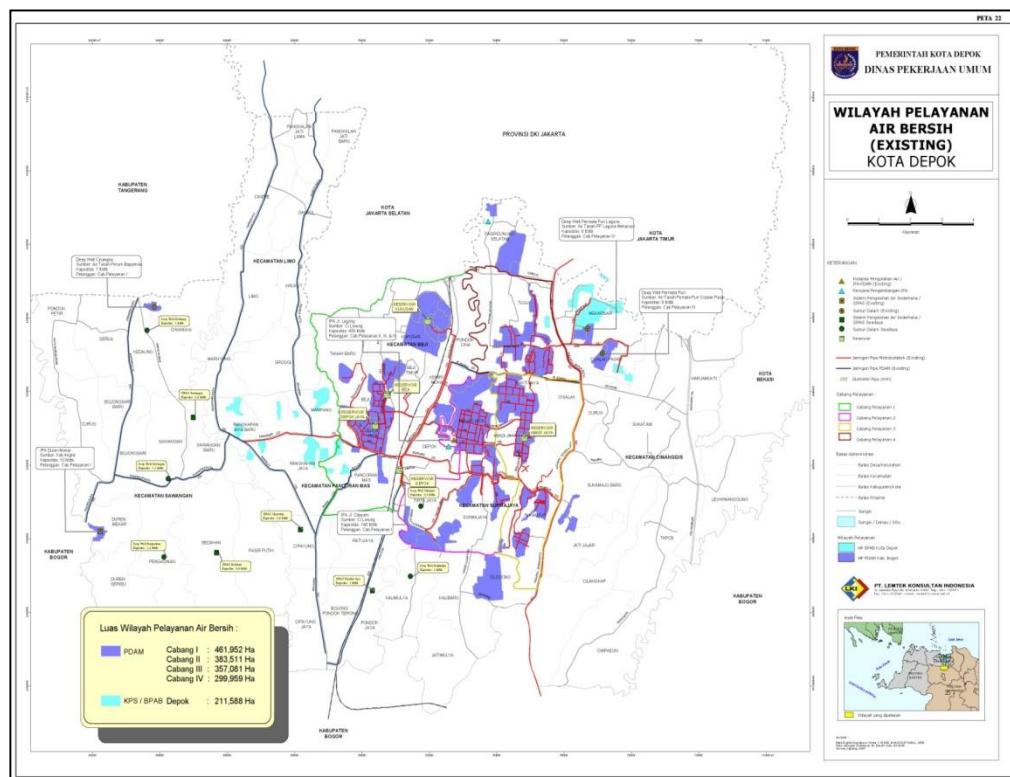
Grafik 3.14 Perkembangan Jumlah Pemakaian Air Bersih Perpipaandi Kota Depok



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2005-2013

Sebaran layanan air bersih perpipaan di Kota Depok sampai dengan tahun 2013 masih terpusat di lima kecamatan yaitu Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoranmas, Kecamatan Sukmajaya, kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Cilodong. Sedangkan layanan air bersih di enam kecamatan lainnya relatif masih sedikit sebagaimana diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Rencana pengembangan layanan air bersih sampai tahun 2025, perlu penyebaran merata di seluruh kecamatan.

Gambar 3.2. Sebaran Layanan Air Bersih Perpipaan di Kota Depok Tahun 2013



Sumber : PDAM Tirta Asasta (2013)

c) *Bangunan/Konstruksi*

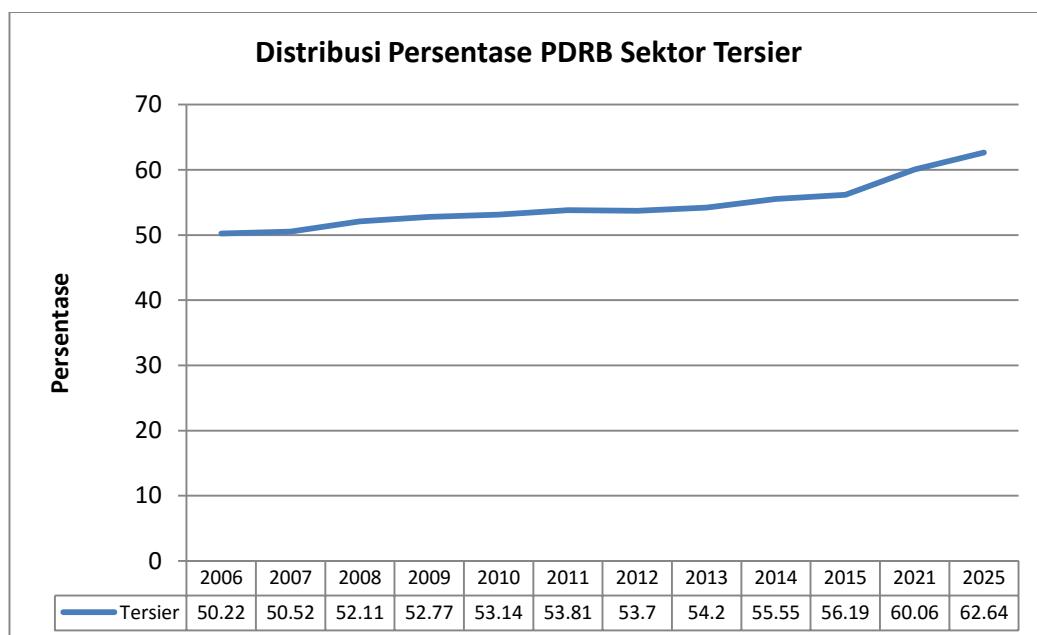
Sebelumnya diprediksi bahwa subsektor bangunan/konstruksi akan mengalami penurunan, namun kenyataannya mengalami peningkatan. PDRB lapangan usaha konstruksi pada tahun 2005 mencapai Rp. 397.586,61 ribu, meningkat menjadi Rp. 763.196,78 ribu pada tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi subsektor bangunan merupakan yang paling pesat diantara sektor sekunder. Dalam lima tahun terakhir tumbuh dalam kisaran 6,72%-14,23%. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya laju pembangunan dan perkembangan perekonomian di Kota Depok, seiring dengan perkembangan wilayah pinggiran DKI Jakarta lainnya (Bekasi, Tangerang, Bogor).

Kontribusi subsektor bangunan/konstruksi akan dipacu lebih besar lagi melalui pembangunan properti ke arah vertikal karena secara horizontal dihadapkan pada keterbatasan lahan. Kota Depok sangat tepat untuk dijadikan tujuan investasi pemukiman karena dekat dengan pusat bisnis, kampus dan sekolah dan juga kemudahan akses ke Ibukota dan wilayah Jabodetabek lainnya, apalagi dengan akan terbangunnya jalan tol Antasari-Depok (Desari) dan tol Cinere-Jagorawi (Cijago), jalur rel listrik yang menghubungkan dengan bandara dan lain sebagainya.

3) SEKTOR TERSIER

Sektor tersier terdiri dari lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, lapangan usaha angkutan dan komunikasi, lapangan usaha bank & lembaga keuangan lainnya, serta lapangan usaha Jasa-jasa. Selama kurun waktu lima tahun (2005-2010), PDRB sektor tersier menunjukkan pola peningkatan, demikian pula dengan laju pertumbuhan ekonominya, meskipun terjadi fluktuasi di awal periode. Sebelumnya diprediksi bahwa sektor tersier tidak akan bertumbuh pesat, namun nyatanya pertumbuhannya melebihi yang diperkirakan dan terus akan mengalami peningkatan sampai tahun 2025. Kontribusi sektor tersier terhadap total PDRB diprediksi akan mengalami pertumbuhan terus-menerus hingga tahun 2015 (**lihat Grafik 3.15**).

Grafik 3.15 Tren Perkembangan Distribusi Sektor Tersier Sampai Dengan Tahun 2025



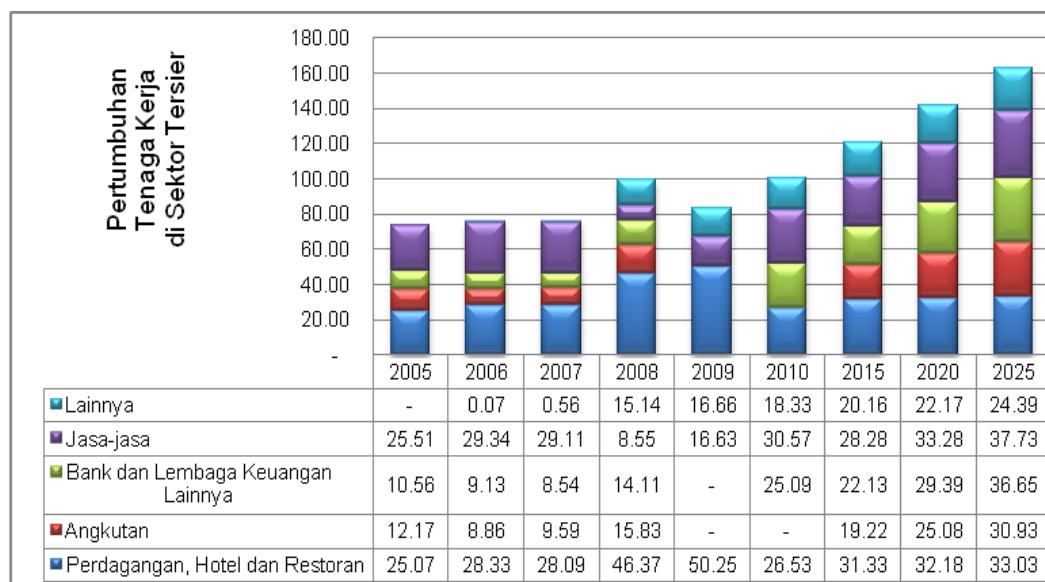
Sumber : Diolah dari PDRB Kota Depok (BPS),2006- 2013

Subsektor yang menyumbang paling besar dan pesat pertumbuhannya adalah perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan sektor jasa-jasa serta bank dan lembaga keuangan lainnya memberikan sumbangan yang cenderung stabil. Kalau dirinci lagi, maka subsektor perdagangan besar dan eceran yang berpengaruh besar dalam perekonomian daerah.

Seiring dengan peningkatan PDRB sektor tersier, persentase angkatan kerja Kota Depok yang bergerak di sektor tersier yang saat ini sudah sangat besar, akan semakin meningkat di masa mendatang. Tenaga kerja sektor tersier yang saat ini mencapai 74.12% dari total

angkatan kerja di Kota Depok, pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan pekerja di sektor ini rata-rata akan meningkat sebesar 24.22% pada tahun 2015, menjadi 28.42% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 32.55% di tahun 2025. Peningkatan ini karena terkait dengan sektor unggulan Kota Depok yang merupakan kota pemukiman di sekitar wilayah DKI Jakarta. Grafik perkembangan persentase tenaga kerja sektor tertier di Kota Depok dapat dilihat pada **Grafik 3.16**.

Grafik 3.16 Perkembangan Persentase Tenaga Kerja Sektor Tersier di Kota Depok



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

a) Perdagangan, Hotel dan Restoran

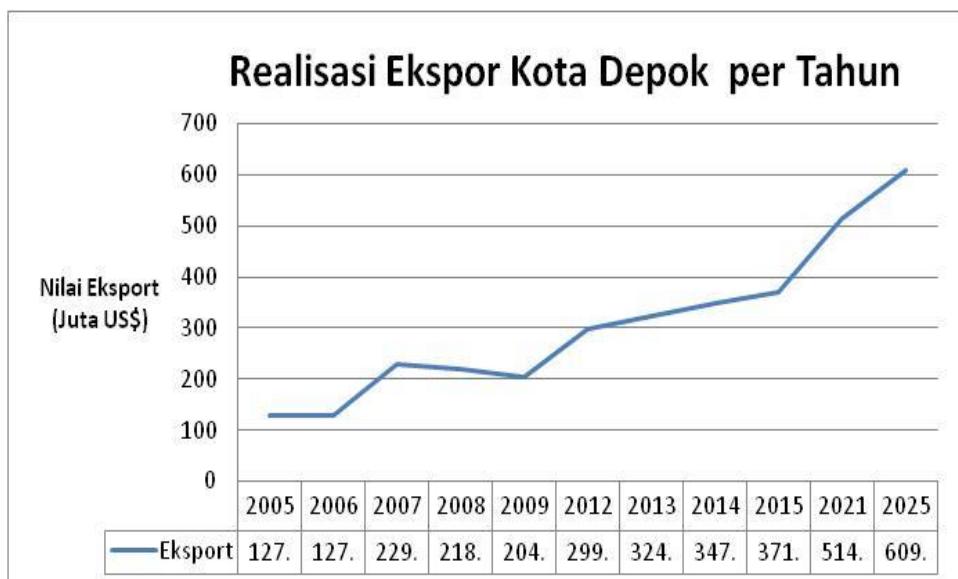
Laju Pertumbuhan Ekonomi subsektor perdagangan, hotel dan restoran agak berfluktuasi, pernah mengalami pertumbuhan cepat paling besar di tahun 2011 sebesar 8,55 kemudian menurun pada tahun 2012 menjadi 7,24 dan kembali menurun pada tahun 2013 menjadi 6,93.

Perkembangan perdagangan Kota Depok dapat dilihat melalui nilai eksportnya. Selama dasa warsa 1990 sampai 1999 Kota Depok diklasifikasikan sebagai kota yang tinggi ekspor industri manufakturnya. Oleh sebab itu pada tahun 2010 diperkirakan angka ekspor mencapai 925 juta \$. Namun, faktanya nilai ekspor Kota Depok tidak bisa mencapai angka itu terkait dengan adanya krisis global pada tahun 2008/2009. Nilai ekspor kembali meningkat pada tahun 2010, dan setelah tahun 2014 diprediksi angka ekspor akan terus berkembang bersamaan dengan pulihnya perekonomian dunia. Prediksi ini termasuk

pesimis karena memperhatikan adanya kemungkinan faktor persaingan dari negara lain, biaya produksi yang semakin meningkat, kondisi perekonomian yang masih dianggap belum kondusif dan faktor-faktor lainnya.

Ekspor Kota Depok Tahun 2013 paling banyak ke negara Philipina disusul kemudian ke negara Amerika Serikat. Grafik prediksi nilai ekspor Kota Depok sampai tahun 2025 (dalam satuan satu juta US\$) dapat dilihat pada **Grafik 3.17**.

Grafik 3.17 Perkembangan Ekspor Kota Depok



Sumber : *Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013*

Dalam bidang perhotelan, selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan jumlah kamar hotel, tapi dari segi kualitas ada kecenderungan peningkatan, yaitu dari Melati 1 dan 2 meningkat kualitasnya menjadi bintang 2. Berdasarkan laporan dari BPS Kota Depok tahun 2011, jumlah hotel berbintang di Kota Depok ada 3 buah yaitu bintang tiga 1 buah dengan jumlah kamar 78 dan bintang dua 1 buah dengan jumlah kamar 54. Sedangkan hotel dengan kelas melati di Kota Depok ada 10 buah. Jumlah hotel perlu terus didorong untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik akan penginapan, ruang pertemuan, pameran, dan lain-lain.

Tantangan yang dihadapi sektor perdagangan adalah perlindungan terhadap usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor ini. Perlu upaya untuk melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat dengan pemodal besar maupun para retailer. Tantangan lainnya adalah penataan dan pembangunan pasar tradisional dan modern secara lebih merata, peningkatan penggunaan pasar lelang serta sistem resi gudang untuk membantu industri

kecil, dan perlunya program pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai usaha mikro yang memiliki peran penting dalam mengurangi angka pengangguran.

Dalam rangka meningkatkan PDRB perdagangan, masih dirasakan kurangnya pemanfaatan pangsa pasar domestik, sehingga perlu upaya optimal dan terpadu dalam rangka pengembangan perdagangan di berbagai wilayah sub pelayanan kota (SPK) sebagaimana diarahkan oleh RTRW 2012-2032. Untuk pusat pertokoan dan pasar lingkungan, masih terbuka peluang pengembangan di SPK Citayam, Tapos dan Cimanggis. Toko modern berupa minimarket dan supermarket bisa dibangun di seluruh SPK. Sedangkan untuk hypermarket bisa dibangun di PPK Margonda dan seluruh SPK kecuali SPK Cipayung. Pusat Perbelanjaan dan Niaga masih bisa dikembangkan di SPK Sawangan, SPK Citayam, SPK Tapos, dan SPK Cimanggis. Adapun untuk Pengembangan Skala Regional, tantangan ke depan adalah membangun pasar induk di SPK Tapos, Pengembangan SNADA di SPK Citayam, dan Pembangunan pusat grosir di PPK Margonda. Melalui peningkatan infrastruktur dasar yang lebih merata, maka akan menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam sektor perdagangan sehingga tidak cenderung mengumpul di wilayah tertentu saja.

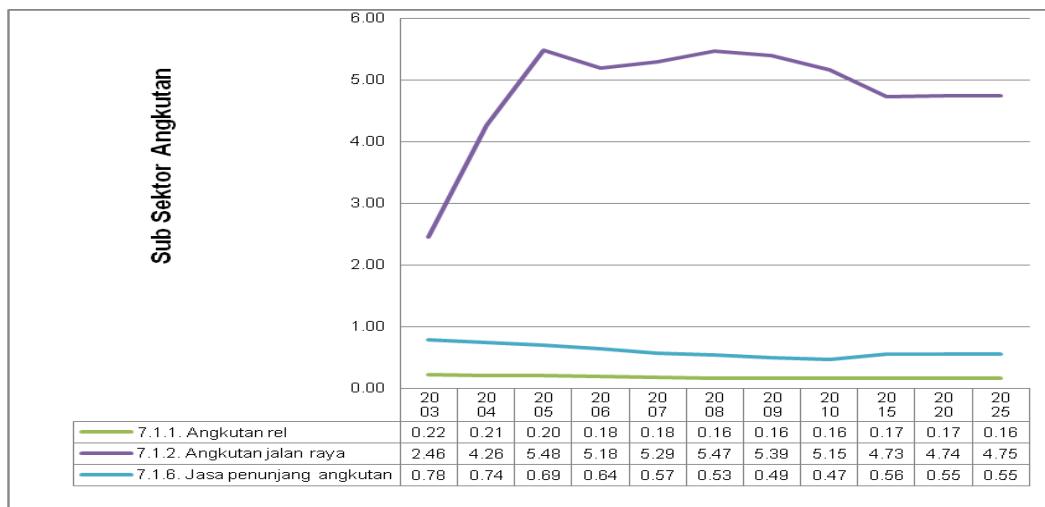
Seiring penguatan pasar domestik, tantangan lainnya adalah pengembangan pasar di level regional Jabodetabek. Dalam kerangka itu perlu dijalin kerjasama dengan daerah-daerah tetangga melalui kerjasama mutualisme dengan berbasis pada komoditis unggulan masing-masing, sehingga terhindar dari kompetisi tak sehat dan diharapkan dapat diwujudkan pembagian peran sebagai produsen dan pemasar serta pengekspor sehingga tercipta rantai suplai yang efisien.

Dalam bidang perdagangan luar negeri, perlunya upaya peningkatan hasil ekspor karena permintaan dunia yang terpengaruh krisis global. Masih banyak lagi tantangan di sektor perdagangan ini, yaitu perlunya peningkatan promosi produk industri Kota Depok, pentingnya aspek metrologi (kemetrologian legal), standardisasi produk ekspor dan impor, pengawasan barang, pengujian mutu dan pengaduan konsumen. Potensi ekonomi kreatif juga merupakan tantangan tersendiri yang menarik karena kontribusinya yang cukup signifikan terhadap PDRB Kota Depok (mencapai 12%). Depok dengan keunggulan sumberdaya manusianya, merupakan modal dasar penting untuk menunjang berkembangnya ekonomi kreatif. Dengan posisi letak geografis yang menguntungkan, serta sumberdaya manusia yang relatif baik, memungkinkan untuk tumbuhnya berbagai jenis jasa dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah tinggi di Kota Depok.

b) Angkutan dan Komunikasi

Salah satu potensi Kota Depok adalah sektor perhubungan. Jumlah angkutan, ijin trayek, dan jumlah penumpang yang ada merupakan investasi yang menunjang pembangunan karena merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah. Lalu lintas Angkutan Penumpang Kereta Api merupakan alat transportasi yang banyak diminati dikarenakan biayanya yang relatif murah dan cepat mencapai tujuan. Selain itu terdapat upaya perbaikan pelayanan oleh PT KAI, banyaknya pilihan kelas kereta api, jadual yang relatif pasti, frekuensi keberangkatan setiap 15 menit, kejahatan di dalam kereta semakin berkurang, dan bebas dari pengasong dan pangamen. Di Kota Depok terdapat 5 Stasiun Kereta Api, antara lain Stasiun Kereta Api Pondok Cina, UI, Depok Baru, Depok Lama, dan Citayam.

Grafik 3.18 Pertumbuhan Sektor Angkutan Kota Depok



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

Tantangan subsektor angkutan adalah mewujudkan transportasi massal yang terintegrasi dengan wilayah Jabodetabek khususnya DKI Jakarta. Menurut RTRW 2012-2032, setidaknya ada 6 jalur transportasi massal yang harus diwujudkan dalam masa mendatang yaitu Angkutan Umum Massal Terminal Jatijajar-Raya Bogor-Kp. Rambutan, Angkutan Umum Massal Bojongsari-Ciputat-Lebak Bulus, Angkutan Umum Massal Terminal Jatijajar-Ir. H. Juanda-Cinere-Lebak Bulus, Angkutan Umum Massal Depok 2-Margonda Raya-Lt. Agung-Ragunan/Ps. Minggu, Angkutan Umum Massal Terminal Depok-Margonda Raya-Lt. Agung-Ragunan/Ps. Minggu, Angkutan Umum Massal Terminal Jatijajar-Ir. H. Juanda-Margonda Raya-Ragunan.

Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, termasuk teknologi internet dan telepon seluler, menyebabkan komunikasi melalui pos menjadi tidak efisien dan relatif

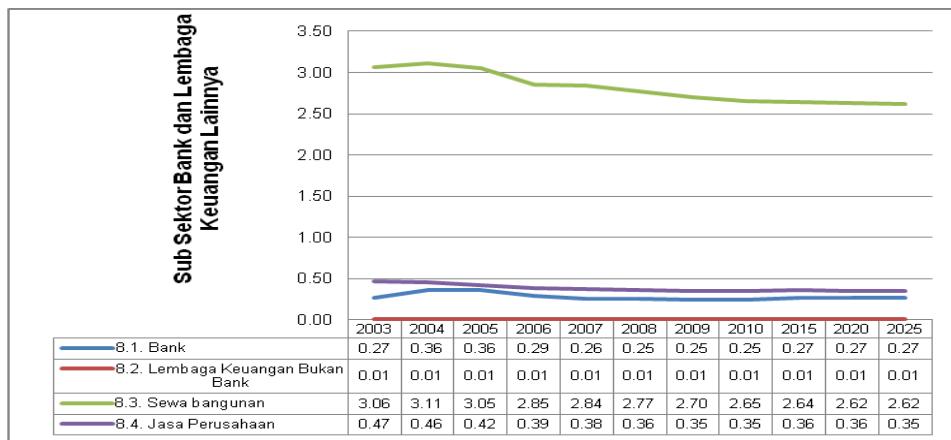
mahal. Total kiriman pos dari dan ke Depok, baik lokal maupun luar negeri diprediksikan akan terus menurun dimasa mendatang. Pertumbuhan subsektor pengangkutan dan komunikasi akan memberikan kontribusi yang terus meningkat. Diprediksi pada tahun 2015 sebesar 6,59%, tahun 2020 sebesar 6,63%, dan pada tahun 2025 sebesar 6,66%. Laju pertumbuhan subsektor angkutan dan komunikasi dalam lima tahun terakhir ini cukup tinggi, tumbuh 3,3% pada tahun 2007 kemudian melonjak tajam pada tahun 2011 mencapai 8,17%.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi, tantangan ke depan menurut RTRW 2012-2032 adalah penyediaan hot spot Wi-Fi (wireless fidelity) di pusat-pusat kegiatan umum dan sosial, fasilitasi pengembangan data-center dan industri IT, penyediaan menara dan penataan sarana penunjang (micro cell) untuk penguatan sinyal frekuensi radio, pengembangan jaringan telekomunikasi kabel melalui penyediaan jaringan fiber optic yang terintegrasi dengan jaringan PJU, pengintegrasian prasarana telekomunikasi kabel dengan jaringan jalan, pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum pada kawasan pusat-pusat pelayanan kota, pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah, penataan dan pengembangan zone cell terdiri maksimum 3 menara, dan pengendalian penggunaan menara.

c) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Perkembangan subsektor lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan didominasi oleh persewaan bangunan (mendekati 90% dari total lapangan usaha ini). Setelah itu menyusul jasa perusahaan, bank, dan terakhir lembaga keuangan non-bank. Secara keseluruhan dalam periode 2009-2013 terakhir subsektor ini tumbuhfluktuatif. Pada tahun 2009 tumbuh sebesar 4,63%, kemudian meningkat di tahun 2011 sebesar 12,01 dan menurun pada tahun 2012 menjadi 5,78. Terakhir pada tahun 2013 tumbuh mencapai 7,37%, lebih cepat dibanding pertumbuhan subsektor perdagangan, hotel dan restoran. **Grafik 3.19** memperlihatkan tren perkembangan subsektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dalam kurun 2005-2025.

Grafik 3.19 Perkembangan Lapangan Usaha Bank & Lembaga Keuangan lainnya



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

d) Jasa-Jasa

Subsektor Jasa-jasa terdiri dari Jasa pemerintahan Umum dan Jasa Swasta. Jasa swasta terdiri dari jasa perorangan dan rumah tangga, jasa hiburan dan rekreasi, dan jasa sosial kemasyarakatan. Kontribusi jasa pemerintahan umum lebih besar dibanding swasta, dan secara agregat memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 7,16% dengan laju pertumbuhan mencapai 5,36% (data tahun 2013).

Berdasarkan data PDRB diketahui bahwa nilai jasa pemerintahan umum dari tahun ke tahun meningkat terus. Pada tahun 2005 nilai jasa pemerintahan umum adalah Rp. 302,981.37 juta dengan jumlah penduduk 1,374,522.00 orang, maka jasa pemerintahan umum per penduduk Depok adalah Rp. 22.042,67. Pada tahun 2010, jasa pemerintahan umum per penduduk meningkat menjadi Rp. 35.091,48, artinya jika pelayanan yang diberikan pemerintahan umum masih sama kualitas dan kuantitasnya dengan tahun 2005, maka pelayanan yang diberikan lebih mahal harganya. **Tabel 3.4** menunjukkan kecenderungan jasa pemerintahan umum di masa mendatang.

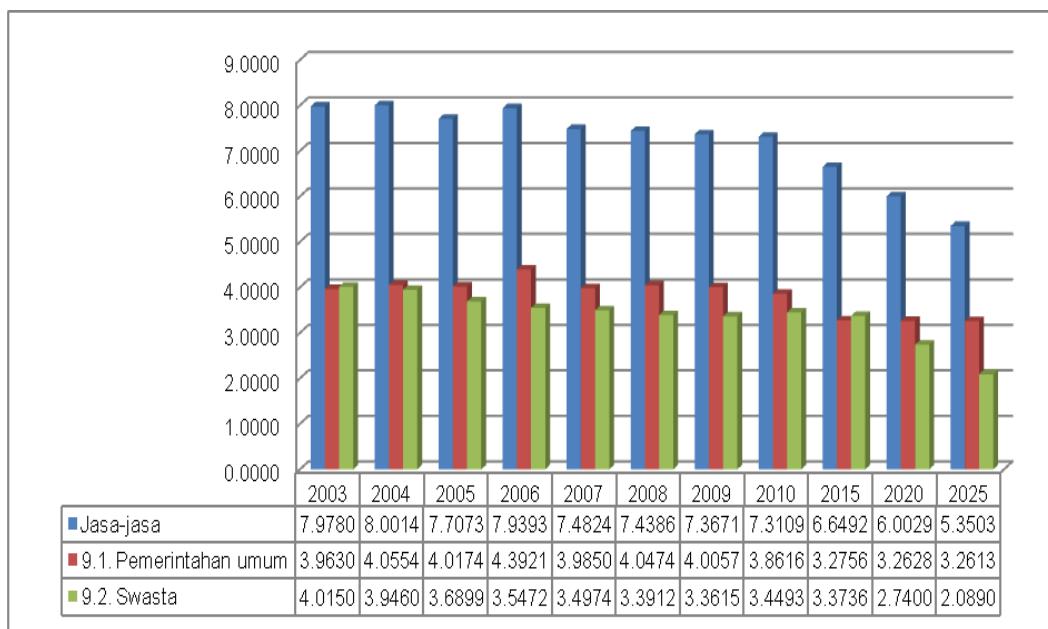
Tabel 3.4. Estimasi Nilai Jasa Pemerintahan Umum di Kota Depok

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2015	2020	2025
Jasa Pemerintahan umum	302,981.37	393,875.78	422,372.33	507,649.30	563,227.16	623,452.49	707,763.00	796,006.00	882,249.00
Jumlah Penduduk	1,374,522	1,420,480	1,470,002	1,503,677	1,536,980	1,736,565	2,054,938	2,415,013	2,775,088
Perbandingan	22.04	27.73	28.73	33.76	36.65	35.9	34.44	38.74	36.53

Sumber : Analisis Tim, 2013

Pertumbuhan jasa swasta paling tinggi disumbang oleh sektor swasta dari subsektor perorangan dan rumah tangga serta subsektor hiburan dan rekreasi. Perkembangan lapangan usaha jasa-jasa dapat dilihat pada **Tabel 3.4** yang menunjukkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari jasa pemerintahan umum, dan diperkirakan sampai tahun 2025 sumbang jasa pemerintahan umum masih besar proporsinya. Sedangkan **Grafik 3.20** memperlihatkan bahwa sub-sektor perorangan dan rumah tangga memberikan kontribusi terbesar dalam subsektor swasta dan kedua adalah sosial kemasyarakatan.

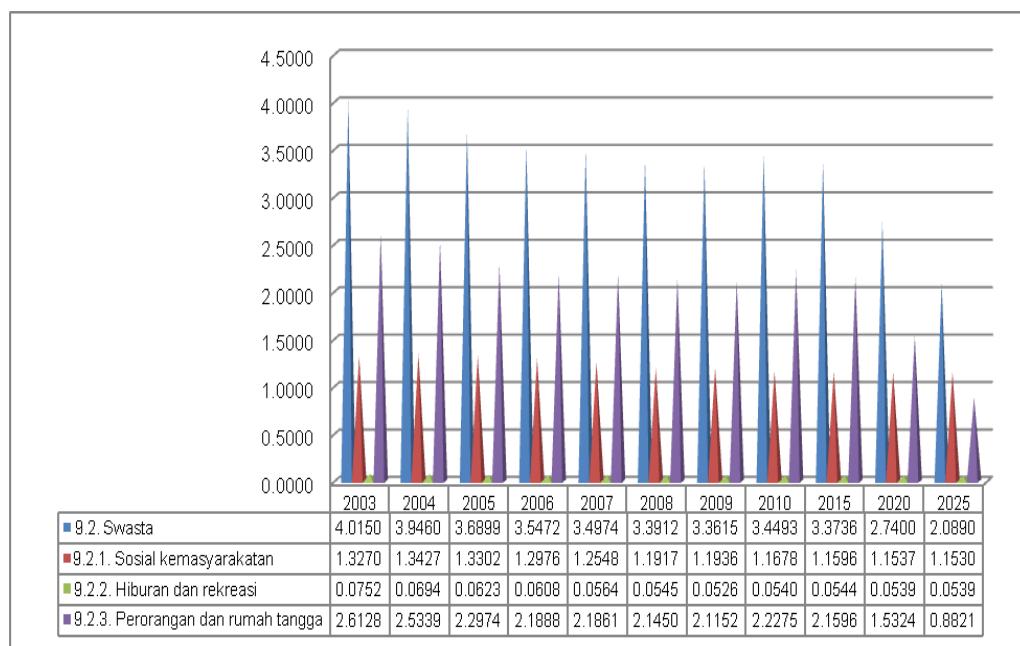
Grafik 3.20 Pertumbuhan Sektor Jasa Kota Depok



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

Sedangkan **Grafik 3.21** memperlihatkan tren perkembangan subsektor jasa swasta, di mana jasa perorangan dan rumah tangga memberikan kontribusi terbesar dibanding jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan/rekreasi. Jasa hiburan dan rekreasi masih berpotensi untuk lebih dikembangkan di Kota Depok tanpa harus menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi social budaya masyarakat. Secara lebih makro, hiburan dan rekreasi yang merupakan bagian dari pariwisata memang relatif kurang berkembang di Kota Depok sehingga perlu lebih dipacu melalui peningkatan rekreasi kuliner, air, alam, religius, budaya dan pendidikan. Standar pelayanan perkotaan mengamanatkan kecukupan sarana dan prasarana rekreasi dan olahraga berupa tempat-tempat rekreasi, gelanggang olahraga, gedung kesenian dan balai pertemuan.

Grafik 3.21 Perkembangan Lapangan Usaha Jasa-jasa di Kota Depok



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

3.1.2.2.1.2. INDEKS HARGA IMPLISIT

Indeks Harga Implisit adalah suatu indeks harga yang menggambarkan perbandingan antara nilai produk atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan, sedangkan perubahan Indeks Harga Implisit mencerminkan tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu periode.

Perubahan Indeks Harga Implisit dapat dianggap lebih menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dibandingkan dengan indikator inflasi lainnya seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Sembilan Bahan Pokok. Hal ini disebabkan Indeks Harga Implisit sudah mewakili semua jenis harga yaitu harga konsumen, harga produsen, harga perdagangan besar, harga eceran dan harga lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis harga yang dipergunakan dalam penghitungan nilai produksi setiap sektor.

Dari Tabel di bawah diperoleh bahwa pada tahun 2013 di Kota Depok telah terjadi inflasi (perubahan Indeks Harga Implisit) berbagai jenis produk sebesar 8,77 persen. Sektor yang yang mengalami inflasi terbesar adalah sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 18,82 persen, sedangkan yang terendah adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 4,83 persen.

**Tabel 3.5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor
Kota Depok Tahun 2009-2013**

SEKTOR	2009	2010	2011	2012*)	2013*)
A. PRIMER	178,47	190,81	195,29	206,01	233,89
1. PERTANIAN	178,47	190,81	195,29	206,01	233,89
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	-	-	-	-	-
B. SEKUNDER	206,71	224,05	233,50	241,45	257,64
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	204,12	222,58	234,09	242,18	255,98
4. LISTRIK,GAS & AIR BERSIH	317,65	330,73	334,63	342,30	391,57
5. BANGUNAN	170,24	183,49	187,26	193,14	205,37
C. TERSIER	256,58	275,43	285,73	299,85	331,09
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	266,82	288,48	298,61	316,22	349,75
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	291,48	300,21	312,40	314,72	373,93
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	196,90	209,02	214,51	221,02	231,70
9. JASA - JASA	222,03	238,68	251,10	261,30	274,82
PDRB KOTA DEPOK	229,44	247,64	257,80	268,64	292,20
Inflasi Depok	5,57	7,93	4,10	4,20	8,77
PDRB PROVINSI JAWA BARAT	217,47	227,37	239,46	250,93	259,84
Inflasi Jawa Barat	13,31	4,55	5,32	4,79	3,55

*) Data Sementara PDRB Kota Depok Tahun 2013 (BPS, 2014)

Untuk kelompok sektor, inflasi terbesar adalah sektor primer sebesar 13,53 persen, kedua sektor Tersier sebesar 10,42 persen, sedangkan yang terendah sektor Sekunder 6,71 persen. Perkembangan Inflasi Kota Depok Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada **Grafik 3.22**.

Grafik 3.22 Perkembangan Inflasi Kota Depok



Sumber : Diolah dari PDRB Kota Depok 2013(BPS,2014)

3.1.2.2.1.3. PDRB PER KAPITA DAN INDEKS GINI

Indikator makro yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat adalah pendapatan per kapita, makin tinggi angka tersebut maka secara rata-rata masyarakat makin sejahtera. Selama 10 tahun terakhir, PDRB perkapita Kota Depok (atas dasar harga konstan) mengalami peningkatan dari Rp. 3.113.484 pada tahun 2001 menjadi Rp. 4.056.982 pada tahun 2013. Pernah mengalami penurunan pada tahun 2009 dan 2010 tetapi naik kembali pada tahun 2011 dan 2012. Sedangkan PDRB per kapita atas harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp. 11.854.685 mengalami peningkatan dibanding tahun 2001 yang masih sebesar Rp. 3.470.917. Kenaikan PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa terjadi kenaikan daya beli masyarakat Kota Depok secara umum.

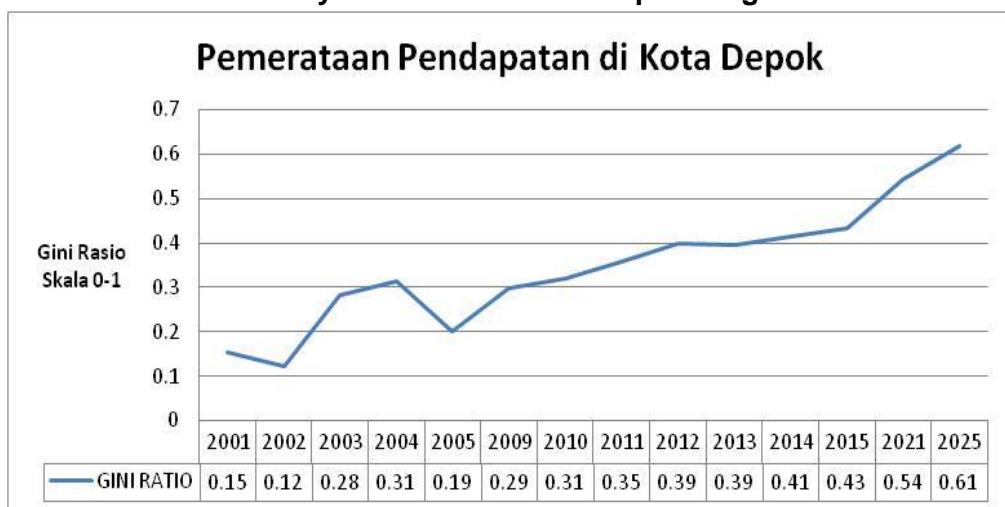
Grafik 3.23 Perkembangan PDRB per Kapita di Kota Depok



Sumber : Diolah dari Inkesra Kota Depok 2006 dan PDRB Kota Depok 2013(BPS,2014)

PDRB per kapita yang tinggi tidak serta-merta dinikmati oleh seluruh warga masyarakat. Pemerataan pendapatan yang diukur dengan indikator gini ratio, menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kota Depok pernah mengalami perbaikan (pendapatan merata), namun pada tahun 2011 indeks gini menunjukkan tidak meratanya pendapatan masyarakat. Perlu upaya untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara penduduk mampu dengan yang kurang melalui pemerataan pembangunan wilayah, pemberdayaan masyarakat dan kemudahan akses terhadap sumberdaya modal dan pasar. Grafik perkembangan gini ratio di Kota Depok sampai tahun 2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.24**.

Grafik 3.24 Proyeksi Indeks Gini Sampai Dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari Inkesra Kota Depok 2006 dan PDRB Kota Depok 2013(BPS,2013)

3.1.2.2.2. PEMBANGUNAN MANUSIA

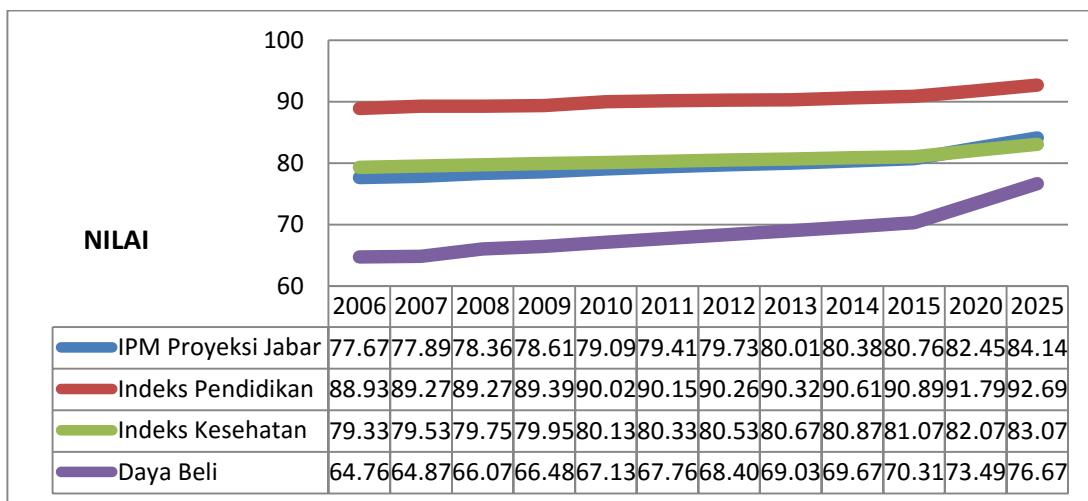
Pembangunan manusia bertujuan meningkatkan kemampuan penduduk menuju hidup yang lengkap, produktif dan menyenangkan, yang ditunjukkan oleh umur panjang, kesehatan baik, terdidik, pendapatan cukup untuk membeli makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut dirinya. Modal manusia memegang peran sentral dalam proses pembangunan karena memberikan keuntungan yang tinggi, menghemat penggunaan modal fisik dan modal alam, menghasilkan pembangunan yang lebih cepat, berkesinambungan, serta lebih merata.

Pembangunan manusia adalah suatu upaya pembangunan kemampuan diri manusia, yang mengandung empat unsur, yaitu produktivitas (productivity), pemerataan (equity), kesinambungan (sustainability), dan pemberdayaan (empowerment). Hal ini dapat dicapai melalui program pembangunan yang menitik-beratkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, berupa umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif serta mendapat penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak.

3.1.2.2.2.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Melalui berbagai program pembangunan manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok maupun para pihak terkait menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan, bahkan IPM Kota Depok merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat. IPM adalah indikator yang disepakati sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia. Tingginya nilai IPM menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat rata-rata berada pada posisi sejahtera. Pada **Grafik 3.25** dapat dilihat tren IPM dan Indeks-indeks pendukungnya (indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli) sampai dengan tahun 2025.

Grafik 3.25 Proyeksi Perkembangan IPM Kota Depok sampai dengan Tahun 2025



Sumber: Bappeda Kota Depok 2012, Bappeda Jabar 2011

Meskipun capaian agregat IPM Kota relatif tinggi, namun jika dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat Kecamatan, menunjukkan adanya gap atau ketidakmerataan nilai IPM. Berdasarkan data IPM tahun 2013, terdapat 6 kecamatan dengan nilai IPM kurang dari 76,73 (di bawah rata-rata Kota), sedangkan Kecamatan Cipayung memiliki IPM terendah, yaitu 69,95(**Tabel 3.8**). Perlu strategi pembangunan yang lebih merata dengan berbasis pada pemenuhan kebutuhan pelayanan tiap-tiap kecamatan, dalam jangka pendek difokuskan kepada kecamatan tertinggal. Jika hal itu bisa dilakukan maka pada akhirnya akan meningkatkan IPM Kota.

Penyebab utama ketertinggalan suatu wilayah terkait dengan kebijakan pembangunan yang terlalu berdimensi sektoral. Belum optimalnya pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan dapat dirasakan dari adanya ketimpangan antarwilayah. Diabaikannya dimensi spasial membuat warna pembangunan daerah ditentukan oleh mekanisme pasar. Akibatnya modal dan orang cenderung memilih wilayah yang menawarkan return yang lebih tinggi dan menarik, yang pada gilirannya wilayah yang maju semakin maju, yang tertinggal tetap tertinggal. Kedua, perlu adanya integrasi strategi pembangunan pembangunan perkotaan. Kecamatan tertinggal umumnya masih tertinggal dalam berbagai jenis infrastruktur. Dengan integrasi ini diharapkan dapat dikembangkan keterkaitan “desa”-kota. Ketiga, diperlukan *Big Push* bagi percepatan pembangunan wilayah tertinggal. Dalam konteks daerah tertinggal, “daya dorong yang besar” bisa diartikan modal dan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat-pusat bisnis, pasar, dan jejaring internasional tampaknya

perlu menjadi prioritas. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan percepatan pembangunan daerah tertinggal perlu diupayakan dengan berbagai cara diantaranya melalui: (1) pemberian insentif kepada investor agar tertarik berinvestasi di daerah tertinggal, dan (2) *mainstraining* alokasi anggaran untuk fokus pada penyelesaian ketertinggalan wilayah.

Tabel 3.6. Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2013

No	Kecamatan	KOMPONEN IPM 2013				
		AHH	AMH	RLS	DB (PPP)	IPM
1	Sawangan	68,16	99,11	10,45	643,12	75,55
2	Bojongsari	69,03	96,44	10,19	632,89	74,47
3	Pancoran Mas	68,53	99,51	11,42	653,34	77,36
4	Cipayung	67,83	96,55	9,14	592,63	69,95
5	Sukmajaya	74,81	99,52	11,90	653,85	81,23
6	Cilodong	73,86	97,59	10,53	614,85	76,27
7	Cimanggis	73,98	99,35	10,76	652,16	79,77
8	Tapos	69,52	98,78	10,76	612,82	74,13
9	Beji	69,50	99,69	12,02	655,59	78,55
10	Limo	69,41	99,09	9,58	656,57	76,63
11	Cinere	71,91	98,86	11,87	663,55	80,20
KOTA DEPOK		73,64	99,04	10,98	658,25	80,14

Sumber : IPM Kota Depok (BPS), 2014

Peningkatan IPM membutuhkan keterlibatan berbagai *stakeholder*. Sebagai indeks komposit, IPM terdiri atas sejumlah dimensi dan indikator, dan sebagian dari dimensi dan indikator tersebut bersifat *outcomes based*. Dengan kata lain, perbaikan dimensi dan indikator tersebut tidak mungkin bisa dicapai dengan program tunggal dan juga aktor tunggal (baca: pemerintah). Implikasinya, di masa depan, perlu dibangun dan dikembangkan sinergitas antar level pemerintahan dan antar SKPD serta kolaborasi antar pelaku/aktor pembangunan.

IPM merupakan indeks komposit dari 3 indeks tunggal, yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya Beli.

1) INDEKS KESEHATAN

Indeks Kesehatan ditentukan oleh Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup Kota Depok tahun 2013 mencapai **73,64** tahun, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya (**73,34** tahun). Selama kurun waktu 2006-2013, AHH Kota Depok mengalami

peningkatan dari 73,03 menjadi 73,64. Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh kinerja program pembangunan kesehatan pada umumnya, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga khususnya ibu hamil dan balita, peningkatan kecukupan gizi dan kalori serta program penanggulangan kemiskinan. Tantangan ke depan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi adalah belum stabilnya pencapaian cakupan kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kompeten dan cakupan balita gizi buruk terawat, sehingga perlu upaya untuk mempertahankan tren peningkatan.

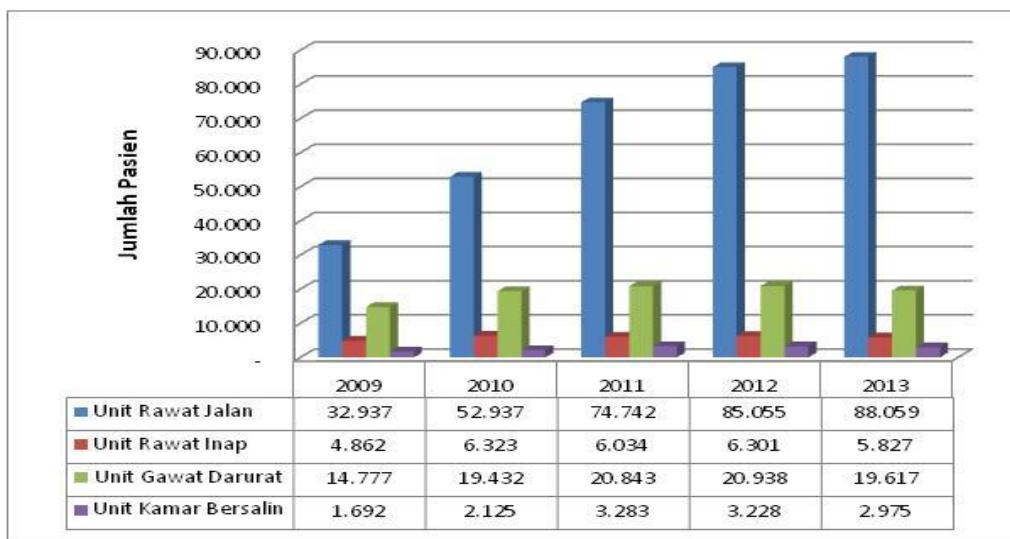
Dengan capaian AHH yang tinggi, menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kesehatan pada umumnya sudah baik, namun demikian ke depan capaian AHH masih bisa dan perlu terus ditingkatkan. Sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya, adalah membaiknya perawatan kesehatan, meningkatnya akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan, tersedianya sarana dan prasarana kesehatan secara luas dan merata, membaiknya pemahaman dan kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, membaiknya kualitas dan sanitasi lingkungan, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat, dan sebagainya.

Bidang kesehatan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diperbaiki di masa mendatang, antara lain adalah :

RSUD Kota Depok.

Kondisi RSUD belum memadai yaitu kekurangan fasilitas pelayanan, utamanya sarana tempat tidur dan gedung rawat inap, sehingga banyak pasien yang seharusnya rawat inap dirujuk ke Rumah Sakit lainnya. Peningkatan kondisi RSUD perlu memperoleh perhatian karena pasien yang berobat ke RSUD semakin meningkat. Data Kunjungan pasien RSUD Kota Depok dapat terihat pada **Grafik 3.26** berikut ini.

Grafik 3.26 Perkembangan Kunjungan Pasien RSUD Kota Depok



Sumber : RSUD Kota Depok, 2014

Sarana dan Tenaga Kesehatan

Jumlah rumah sakit dan puskemas saat ini masih dirasakan kurang, yaitu rata-rata 3 buah per 100.000 penduduk. Sedangkan petugas kesehatan per 100.000 penduduk pada tahun 2005 sebanyak 69,11 orang, namun pada akhir tahun 2011 menurun sebanyak 63,35. Demikian halnya jumlah dokter, mengalami naik turun, namun ke depan diharapkan baik sarana dan tenaga kesehatan haruslah memadai seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat.

Posyandu

Rasio posyandu per satuan balita adalah 200 Artinya bahwa 1 buah posyandu melayani balita sebanyak 200 anak. Idealnya rasio tersebut adalah 100, artinya 1 posyandu melayani 100 balita.

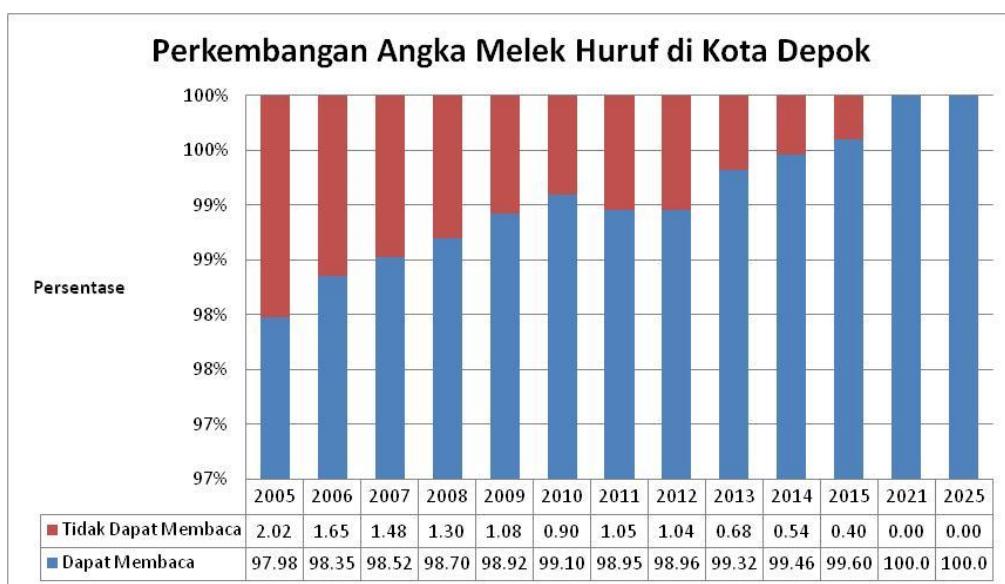
TBC BTA

Cakupan penanganan TBC BTA yang cukup tinggi di Kota Depok, masih belum ideal karena sampai tahun 2012 baru ada 2 (dua) buah RS yang melaksanakan DOTS (penanganan pasien TBC secara rutin), yaitu RSUD dan RS Hermina serta 32 puskesmas. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang semua RS di Kota Depok dapat bekerjasama dan melaksanakan program DOTS bagi masyarakat Depok sehingga dapat menekan kejadian TBC BTA.

2) INDEKS PENDIDIKAN

Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2013 AMH mencapai 99,04%, meningkat dibanding tahun 2011 sebesar 98,95%. Kendati AMH Kota Depok sudah cukup tinggi, namun angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada 0,96 % penduduk Kota Depok yang buta huruf. Tren perkembangan AMH selama 2006-2013 pernah mengalami penurunan pada tahun 2011, tetapi naik kembali pada tahun 2013. Adapun estimasi perkembangan AMH dapat dilihat pada **Grafik 3.27**. Berdasarkan gambar tersebut, AMH diharapkan sudah bisa mencapai 100% sebelum tahun 2025.

Grafik 3.27 Estimasi Perkembangan AMH di Kota Depok



Sumber : Diolah dari Inkesra Kota Depok (BPS), 2013

Rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2013 mencapai 10,98 tahun, mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2011 (10,96 tahun). Angka ini merupakan yang tertinggi di Jawa Barat yang rata-rata masih sebesar 8,2 tahun. Selama kurun 2006-2013, RLS mengalami peningkatan, pada awalnya tumbuh relatif datar, tetapi sejak tahun 2010 terjadi peningkatan yang cukup berarti. Ke depan, RLS Kota Depok akan terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelayanan bidang pendidikan.

Untuk memperbaiki indikator rata-rata lama sekolah, sedikitnya ada lima perspektif yang harus dikembangkan yaitu: (1) memastikan bahwa anak-anak yang sementara duduk di bangku sekolah tetap bisa bersekolah; (2) menarik anak-anak yang putus sekolah untuk kembali duduk di bangku sekolah; (3) "memaksa" anak-anak yang terpaksa bekerja - karena alasan ekonomi keluarga- untuk berhenti bekerja dan kembali ke bangku sekolah;

(4) pelayanan bidang pendidikan benar-benar sanggup menjangkau seluruh anak usia sekolah, termasuk yang berada di wilayah perbatasan dan (5) melahirkan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama pendidikan lanjutan.

Untuk meningkatkan indikator angka melek huruf, perspektif harus diarahkan untuk (1) mendorong orang-orang yang buta huruf agar termotivasi untuk belajar menulis dan membaca, (2) merubah bentuk fasilitasi dari suasana “kelas” yang cenderung formal menjadi hubungan personal yang bersifat informal dan interaktif, (3) merawat kemampuan baca-tulis orang yang sudah melek huruf yang sebelumnya buta huruf; (4) mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan buta huruf; dan (5) menjadikan pemberantasan buta huruf sebagai sebuah “gerakan” yang berbasis kelurahan dengan model intervensi *by name by address*.

Prasarana Sekolah

Jumlah sekolah negeri masih dianggap kurang di Kota Depok. Daya tampung siswa di SMPN baru mencapai 25% dari total siswa SMP, dan kapasitas daya tampung siswa di SMAN/SMKN baru mencapai 16,6% dari total siswa SMA. Kekurangan daya tampung sekolah negeri diatasi oleh keberadaan sekolah swasta.

Jumlah SD di Kota Depok pada tahun 2010 sebanyak 394 buah, SMP 154 buah, sekolah SMA 48 buah dan sekolah kejuruan 79 buah. Data tersebut jauh dari yang diproyeksikan sebelumnya di mana pada tahun 2010 diharapkan tersedia 533 SD, 231 SMP, dan 164 SMA. Bahkan sampai tahun 2012, proyeksi tersebut juga belum dapat diwujudkan. Menurut Depok Dalam Angka Tahun 2012, jumlah SD sebesar 411 buah, SMP 164 buah, dan SMA sebesar 51 buah. Pertumbuhan sarana pendidikan dasar diperkirakan tidak akan dapat mengejar pertumbuhan penduduk, meskipun jumlah bangunan SD terus bertambah. Pada tahun 2005 di Kota Depok ada 346 SD dan jumlah penduduk 1.374.522 orang, berarti untuk setiap 100.000 penduduk ada 25 SD dan rasio ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2011 jumlah SD meningkat menjadi 393 buah, sementara itu jumlah penduduk juga meningkat menjadi 1.813.613 sehingga jumlah SD untuk setiap 100.000 penduduk menurun menjadi 22 SD. Jika kecenderungan ini berlanjut maka di masa depan kapasitas SD dibandingkan jumlah penduduk akan lebih rendah dari saat ini.

Sebagaimana sarana pendidikan sekolah dasar, sarana pendidikan SLTP di Kota Depok diperkirakan juga tidak akan dapat mengejar pertumbuhan penduduk. Meskipun jumlah

bangunan SLTP terus bertambah, namun perbandingan antara jumlah SLTP dengan jumlah penduduk terus menurun sejak tahun 2000. Jika kecenderungan ini berlanjut maka di masa depan kapasitas SLTP dibandingkan jumlah penduduk akan lebih kecil dari saat ini. Saat ini jumlah SLTP ada sebanyak 131 dengan murid sebanyak 43.463 murid sehingga setiap 100.000 penduduk ada 10 SLTP. Pada tahun 2011 setiap 100.000 penduduk ada 9 SLTP, diperkirakan pada tahun 2015 hanya ada 8 SLTP, pada tahun 2020 ada 8 SLTP dan diperkirakan tahun 2025 ada 7 SLTP.

Sarana pendidikan SLTA agak berbeda dengan sarana sekolah dasar, diperkirakan pertumbuhan jumlah SLTA akan sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Sehingga dari tahun 2000 yang lalu sampai tahun 2020 kelak perbandingan jumlah SLTA dengan jumlah peduduk di Kota Depok selalu tetap sebesar 7 SLTA untuk setiap 100.000 penduduk. Ini berarti kelak di masa depan persentase penduduk Kota Depok yang pernah mengenyam bangku SLTA akan semakin sedikit. Banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor ekonomi, banyaknya anak-anak jalanan, sulitnya lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.

3) INDEKS DAYA BELI

Kesejahteraan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan, hal itu terlihat dari daya beli di Kota Depok sebesar 658,25 ribu rupiah pada tahun 2013, meningkat dibanding tahun 2011 (652,06 ribu rupiah) . Daya beli masyarakat Depok juga lebih tinggi dari nilai rata-rata Provinsi Jawa Barat yang diperkirakan sebesar 635,10 ribu rupiah. Selama kurun waktu 2007-2013 daya beli Kota Depok mengalami peningkatan dan diperkirakan akan terus meningkat pada masa mendatang. Tantangan potensial terhadap daya beli adalah angka kesempatan kerja yang terbatas dan inflasi yang tinggi. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi harus dipacu lebih berkualitas sehingga serapan terhadap angkatan kerja bisa lebih tinggi.

Dalam jangka menengah dan panjang, strategi utama untuk meningkatkan pendapatan atau pengeluaran per kapita perlu difokuskan pada dua aspek utama. **Pertama**, menjaga dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, melalui (1) Peningkatan arus investasi, baik asing maupun domestik, melalui implementasi berbagai kebijakan seperti promosi investasi, pengembangan kemitraan, insentif fiskal, reformasi birokrasi, dsb.; (2) Peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur, terutama yang menunjang aktivitas perekonomian, seperti jalan, pergudangan, irigasi, dsb; (3) memberi perhatian terhadap sektor-sektor ekonomi yang memiliki elastisitas tinggi bagi pertumbuhan ekonomi

dan penciptaan kesempatan kerja, seperti sektor industri manufaktur, perdagangan dan jasa, dsb.

Kedua, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk harus ditekan sedemikian rupa sehingga berada di bawah satu persen per tahun. Ini diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat memberi dampak yang lebih berarti bagi perbaikan taraf hidup masyarakat yang diindikasikan oleh peningkatan pendapatan atau pengeluaran per kapita.

3.1.2.2.2. KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

1) KEMISKINAN

Meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun tidak serta merta seluruh penduduk menikmati hasil pertumbuhan tersebut. Hal itu terlihat dari masih adanya kemiskinan dan pengangguran di Kota Depok, serta indeks gini yang potensial menuju ketidakmerataan pada 2 tahun terakhir. Pertumbuhan kota yang pesat membawa konsekuensi memunculkan kemiskinan, tingginya pengangguran, timbulnya kawasan kumuh, masalah ketidakjangkauan fasilitas dan pelayanan pendidikan, kesehatan dan air bersih oleh sebagian warga kota.

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Berdasarkan data PPLS 2011, tingkat kemiskinan Kota Depok di tahun 2010 sebesar 2,84 % dan tahun 2012 menurun menjadi sebesar 2,75%, berada jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional (13,33 %) maupun provinsi Jawa Barat (10,93 %). Artinya penduduk di atas garis kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 97,25%. Ke depan sampai tahun 2025 tingkat kemiskinan diharapkan semakin menurun, meskipun terdapat kecenderungan stabil (**Grafik 3.28**).

Grafik 3.28 Kecenderungan Jumlah Orang Miskin sampai dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari Kota Depok Dalam Angka (BPS), 2008-2013

Permasalahan kemiskinan bersifat multi dimensional dan tidak hanya sekedar masalah ekonomi-keuangan yang berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh pendapatan maupun kemampuan membeli barang dan jasa (pengeluaran). Konsep kemiskinan semakin luas (bukan hanya physiological deprivations, namun hingga mencakup social deprivations), penyebab kemiskinan semakin luas (termasuk sosial, politik, budaya, kekerasan dan sumber daya alam), dan fokus kemiskinan semakin dalam (mencakup hingga strategi perlindungan sosial, mitigasi dan pengurangan resiko). Kemiskinan merupakan meta masalah (masalah di atas segala masalah), sehingga untuk mengatasinya harus terlebih dahulu menyelesaikan seluruh masalah pada tingkat di bawahnya (low level problem), seperti masalah kesehatan, pendidikan, ketersediaan pangan dan nutrisi, air bersih dan sanitasi, akses permodalan, ketersediaan infrastuktur, dampak perubahan cuaca dan bencana alam, konflik dan kekerasan, stabilitas keamanan, korupsi, bad governance yang mengakibatkan misalokasi sumber daya alam dan ketidak-adilan sosial, kepemilikan aset produksi, nilai tukar petani/nelayan, angka kelahiran yang tinggi, pengelolaan fiskal dan moneter, hingga bad corporate governance yang menyebabkan bubble economy dan krisis keuangan.

Kompleksitas anatomi kemiskinan tersebut menyebabkan permasalahan kemiskinan tidak hanya dapat diatasi dengan pendekatan ekonomi semata, namun sangat terkait dengan dinamika sosial, politik dan budaya yang melekat dalam suatu komunitas, sehingga pengentasan kemiskinan bersifat multi-dimensi dan memerlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta antar Sektor dan antar Regional. Strategi besar Pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional adalah dengan menerapkan *Four Track Strategy*, yaitu: *pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment*. Strategi 4-jalur ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (*growth with equity*) melalui perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menekankan pada kelestarian lingkungan. Melalui strategi tersebut diharapkan persoalan kesenjangan juga dapat semakin dikurangi.

Strategi Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan difokuskan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Klaster Pertama: Program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin. Program utamanya adalah Beras Miskin (Raskin), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
2. Klaster Kedua: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran kelompok masyarakat/kecamatan miskin.
3. Klaster Ketiga: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Melalui pembagian klaster bertingkat tersebut diharapkan kelompok keluarga miskin yang awalnya menjadi penerima program klaster 1 akan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan selanjutnya naik kelas menjadi penerima program klaster 2 untuk terus memperbaiki kehidupannya hingga mampu memanfaatkan program klaster 3 dan akhirnya diharapkan dapat keluar dari jeratan masalah kemiskinan. Untuk memperkuat strategi 3 klaster

tersebut, diluncurkan Klaster Keempat yang terdiri dari Program Rumah Murah, Transportasi Umum Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, serta Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Pinggir Perkotaan.

Secara konseptual Strategi Pengentasan Kemiskinan Nasional (*National Poverty Reduction Strategy*) adalah penting namun tidak mencukupi. Diperlukan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mempertajam program dan target penerima sasaran melalui Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang mencakup inisiatif dan kearifan lokal. Sebagai unit Pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, maka Pemerintah Daerah lebih dapat memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerahnya, sehingga pelayanan publik dapat diberikan dalam jumlah yang lebih besar (*production efficiency*), sumber daya dialokasikan lebih efektif dan akuntabel (*allocation efficiency and accountabel*) serta partisipasi dan aspirasi masyarakat lebih diakomodasi (*empowerment and participation*), termasuk kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Disamping penajaman program pengentasan kemiskinan dan target sasaran serta penguatan partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah juga memiliki peranan penting untuk memastikan situasi yang kondusif di wilayahnya. Pemerintah Daerah perlu pula memastikan ketersediaan serta keterjangkauan kebutuhan dasar di daerahnya agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya ekonomi yang tidak wajar, termasuk ancaman kelangkaan dan kenaikan harga (inflasi) bahan pokok. Pemahaman yang mendalam dari Pemerintah Daerah terhadap wilayahnya akan memperkuat stabilitas maupun ketahanan ekonomi sehingga kelompok masyarakat yang rentan akan terhindar dari ancaman gejolak eksternal yang akan menyebabkan mempengaruhi daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

2) PENGANGGURAN

Masalah lain yang terkait dengan pembangunan manusia adalah kesempatan kerja bagi masyarakat, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang ekonomi. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Pada Tahun 2010 diprediksi angkatan kerja di Kota Depok berjumlah 814.740 jiwa. Namun berdasarkan data BPS, angkata kerja hanya berjumlah 779.963 jiwa yang kemudian meningkat menjadi 815.062 jiwa pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 terjadi peningkatan angkatan kerja menjadi 894.860 jiwa,

terdiri atas laki-laki sebanyak 608.375 jiwa dan perempuan 286.485 jiwa. Dengan demikian masih ada yang belum mendapat kesempatan kerja, yaitu sebanyak 68.669 jiwa yang terdiri atas laki-laki sekitar 50.376 jiwa dan perempuan 18.293 jiwa. Di Kota Depok yang termasuk dalam bukan angkatan kerja sebanyak 531.408 jiwa, dengan rincian 125.260 jiwa sedang sekolah, 359.951 jiwa mengurus rumah tangga dan lainnya sebanyak 46.197 jiwa sebagaimana tercantum pada **Tabel 3.7.** dibawah ini.

Tabel 3.7. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2013

Kegiatan Utama	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan	
	N	%	N	%	N	%
1. Angkatan Kerja	608.375	84,74	286.485	40,44	894.860	62,74
a. Bekerja	557.999	91,72	268.192	93,61	826.191	92,33
b. Pengangguran	50.376	8,28	18.293	6,39	68.669	7,67
2. Bukan Angkatan Kerja	109.553	15,26	421.855	59,56	531.408	37,26
a. Sekolah	51.050	46,60	74.210	17,59	125.260	23,57
b. Mengurus RMT	21.225	19,37	338.726	80,29	359.951	67,74
c. Lainnya	37.278	34,03	8.919	2,11	46.197	8,69
J U M L A H	717.928	100	708.340	100	1.426.268	100

Sumber : Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

Berdasarkan kecenderungan data angkatan kerja 5 tahun terakhir, dibuat proyeksi angkatan kerja sampai dengan tahun 2025 seperti ditampilkan pada **Grafik 3.29.**

Grafik 3.29 Proyeksi Angkatan Kerja Hingga Tahun 2025



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2005-2013

Data Sakernas menunjukkan bahwa pada 2012, tingkat pengangguran terbuka Kota Depok sebesar 10,6%, di atas angka pengangguran Jawa Barat (9,8%) dan nasional (6,56%). Angka ini relatif meningkat dari tahun 2010 sebesar 8,72% (Inkesra 2012). Indikator Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Angka pengangguran yang tinggi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas, karena hanya ditentukan oleh konsumsi bukan oleh investasi yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Kecenderungan di masa mendatang, angka pengangguran akan meningkat bersamaan dengan makin bertambahnya jumlah penduduk.

Perlu terobosan kebijakan pembangunan yang komprehensif dalam mengatasi pengangguran, tidak hanya yang bersifat langsung dengan membuka kesempatan berusaha bagi mereka, tetapi juga melalui upaya tidak langsung seperti pengendalian migrasi yang masuk ke Kota Depok dan pendidikan kejuruan. Migrasi sumberdaya manusia yang tidak berketrampilan berpotensi memicu pengangguran, kemungkinan hal inilah yang menjadi faktor penyebab tingginya angka pengangguran. Strategi peningkatan proporsi SMK yang lebih besar daripada SMU perlu dipertajam agar kurikulum SMK benar-benar berbasis kebutuhan lokal sehingga lulusan yang dihasilkan dapat langsung dengan mudah memperoleh pekerjaan.

3.1.2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jenis pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak dapat dilindungi.

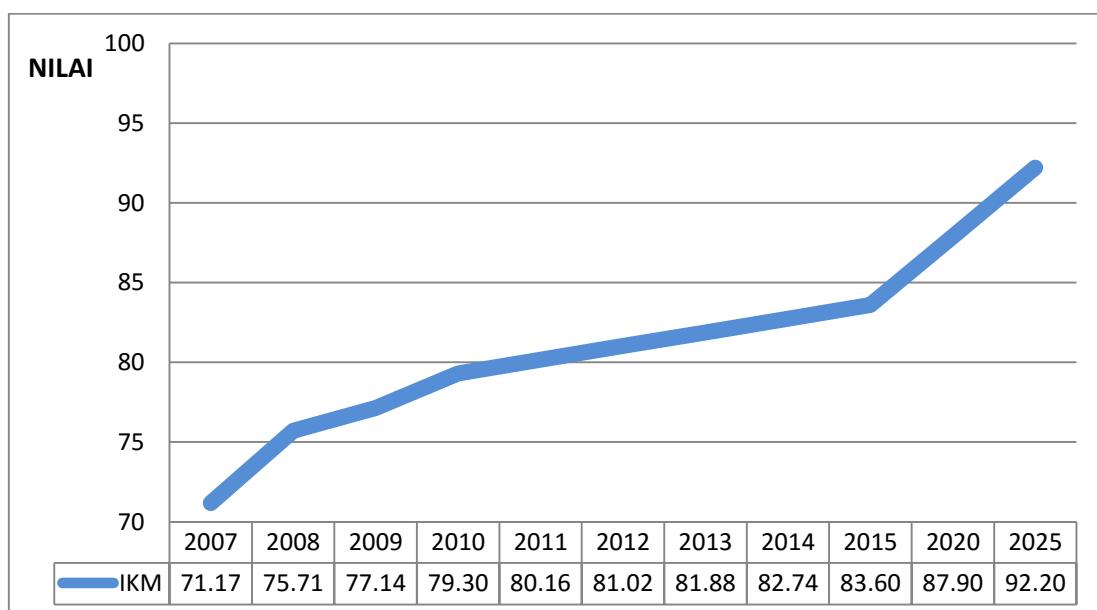
3.1.2.3.1. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator yang diamanatkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan kepada masyarakat. Hasil survei terhadap 21 jenis pelayanan oleh Pemerintah Kota Depok yang dilaksanakan tiap tahun sejak tahun 2007 menghasilkan peningkatan Nilai IKM yang cukup signifikan. Selama kurun 2007-2012, IKM Kota Depok mengalami peningkatan dari 71,17 menjadi 81,02. Artinya bahwa upaya perbaikan

terhadap unsur-unsur pelayanan publik menghasilkan kinerja yang semakin memuaskan masyarakat.

Meskipun secara agregat menghasilkan nilai IKM cukup tinggi, namun masih terdapat beberapa jenis pelayanan yang perlu ditingkatkan antara lain pelayanan terminal dan persampahan yang nilai IKM-nya masih relatif tertinggal. Dengan terbangunnya Terminal Terpadu dan Terminal Jatijajar, serta upaya untuk mengelola sampah secara lebih komprehensif, diharapkan bisa meningkatkan nilai IKM Kota Depok. Tren nilai IKM sampai tahun 2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.30**.

Grafik 3.30 Tren IKM Kota Depok Sampai Dengan Tahun 2025



Pelayanan publik Kota Depok ke depan akan dihadapkan pada berbagai tantangan terutama kapasitas anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai untuk menyesuaikan tuntutan masyarakat yang makin meningkat. Aspek lainnya adalah menyangkut integritas dan profesionalisme aparatur yang menentukan sistem dan prosedur pelayanan yang makin efisien, murah dan cepat sehingga makin memuaskan masyarakat sebagai *customer*.

3.1.2.3.2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam 5 tahun terakhir cukup mengemuka sebagai bagian dari pembangunan sumberdaya manusia dan hak asasi, sehingga di Kota Depok dibentuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Pangan. Tujuan yang ingin diwujudkan adalah meningkatkan peran dan keterlibatan

perempuan dalam pembangunan di berbagai bidang. Selain itu juga dalam rangka melindungi perempuan dari berbagai kemungkinan tindak kekerasan. Menurut Sakernas (2010), jumlah penduduk perempuan yang bekerja pada tahun 2010 mencapai 272.554 orang (38,12%) dari total yang bekerja sebesar 714.891 orang. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya (34,45%) dan diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang.

Dalam hal perlindungan anak, perkembangannya juga sangat positif seiring dengan pencanangan Kota Depok sebagai Kota Layak Anak (KLA). Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan kabupaten/ kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Adapun Tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

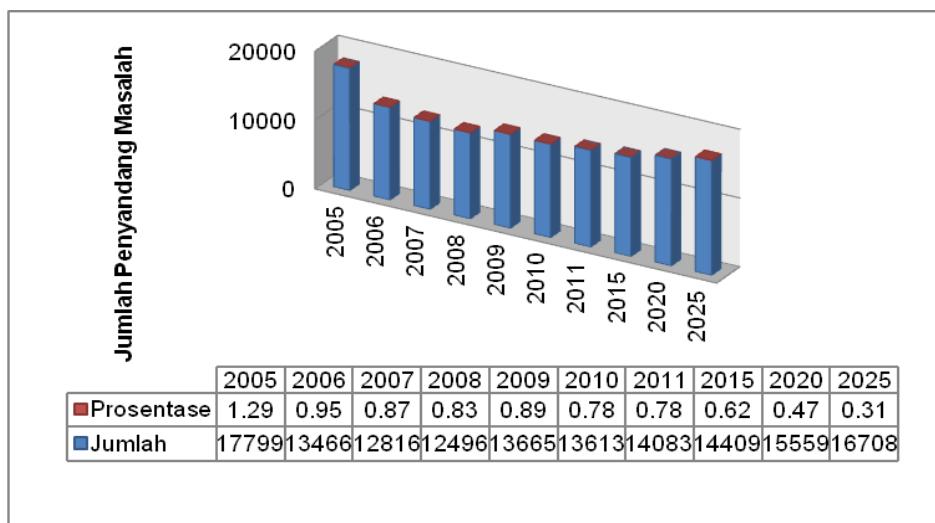
Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Depok perlu terus diperluas cakupannya, dari RW Layak Anak hingga ke tingkat Kelurahan Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan akhirnya terwujudlah Kota Layak Anak. KLA dikembangkan karena anak merupakan investasi SDM yang harus tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi. Mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan yang diharapkan bisa membawa bangsa menuju pada kemajuan. Pemerintah telah menjamin hak-hak dan kewajiban anak-anak Indonesia melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Selain itu, anak-anak juga berhak memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Untuk mewujudkan hal itu, maka perlu diciptakan kawasan bermain anak. Fasilitas bermain bisa merangsang kecerdasan anak, tidak hanya kecerdasan kognitif dan kecerdasan sosial, tetapi juga kecerdasan fisik/keterampilan kinestetik.

3.1.2.3.3. SOSIAL

Pesatnya pembangunan di kawasan kota juga menyimpan potensi bagi munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial akibat urbanisasi dan kompetisi yang ketat dalam bidang ekonomi di kota. Meskipun persentase angka PMKS kecil, secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 terdapat 17.799 orang PMKS, menurun pada tahun 2011, namun diperkirakan meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 14.409 orang, 15.559 orang pada tahun 2020, dan naik menjadi 16.708 orang pada tahun 2025.

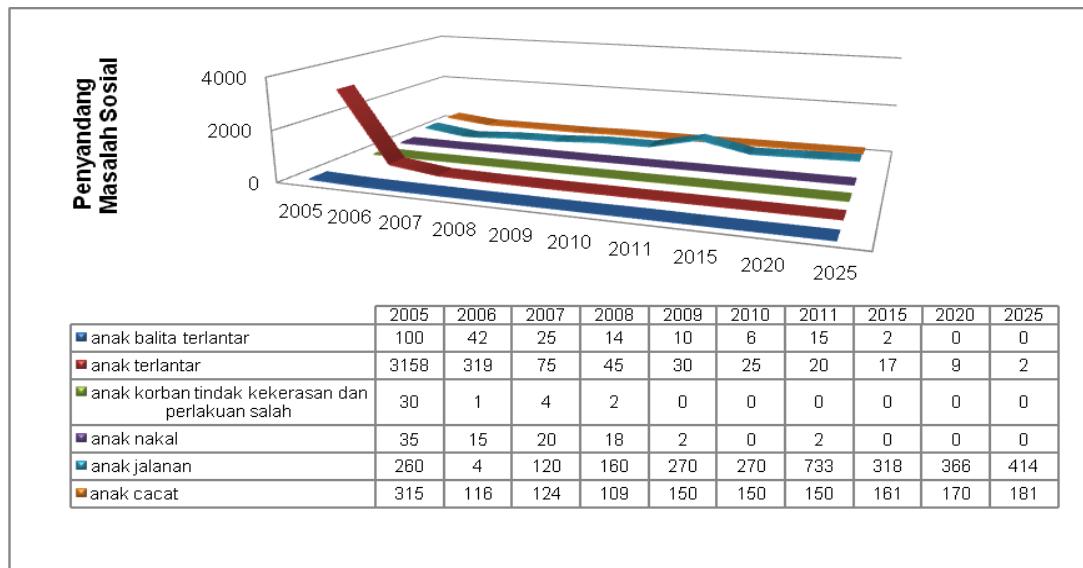
Diperkirakan jenis masalah sosial yang akan dihadapi di masa depan, diurutkan dari jumlah penyandang yang paling banyak, adalah anak terlantar, orang jompo, penderita penyakit kronis, dan korban narkotika. Secara grafis, perkembangan jumlah penyandang masalah sosial dapat dilihat pada **Grafik 3.31**.

Grafik 3.31 Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial di Kota Depok



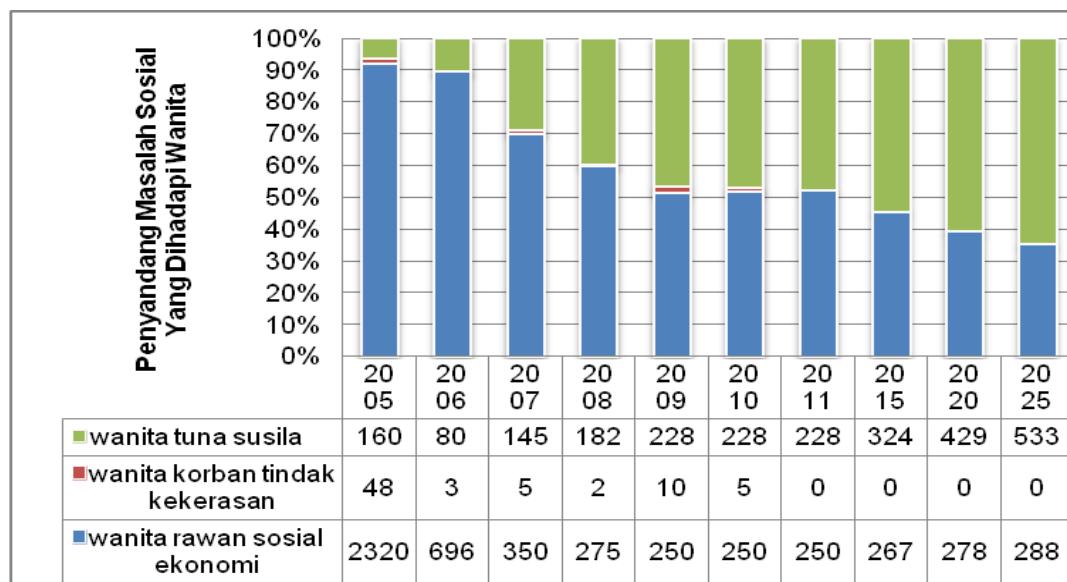
Penyandang masalah sosial di tingkat anak-anak paling banyak adalah anak jalanan, anak terlantar dan anak cacat. Masalah anak jalanan dan anak cacat memiliki kecenderungan meningkat sampai tahun 2025 hal ini dikarenakan semakin beratnya kehidupan dan perekonomian (**Grafik 3.32**).

Grafik 3.32 Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial Anak-anak di Kota Depok

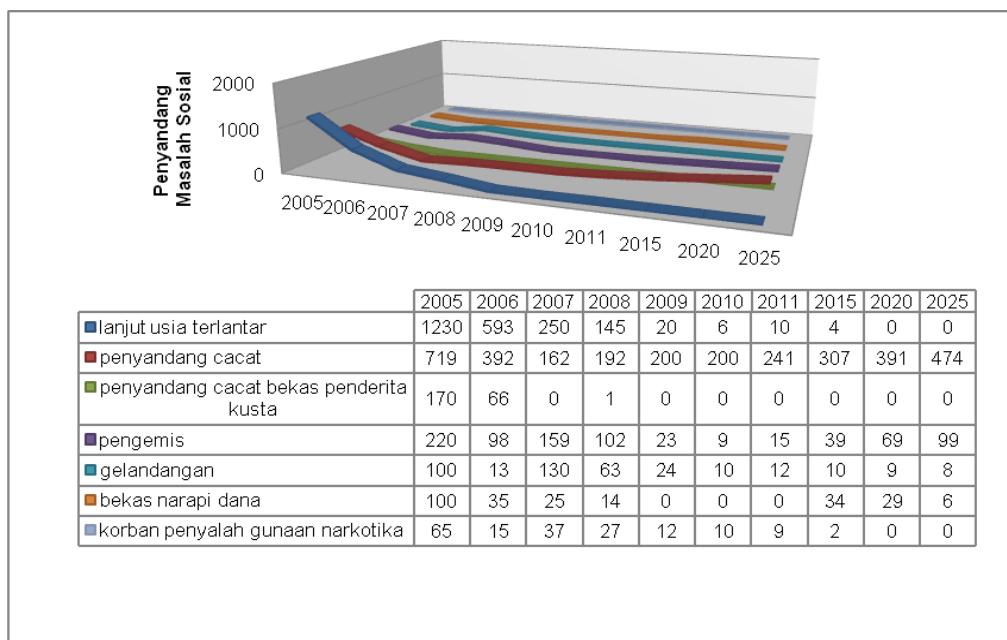


PMKS lainnya yang merupakan korban dari permasalahan ekonomi adalah wanita, karena umumnya wanita tidak bekerja dan banyak faktor lainnya. Permasalahan yang sering terjadi adalah munculnya wanita tuna susila yang menunjukkan estimasi makin meningkat sebagaimana tercantum pada **Grafik 3.33**. Pada **Grafik 3.34** menunjukkan perkiraan PMKS yang akan menonjol keberadaannya di masa depan, yaitu penyandang cacat dan pengemis.

Grafik 3.33 Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial Yang Dihadapi Wanita di Kota Depok sampai tahun 2025



Grafik 3.34 Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial di Kota Depok sampai dengan tahun 2025



3.1.2.3.4. KOPERASI DAN UMKM

Koperasi dan UMKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional.

Perkembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Depok cukup positif, namun masih dihadapkan pada banyaknya keterbatasan sehingga menyulitkan mereka dalam memainkan perannya dalam perekonomian daerah. Kelemahan dimaksud, adalah:

- Kekurangmampuan dalam menangkap peluang pasar yang ada dan dalam memperluas pangsa pasar;

- Kekurangmampuan dan keterbatasan dalam mengakses sumber dana (modal) dan kelemahan dalam struktur permodalan;
- Rendahnya kemampuan dalam bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia; dan
- Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antarpelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kelemahan-kelemahan yang bersifat struktural tersebut perlu diatasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, program pembinaan yang lebih terpadu, serta pentingnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan pemberdayaan UMKM hendaknya tidak dikemas secara charity, melainkan harus dengan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir para pelaku usaha tersebut. Menurut standar pelayanan perkotaan (SPP), kota perlu memberikan fasilitas ruang untuk sektor informal dan usaha mikro dan kecil sebagai upaya membantu mereka dalam bidang pemasaran.

Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM mendatang adalah 1) Meningkatnya produktivitas UMKM 2) Meningkatnya proporsi usaha kecil formal; 3) Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya; 4) Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 5) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi.

Kebijakan yang perlu dikembangkan adalah memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan; memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan; memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi; meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi; mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif; mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM; mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah; Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai

penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak; Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

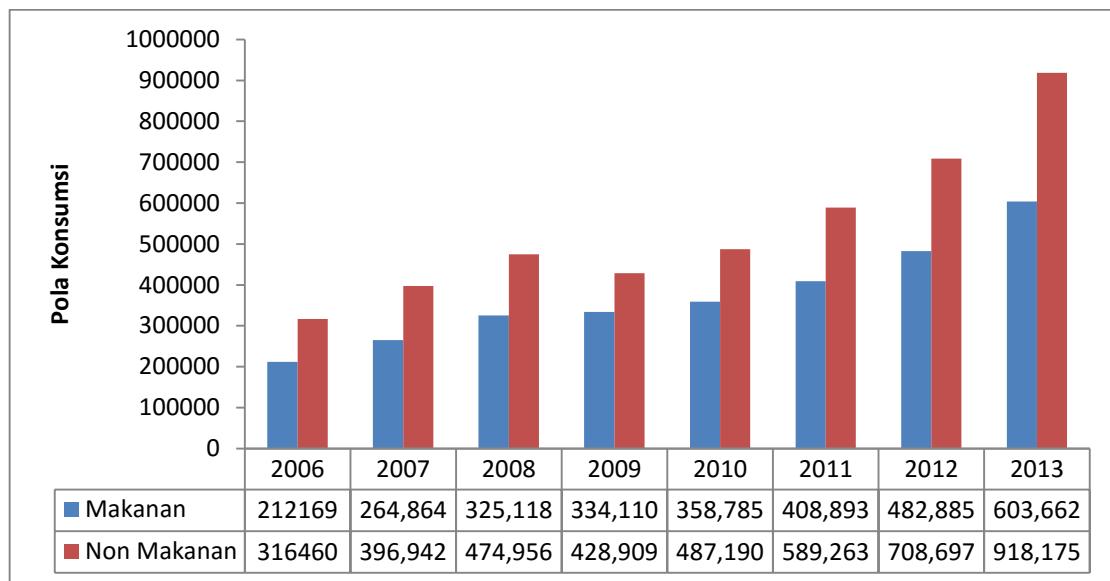
3.1.2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah ditentukan oleh tingkat kemampuan ekonomi daerah, kelebihan dalam infrastruktur, iklim investasi dan sumberdaya manusia. Kemampuan daerah dapat dilihat dari PDRB serta pola konsumsi per kapita masyarakat. Infrastruktur meliputi jalan, listrik, lembaga keuangan, dan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sedangkan iklim investasi tergantung pelayanan perizinan, kondisi sosial politik, dan regulasi yang mendukung iklim usaha. Sumber Daya Manusia (SDM) ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat dan angka rasio ketergantungan.

3.1.2.4.1. PDRB DAN POLA KONSUMSI MASYARAKAT

Ukuran dan pertumbuhan PDRB yang terus meningkat menciptakan perubahan pola konsumsi rata-rata masyarakat dari pola konsumsi lebih banyak untuk bahan makanan menjadi berbalik, belanja non makanan lebih tinggi dibanding pengeluaran untuk makanan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Depok secara umum mengalami peningkatan kesejahteraan. Proporsi non-makanan berdasarkan data tahun 2013 mencapai 60,33%, sedangkan untuk bahan makanan hanya sebesar 39,67 %. Tren pola konsumsi masyarakat Kota Depok dalam 8 tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 3.35**.

Grafik 3.35 Perkembangan Pola Konsumsi Masyarakat Kota Depok



Sumber : diolah dari Inkesra Kota Depok (BPS) tahun 2014

3.1.2.4.2. PDRB KREATIF

Laju pertumbuhan PDRB ekonomi kreatif dapat dijadikan sebagai alat ukur perkembangan ekonomi kreatif. Secara umum pada tahun 2011 laju pertumbuhan PDRB ekonomi kreatif Kota depok atas harga dasar berlaku sebesar 9,81 %, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar 6,55% sebagaimana diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8. PDRB Kreatif Kota Depok dan Laju Pertumbuhan ekonomi kreatif Tahun 2013

No.	Sektor	PDRB Kreatif		Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	
		Atas Harga Berlaku (juta rupiah)	Atas Harga Konstan 2000 (juta rupiah)	Atas Harga Berlaku	Atas Harga Konstan 2000
1	Periklanan	51.850,16	19.955,82	9,68	5,32
2	Arsitektur	20.776,16	7.461,13	11,08	3,49
3	Pasar Barang Seni	28.640,66	9.067,96	14,2	4,44
4	Kerajinan	857.512,43	293.227,20	17,16	6,62
5	Desain	76.505,58	26.963,33	14,92	8,42
6	Fesyen	870.173,63	298.711,65	14,16	8,76
7	Film, Video dan Fotografi	78.217,40	28.693,45	10,02	3,27

No.	Sektor	PDRB Kreatif		Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	
		Atas Harga Berlaku (juta rupiah)	Atas Harga Konstan 2000 (juta rupiah)	Atas Harga Berlaku	Atas Harga Konstan 2000
8	Permainan Interaktif	103.000,00	41.247,88	7,61	3,09
9	Musik	102.490,40	38.493,08	10,03	4,91
10	Seni Pertunjukan	69.310,53	22.970,64	6,69	2,13
11	Penerbitan dan Percetakan	134.462,20	48.214,11	14,64	8,82
12	Layanan Komputer dan Piranti lunak	47.939,24	18.515,27	14,47	4,66
13	TV dan Radio	1.270,88	454,55	15,87	7,96
14	Riset dan Pengembangan	57.400,66	21.408,97	9,12	3,68
15	Kuliner	228.437,41	99.983,62	18,93	8,98
Jumlah PDRB		2.727.987,34	975.368,66	14,54	7,04

Sumber : PDRB ekonomi Kreatif Kota Depok Tahun 2014 (BPS)

Kontribusi PDRB ekonomi kreatif terhadap Total PDRB Kota Depok pada Tahun 2013 sekitar 11,73%. Sektor yang paling mendominasi ekonomi kreatif di Kota Depok adalah sektor fesyen, kerajinan dan kuliner. Kontribusi ketiga sektor tersebut mencapai 71,70 % dari PDRB ekonomi kreatif atau sekitar 8,41 % dari Total PDRB . Sehingga sektor yang perlu mendapatkan perhatian untuk dikembangkan kedepan adalah ketiga sektor tersebut.

3.1.2.4.3. INFRASTRUKTUR

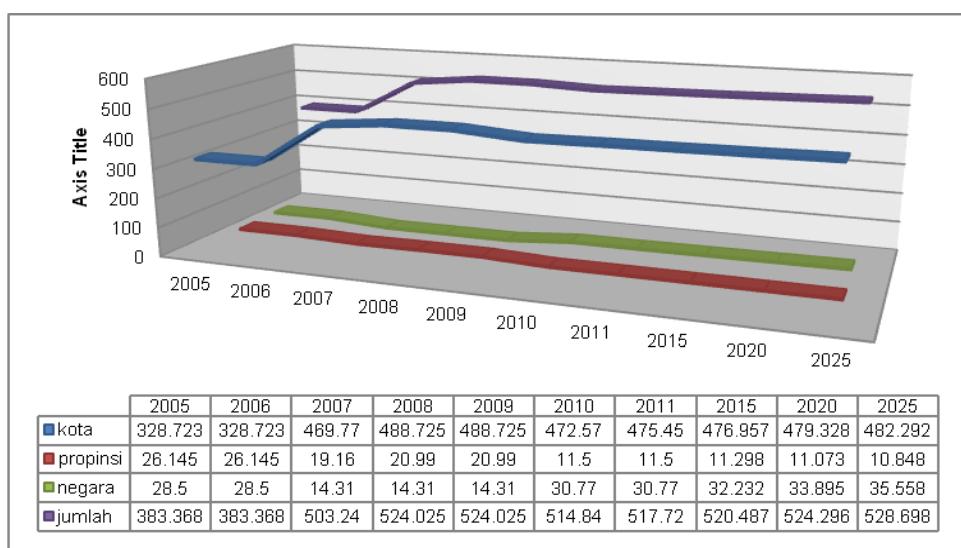
Infrastruktur dasar daerah merupakan sistem yang mendukung kegiatan masyarakat, di dalamnya meliputi jaringan telekomunikasi, transportasi, listrik, sumberdaya air dan sanitasi. Bagi masyarakat perkotaan, keberadaan infrastruktur yang modern sangat dibutuhkan sehingga merupakan tantangan tersendiri ke depan karena penyediaannya akan terbentur pada kapasitas keuangan daerah. Pengembangan infrastruktur kota harus memenuhi prinsip fungsionalitas terutama dalam mendorong peran kota sebagai penggerak ekonomi wilayah terutama sebagai elemen yang mendorong efek aglomerasi. Pertambahan penduduk kota yang semakin cepat akan berujung pada tingkat intensitas aktifitas warga kota yang semakin intensif, sehingga memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ruang dan pemenuhan kebutuhan berbagai macam infrastruktur dan fasilitas perkotaan.

3.1.2.4.3.1 PERHUBUNGAN

Sejalan dengan perkembangan pembangunan dan perekonomian, kebutuhan akan sarana dan prasarana jalan semakin meningkat, apalagi dengan banyaknya pembangunan perumahan yang menuntut adanya akses jalan. Panjang jalan diperkirakan akan terus meningkat, namun berdasarkan data yang ada, perkembangannya agak lambat. Diproyeksikan bahwa pada tahun 2010 terbangun jalan sepanjang 1.891 km jalan kota, tetapi kenyataannya hanya dapat dibangun sepanjang 472,57 km. Estimasi perkembangan panjang jalan di Kota Depok sampai dengan akhir periode RPJPD dapat dilihat pada **Grafik 3.36**. Secara kualitatif proporsi jalan dalam kondisi baik mencapai 476,15 km jalan kota, 17,75 km jalan provinsi, dan 36,25 km jalan Negara.

Panjang jalan yang terbatas selain mengurangi mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu tantangan utama Kota Depok ke depan adalah mewujudkan pembangunan jalan dalam proporsi yang lebih maksimal dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan luas wilayah. RTRW Kota Depok 2012-2032 merencanakan pembangunan berbagai jalur jalan strategis, utamanya Depok *Outer Ring Road* (DORR) yang meliputi jalur yang cukup panjang, mulai dari terminal Jatijajar melingkar ke selatan hingga barat Kota Depok terus ke Utara bersambung dengan jalur Juanda dan bertemu kembali dengan Jatijajar. Dari terminal Jatijajar juga didorong pembangunan jalan menuju tol Jagorawi sehingga keterkaitan antarwilayah di Jabodetabek meningkat yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan ekonomi regional.

Grafik 3.36 Perkembangan Sarana Jalan di Kota Depok



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

Kekurangan jalur jalan juga akan mencegah kemacetan kota yang makin akut di Kota Depok. Dari sekitar 20 titik macet yang terpantau pada tahun 2012, prioritas yang perlu ditangani adalah ruas-ruas jalan utama. Pemisahan pergerakan lokal dan regional melalui relokasi terminal bus regional ke Jatijajar merupakan solusi lainnya sehingga perlu dipercepat penyelesaiannya, di samping perlunya manajemen transportasi (manajemen rekayasa) yang lebih efektif, edukasi kepada masyarakat, penegakan peraturan, dan kekurangan fasilitas perlengkapan jalan (halte dan trotoar) dan perambuan.

Tidak hanya masalah lokal, kemacetan juga menjadi masalah bersama dan saling keterkaitan di wilayah Jabodetabek sehingga perlu adanya integrasi moda regional. Masterplan transportasi Jabodetabek diharapkan bisa segera terimplementasi sehingga masalah kemacetan bisa ditangani secara bersama-sama. Telah terbit Permen Perhubungan RI No PM 54 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang menjadi pedoman dalam rangka pembangunan jaringan angkutan umum massal di Jabodetabek dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Sasaran Rencana Umum tersebut adalah mewujudkan angkutan umum sebagai tulang punggung sistem transportasi Jabodetabek dan menerapkan kebijakan manajemen permintaan (*transport demand management/TDM*), mengurai dan mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pengguna jasa transportasi, memadukan pola jaringan transportasi, meningkatkan jaringan jalan dan jalur kereta api, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sedangkan Arah pembangunan angkutan massal meliputi pembangunan berbasis jalan dan rel yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung yang sesuai standar (koridor jalur khusus bus, pengembangan sistem tiket, fasilitas park and ride, fasilitas integrasi antarmoda, fasilitas pesepeda dan jalan kaki, peningkatan kapasitas ruas jalan dan simpang), pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan pengembangan angkutan massal yang ramah lingkungan. Dalam rencana umum tersebut, tercantum rencana pembangunan jaringan angkutan massal berbasis jalan trayek Depok-Manggarai, Depok-Dukuh Atas, dan trayek Depok-Cawang (trayek utama) sebagai program jangka panjang. Di Depok juga akan dikembangkan fasilitas integrasi dan *park and ride*, selain jaringan trayek pengumpan.

Upaya menyediakan park and ride yang mulai dirintis di Kota Depok, baik oleh Pemerintah maupun PT KAI, perlu ditambah jumlahnya guna mengurangi jumlah kendaraan yang menuju Jakarta. Selain itu fasilitas parkir juga perlu diperbanyak guna mencegah terjadinya parkir di pinggir jalan yang bisa memicu kemacetan. Dalam kaitan ini, sangat

penting ketegasan dalam menegakkan peraturan tentang izin mendirikan bangunan yang mewajibkan adanya fasilitas parkir.

Meskipun tidak berkewenangan dalam pembangunan jalan tol, Pemerintah Kota Depok perlu memberikan dorongan terhadap percepatan pembangunan jalan tol Cijago dan Desari yang diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan. Permasalahan bidang perhubungan lainnya adalah kurangnya jumlah jembatan penyeberangan (JPO), sehingga ikut menambah kemacetan. Pembangunan JPO yang sudah dimulai agar dilanjutkan sampai memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Prasarana perhubungan lainnya yang relatif kurang adalah penerangan jalan umum (PJU), sehingga perlu mendapat perhatian yang sama.

3.1.2.4.3.2 SUMBERDAYA AIR

Tantangan lain yang cukup berat dalam pemenuhan infrastruktur dasar kota adalah drainase serta penataan situ, sungai dan irigasi. Panjang drainase meningkat dalam kurun 3 tahun terakhir, namun masih dianggap belum memadai untuk memenuhi standar pelayanan kota, sehingga harus ada upaya menempatkannya sebagai salah satu prioritas karena vital perannya sebagai sarana pengendali banjir kota. Demikian halnya dengan penataan situ dan sungai beserta sempadannya. Sungai dan situ berperan vital dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat sehingga kelestariannya harus dijaga melalui kebijakan revitalisasi dan penataan. Aspek lain dari situ dan sungai adalah perlunya perlindungan dari pencemaran oleh limbah dan sampah yang merupakan ancaman serius di Kota Depok selain ancaman alih fungsi secara ilegal. Rencana pembangunan waduk Limo sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2008 di Kecamatan Cinere merupakan tantangan tersendiri untuk dapat diwujudkan di masa depan.

Pembangunan dan revitalisasi irigasi diperlukan dalam rangka menyediakan keperluan air untuk budidaya pertanian produktif (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan hortikultura). Masalah yang dihadapi adalah kurangnya irigasi dan minimnya pemeliharaan serta bercampurnya saluran irigasi dengan drainase. Pembangunan irigasi tergantung komitmen terhadap pentingnya pembangunan pertanian kota yang masih berpotensi menyejahterakan masyarakat dan melindungi keberadaan ruang terbuka hijau kota.

Tantangan lain dalam bidang sumberdaya air adalah pengendalian penurunan muka air tanah melalui pembuatan sumur resapan, pembatasan penggunaan air tanah bukan domestik, dan pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

3.1.2.4.3.3 LINGKUNGAN HIDUP

Kota berkelanjutan dibangun dengan kepedulian dan memperhatikan aset-aset lingkungan, memperhatikan penggunaan sumber daya, dan meminimalisasi dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut. Persoalan yang muncul pada kawasan cepat tumbuh adalah seringkali mendorong semakin membesarnya emisi karbon di kota yang dampaknya akan menganggu lingkungan melalui perubahan cuaca yang ekstrem. Oleh sebab itu mainstream pembangunan kota harus mengawal pertumbuhannya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan menahan sebesar mungkin kegiatan-kegiatan pelepasan karbon hasil residu kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan kota yang pesat juga membawa konsekuensi berupa meluasnya lahan-lahan yang digunakan untuk menampung pertumbuhan kota, sehingga memicu semakin terbatasnya ruang-ruang terbuka hijau, polusi udara, air dan pengelolaan lahan. Berkurangnya lahan pertanian untuk kegiatan sektor lain (khususnya perumahan), menyebabkan berkurangnya potensi RTH kota. Pertumbuhan kota yang diiringi penduduk yang besar juga berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan hidup perkotaan. Padahal semakin berkembang dan maju suatu kota, seharusnya tingkat kenyamanan hidup di kota tersebut semakin meningkat. Kondisi inilah yang harus menjadi identitas Kota Depok di masa depan, menjadi kota yang berkembang & maju diiringi tingkat livability yang tinggi.

Tantangan paling kongkrit dalam aspek lingkungan hidup di Kota Depok adalah potensi pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah baik oleh masyarakat maupun industri. Tempat yang menjadi sasaran pencemaran adalah sungai, saluran, situ dan lahan kosong di masyarakat. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas udara, juga memberi sinyal awal perlunya perhatian terhadap optimalisasi program langit biru. Cakupan penangan sampah sampai tahun 2014 mencapai 48,3%, hal ini masih belum memadai untuk menjamin kesehatan lingkungan akibat timbulan sampah yang tak terangkat atau terbuang di tempat tidak semestinya. Demikian halnya dengan pelayanan limbah cair, masih dirasakan belum memadai sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Perlu upaya lebih akseleratif dalam meningkatkan manajemen sampah dan limbah ini khususnya dalam rangka mengejar standar pelayanan minimal perkotaan.

Tantangan lainnya dalam bidang lingkungan hidup adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan mitigasi bencana melalui penyediaan sarana dan prasarana hidran umum, pos damkar, dan pusat evakuasi bencana. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengendalian

lingkungan hidup, Kota juga harus segera memiliki sarana monitoring polusi udara dan laboratorium penelitian lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Standar Pelayanan Perkotaan.

3.1.2.4.3.4 PERMUKIMAN

Permasalahan perumahan yang menonjol adalah masih adanya kawasan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni serta masih banyak warga Kota Depok yang belum memiliki rumah. Menurut standar pelayanan perkotaan, Pemerintah Kota wajib menyediakan rumah layak huni atau rumah susun terjangkau bagi warga kurang mampu sehingga mencegah munculnya kawasan pemukiman kumuh di perkotaan. Berdasarkan tabel dibawah ini menunjukan bahwa masih terdapat sekitar 34,07 persen yang belum memiliki rumah. Kondisi ini menunjukan perlunya peran pemerintah menyediakan rumah sehat yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 3.9. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal 2006-2013

Status Penguasaan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Milik sendiri (%)	67,69	64,59	57,34	64,87	66,27	66,58	74,12	65,93
Kontrak (%)	20,37	15,96	11,91	11,3	8,06	6,81	4,25	3,28
Sewa (%)	1,72	6,95	20,9	14,19	14,33	15,13	17,25	18,89
Bebas sewa milik orang lain (%)	0,14	1,19	2,01	1,17	1,19	2,47	3,13	2,21
Bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara (%)	7,67	10,86	7,41	8,18	9,55	7,7	0	7,78
Dinas (%)	2,28	0,15	0,29	0,15	0,45	1,3	1,26	1,71
Lainnya (%)	0,13	0,3	0,14	0,15	0,15	0	0	0,21

Sumber: Inkesra Kota Depok (BPS) Tahun 2014

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032 menyebutkan bahwa pemanfaatan lahan terbangun didominasi oleh kegiatan perumahan dan permukiman. Menurut sifat kegiatannya, perumahan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Perumahan yang tumbuh dan berkembang tidak tertata dalam skala ruang yang relatif kecil atau yang disebut perumahan swakola;

2. Perumahan yang tumbuh dan berkembang dibangun secara massal oleh perusahaan atau lembaga pengembang dalam skala ruang yang relatif besar dengan berbagai kelengkapan sarana sosial yang umumnya disebut perumahan formal.

Masing-masing kegiatan perumahan mempunyai pola sebaran berbeda. Untuk perkampungan yang berada di sekitar pusat kota pada umumnya menunjukkan pola sebaran menerus merapat, sedangkan di lokasi-lokasi lainnya yang relatif jauh dari pusat kota pada umumnya mempunyai pola kluster, sedangkan kompleks perumahan pada umumnya pola pengembangannya tidak menerus dan menyesuaikan terhadap luas dan bentuk lahan yang berhasil dibebaskan.

Kebutuhan sarana hunian pada tahun 2026 di Kota Depok diperkirakan mencapai 472.039 unit dan kebutuhan lahan seluas 70.805.826 ha dengan perincian sebagai berikut:

1. Kavling/Rumah Besar sebanyak 47.204 unit dengan luas lahan 14.161.165 ha;
2. Kavling/Rumah Menengah sebanyak 141.612 unit dengan luas lahan 28.322.330 ha;
3. Kavling/Rumah Kecil sebanyak 283.223 unit dengan luas lahan 28.322.330 ha.

Berikut ini disajikan proyeksi kebutuhan rumah berdasarkan proporsi rumah berimbang tahun 2011 – 2026 pada **Tabel 3.10**.

Tabel 3.10. Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kota Depok Tahun 2011-2026

TAHUN	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)				KEBUTUHAN LAHAN (m ²)			
	KAV. BESAR	KAV. MENENGAH	KAV. KECIL	TOTAL	KAV. BESAR	KAV. MENENGAH	KAV. KECIL	TOTAL
2011	10.298	30.894	61.788	102.980	3.089.391	6.178.782	6.178.782	15.446.956
2016	22.315	66.945	133.891	223.151	6.694.534	13.389.067	13.389.067	33.472.668
2021	32.351	97.054	194.109	323.514	9.705.428	19.410.857	19.410.857	48.527.142
2026	47.204	141.612	283.223	472.039	14.161.165	28.322.330	28.322.330	70.805.826

Sumber : Naskah Akademis RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

Tantangan lainnya adalah akses air bersih bagi masyarakat, yang sebagian besar masih bertumpu pada air bawah tanah. Kinerja PDAM Kota Depok masih relatif terbatas dalam melayani kebutuhan air bersih. Arah kebijakan RTRW menyangkut air minum mengarah

pada pelayanan dengan sistem perpipaan, sehingga meminimalisir penggunaan sumber-sumber air bersih non perpipaan secara sporadis (potensial mengurangi cadangan air tanah). Data perkembangan pemanfaatan air bersih dapat dilihat pada **Tabel 3.11**.

Tabel 3.11. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Depok Tahun 2006-2013

Jenis	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Air Kemasan (%)	10,39	7,46	24,17	19,51	27,31	37,32	44,5	47,5
Leding (%)	13,53	6,72	4,73	7,45	7,16	1,67	2,26	3,39
Pompa (%)	56,55	69,6	67,37	58,91	61,95	57,61	47,82	46,56
Sumur terlindung (%)	10,83	15,46	1,87	13,26	3,28	3,08	5,03	2,21
Sumur tak terlindung (%)	2,56	0,77	1,44	0,15	0	0,32	0	0,07
Mata air terlindung (%)	6,01	0	0	0	0	0	0,39	0,12
Mata air tak terlindung (%)	0,13	0	0	0	0	0	0	0
Lainnya (%)	0	0	0,43	0,37	0,3	0	0	0,15

Sumber : Diolah dari Inkesra (BPS) Tahun 2014

Permasalahan lain dalam bidang perumahan adalah persampahan dan limbah cair, baik dalam hal manajemen maupun kurangnya sarana prasarana. Target RPJMN maupun RPJMD bahwa pada tahun 2014 tersedia akses terhadap pengelolaan sampah bagi 70-80% rumah tangga di perkotaan, akan sulit dicapai karena sampai saat ini baru terlayani sekitar 48%. Kondisi sarana dan prasarana persampahan perlu ditingkatkan karena TPS yang ada belum dapat menangani seluruh sampah yang ada. Demikian halnya dengan armada/truk sampah sehingga sampah sering terlambat. Pada tingkat kawasan sudah dilakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, namun pelaksanaannya belum didukung oleh SOP sehingga hasilnya belum optimal. TPA juga sudah mendekati batas kapasitasnya sehingga perlu segera dicari alternatif lokasi yang tepat secara teknis, lingkungan dan sosial.

Pengelolaan sampah oleh masyarakat merupakan amanat UU No. 18 tahun 2008 dan merupakan salah satu cara mengurangi beban TPA, mengurangi pencemaran lingkungan, dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya perilaku masyarakat masih kurang mendukung, hal itu tampak dari kebiasaan buang sampah masyarakat yang belum sesuai harapan : 38,96% dibakar, 33,70% dikubur lubang, 17% di TPS, sisanya dibuang ke kebun, sungai, dll. Masyarakat juga hanya 9% yang sudah memilah, sedangkan 69% tidak memilah. Banyak terjadi okupasi lahan kosong

menjadi TPS liar (tercatat sejumlah 71 Titik, 2010) di masyarakat, dan sampah di TPS liar dibakar atau dibiarkan menumpuk oleh masyarakat setempat.

Limbah cair juga tak kalah rumit masalahnya karena terbatasnya sarana dan prasarana. IPLT Kalimulya adalah satu-satunya unit pengelolaan akhir air limbah di Kota Depok. Dengan kapasitas yang ada ($70 \text{ m}^3/\text{hari}$) IPLT Kalimulya hanya dapat melayani ± 600.000 jiwa atau $\pm 33\%$ penduduk Depok, sehingga kapasitasnya perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas tersebut perlu diimbangi dengan penambahan truk atau motor sedot tinja. Keberadaan motor sedot tinja merupakan solusi untuk melayani wilayah-wilayah padat yang tidak dapat dilalui truk tinja. Sasaran RPJMN maupun Permen PU yang mengamanatkan tersedianya sistem air limbah setempat (IPLT) yang memadai sebesar 60-65 % pada tahun 2014 akan sulit dicapai. Selain sarana prasarana, masalah lainnya adalah manajemen, di mana perlu ada penguatan struktur organisasi dan tupoksi pengelola air limbah yang lebih jelas, serta peningkatan SDM pengelola IPLT.

Di tingkat masyarakat, kesadaran terhadap penanganan limbah yang benar juga masih harus ditingkatkan. Meskipun 93,8% punya jamban sendiri, sisanya masih ada yang menggunakan cubluk, sungai, kebun, selokan, WC helikopter, dll. Sebanyak 88,66% warga mempunyai septic-tank namun 66% septic tank tak pernah dikosongkan, 20% mengosongkan, sisanya tidak tahu kalau harus dikosongkan. Sebanyak 11,44% warga membuang air limbah *dike* kolam, cubluk, sungai, dll. Sasaran RPJMN yang mentargetkan bebas buang air besar sembarangan di akhir tahun 2014 tampaknya sulit dicapai.

Di kota-kota metropolitan dan besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat (*sewerage system*) dengan target tersedianya akses terhadap sistem pengelolaan air limbah terpusat (*off-site*) bagi 10% total penduduk, baik melalui SPAL terpusat skala kota sebesar 5% maupun SPAL terpusat skala komunal sebesar 5%. Permen PU no 14 th 2010 menyatakan bahwa SPM air limbah perpipaan skala komunitas/kawasan/kota sebesar 5% pada tahun 2014. Target ini akan sulit dicapai jika tidak ada komitmen tinggi untuk membenahi masalah ini. Hal itu terlihat dari masih lemahnya pemahaman semua pihak terhadap pengelolaan air limbah domestik, khususnya *blackwater*, terbukti besaran anggaran, jumlah dokumen perencanaan dan aturan, serta partisipasi masyarakat masih sangat minim. Untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang cepat maka Depok harus memikirkan strategi pengelolaan dan mulai mempersiapkan infrastruktur air limbah terpusat skala kawasan/kota. RTRW 2012-2032 telah merancang indikasi program pengembangan sistem pengelolaan air limbah melalui IPLT, IPAL komunal, pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan sistem jaringan drainase, dan

pengembangan pengolahan dan lokasi pengumpulan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).

Dalam bidang persampahan, tantangan ke depan adalah mewujudkan Pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui pendekatan 4R (*Reuse, Reduce, Recycle, Replace*), Pemanfaatan TPPAS Nambo, Pembangunan TPA baru Pasir Putih dan SPA Tapos, dan Optimalisasi pengelolaan sampah menggunakan UPS.

3.1.2.4.3.5. PENATAAN RUANG

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Depok diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai kawasan andalan dengan keunggulan bidang perdagangan dan jasa. Terkait dengan letak kota, Depok berkembang menjadi "*Dormitory Town*" bagi Kota Jakarta yang merupakan Pusat Pemerintahan.

Masalah utama penataan ruang kota adalah implementasi di lapangan yang sering meleset. Oleh sebab itu upaya pengawasan dan pengendalian harus lebih diintensifkan. Tantangan bidang penataan ruang makin besar karena harus menyediakan ruang untuk sektor informal, lansia, pejalan kaki dan penyandang cacat selain ruang publik atau RTH sebagaimana diamanatkan oleh UU Tataruang. Ruang publik adalah ruang yang dapat diakses oleh penduduk kota secara bebas, dapat membentuk suasana vibrant yang hangat dan egaliter (sama bagi semua penduduk kota). Tetapi pandangan tentang ruang publik saat ini telah bergeser dengan munculnya pemikiran ruang kota sebagai faktor produksi di mana yang dilihat adalah nilai tukarnya (*exchange value*).

Arah pengembangan Kota Depok menjadi kota niaga, jasa dan pendidikan menimbulkan dampak potensial yang kompleks dipengaruhi oleh faktor internal kota Depok dan juga faktor eksternal Kota Depok. Potensi masalah perkotaan yang dihadapi Depok antara lain pertumbuhan penduduk tinggi yang disebabkan oleh migrasi penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut tersedianya perumahan dan fasilitas lainnya yang membutuhkan ruang kota yang tinggi pula. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berpotensi memunculkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dengan makin sempitnya ruang terbuka hijau.

Masalah lainnya adalah kemacetan lalu lintas, ketersediaan dan kualitas air bersih; pengelolaan sampah domestik; kualitas udara, iklim mikro (suhu dan kelembaban); serta bencana banjir. Alokasi kawasan permukiman dan kawasan terbangun yang dominan yaitu

sebesar 185,81 km² (92,8%) (*Sumber: KLHS RTRW Kota Depok Tahun 2011 dari Citra Landsat Kota Depok Liputan Tanggal 22 April 2011*), memberikan permasalahan ketidakseimbangan fungsi kelestarian (Ekonomi-Sosial-Ekologi) bagi keberlanjutan pembangunan Kota Depok.

3.1.2.4.3.6. PENANAMAN MODAL

Penanaman modal atau investasi secara langsung di sektor riil memiliki peran yang penting dalam pembangunan perekonomian daerah. Selain memberikan efek pengganda (*multiplier*) pada pertumbuhan pendapatan daerah, penanaman modal dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat di kawasan investasi tersebut ditanam. Penanaman modal yang memiliki "*multipler* keterkaitan tinggi" dapat menghasilkan peningkatan lapangan kerja dan perkembangan industri hilir dan industri pasokan. Hadirnya era desentralisasi dan otonomi daerah di tanah air merupakan peluang besar bagi para pemilik modal, pelaku ekonomi dan pemerintahan daerah untuk mengembangkan jenis-jenis penanaman modal tersebut. Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada pemerintahan daerah untuk merealisasikan visi dan misi serta rencana-rencana pembangunan wilayah dengan memobilisir kehadiran industri-industri andalan, kegiatan produksi dan perdagangan oleh perusahaan kecil dan menengah, serta usaha-usaha rumah tangga oleh berbagai kalangan masyarakat. Bagi perusahaan domestik yang telah melakukan kegiatan usahanya di satu wilayah, masuknya para penanam modal baru akan membuka berbagai peluang dalam kerjasama investasi dan produksi secara lebih luas.

Penanaman modal, khususnya dalam bidang perdagangan, jasa dan industri, telah ikut berperan dalam pembangunan Kota Depok sehingga mengalami perkembangan yang cukup pesat saat ini. Indikasinya dapat dilihat dari PDRB Kota yang terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan melebihi rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Penanaman modal berasal dari investasi masyarakat, swasta dalam rangka PMA maupun PMDN, serta belanja barang modal serta pengeluaran rutin oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, kinerja penanaman modal di Kota Depok masih dirasakan belum optimal jika dilihat dari keunggulan komparatif yang dimiliki sebagai bagian dari kawasan cepat tumbuh jabodetabek. Penanaman modal juga dinilai belum sepenuhnya berkualitas karena masih banyak disumbang oleh sisi konsumsi, selain belum dapat menyerap tenaga kerja secara memadai. Masih perlu adanya stimulan penanaman modal yang lebih atraktif melalui perbaikan ikim investasi dengan berbagai kebijakan pelayanan perizinan yang lebih cepat, murah dan transparan. Selain itu perlunya disusun regulasi

yang mengatur penanaman modal dan menjaga suasana sosial dan politik agar tetap kondusif.

Selain itu belum maksimalnya pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP (pelayanan terpadu satu pintu). Dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, diharapkan akan merangsang lebih banyak lagi investasi di Kota Depok melalui iklim investasi menarik yang bisa ditawarkan kepada dunia usaha. Laju pertumbuhan investasi skala nasional di Kota Depok cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2009 akibat adanya krisis keuangan global. Investasi yang perlu dikembangkan ke depan adalah yang memperkuat kompetensi inti daerah, yaitu sektor tersier, khususnya niaga dan jasa. Dalam bidang jasa, sektor pendidikan berikut sarana prasarana perlu dipertimbangkan menjadi fokus pengembangan investasi daerah.

3.1.2.4.7. ANGKA KRIMINALITAS

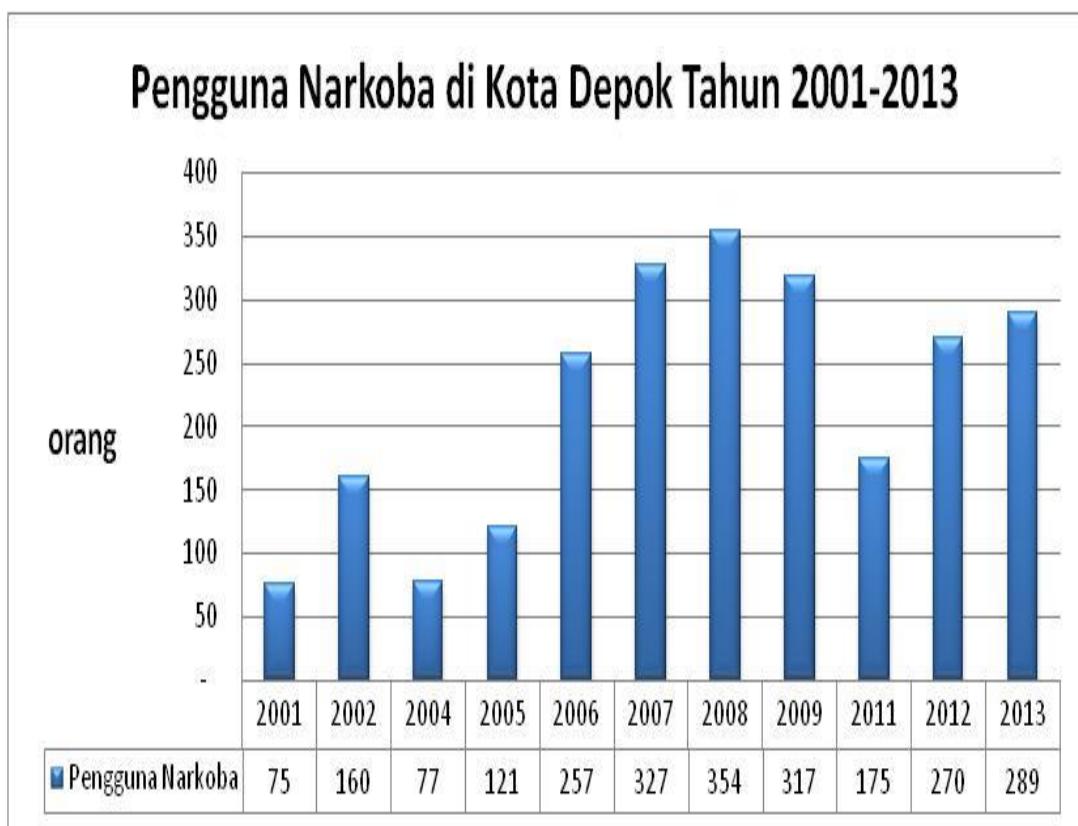
Kriminalitas yang tinggi akan menjadi kendala bagi datangnya investor. Inilah tantangan dalam aspek daya saing yang perlu terus diwaspadai mengingat pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan kriminalitas akibat keterbatasan lapangan kerja. Pada tahun 2000, terjadi satu kasus kriminalitas per tahun untuk setiap 1000 orang penduduk Kota Depok. Pada tahun 2003 angka ini meningkat menjadi 2 kasus kriminal per tahun per 1000 penduduk. Diperkirakan angka kriminalitas ini akan melonjak menjadi 3,75 kasus per tahun per 1000 penduduk pada tahun 2010, dan meningkat menjadi 4,5 kasus pada tahun 2015, lalu meningkat lagi menjadi 5 kasus per tahun hingga tahun 2025.

Perkembangan jumlah kriminalitas per tahun mengalami pasang surut dan rekor dicapai pada tahun 2007 mengalami lonjakan yang besar dan setelah itu turun dan diperkirakan pada tahun-tahun ke depan mengalami peningkatan akibat banyak faktor, salah satunya adalah perkiraan banyaknya anak jalanan, sulitnya perekonomian, tumbuhnya tempat-tempat pemukiman, lalu-lintas manusia dan semakin padatnya Kota Depok akibat perkembangan perekonomian dan pertumbuhan penduduk. Perkembangan jumlah kriminalitas per tahun di Kota Depok dapat dilihat pada **Grafik 3.37** dan **Grafik 3.38** dibawah ini.

Grafik 3.37 Perkembangan Kasus Kriminal di Kota Depok Tahun 2001-2013



Grafik 3.38 Perkembangan Kasus Pengguna Narkoba di Kota Depok Tahun 2001-2013



3.1.2.4.8. RASIO KETERGANTUNGAN

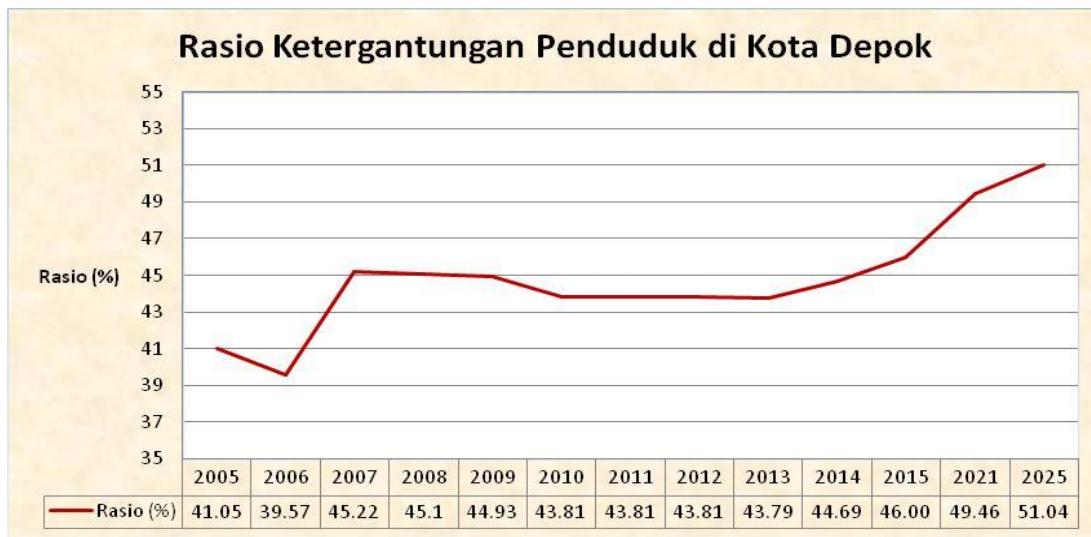
Jumlah penduduk Kota Depok di tahun 2010 mencapai 1.736.565 jiwa, terdiri atas laki-laki 879.325 jiwa (50,64%) dan perempuan 857.240 jiwa (49,36%). Dengan jumlah penduduk sebesar itu, 69,38% merupakan kelompok umur produktif (15-64 tahun), sehingga Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Depok sebesar 44,13%. Artinya, tiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 45 orang penduduk tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Semakin kecil Angka Beban Ketergantungan makin baik karena penduduk produktif lebih banyak sehingga tanggungannya menjadi lebih kecil.

Tabel 3.12. Rasio Ketergantungan dan Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2005-2025

Tahun	Kelompok Umur			Rasio	Jumlah
	0-14	15-64	64+		
2005	364,852	974,519	35,151	41.05	1,374,522
2006	365,110	1,017,769	37,601	39.57	1,420,480
2007	397,914	1,012,228	59,860	45.10	1,470,002
2008	402,301	1,036,280	65,096	45.10	1,503,677
2009	406,113	1,060,522	70,345	44.93	1,536,980
2010	479,877	1,208,919	49,769	43.81	1,738,565
2011	500,590	1,261,100	51,923	43.81	1,813,613
2012	524,038	1,320,172	54,357	43.81	1,898,567
2013	541,205	1,364,632	56,323	43.79	1,962,160
2014	564,149	1,401,075	62,027	44.93	2,027,251
2015	604,732	1,453,376	63,756	45.42	2,121,864
2016	647,013	1,505,676	65,485	47.32	2,218,175
2017	688,783	1,557,977	67,215	48.52	2,313,975
2018	721,072	1,610,278	68,944	49.06	2,400,294
2019	734,376	1,662,579	70,673	49.06	2,467,628
2020	766,649	1,714,879	72,402	48.93	2,553,930
2021	799,898	1,767,180	74,132	49.46	2,641,209
2022	836,203	1,819,481	75,861	50.13	2,731,544
2023	870,201	1,871,781	77,590	50.64	2,819,572
2024	899,096	1,924,082	79,319	50.85	2,902,497
2025	927,729	1,976,383	81,049	51.04	2,985,161

Sumber: Diolah dari Depok Dalam Angka, IPM, Inkesra (BPS) Tahun 2005-20013

Grafik 3.39 Rasio Ketergantungan di Kota Depok Tahun 2005-2025



Sumber: Diolah dari IPM dan Inkesra (BPS) 2005-2013

3.1.3 TELAAHAN RPJP NASIONAL DAN RPJPD PROVINSI JAWA BARAT

Penelaahan kebijakan nasional bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional terpenting, berhubungan, dan berpengaruh langsung dengan Kota Depok. Hasil telaahan ini sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat provinsi dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan sumber-sumber informasi terkait lainnya. Adapun, penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber-sumber informasi terkait lainnya sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 13 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kebijakan RPJPN	Kebijakan RPJP Provinsi
Visi : Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Misi: 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan	Visi : Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia Misi: 1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan

Kebijakan RPJPN	Kebijakan RPJP Provinsi
<p>beradab berdasarkan falsafah Pancasila</p> <p>2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing</p> <p>3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;</p> <p>4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu</p> <p>5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;</p> <p>6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;</p> <p>7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;</p> <p>8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaularan dunia internasional.</p>	<p>teknologi, produktif dan berdaya saing;</p> <p>2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;</p> <p>3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;</p> <p>4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik;</p> <p>5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.</p>
<p>Tahapan dan Prioritas Pembangunan RPJMN :</p> <p>1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia ;</p> <p>2. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan (Tahan I);</p> <p>3. meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif (tahap II,III,IV);</p> <p>4. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;</p> <p>5. meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;</p> <p>6. meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan;</p> <p>7. meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk(I,II,III);</p> <p>8. meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang (tahap IV);</p> <p>9. Revitalisasi kelembagaan pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki lokasi strategis, antara lain kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan andalan (tahap I);</p>	<p>Tahapan dan Prioritas Pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Barat:</p> <p>1. Penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun dengan sasaran pendidikan untuk semua/ <i>education for all</i>;</p> <p>2. Pengembangan infrastruktur wilayah melalui konsep desa pintar(Tahap II dan IV);</p> <p>3. Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin;</p> <p>4. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta sarpras kesehatan;</p> <p>5. Meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian bayi;</p> <p>6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan;</p> <p>7. Penyelenggaraan advokasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender;</p> <p>8. Peningkatan penggalian potensi PMKS;</p> <p>9. Menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat;</p> <p>10. Pendayagunaan potensi lokal dan Penumbuhkembangan industri kecil menengah sebagai pendukung industri besar;</p> <p>11. Pemberdayaan Perempuan</p>

Kebijakan RPJPN	Kebijakan RPJP Provinsi
<p>10. Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur (Tahap II);</p> <p>11. Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya (Tahap III);</p> <p>12. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa (tahap IV);</p> <p>13. Percepatan pembangunan infrastruktur (Tahap II);</p> <p>14. pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha (tahap III);</p> <p>15. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang serta pengembangan infrastruktur perdesaan (Tahap IV);</p> <p>16. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;</p> <p>17. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>18. Memantapkan budaya nasional dan karakter bangsa, termasuk wawasan dan budaya bahari;</p> <p>19. pelayanan kepada masyarakat makin membaik;</p> <p>20. profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional</p> <p>21. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat;</p>	<p>berbasis pemberdayaan ekonomi;</p> <p>12. Meningkatkan konsolidasi dan jejaring (<i>networking</i>) bidang industri dan perdagangan;</p> <p>13. Pengembangan inkubator bisnis KUKM;</p> <p>14. Pengoptimalan pendayagunaan potensi dalam negeri serta perluasan jaringan perdagangan luar negeri;</p> <p>15. Pengembangan jaringan kelembagaan KUKM dan kermitraan UMKM</p> <p>16. Pengembangan kemampuan inovasi, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri;</p> <p>17. Peningkatan kualitas serta kehandalan KUKM;</p> <p>18. Perintisan pembentukan ekonomi kawasan khusus/<i>Free Trade Zone</i>.</p> <p>19. Peningkatan kompetensi dan profesionalis pegawai;</p> <p>20. Meningkatkan Daya dukung lingkungan Jawa Barat.</p> <p>21. Pengembangan sistem transportasi masal (<i>mass rapid transport</i>) dan infrastruktur transportasi seperti: pembangunan Tol Depok Antasari, Cinere-Jagorawi(tahap II, III).</p> <p>22. Pengembangan Jabar Cyber Province(tahap III, dan IV);</p> <p>23. Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bodebek yang berada dalam sistem kawasan Jebodetabek;</p>

3.1.4 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH LAINNYA

Dokumen RPJPD Kota Depok disusun dengan memperhatikan dokumen RPJP Daerah lainnya, hal ini dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang

daerah dengan daerah-daerah lain terkait. Hasil telaahan RPJPD daerah lainnya pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Perlunya penelaahan RPJPD daerah lain karena beberapa alasan, sebagai berikut:

1. Adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
4. Adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Hasil identifikasi kebijakan dokumen RPJPD daerah lain tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 14 Identifikasi Kebijakan RPJPD Daerah lain

No.	Daerah Lain	Kebijakan Terkait
1.	DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan keterpaduan perencanaan tata ruang regional dan pembangunan sarana dan prasarana untuk membuat hubungan fungsional yang sinergis antara Jakarta dengan daerah sekitarnya (Bodetabekjur); 2. Meningkatkan kualitas manajemen pengendalian banjir (Jabodetabekjur); 3. Mewujudkan hubungan antar wilayah yang lebih sinergis dan berkelanjutan dalam rangka mendukung daya saing kota Jakarta; 4. Peningkatan kerjasama antar daerah dan Pusat;
2.	Kabupaten Bogor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sarana pengolahan sampah Regional di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor (termasuk pengolahan sampah B3); 2. Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi meliputi Jl. Raya Bogor Koridor Cibinong-Cilodong, Jl. Raya Pondok Rajeg; Jl. Tol Bojonggede-Antasari-Depok; Jl. Tol Kemang-Parung-Depok Pasar Jum'at;

No.	Daerah Lain	Kebijakan Terkait
		3. Pembangunan terminal terpadu di Cibinong, Bojonggede yang berbatasan dengan Kota Depok;

3.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/ institusi di masa yang akan datang.

Berdasarkan pencermatan terhadap berbagai permasalahan, kekuatan, peluang/potensi dan tantangan yang disampaikan sebelumnya, serta isu-isu lokal dan regional, maka Kota Depok dihadapkan pada berbagai **isu strategis** sebagai berikut :

1. Perkembangan sektor ekonomi yang mengarah pada sektor tersier belum didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia disektor tersebut ditandai dengan angka pegangguran masih tinggi pada kelompok penduduk berpendidikan menengah keatas;
2. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membangun ekonomi kota termasuk ekonomi kreatif yang mandiri berbasis potensi lokal dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
3. Laju pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan ditandai dengan semakin meningkatnya indeks gini;
4. Terbatasnya aksesibilitas dan belum terintegrasi sistem transportasi Kota Depok dengan Jabotabekkarpur;
5. Laju pertumbuhan penduduk tinggi dengan struktur penduduk muda serta rata-rata lama sekolah masih dibawah dua belas tahun dan masih terbatasnya sarana prasarana pendidikan, kepemudaan dan olahraga
6. Tingginya angka perceraian yang disebabkan menurunnya ketahanan keluarga seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan menurunnya intensitas

pertemuan, perhatian suami , istri dengan anak dan anggota keluarga yang lain serta lingkungannya sehingga keluarga menjadi kurang harmonis.

7. Penyalahgunaan narkoba yang cenderung meningkat;
8. Gap antara angka temuan penyakit menular (HIV/Aids dan Tuberculosis paru) dan penyakit tidak menular (diabetes melitus, hipertensi dan penyakit kejiwaan) dengan angka kejadian;
9. Pelayanan dasar dan prasarana sarana utilitas berbasis penataan komunal/pengelolaan bersama;
10. Daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan menurunnya kualitas lingkungan hidup;
11. Sub sektor perdagangan-hotel-restoran-hunian mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi namun tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
12. Pelayanan publik berbasis profesionalisme aparatur melalui penggunaan teknologi informasi.
13. Ketimpangan pembangunan antar wilayah yang ditandai dengan tingginya gap IPM antar kecamatan;
14. Pemeliharaan, penataan dan pengembangan Taman Hutan Raya yang ada di Kota Depok serta peralihan statusnya
15. Implementasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih terkendala kompleksitas permasalahan perkotaan seperti berkurangnya lahan pertanian dan harga tanah yang tinggi.
16. Jaminan layanan konsumen melalui tertib ukur pada pasar rakyat dan toko klontong.
17. Peningkatan kualitas usia muda agar menjadi pemuda mandiri

BAB IV

VISI DAN MISI

4.1. VISI

Analisis kondisi umum daerah saat ini dan prediksi kondisi umum ke depan mengemukakan hal-hal berikut:

1. Kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup Kota Depok saat ini sudah mengalami tekanan yang sangat berat akibat pertumbuhan penduduk dan persaingan untuk mendapatkan sumberdaya lahan, sumber daya air dan sumber daya lainnya. Diprediksi di masa depan tekanan terhadap lingkungan hidup akan semakin berat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok.
2. Kondisi demografi Kota Depok saat ini dihadapkan dengan permasalahan kepadatan penduduk, jumlah angkatan kerja, jumlah pencari kerja dan sebagainya. Prediksi kondisi demografi di masa mendatang mengindikasikan adanya peningkatan intensitas terhadap permasalahan-permasalahan demografis tersebut.
3. Kondisi ekonomi dan sumber daya alam Kota Depok saat ini sudah mengarah pada struktur ekonomi tertentu, yaitu struktur ekonomi modern yang bertumpu pada sektor tersier dan didukung sektor sekunder. Di masa depan diprediksi bahwa tumpuan utama ekonomi Kota Depok akan bertumpu ke sektor tersier. Kota Depok juga harus dapat menangkap berbagai peluang ekonomi regional termasuk dampak adanya pembangunan jalan tol di wilayah Kota Depok.
4. Terdapat kecenderungan bahwa globalisasi ekonomi tak bisa dihindari sehingga dibutuhkan upaya pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan UMKM dalam rangka mewujudkan kemandirian dan daya tahan ekonomi daerah dan dalam negeri.
5. Terdapat kecenderungan bahwa Kota Depok akan mengarah kepada terbentuknya kawasan megapolitan bersama dengan daerah-daerah di wilayah Jabodetabek, sehingga integrasi dan kerjasama berbagai kepentingan bersama tak bisa dihindari, khususnya di bidang transportasi, tataruang dan sumberdaya air.
6. Terdapat tuntutan terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai modal dasar Kota Depok yang utama, sehingga perlu didukung oleh kecukupan infrastruktur pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan sarana prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

7. Kondisi sosial budaya Kota Depok saat ini sudah mengarah pada budaya metropolis yang multi etnis dan dengan latar belakang beragam tingkat intelektualitas. Di masa depan, kondisi sosial budaya yang ada akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.
8. Kondisi sarana dan prasarana Kota Depok saat ini cukup baik dalam segi kualitas, walaupun masih kurang dalam segi rasio kuantitas per penduduk, terutama rasio rumah sakit umum per penduduk. Di masa depan diprediksi rasio jumlah sarana dan prasarana per penduduk di Kota Depok akan semakin kecil akibat tidak sebandingnya pertumbuhan jumlah penduduk dengan pertumbuhan jumlah sarana dan prasarana.
9. Kondisi pemerintahan Kota Depok saat ini semakin dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang berkualitas. Diprediksi di masa depan tuntutan terhadap kinerja pemerintahan akan semakin tinggi dengan kinerja pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan prima.

Berdasarkan kondisi diatas, tantangan dan prediksi yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar berupa Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sosial, Budaya dan Ekonomi yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Kota Depok tahun 2006-2025 adalah :

**“ DEPOK KOTA NIAGA DAN JASA, YANG RELIGIUS DAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN “**

Visi pembangunan Kota Depok tahun 2006-2025 ini merupakan komitmen politis yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional seperti tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang menetapkan Kota Depok sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan salah satu kawasan andalan/kegiatan utama berupa Jasa dan Sumber Daya Manusia. Sebagai gambaran kualitatif, Visi Kota Depok mengandung makna sebagai berikut :

A. Kota Niaga dan Jasa

Kota Niaga, mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang di dalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota niaga diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan.

Kota Jasa, lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Sebagai kota jasa dengan demikian mencakup kesiapan kota dalam melaksanakan berbagai fungsi, diantaranya :

1. Menjamin akses dan mobilitas kegiatan jasa yang kompetitif, khususnya jasa pendidikan.
2. Penyediaan jasa layanan publik secara memadai, baik mencakup standar pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat, pengaturan/regulasi yang dapat memberikan jaminan mutu pelayanan, maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan.
3. Penyediaan fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, Ruang Pamer Ruang Pertemuan, dan lain sebagainya.
4. Berorientasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Customer engagement).

B. Kota Religius

Terwujudnya masyarakat Depok yang menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang tercermin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemulian dalam akhlak, moral dan etika.

C. Kota Berwawasan Lingkungan

Terwujudnya Depok sebagai kota yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan mengindahkan kelestarian dan kelangsungannya untuk generasi yang akan datang, yang tercermin dalam pemanfaatan ruang yang serasi antara untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan kenyamanan kota, serta terpelihara dan termanfaatkannya keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Dari penjelasan di atas, Visi Kota Depok mengarahkan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Depok untuk fokus kepada bidang-bidang ekonomi yang menjadi tumpuan utama Kota Depok saat ini dan dimasa mendatang, dengan memperhatikan kenyamanan lingkungan, kenyamanan mencari penghidupan, kenyamanan dalam memperoleh pendidikan, kenyamanan melaksanakan kegiatan keagamaan, kenyamanan

menggunakan sarana dan prasarana umum, serta kenyamanan dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah daerah.

Indikasi terwujudnya pencapaian visi Kota Depok Tahun 2006-2025 ditandai dengan :

Kota Niaga dan Jasa dari sisi konsep ekonomi ditunjukkan dengan tingginya PDRB yang disumbangkan secara agregatif oleh sektor Jasa yang meliputi kegiatan sektor-sektor : Jasa kreatif (khususnya Fesyen, kuliner, kerajinan, penerbitan dan percetakan), Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa konstruksi, Jasa perorangan, jasa masyarakat, sewa rumah, jasa hiburan, perdagangan, hotel, restoran, lembaga keuangan, pemerintah, transportasi, dan penyediaan gas/listrik/air/.

Kota Niaga dan jasa menurut konsep pelayanan adalah adanya "manajemen pelayanan" yang efektif dan efisien terhadap masyarakat sebagai ciri dalam menjalankan pemerintahan kota. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan mutu pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan harapan publik. Peningkatan kinerja pemerintahan, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, yang mampu menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* yang didukung melalui pengembangan sistem *e-government* secara terpadu mulai dari *e-office*, perencanaan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting*), pengadaan barang/jasa (*e-procurement*), pengawasan (*e-controling*), pemeriksaan keuangan, ekonomi dan efisiensi (*e-management audit*) termasuk *e-payrol* dan *e-performance*.

Kota Depok pada tahun 2025 harus menjadi kota yang struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor niaga dan jasa yang berwawasan lingkungan dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, dikelola oleh sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, moral dan kearifan lokal; berdisiplin tinggi, mampu beradaptasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat, pantang menyerah, memiliki rasa solidaritas yang kuat, selalu mengedepankan komunikasi dua arah dengan masyarakat, sehingga terbentuk arus informasi yang "bermutu dan konstruktif". Kota Depok akan menjadi kota jasa berdaya saing regional. Pada tahun 2025 Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok mencapai 81,85

4.2. MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah diatas, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mengelola perekonomian daerah secara fokus, efisien dan efektif, dengan mengutamakan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah dan pertumbuhan tertinggi.
2. Memanfaatkan dan mengelola secara optimal seluruh potensi letak geografis sesuai dengan daya dukung lingkungan.
3. Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.
4. Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang.
5. Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.

4.3. TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Tujuan pembangunan jangka panjang Daerah Kota Depok tahun 2006-2025 adalah mewujudkan Kota Depok sebagai kota niaga dan jasa yang religius dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat adil dan makmur.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Sasaran Pokok dari tiap Misi Kota Depok 2006-2025 adalah sebagai berikut :

5.1.1. SASARAN POKOK MISI PERTAMA

Misi 1 :Mengelola perekonomian daerah secara fokus, efisien dan efektif, dengan mengutamakan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah dan pertumbuhan tertinggi.

Sasaran Pokok :

1. Meningkatnya kapasitas perekonomian lokal yang berorientasi dan berdaya saing regional dan global.
2. Meningkatnya investasi daerah yang *pro-inclusive growth, pro-environment, pro-poor* yang didukung oleh iklim investasi yang kondusif
3. Meningkatnya daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi daerah.

5.1.2. SASARAN POKOK MISI KEDUA

Misi 2 :Memanfaatkan dan mengelola secara optimal seluruh potensi letak geografis sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Sasaran Pokok :

1. Terwujudnya Kota Depok sebagai simpul transportasi Jabodetabek dengan skala pelayanan regional atau beberapa provinsi.
2. Meningkatnya peluang ekonomi skala regional.
3. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi.

5.1.3. SASARAN POKOK MISI KETIGA

Misi 3 :Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.

Sasaran Pokok :

1. Meningkatnya pendidikan masyarakat yang dicerminkan dengan berkembangnya intelektual dan akhlak mulia, serta mampu bersaing secara regional, nasional dan global.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang dapat mendukung terwujudnya produktivitas dan kemampuan daya saing.
3. Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan sosial masyarakat;
4. Meningkatnya peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, dan menjadi kekuatan pendorong kemajuan dalam pembangunan spiritual.
5. Meningkatnya kondusivitas Idiologi politik sosial budaya dan ketertiban masyarakat
6. Terwujudnya budaya inovatif-kreatif dan produktif yang berorientasi iptek, diiringi dengan pembangunan seni budaya serta pembentukan *system social* yang berakar, unik dan unggul.
7. Terwujudnya masyarakat yang berkesadaran hukum tinggi

5.1.4. SASARAN POKOK MISI KEEMPAT

Misi 4 : Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang.

Sasaran Pokok :

1. Meningkatnya pembangunan bidang transportasi untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
2. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumberdaya sosial dan ekonomi sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
4. Berkembangnya sarana dan prasarana energy dan kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang kegiatan ekonomi dan pemerataan penerangan jalan umum.
5. Berkembangnya sistem informasi dan komunikasi untuk mendukung produktivitas masyarakat;
6. Tertatanya kota sesuai arahan RTRW Kota untuk mewujudkan pola ruang kota yang seimbang

5.1.5. SASARAN POKOK MISI KELIMA

Misi 5 : Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.

Sasaran Pokok :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
2. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintah dan pelayanan publik yang memadai.

Sasaran Pokok pembangunan dijabarkan dari Misi RPJPD untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit atas tujuan dari tiap-tiap misi RPJPD. Sasaran pokok selanjutnya ditandai secara kuantitatif melalui target indikator kinerja yang terukur pada tiap-tiap tahap pembangunan. Indikator kinerja yang dipilih merupakan gambaran dari isu prioritas RPJPD yang harus dicapai pada periode lima tahunan melalui penjabaran kebijakan-kebijakan RPJPD ke dalam program dan kegiatan RPJMD.

Secara lengkap sasaran pokok, indikator kinerja dan arah kebijakan pembangunan disajikan pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1. Sasaran Pokok, Indikator Kinerja dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Depok Sampai Dengan Tahun 2025

NO.	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir	Arah Kebijakan
1	Mengelola perekonomian daerah secara fokus, efisien dan efektif, dengan mengutamakan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah dan pertumbuhan tertinggi	1. Meningkatnya kapasitas perekonomian lokal yang berorientasi dan berdaya saing regional dan global	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,55 %	Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor tersier, serta menjaga pertumbuhan sektor basis/ sekunder dan sektor unggulan primer dengan mempertahankan luas lahan pangan berkelanjutan guna menjamin ketersediaan pangan
			Kontribusi/ Distribusi persentase PDRB sektor tersier	55,45 %	Meningkatkan sektor tersier sebagai kompetensi inti kota
		2. Meningkatnya investasi daerah yang <i>pro-inclusive growth, pro-environment, pro-poor</i> yang didukung oleh iklim investasi yang kondusif	Laju Investasi	Naik 10%/ tahun	Meningkatkan investasi daerah yang <i>pro-inclusive growth, pro-environment, pro-poor</i> yang didukung oleh iklim investasi yang kondusif
			Indeks Gini	0,35 %	
			Angka Pengangguran	8,16 %	
		3. Meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi daerah	Jumlah UMKM (dari jumlah penduduk)	5%	Meningkatkan jumlah UMKM Baru dan mandiri
			Jumlah UMKM Mandiri (dari jumlah UMKM)	5%	
2	Memanfaatkan dan mengelola secara optimal seluruh potensi letak geografis sesuai dengan daya dukung lingkungan	1. Terwujudnya Kota Depok sebagai simpul transportasi Jabodetabek dengan skala pelayanan regional atau beberapa provinsi.	Jumlah Terminal Terbangun 1. Terminal Terpadu Margonda Raya 2. Terminal tipe A jatijajar	7 buah terminal 100 % 100 %	Meningkatkan ketersediaan prasarana perhubungan skala regional serta meningkatkan kerjasama transportasi dalam mengintegrasikan

NO.	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir	Arah Kebijakan
			3. Terminal tipe C di Kelurahan Jatimulya 4. Terminal tipe C di Kelurahan Sawangan 5. Terminal tipe C di Kelurahan Cinere / Limo 6. Terminal tipe C di Kelurahan Cisalak Pasar 7. Terminal tipe C di Kelurahan Cipayung Jaya Jumlah Park and Ride Jumlah Koridor Transportasi Masal	100 % 100 % 100 % 100 % 3 buah 4 koridor	fungsi pelayanan transportasi
		2. Meningkatnya peluang ekonomi skala regional Jabodetabek	Jumlah Pasar Induk Jumlah Pasar Rakyat Pembangunan Sentra ekonomi kreatif	1 buah (100 %) 2 buah (100 %) 1 titik (100%)	Meningkatkan prasarana perdagangan skala regional sebagai realisasi program pembangunan metropolitan kembar bodebekarpur
		3. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi.	Tingkat Cemaran Udara Tingkat Cemaran Air	di bawah ambang batas Kualitas air kelas II	Meningkatkan pengendalian pencemaran udara dan air
3	Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan	1. Meningkatnya pendidikan masyarakat yang dicerminkan dengan	Indeks Pendidikan	84,86	Meningkatkan kuantitas/kualitas sumberdaya pendidikan dan akses pendidikan

NO.	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir	Arah Kebijakan
	nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya	berkembangnya intelektual dan akhlak mulia, serta mampu bersaing secara regional, nasional dan global.			masyarakat serta menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal Kota Depok;
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang dapat mendukung terwujudnya produktivitas dan kemampuan daya saing.	Indeks Kesehatan	83,83	Meningkatkan kuantitas/kualitas sumber daya kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
		3. Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Kelurahanlayak Anak dan Lansia	63	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, serta penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan pemuda
			Angka Kemiskinan	2,12%	
			Angka Perceraian	Kurang dari 2000 kasus	
		4. Meningkatnya peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, dan menjadi kekuatan pendorong kemajuan dalam pembangunan spiritual.	Angka HIV	Kurang dari 150 kasus	Menurunkan kejadian penyakit sosial dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama
			Angka Narkoba	Kurang dari 949 kasus	
		5. Meningkatnya kondusivitas Ideologi politik sosial budaya dan ketertiban masyarakat	Angka Gangguan Kamtibmas (Kriminalitas)	Kurang dari 5.869 kasus	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tenang, toleran dalam suasana yang kondusif, harmonis dan demokratis
			Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	70 %	
		6. Terwujudnya budaya inovatif-kreatif dan produktif yang berorientasi iptek,	Distribusi Persentase PDRB Ekonomi Kreatif	13%	Meningkatkan kegiatan produktif dan kreatif masyarakat serta menyediakan

NO.	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir	Arah Kebijakan
		diiringi dengan pembangunan seni budaya serta pembentukan <i>system social</i> yang berakar, unik dan unggul.			sarana prasarana publik untuk berkembangnya ekonomi kreatif
		7. Terwujudnya masyarakat yang berkesadaran hukum tinggi.	Tingkat Penegakan Perda	75 %	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan
4	Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang	1. Meningkatnya pembangunan bidang transportasi untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.	Kenaikan Panjang Jaringan Jalan (km)	63,67 km	Meningkatkan pembangunan jaringan jalan dan fasilitasi pedestrian
			Underpass Jl. Raya Citayam	100% (500 m)	
			Terusan Jalan Kota Kembang Menghubungkan Simpang Jalan Kartini dengan Jalan Sawangan	100% (3,7 km)	
			Fly Over Jl Siliwangi-Jl. Dewi Sartika-Jl Raya Sawangan	100% (2 km)	
			Jl. Raya Citayam;	100% (4,8 km)	
			Jl. Raya Sawangan – Mochtar Raya – Dewi Sartika;	100% (9,4 km)	
			Depok Outer Ring Road (DORR) : 1. Jl. Tembus Terminal Jatijajar-Jl Tapos Raya; 2. Jl. Tembus Ir.H.Juanda-Jl Limo Raya; 3. Jl. Tembus Jl. Raya Bogor-Jl. Raya Parung;	100% (6 km) 100 % (7 km) 100%	

NO.	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir	Arah Kebijakan
			4. Jl. Tembus Jl. Krukut Raya – Jl. Cinangka Raya-Jl. Pondok Petir Raya	100%	
		2. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air sebagai sumberdaya sosial dan ekonomi sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Jumlah Situ Tertata/Revitalisasi	20 situ	Meningkatkan penataan dan revitalisasi sumberdaya air melalui pembuatan sumur resapan, sumur imbuhan dan biopori serta pengelolaan sumber mata air
			Jumlah Titik Banjir	Kurang dari 50 titik	
		3. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman sebagai kebutuhan dasar masyarakat.	Persentase Sampah Tertangani	80%	Meningkatkan pengelolaan persampahan berbasis komunitas melalui pola 3 R (<i>reduce-reuse-recycle</i>); Kerjasama Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir; Pengelolaan sampah dengan konversi energi
			Persentase Tertanganinya Limbah	50%	Meningkatkan pengelolaan limbah cair secara komunal serta kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras sanitasi dan air bersih yang memadai
			Akses Air Bersih Perpipaan	50%	
			Panjang Drainase (Km)	846,2 km	
			Sarana Prasarana Olahraga dan Pemuda	1 lokasi	Menyediakan Gelanggang Remaja dan sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar

NO.	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir	Arah Kebijakan
		4. Berkembangnya sarana dan prasarana energy dan kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang kegiatan ekonomi dan pemerataan penerangan jalan umum 5. Berkembangnya sistem informasi dan komunikasi untuk mendukung produktivitas masyarakat 6. Tertatanya kota sesuai arahan RTRW Kota untuk mewujudkan pola ruang kota yang seimbang	Persentase Penggunaan Listrik dan Energi Ramah Lingkungan Ditingkat Rumah Tangga dan Penerangan Jalan Umum Sistem Informasi dan Komunikasi Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15% 4 Jenis layanan (website, majalah, call center dan media center) 15,5% (3,105 ha)	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan energi, penerangan jalan dan penerangan permukiman secara efisien dan ramah lingkungan Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras komunikasi dan informasi secara merata Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pengendalian pemanfaatan ruang, pembangunan perumahan vertical, serta mempertahankan daerah resapan air, cekungan, sepadan setu/sungai sebagai ruang terbuka hijau, pengelolaan Taman Hutan Raya dan optimalisasi pelaksanaan LP2B
5	Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.	Opini BPK Penyelenggaraan e-Government untuk Mendukung Pelayanan Publik	WTP 3 (Indeks PeGI)	Meningkatkan penyelenggaraan administrasi keuangan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi

NO.	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir	Arah Kebijakan
		2. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	10%/th	Meningkatkan pendapatan asli daerah
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
		4. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintah dan pelayanan publik yang memadai.	Persentase Ketersediaan Sarpras Pemerintah	90%	Meningkatkan ketersediaan sarpras pemerintah dan pelayanan publik

Sumber : hasil analisis Bappeda, 2014

Sedangkan Tahapan, indikator kinerja dan arah kebijakan pembangunan disajikan secara lengkap pada **Tabel 5.2.**

Tabel 5.2. Tahapan dan Arah kebijakan Pembangunan Kota Depok Sampai Dengan Tahun 2025

SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	Tahap III	Tahap IV	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kapasitas perekonomian lokal yang berorientasi dan berdaya saing regional dan global	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	7,27 %	7,55 %	Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor tersier, menjaga pertumbuhan sektor basis (sekunder), menjaga pertumbuhan sektor unggulan primer dengan mempertahankan lahan pangan berkelanjutanguna menjamin ketersediaan pangan
	Kontribusi/ Distribusi Persentase PDRB Sektor Tersier	55,19 %	55,45 %	Meningkatkan sektor tersier sebagai kompetensi inti kota
2. Meningkatnya investasi daerah yang yang <i>pro-inclusive growth, pro-environment, pro-poor</i> , yang didukung oleh iklim	Laju Investasi	Naik 10 %/tahun	Naik 10 %/tahun	Meningkatkan investasi daerah yang yang <i>pro-inclusive growth, pro-environment, pro-poor</i> , yang didukung oleh iklim
	Indeks Gini	0,38	0,35	

SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	Tahap III	Tahap IV	Arah Kebijakan
<i>pro poor</i> yang didukung oleh iklim investasi yang kondusif	Angka Pengangguran	8,22 %	8,16 %	investasi yang kondusif
3. Meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi daerah	Jumlah UMKM (dari jumlah penduduk)	3 %	5 %	Meningkatkan jumlah UMKM Baru dan Mandiri
	Jumlah UMKM Mandiri (dari jumlah UMKM)	3 %	5 %	
4. Terwujudnya Kota Depok sebagai simpul transportasi Jabodetabek dengan skala pelayanan regional atau beberapa provinsi.	Jumlah Terminal Terbangun	3 buah	2 buah	Meningkatkan ketersediaan prasarana perhubungan skala regional serta meningkatkan kerjasama transportasi dalam mengintegrasikan fungsi pelayanan transportasi
	1. Terminal Terpadu Margonda Raya	100%		
	2. Terminal tipe A jatijajar	10%		
	3. Terminal tipe C di Kelurahan Jatimulya	100%		
	4. Terminal tipe C di Kelurahan Sawangan	100%		
	5. Terminal tipe C di Kelurahan Cinere / Limo	100%		
	6. Terminal tipeC di Kelurahan Cisalak Pasar		100%	
	7. Terminal tipe C di Kelurahan Cipayung Jaya		100%	
	Jumlah Park and Ride	1 buah	2 buah	
	Jumlah Koridor Transportasi Massal	3 koridor	1 koridor	
5. Meningkatnya peluang ekonomi skala regional Jabodetabek.	Jumlah Pasar Induk	1 buah (100 %)	-	Meningkatkan prasarana perdagangan skala regional sebagai realisasi program pembangunan metropolitan kembar bodebekarpur
	Jumlah Pasar Rakyat	1 buah (100 %)	1 buah (100 %)	
	Pembangunan Sentra ekonomi kreatif	1 titik (100%)	-	
6. Terkendalinya pencemaran dan	Tingkat Cemaran Udara	Di bawah ambang batas	Di bawah ambang batas	Meningkatkan pengendalian

SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	Tahap III	Tahap IV	Arah Kebijakan
kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi.	Tingkat Cemaran Air	Kualitas air kelas II	Kualitas air kelas II	pencemaran udara dan air
7. Meningkatnya pendidikan masyarakat yang dicerminkan dengan berkembangnya intelektual dan akhlak mulia, serta mampu bersaing secara regional, nasional dan global.	Indeks Pendidikan	80,14	84,86	Meningkatkan kuantitas/kualitas sumberdaya pendidikan dan akses pendidikan masyarakat serta menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal Kota Depok;
8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang dapat mendukung terwujudnya produktivitas dan kemampuan daya saing.	Indeks Kesehatan	83,56	83,83	Meningkatkan kuantitas/kualitas sumber daya kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
9. Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Kelurahan Layak Anak Dan Lansia	63		Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, serta penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan pemuda
	Angka Kemiskinan	2,22 %	2,12 %	
	Angka Perceraian	Kurang dari 2700 kasus	Kurang dari 2000 kasus	
10. Meningkatnya peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, dan menjadi kekuatan pendorong kemajuan dalam pembangunan spiritual.	Angka HIV	Kurang dari 200 kasus	Kurang dari 150 kasus	Menurunkan kejadian penyakit sosial melalui pendekatan keagamaan dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama
	Angka Narkoba	Kurang dari 1.074 kasus	Kurang dari 949 kasus	
11. Meningkatnya kondusivitas Idiologi politik sosial budaya dan ketertiban masyarakat	Angka Gangguan Kamtibmas (Kriminalitas)	Kurang dari 7.246 kasus	Kurang dari 5.869 kasus	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tenang, toleran dalam suasana yang kondusif, harmonis dan demokratis
	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	65 %	70 %	

SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	Tahap III	Tahap IV	Arah Kebijakan
12. Terwujudnya budaya inovatif-kreatif dan produktif yang berorientasi iptek, diiringi dengan pembangunan seni budaya serta pembentukan <i>system social</i> yang berakar, unik dan unggul.	Distribusi Persentase PDRB Ekonomi Kreatif	12,4 %	13 %	Meningkatkan kegiatan produktif dan kreatif masyarakat serta menyediakan sarana prasarana public untuk berkembangnya ekonomi kreatif
13. Terwujudnya masyarakat yang berkesadaran hukum tinggi.	Tingkat Penegakan Perda	70%	75%	Meningkatkan Efektivitas pelaksanaan peraturan
14. Meningkatnya pembangunan bidang transportasi untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.	Kenaikan Panjang Jaringan Jalan (Km)	30,47 km	23,2 km	Meningkatkan pembangunan jaringan jalan dan fasilitasi pedestrian
	Underpass Jl. Raya Citayam	100% (500 m)		
	Terusan Jalan Kota Kembang Menghubungkan Simpang Jalan Kartini Dengan Jalan Sawangan	50 % (1,7 km)	50 % (2 km)	
	Fly Over Jl Siliwangi-Jl. Dewi Sartika-Jl Raya Sawangan	100% (2 km)		
	Jl. Raya Citayam		100% (4,8 km)	
	Jl. Raya Sawangan – Mochtar Raya – Dewi Sartika	50 % (4,7 km)	50 % (4,7 km)	
	Depok Outer Ring Road (DORR) :			
	1. Jl. Tembus Terminal Jatijajar-Jl Tapos Raya;	60% (4 km)	40% (2 km)	
	2. Jl. Tembus Ir.H.Juanda-Jl Limo Raya;	50 % (7 km)	50 % (7 km)	
	3. Jl. Tembus Jl. Raya Bogor-Jl. Raya Parung;	50%	50%	

SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	Tahap III	Tahap IV	Arah Kebijakan
	4. Jl. Tembus Jl. Krakut Raya – Jl. Cinangka Raya-Jl. Pondok Petir Raya	50%	50%	
15. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumberdaya sosial dan ekonomi sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Jumlah Situ Tertata/Revitalisasi	10 situ	10 situ	Meningkatkan penataan dan revitalisasi sumberdaya air melalui pembuatan sumur resapan, sumur imbuhan dan biopori serta pengelolaan sumber mata air
	Jumlah Titik Banjir	Kurang dari 54 titik	Kurang dari 50 titik	
16. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman sebagai kebutuhan dasar masyarakat.	Percentase Sampah Tertangani	65% (Penambahan Armada, TPA Nambo, Optimalisasi UPS & Bank Sampah, Teknologi Pengelolaan Sampah TPA/BGS)	80% (Penambahan Armada, Optimalisasi UPS & Bank Sampah)	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Berbasis Komunitas Melalui Pola 3 R (Reduce-Reuse-Recycle); Kerjasama Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir; Pengelolaan Sampah Dengan Konversi Energi
	Percentase Tertanganinya Limbah	30%	50%	Meningkatkan pengelolaan limbah cair secara komunal serta kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras sanitasi dan air bersih yang memadai
	Akses Air Bersih	35%	50%	
	Panjang Drainase (km)	644,37 km	846,2 km	
	Sarana Prasarana Olahraga dan Pemuda	1 lokasi	1 lokasi	Menyediakan Gelanggang Remaja dan sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar

SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	Tahap III	Tahap IV	Arah Kebijakan
17. Berkembangnya sarana dan prasarana energy dan kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang kegiatan ekonomi dan pemerataan penerangan jalan umum.	Percentasi penggunaan listrik dan energi ramah lingkungan ditingkat rumah tangga dan penerangan jalan umum	10 %	15%	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan energi, penerangan jalan dan penerangan permukiman secara efisien dan ramah lingkungan
18. Berkembangnya sistem informasi dan komunikasi untuk mendukung produktivitas masyarakat.	Sistem Informasi Dan Komunikasi	3 Jenis Layanan (website, majalah dan call center)	4 Jenis layanan (website, majalah, call center dan media center)	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras komunikasi dan informasi secara merata
19. Tertatanya kota sesuai arahan RTRW Kota untuk mewujudkan pola ruang kota yang seimbang	Percentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	13% (2.604 ha)	15,5% (3,105 ha)	Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pengendalian pemanfaatan ruang, pembangunan perumahan vertical, serta mempertahankan daerah resapan air, cekungan, sepadan setu/sungai sebagai ruang terbuka hijau, pengelolaan Taman Hutan Raya dan optimalisasi pelaksanaan LP2B
20. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.	Opini BPK	WTP	WTP	Meningkatkan penyelenggaraan administrasi keuangan
	Penyelenggaraan e-Government untuk Mendukung Pelayanan Publik	2,75 (Indeks PeGI)	3 (Indeks PeGI)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi
21. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.	Percentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	10 %/th	10 %/th	Meningkatkan pendapatan asli daerah
22. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	90	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

SASARAN POKOK	INDIKATOR KINERJA	Tahap III	Tahap IV	Arah Kebijakan
23. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintah dan pelayanan publik yang memadai.	Percentase Ketersediaan Sarpras Pemerintah	90%	90%	Meningkatkan ketersediaan sarpras pemerintah dan pelayanan publik

Sumber : hasil analisis Bappeda, 2014

5.2. ARAHAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN 2012-2032

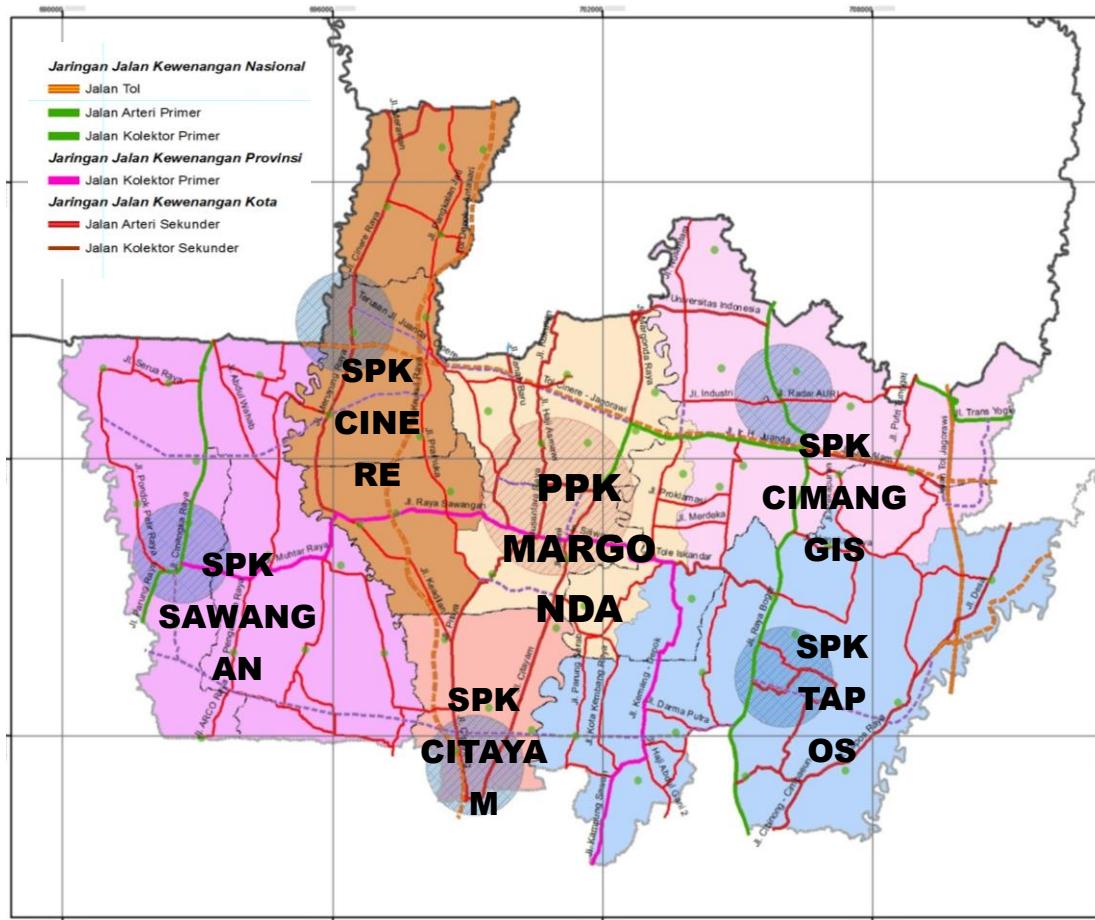
Pesatnya perkembangan Kota Depok memunculkan kompetisi dalam berebut ruang kota. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut tersedianya perumahan dan fasilitas lainnya yang membutuhkan ruang kota yang tinggi pula. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berpotensi memunculkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dengan makin sempitnya ruang terbuka hijau. Pemerintah berkewajiban menyediakan ruang kota yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan mudah melalui penyediaan ruang publik dalam bentuk taman kota. Taman yang membebaskan penduduk kota dari perbedaan sosial, gender dan ras, yang memberikan suasana manusiawi tempat ‘manusia merasa menjadi manusia’ setelah seharian sibuk bekerja. Dengan demikian dibutuhkan penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang berisi rencana operasional pembangunan wilayah kota sesuai dengan peran dan fungsi wilayah kota. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Depok meliputi : 1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota, 2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota; dan 3) kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategis tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kota.

Strukturruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang kota merupakan sistem pusat pelayanan kegiatan yang rencana pengembangannya untuk Kota Depok terdiri dari pusat pelayanan kota (PPK), subpusat pelayanan kota (SPK), pusat lingkungan (PL) serta skala pelayanannya dan fungsi dari masing-masing sub wilayah tersebut sebagaimana tercantum pada gambar dibawah ini yang meliputi:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Margonda sebagai pusat pelayanan primer yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
2. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) Cinere, Cimanggis, Tapos, Sawangan dan Citayam sebagai pusat pelayanan sekunder yang melayani subwilayah kota; dan
3. Pusat Lingkungan (PL) sebagai pusat pelayanan sekunder 2 yang melayani skala lingkungan wilayah kota.
- 4.

Gambar 5.1 Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032



Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah di Kota Depok sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini meliputi:

1. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhirkiki yang memperkuat kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa berskala regional;
2. pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terdistribusi secara hirarkis; dan

3. pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa.

Tabel 5.3. Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032

No	Nama SPK/PPK	Lokasi		Arah Pengembangan Sektor
	PPK	Beji	Beji, Beji Timur, Kemiri Muka, Pondok Cina, Kukusan dan Tanah Baru,	1. kantor pemerintahan 2. pendidikan tinggi 3. perdagangan dan jasa skala regional 4. terminal terpadu 5. perumahan kepadatan tinggi (vertikal) 6. konservasi budaya dan 7. RTH kota
			Mampang, Depok, Depok Jaya dan Pancoran Mas	
			Mekarjaya dan Tirtajaya	
	SPK CINERE	Cinere	Cinere, Gandul, Pangkalan Jati dan Pangkalan Jati Baru.	1. Pariwisata 2. pendidikan tinggi 3. perdagangan dan jasa skala subwilayah kota 4. perumahan kepadatan sedang dan 5. RTH kota
			Limo, Meruyung, Grogol dan Kerukut.	
			Rangkapan Jaya dan Rangkapan Jaya Baru	
	SPK SAWANGAN	Bojongsari	Bojongsari, Bojongsari Baru, Pondok Petir, Serua, Curug, Duren Mekar dan Duren Seribu.	1. pariwisata; 2. perdagangan dan jasa skala regional (jasa pergudangan); 3. agrobisnis (tanaman hias, buah, ikan hias); 4. pertanian; 5. perumahan kepadatan rendah dan 6. RTH kota
			Sawangan, Kedaung, Cinangka, Sawangan Baru, Pengasinan, Bedahan, dan Pasir Putih	
	SPK CITAYAM	Cipayung	Cipayung, Cipayung Jaya, Ratujaya, Bojong Pondok Terong dan Pondok Jaya	1. perdagangan dan jasa skala subwilayah kota 2. perumahan kepadatan rendah; 3. kawasan SNADA; 4. industry; dan 5. RTH kota.

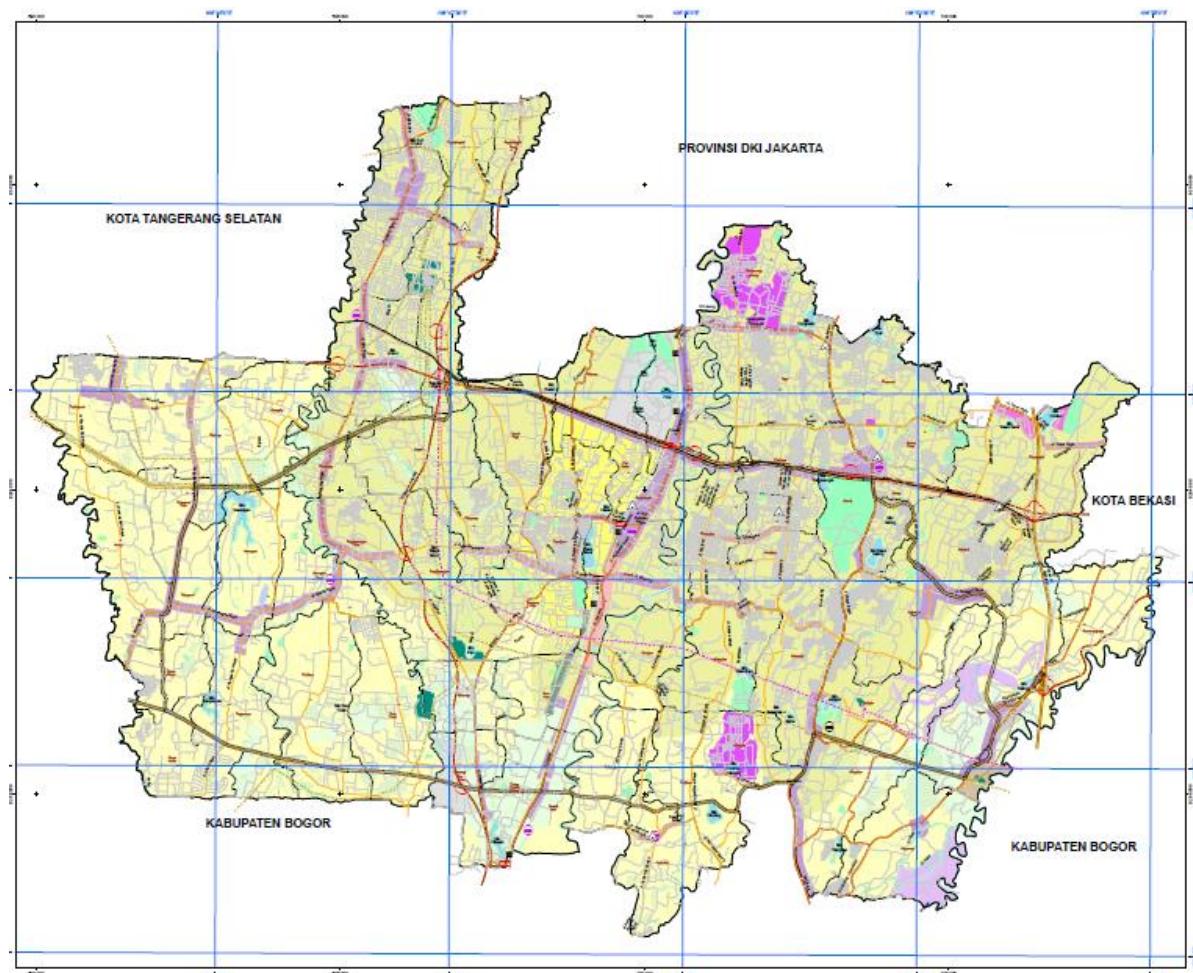
No	Nama SPK/PPK	Lokasi		Arah Pengembangan Sektor
	SPK TAPOS	Cilodong Sukmajaya Tapos	Sukamaju, Cilodong, Kalibaru, Kalimulya, dan Jatimulya	1. perdagangan dan jasa skala regional; 2. terminal tipe A; 3. industri; 4. jasa pergudangan;
			Sukmajaya	5. perumahan kepadatan sedang dan kepadaan rendah; 6. pusat sosial budaya; 7. kawasan pertahanan dan keamanan Negara
			Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap, Cimpaeun, Tapos dan Leuwinanggung	8. RTH Kota
	SPK CIMANGGIS	Cimanggis Sukmajaya Tapos	Cisalak Pasar, Mekarsari, Tugu, Pasirgunung Selatan, Harjamukti dan Curug	1. perdagangan dan jasa skala regional; 2. industri; 3. perumahan kepadatan sedang;
			Cisalak, Baktijaya dan Abadijaya	4. kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
			Sukatani	5. RTH kota.
	PL	Seluruh Kelurahan		kegiatan pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi

Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

Pola ruang adalah distribusi ruang dalam suatu wilayah yang meliputi ruang untuk fungsi lindung dan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pengembangan pola ruang di Kota Depok dilaksanakan melalui perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Kawasan resapan air di Kota Depok memiliki luas \pm 882,30 Ha yang tersebar di Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kelurahan Ratu

Jaya, Kelurahan Cimpaeun, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Tapos, dan Kelurahan Leuwinanggung.

Gambar 5.2 Rencana Pola Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032



Sumber : RTRW Kota Depok tahun 2012-2032

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini meliputi:

1. Kebijakan pengembangan kawasan lindung :
 - a. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - b. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota.

2. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya:

- a. pengembangan kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa secara seimbang;
- b. pengelolaan pertumbuhan kawasan budi daya untuk membentuk ruang kota yang kompak dan efisien dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. penyediaan fasilitas keagamaan dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang;
- d. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;

Tabel 5.4. Rencana Pola Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032

Pola Ruang		Luas (Ha)
	Kawasan Lindung	2.037,34
1	Situ/Danau	152,79
2	Sungai	18,74
3	Kawasan Resapan Air	994,45
4	Sempadan Situ/Danau	187,80
5	Sempadan Sungai	464,77
6	Sempadan Infrastruktur	211,19
7	Kawasan Lindung Lainnya	7,60
	Kawasan Budidaya	17.991,65
8	Perumahan Kepadatan Tinggi	447,55
9	Perumahan Kepadatan Sedang	6.786,95
10	Perumahan Kepadatan Rendah	5.307,38
11	Kawasan Perdagangan dan Jasa	1.121,55
12	Kawasan Perkantoran	74,03
13	Kawasan Peruntukan Industri	338,03
14	Ruang Terbuka Hijau	2.704,45
15	Kawasan Pertanian	432,66
16	Fasilitas Penunjang Pertanian	33,35
17	Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara	157,76
18	Fasilitas Pendidikan	244,26
19	Fasilitas Kesehatan	4,91
20	Fasilitas Olahraga dan Rekreasi	253,31
21	Fasilitas Transportasi	32,90
22	Infrastruktur Kota	52,56
	Total Jumlah	20.029,00

Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

Kawasan Strategis Kota merupakan aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggariskan pertumbuhan ekonomi, memiliki potensi ekspor, didukung dengan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, dan memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Kawasan strategis Kota Depok dari sudut kepentingan ekonomi , terdiri dari:

1. Kawasan Margonda meliputi sebagian Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, dan Kelurahan Depok merupakan pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan regional
2. Kawasan Bedahan yang meliputi Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Serua, Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren Seribu, dan Kelurahan Pasir Putih merupakan sentra agroindustri untuk pengembangan agrobisnis berupa buah-buahan, tanaman hias dan ikan hias.
3. Kawasan Meruyung terdapat di Kelurahan Meruyung merupakan kawasan wisata meliputi wisata religi Kubah Mas dan wisata alam Kampung 99 dilengkapi pusat penjualan produk lokal Kota Depok.
4. Kawasan SNADA terdapat di Kelurahan Cipayung Jaya dan Kelurahan Bojong Pondok Terong merupakan pengembangan kawasan perdagangan, pelestarian budaya, dan kawasan pendidikan terpadu.

Kebijakan penetapan kawasan strategis kota meliputi pengembangan kawasan strategis kotamelalui kebijakan penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Strategi pengembangan kawasan strategis adalah:

1. Menata kawasan agar tercapai penggunaan infrastruktur kawasan secara efisien
2. Menata kawasan agar menjadi identitas khas jatidiri kota; dan
3. Menata kawasan agar terjaga fungsi ekologis lingkungan kota

5.3. TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH LIMA TAHUNAN

5.3.1. KEBIJAKAN UMUM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN LIMA TAHUN PERTAMA (2006 – 2011)

Kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2005-2010 menurut RPJPN adalah menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang. Sedangkan kebijakan umum pembangunan Jawa Barat adalah akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi Jawa Barat : Dengan Iman dan Takwa Jawa Barat Sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010.

Berdasarkan kedua kebijakan umum di atas, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lokalitas Kota Depok, **kebijakan umum pembangunan di Kota Depok** adalah melanjutkan penataan kota dan pengembangan potensi daerah melalui tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta berorientasi melayani dan menyejahterakan masyarakat dengan **target IPM 78,50-79,00** (kategori menengah-tinggi). Prioritas pembangunan setiap bidang pada tahap ini adalah sebagai berikut:

Dalam Bidang Ekonomi

Kondisi yang diharapkan adalah makin meningkatnya indeks daya beli masyarakat yang didukung oleh makin tumbuhnya perekonomian daerah, tertatanya potensi unggulan daerah, khususnya perdagangan dan jasa, industri manufaktur dan sektor primer unggulan (pertanian perkotaan), serta mulai digalinya potensi pariwisata daerah. Dalam bidang perdagangan dan jasa pembangunan difokuskan pada penataan sistem pemasaran dan sarana distribusi barang, termasuk menata dan mengembangkan fasilitas perdagangan dan jasa (pasar, Rumah Potong Hewan, jasa pendidikan). Sedangkan pembangunan industri diarahkan pada revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi yang ditandai dengan penguatan struktur industri, peningkatan kesempatan kerja di sektor industri, pen dayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil menengah sebagai pendukung industri besar. Pembangunan pertanian diarahkan pada pengembangan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan tidak membutuhkan lahan luas, seperti belimbing, tanaman hias, ikan hias, ternak kecil, dan pemotongan hewan/unggas.

Adapun sektor pariwisata lebih diarahkan pada penyiapan sarana dan prasarana iklim investasi, inventarisasi potensi dan promosi investasi. Tumbuhnya ekonomi daerah dibarengi dengan berkembangnya kapasitas dan kelembagaan usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM), semangat kewirausahaan para pelaku usaha yang meningkat, serta berkembangnya jasa keuangan dan pelayanan transportasi.

Dalam Bidang Sosial Dan Budaya

Kondisi yang diharapkan terutama adalah meningkatnya pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, dan Angka Harapan Hidup melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang bermutu, percepatan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, penyiapan tenaga kesehatan strategis, pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin, pengembangan puskesmas dan Rumah Sakit yang mampu menolong gawat darurat pada persalinan, peningkatan surveilans penyakit, promosi dan penyebarluasan info kesehatan melalui media. Selain itu, dalam kurun waktu ini angka pengangguran dan kemiskinan diharapkan menurun, kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak meningkat, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana, sistem administrasi kependudukan dan fasilitasi transmigrasi.

Dalam urusan sosial, terwujud peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dalam urusan pemuda dan olahraga, mengoptimalkan peran lembaga kepemudaan, meningkatkan prestasi olahraga yang berskala regional serta melakukan pembinaan terhadap bintang-atlet berprestasi, membangun sarana prasarana olahraga masyarakat di kecamatan.

Dalam bidang kebudayaan, kondisi yang diinginkan adalah meningkatnya pelestarian serta pengembangan kekayaan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkokoh kedaulatan NKRI. Dalam urusan kesbangpol dalam negeri, diharapkan terdapat penguatan semangat kebangsaan, pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi, penguatan peran dan fungsi partai politik dan legislatif, peningkatan peran masyarakat dalam demokrasi, penguatan lembaga legislatif serta pengembangan kemitraan eksekutif dan legislatif, masyarakat yang beragama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhhlak mulia, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, gotong royong, patriotik, dinamis, berorientasi iptek, terwujud kerukunan inter dan antar umat beragama dan peningkatan pemahaman dan pengamalan agama.

Dalam Bidang Infrastruktur

Kondisi yang diharapkan adalah membaiknya infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan peningkatan jaringan jalan, persiapan pengembangan jalan tol dan terminal, telekomunikasi, air bersih, sanitasi dan rumah susun. Dalam urusan penataan ruang, diharapkan RTRW sebagai payung kebijakan spasial semua sektor, penataan ruang yang mampu mengarahkan pergerakan orang dan barang dan mengantisipasi pertumbuhan wilayah perkotaan. Dalam urusan lingkungan hidup sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup; membaiknya mutu lingkungan hidup; meningkatnya mitigasi bencana; pendidikan lingkungan di sekolah; penyediaan pedoman, tolok ukur, baku mutu, sistem pemantauan dan evaluasi pengelolaan lingkungan, dan peraturan lingkungan yang memadai, yang disertai dengan penegakan hukum lingkungan; meningkatnya mitigasi bencana.

Dalam Bidang Pemerintahan

Kondisi yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas pelayanan kepada masyarakat, tertatanya kelembagaan dan tatalaksana birokrasi dalam rangka *good governance*, peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai, penguatan unit-unit pelayanan publik, pembentukan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah. Dalam bidang ketertiban, mewujudkan rasa tenram dan suasana tertib dengan tertanganinya berbagai kerawanan sosial, menurunnya angka kriminalitas dan tercapainya prasyarat pembangunan.

5.3.2. KEBIJAKAN UMUM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEDUA (2012 – 2016)

RPJPN menetapkan kebijakan umum pembangunan tahap kedua adalah memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan fokus pada SDM, iptek, dan penguatan daya saing ekonomi. Sedangkan kebijakan umum RPJPD Provinsi Jawa Barat adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat serta layanan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berbasis teknologi informasi (*cyber province*). Pada tahapan ini IPM Jawa Barat diproyeksikan sebesar 74.85-75,03.

Kebijakan umum pembangunan Kota Depok untuk tahap kedua ini adalah memantapkan penataan kota dan pengembangan potensi daerah berbasis pada standar pelayanan perkotaan dan standar pelayanan minimal berbasis teknologi Informasi (e-government) untuk mewujudkan *depok cyber city* mulai dari *e-office*, *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-controling*, serta terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera yang didukung oleh berkembangnya kompetensi inti daerah di bidang perdagangan, jasa dan industri yang berwawasan lingkungan serta berakar pada kearifan lokal. **Target IPM yang ingin dicapai sebesar 80,00-80,58** (kategori tinggi). Prioritas pembangunan setiap bidang pada tahap ini adalah:

Dalam Bidang Ekonomi

Kondisi yang diinginkan adalah meningkatnya indeks daya beli masyarakat yang didukung oleh makin tumbuhnya perekonomian daerah yang ditopang oleh sektor unggulan tersier dan sekunder, investasi yang menyerap tenaga kerja, meningkatnya kapasitas UMKM lokal, dan makin tumbuhnya ekonomi kreatif. Dalam bidang perdagangan, mengoptimalkan market lokal, menata distribusi barang yang efektif dan efisien serta meningkatkan ekspor, menata pasar tradisional, dan mendorong penyebaran fasilitas perdagangan ke semua wilayah sub pelayanan kota. Sedangkan perindustrian diarahkan pada peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, serta peningkatan kemitraan antar industri. Bidang pertanian diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani, perbaikan infrastruktur dan system agribisnis, peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan dan membangun budaya pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan ilmu dan teknologi yang tepat guna, khususnya pada komoditas-komoditas unggulan.

Bidang pariwisata diarahkan pada peningkatan wisata air, wisata belanja dan kunjungan ke wisata kubah emas, serta optimalisasi tatakelola pariwisata daerah. UMKM diarahkan pada optimalisasi sumber daya produktif melalui peningkatan pemberdayaan UMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha, dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna untuk mengakselerasi upaya perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. KUMKM pada tahap ini diharapkan dapat lebih berdaya saing. Penanaman Modal diarahkan untuk mempertahankan keberadaan investasi yang ada, dan menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta, serta pembentukan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal.

Dalam Bidang Sosial Budaya

Kondisi yang diinginkan adalah meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya keberdayaan perempuan dan pemuda, meningkatnya tumbuh kembang dan perlindungan anak, meningkatnya kapasitas perlindungan dan pemberdayaan sosial, berkembangnya kebudayaan dan olahraga, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta kondisi daerah yang makin kondusif, tertib, rukun dan demokratis. Dalam bidang pendidikan, kebijakan diarahkan pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) melalui akselerasi **Wajib Belajar Dua Belas Tahun**, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan secara bertahap, pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal serta menuju proporsi jumlah SMK dan SMA menjadi 60 : 40.

Bidang Kesehatan diarahkan pada meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi melalui peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak, serta peningkatan kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Bidang ketengakerjaan diarahkan untuk menurunkan tingkat pengangguran melalui jobfair, dan peningkatan sarana, prasarana serta kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Dalam tahap kedua ini, diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan; peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dalam bidang kependudukan kebijakan diarahkan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas akseptor, pengendalian angka kelahiran, penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan berbasis *e-government*, dan pengendalian migrasi melalui optimalisasi kegiatan justisi. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan; pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak, peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, dan perintisan **pembentukan Kota Layak Anak**. Dalam kurun tahap kedua ini diharapkan kondisi daerah

dan masyarakat makin demokratis, makin mantapnya semangat kebangsaan, peran dan fungsi partai politik, peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, peran masyarakat madani (*civil society*), kelembagaan demokrasi lokal, hubungan eksekutif dan legislatif, serta terjaganya kerukunan antar dan inter umat beragama.

Dalam Bidang Infrastruktur

Kondisi yang diinginkan adalah makin membaiknya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dasar perhubungan, sumberdaya air, permukiman, komunikasi dan informasi. Bidang Perhubungan diarahkan untuk melanjutkan dan menuntaskan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan (tol, terminal, jalur strategis), memantapkan infrastruktur yang telah ada, mengembangkan sistem transportasi massal (*Mass Rapid Transport*), *park and ride*, penyediaan sarpras untuk memperlancar arus lalu-lintas ke stasiun kereta api dalam rangka mengoptimalkan layanan kereta api, serta menjadikan kereta api sebagai modal transportasi utama/*fully utility*, melanjutkan dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wilayah. Bidang sumberdaya air diarahkan untuk pengendalian bencana banjir, serta meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air. Bidang penataan ruang difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan tataruang dan konsistensi dalam pemanfaatannya serta terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan, ditetapkannya Perda tentang RTRW Kota Depok yang ditindaklanjuti dengan penyiapan petunjuk pelaksanaan RTRW dan rencana tata ruang yang lebih rinci, terwujudnya Struktur Ruang Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bodebek yang berada dalam Sistem Kawasan Perkotaan Jabodetabek, meningkatnya pembangunan infrastruktur data spasial yang operasional dan terintegrasi.

Sasaran Bidang lingkungan hidup adalah berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi SDA dan Lingkungan Hidup dengan partisipasi masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati; mantapnya kapasitas antisipatif terhadap bencana; membaiknya pengelolaan sumber daya pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta semakin tumbuhnya perilaku ramah lingkungan, membaiknya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R, meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya dan infrastruktur alam khususnya lahan-lahan kritis dan rusak, air permukaan, air tanah, tercapainya kawasan lindung sesuai RTRW, serta meningkatnya

penegakanhukum lingkungan, meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana.

Pengembangan infrastruktur komunikasi dan informasi diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi yang ditandai dengan peningkatan cakupan pelayanan jaringan telepon dan nir kabel, pengembangankonsep *Depok Cyber City*.Bidang pemukiman difokuskan pada peningkatan ketersediaan air bersih, dan kualitas sanitasi lingkungan melalui tatakelola persampahan dan limbah yang lebih prima. Bidang Perumahan diarahkan pada percepatan pemanfaatan pembangunan rumah susun sederhana.

Meningkatkan pengelolaan persampahan berbasis komunitas melalui pola 3 R (*re use-reduce- recovery*); Kerjasama Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir; Pengelolaan sampah dengan konversi energy.

Dalam Bidang Pemerintahan

Kondisi yang diinginkan adalah mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pelayanan publik lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel, kuatnya peran masyarakat sipil dan parpol, kondisi kota yang aman dan damai serta taat hukum, penataan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi melalui pengembangan kemampuan aparatur, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan, penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan profesionalitas aparatur; pembentahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan; peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya, proses kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa baik secara manual maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); serta melalui peningkatan fungsi Pusat Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTS), pelibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah, peningkatan pendayagunaan aset – asset daerah dan BUMD.

5.3.3. KEBIJAKAN UMUM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA (2016 – 2021)

Pada tahap ini, kebijakan umum RPJPN adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan fokus pada pencapaian daya saing kompetitif ekonomi berdasar keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia serta

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dengan makin padunya industri manufaktur dan pertanian, kelautan dan SDA lainnya, meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang didukung mantapnya Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), makin selarasnya pembangunan pendidikan, iptek dan industri, serta tertatanya kelembagaan ekonomi masyarakat.

Kebijakan umum RPJPD Jabar dalam periode ini adalah mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang, meningkatkan kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional dengan target status pembangunan manusia (indeks pembangunan manusia) diproyeksikan dapat terwujud pada kisaran 78,06-78,59.

Selaras dengan kedua kebijakan umum tersebut, Kota Depok pada tahap pembangunan ketiga ini menetapkan kebijakan umum pembangunannya pada menuntaskan penataan kota dan pengembangan potensi daerah berbasis pada standar pelayanan perkotaan, memantapkan standar pelayanan minimal berbasis teknologi informasi (*e-government*) dan standar ISO (*International Standardization Organization*) sehingga pada tahap ini sudah terwujud **depok cyber city**. Mendayagunakan jumlah penduduk yang besar (kategori metropolitan) menjadi modal dasar pembangunan menuju karakteristik kota metropolis yang ditandai oleh fungsi kota berjalan lebih baik (pelayanan berkualitas), perkembangan kota cukup pesat, ekonomi daerah dan kegiatan masyarakat makin dominan di sektor perdagangan, jasa dan industri yang berwawasan lingkungan dan didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakar pada kearifan lokal. Pada akhir periode **diharapkan dapat dicapai IPM sebesar 80,58-81,14**. Prioritas pembangunan setiap bidang pada tahap ini adalah:

Dalam Bidang Ekonomi

Kondisi yang diinginkan adalah meningkatnya daya beli masyarakat yang ditopang oleh makin majunya perdagangan dan industri, makin produktif UMKM yang bertambah maju dan berdaya saing, pariwisata yang mulai berkembang, dan investasi yang memperkuat kompetensi inti daerah. Pembangunan bidang industri dan perdagangan diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi termasuk dalam rangka memperkuat ekonomi kreatif, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh, perluasan kawasan perdagangan ekspor, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri. Bidang pertanian diarahkan pada pemantapan mutu untuk menjawab tuntutan konsumen terhadap aspek keamanan, kesehatan, kelestarian

dan isu-isu lingkungan lainnya. Pada tahap ini diperlukan pengelolaan kualitas rantai produksi (*Supply Chain Management*) yang efektif dan efisien, budaya mutu dan merk, serta sertifikasi dan standarisasi produk.

Pengembangan pariwisata diarahkan pada penciptaan destinasi wisata yang berkeunggulan, seperti wisata agro, air, belanja, agama, dan sejarah/*heritage*. Pengembangan UMKM di berbagai sektor perekonomian dilakukan melalui peningkatan kualitas UMKM yang berdaya tawar tinggi, produktif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, pada tahap ini diupayakan pada peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi serta memperluas kerjasama investasi dengan daerah lainnya dan kemungkinan dengan negara-negara lain.

Dalam Bidang Sosial Budaya

Kondisi yang diinginkan adalah meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, berkurangnya PMKS, jumlah orang miskin dan pengangguran; meningkatnya peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan, berkembangnya kesenian dan olahraga, serta kondisi kota yang makin aman, nyaman dan kondusif. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM, relevansi pendidikan berbasis keunggulan lokal dan didukung manajemen pelayanan pendidikan yang makin efisien dan efektif. Sasaran bidang pendidikan yaitu penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun melalui peningkatan IndeksPendidikan. Pembangunan bidang Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Pembangunan bidang sosial diarahkan pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, sebanding dengan negara berpenghasilan menengah, merata yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan lembaga jaminan sosial sehingga akan berkurang jumlah masyarakat miskin dan pengangguran. Sasaran pembangunan bidang kependudukan adalah kondisi penduduk yang tumbuh seimbang, pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pemberdayaan keluarga, pemantapan sistem administrasi kependudukan dan peningkatan upaya pengendalian migrasi dan transmigrasi. Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan; pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi

lembaga sosial masyarakat, peningkatan peran serta dan kesetaraan *gender* dalam pembangunan, dan melanjutkan **Kota Layak Anak** dan perintisan Kota Ramah Lanjut Usia. Pembangunan bidang pemuda diarahkan pada penyiapan kemandirian pemuda dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya tanpa banyak tergantung pada pihak lain. Pengembangan keolahragaan diarahkan pada peningkatan prestasi daerah, dan pencanangan budaya gerak pada semua lapisan masyarakat.

Pembangunan bidang kebudayaan diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai kearifan lokal sebagai penyeimbang dampak negatif globalisasi dan pesatnya perkembangan komunikasi dan informasi. Pada tahap ini, kondisi sosial politik daerah diharapkan makin konstruktif dan partisipatif yang ditopang oleh meningkatnya iklim demokratisasi, semangat kebangsaan dan peran masyarakat madani. Pada periode ini, sinergi diantara tiga pilar good governance mulai teraktualisasi secara kongkrit. Pembangunan bidang keagamaan memprioritaskan kepada upaya-upaya untuk memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama, mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernesara.

Dalam Bidang Infrastruktur

Kondisi yang diinginkan adalah meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dalam level yang makin memadai dan tersebar untuk menunjang produktivitas masyarakat. Dalam bidang perhubungan, diharapkan berkembangnya jaringan infrastruktur jalan dengan mulainya pembangunan **Depok Outer Ring Road (DORR)** meliputi 1) jalan tembus dari terminal Jatijajar-Tapos Raya 2) Jl. Tembus Ir.H.Juanda-Jl Limo Raya 3) Jl. Tembus Jl. Raya Bogor-Jl. Raya Parung; 4) Jl. Tembus Jl. Krukut Raya – Jl. Cinangka Raya-Jl. Pondok Petir Raya, underpass Jl Raya Citayam; Fly Over Jl. Dewi Sartika menuju Jalan Raya Sawangan, terusan Jalan Kota Kembang menghubungkan simpang Jalan Kartini dengan Jalan Sawangan; pembangunan terminal terpadu; berkembangnya sistem transportasi massal (*Mass Rapid Transport*) yang terintegrasi dengan Jakarta, percepatan pembangunan dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola dan peluang kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pembangunan bidang sumberdaya air dan permukiman, ditujukan untuk mengoptimalkan upaya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya ketersediaan jaringan irigasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarpras pendukung bagi seluruh masyarakat sehingga terwujud Kota Tanpa Pemukiman Kumuh.

Pembangunan bidang komunikasi dan informasi diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern sehingga terwujud Masyarakat Informasi Indonesia. Arah kebijakan pembangunan bidang penataan ruang ditujukan untuk memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang, berkembangnya kegiatan ekonomi dan pembangunan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang, mantapnya sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang; proporsi kawasan lindung dan RTH sesuai RTRW, serta berkembangnya penggunaan data dan informasi spasial yang mutakhir serta operasional dalam kerangka pengembangan infrastruktur data spasial.

Pembangunan bidang lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihannya untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari; mengendalikan proses penataan ruang yang mampu mewadahi jumlah penduduk, persebaran dan aktivitasnya serta pertumbuhan kota secara seimbang sesuai daya tampungnya; mengendalikan ketersediaan sumber air baku yang berkualitas, lahan subur, dan kualitas udara dari berbagai potensi pencemaran; meningkatnya peran dan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, berkembangnya pendidikan lingkungan untuk semua; sistem informasi lingkungan hidup yang yang handal, serta sarana prasarana dan infrastruktur lingkungan yang lengkap dan memadai; menjaga konsistensi upaya penegakan hukum dalam pengendalian kualitas lingkungan, konservasi dan pemulihannya kualitas lingkungan hidup, sistem mitigasi dan penanggulangan bencana yang handal.

Meningkatkan pengelolaan persampahan berbasis komunitas melalui pola 3 R (*re use-reduce-recycle*); Kerjasama Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir; Pengelolaan sampah dengan konversi energi.

Dalam Bidang Pemerintahan

Kondisi yang diinginkan adalah makin profesionalnya aparatur sehingga mampu mendukung pembangunan nasional, penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pelayan serta peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan pada meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum, serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan. Pembangunan Bidang Keuangan Daerah ditujukan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah melalui inovasi pembiayaan pembangunan baik melalui obligasi maupun kerjasama pemerintah dan swasta.

5.3.4. KEBIJAKAN UMUM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEEMPAT (2021 – 2025)

Kebijakan umum Pembangunan Nasional (RPJPN) dalam periode ini adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan fokus pada terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Struktur perekonomian makin kukuh dan kokoh dengan makin padunya industri manufaktur dan pertanian, kelautan dan SDA, dan jasa; kelembagaan ekonomi telah berfungsi dengan baik; keterkaitan pelayanan pendidikan, iptek maju sehingga mendorong ekonomi yang efisien dan produktivitas tinggi; berkembangnya usaha dan investasi perusahaan Indonesia di luar negeri; pendapatan perkapita mencapai setara dengan negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran dan penduduk miskin yang makin rendah.

Kebijakan umum Pembangunan Jawa Barat (RPJPD Jawa Barat) adalah mencapai keunggulan masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang dalam konteks pembangunan nasional; memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dan pembangunan Jawa Barat relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lain; kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional juga relatif lebih tinggi daripada daerah lain. Pada tahap ini status pembangunan manusia terkategorikan tinggi (IPM=80) diproyeksikan terwujud pada tahun 2021 atau tahun 2022, dan diakhir tahapan akan terwujud IPM sebesar 81.35-81.85.

Kebijakan Umum Pembangunan di Kota Depok dalam periode ini adalah akselerasi pencapaian Visi Depok Kota Niaga dan Jasa yang religius dan berwawasan lingkungan melalui terwujudnya kota metropolis yang berakar pada kearifan lokal, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan yang ditandai oleh 1) wilayah telah menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk melayani kebutuhan sebagian besar masyarakat, 2) menguatnya keterkaitan ekonomi antarwilayah, 3) fungsi kota berjalan lebih efisien, 4) terdapat standarisasi produk, 5) mulai terbentuknya tata ruang wilayah dengan munculnya

Subpusat Pelayanan Kota sebagai bagian dari Pusat Pelayanan Kota, 6) berkembangnya komplektivitas pemukiman dan industri, dan perkembangan kota tidak lagi mengikat pada jalur transportasi. Pada tahap ini, Depok menjadi kota niaga dan jasa yang didukung dengan penggunaan sistem informasi elektronik (e-government) dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pada tahap ini sudah terwujud pula *Depok smart city*, yang ditandai dengan terjadi integrasi layanan dan data secara elektronik (*Depok single windows*). **IPM Kota Depok direncanakan dapat mencapai 81,14-81,85 mendekati kategori sangat tinggi.** Prioritas pembangunan setiap bidang pada tahap ini adalah:

Dalam Bidang Ekonomi

Kondisi yang diinginkan adalah meningkatnya daya beli dan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan pendapatan perkapita mencapai setara dengan negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran dan penduduk miskin yang makin rendah, yang didukung oleh mantapnya peran sektor tersier (perdagangan dan jasa), industri pengolahan, ekonomi kreatif, pertanian kota, pariwisata, UMKM, dan penanaman modal yang berkualitas. Pembangunan bidang perdagangan diarahkan untuk mewujudkan makin kuatnya pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan jasa sebagai penopang utama ekonomi daerah melalui pemantapan perdagangan lokal dan perluasan jaringan regional, nasional dan luar negeri. Bidang industri diarahkan pada pemantapan industri utama, perkuatan potensi industry kecil, dan penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar. Pengembangan pertanian perkotaan diharapkan sudah menguasai jaringan bisnis yang luas, ditopang oleh infrastruktur, sumberdaya manusia dan manajemen yang makin modern.

Bidang Pariwisata diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pemantapan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata. Pengembangan UMKM diarahkan pada pengembangan jaringan kelembagaan UMKM untuk mengatasi persaingan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan UMKM. Pada tahap ini UMKM diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian dan mampu keluar dari lokalitas dan berkiprah dalam persaingan nasional dan global. Pengembangan ekonomi kreatif telah mengarah pada terciptanya brand Kota Depok. Sedangkan sektor informal lebih terorganisir dan meningkat kapasitasnya sehingga memperkuat usaha mikro yang ada. Pembangunan investasi daerah diarahkan pada pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu dan teknologi.

Dalam Bidang Sosial Budaya

Kondisi yang diinginkan adalah makin meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, tertanganinya PMKS dalam kegiatan produktif, jumlah orang miskin dan pengangguran yang mengecil; mantapnya peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan, majunya kesenian dan olahraga, serta kondisi kota yang makin aman, nyaman, kondusif, dan demokratis. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk memantapkan kualitas SDM yang bermutu dan berdaya saing, serta penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun dan rintisan Wajib belajar lima belas tahun yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana. Bidang Kesehatan diarahkan pada peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) serta terwujudnya pemberian penghargaan dan sangsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

Bidang Sosial diarahkan pada makin tinggi dan meratanya pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, dan peningkatan potensi sumber kehidupan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pembangunan bidang kependudukan ditujukan pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, pemantapan kualitas data penduduk dan program transmigrasi. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada pemantapan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan terwujudnya **Kota Layak Anak** dan melanjutkan depok kota ramah lansia. Pembangunan bidang pemuda diarahkan pada upaya mencapai kemandirian pemuda sehingga selain mampu mensejahterakan dirinya juga mampu berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun pembangunan olahraga diarahkan untuk mencapai keunggulan olahraga di tingkat provinsi dan nasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat Kota Depok.

Arah pembangunan bidang kebudayaan adalah untuk mewujudkan SDM Kota Depok yang berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berkahlik mulia, bermoral Pancasila; penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Depok; dilakukan melalui aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jatidiri masyarakat Kota Depok. Dalam bidang kesbangpol diharapkan kelembagaan politik dan hukum telah tercipta, terbangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah

otonom serta penguatan kerjasama antar institusi, terwujudnya masyarakat sipil, politik dan ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian daerah dalam konstelasi regional dan nasional. Pembangunan bidang keagamaan diprioritaskan pada makin mantapnya kerukunan hidup inter dan antar umat beragama, implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Bidang Infrastruktur

Kondisi yang diinginkan adalah adalah makin meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar pada level yang makin memadai dan tersebar untuk menunjang kegiatan sosial dan produktif masyarakat. Pembangunan bidang transportasi diarahkan pada optimalisasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dan perambuan, melanjutkan pembangunan *Depok Outer Ring Road (DORR)* meliputi 1) jalan tembus dari terminal Jatijajar-Tapos Raya 2) Jl. Tembus Ir.H.Juanda-Jl Limo Raya 3) Jl. Tembus Jl. Raya Bogor-Jl. Raya Parung; 4) Jl. Tembus Jl. Krukut Raya – Jl. Cinangka Raya-Jl. Pondok Petir Raya, Fly Over Jl. Dewi Sartika menuju Jalan Raya Sawangan, terusan Jalan Kota Kembang menghubungkan simpang Jalan Kartini dengan Jalan Sawanganyang telah dimulai pada tahap ketiga, serta mengembangkan sistem transportasi massal (*Mass Rapid Transportation*). Pembangunan Sumber Daya Air diarahkan demi terpenuhinya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, handalnya pengendalian banjir dan kekeringan, tertatanya situ-situ, dan optimalnya pengelolaan jaringan irigasi. Pembangunan bidang kominfo ditujukan untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dan informasi masyarakat melalui ketersediaan sarpras yang memadai dalam rangka mewujudkan *Depok smartcity*. Bidang Perumahan diarahkan pembangunannya pada upaya percepatan ketersediaan air bersih sistem perpipaan, pelayanan sanitasi (persampahan dan limbah), serta pengembangan rumah susun dengan harga yang terjangkau.

Arah pembangunan bidang lingkungan hidup ditujukan untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, semakin mantapnya sistem pemantauan, penilaian dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, semakin terpeliharanya kualitas lingkungan terutama semakin membaiknya status mutu sungai-sungai dan situ, fungsi kawasan lindung, kondisi air bawah tanah, kualitas udara perkotaan, bekas tempat pembuangan sampah, serta menguatnya ketahanan masyarakat di kawasan resiko bencana, serta tertatanya kawasan rawan bencana. Di samping itu wujud Kota Hijau juga mulai tampak nyata di lapangan. Pembangunan bidang Penataan ruang ditujukan untuk mengoptimalkan alokasi ruang di

kawasan perkotaan untuk tumbuh dan berkembangnya aktivitas perkotaan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup, terpeliharanya alokasi ruang kawasan lindung, tersedianya ruang terbuka hijau sesuai target, serta termanfaatkannya infrastruktur data spasial dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang.

Meningkatkan pengelolaan persampahan berbasis komunitas melalui pola 3 R (*re use-reduce-recovery*); Kerjasama Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir; Pengelolaan sampah dengan konversi energy

Dalam Bidang Pemerintahan

Kondisi yang diinginkan adalah terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan berwibawa, berdasarkan hukum serta birokrasi yang bersih, kompeten dan netral. Pada aspek pelayan publik diarahkan pada penyelenggaran pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel. Selain itu, dilakukan upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha. Pembangunan ketentraman dan ketertiban diarahkan pada terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat dan makin efektifnya pelaksanaan perda. Pembangunan bidang keuangan daerah diarahkan pada pemantapan upaya-upaya untuk memperbesar kapasitas keuangan daerah guna menjawab tuntutan pelayanan publik yang makin meningkat. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat, perwujudan harmonisasi produk hukum, pemantapan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Visi, Misi dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyusunan RPJM Daerah, Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Depok. Selain itu RPJP Daerah Kota Depok menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah yang berdekatan (Jakarta, Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor) dan dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat. RPJPD Kota Depok juga mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional, mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan fungsi-fungsi tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJP Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Depok dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Kota Depok, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Walikota, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJP Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJP Daerah Kota Depok Tahun 2006 – 2025;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penjabaran RPJPD Kota Depok ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan;

5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Depok berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 yang telah dijabarkan ke dalam RPJMD.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Depok, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJP Daerah, Pelaksanaan RPJP Daerah, Pengawasan pelaksanaan RPJP Daerah, serta evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah;
7. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok agar terwujud keselarasan dan kesinambungan antara pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana spasial.
8. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan permasalahan dan potensi daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2006 – 2025, dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025. RPJP Daerah Kota Depok 2006-2025 ini merupakan revisi dokumen RPJPD sebelumnya. Revisi RPJPD dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap substansi yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta penyelarasan dengan Peraturan Daerah Prov. Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032. Revisi juga dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika perkembangan kota yang sangat pesat, dan perubahan berbagai kebijakan Pemerintah dan Provinsi, sehingga mengubah isu-isu strategis pembangunan Kota Depok ke depan. Atas dasar itu berbagai kebijakan yang ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan penyempurnaan. Berbagai target pencapaian hasil, strategi, kebijakan dan program perlu dirumuskan kembali untuk menjamin terlaksananya dan tercapainya keberhasilan pembangunan pada masa mendatang dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Kota Depok. RPJP Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 merupakan pedoman dalam :

1. Penyusunan RTRW, RPJMD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD, Renja Organisasi Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Depok.
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antara pemerintah daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJP Daerah Kota Depok Tahun 2006 – 2025 sangat bergantung pada komitmen antara penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat Kota Depok.

WALIKOTA DEPOK

KH. MOHAMMAD IDRIS